

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua

Tahun 2024



Pemerintah
Kabupaten Sumedang



DPMPTSP
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang

TIM PENYUSUN:

Dewi Kurniasih

Selfa Septiani Aulia

Senny Luckyardi

Yongki Alexander

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Akhir ini. Laporan Akhir ini disusun berkenaan dengan telah dilakukannya pekerjaan “**Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua**” yang dilakukan oleh Tim Penyusun.

Laporan Akhir ini merupakan hasil tahapan dari kegiatan pekerjaan “Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua” Tahun Anggaran 2024. Laporan Akhir ini memuat tentang Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum Wilayah, Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua, Permasalahan Pengembangan Potensi Investasi Kecamatan Buahdua, serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Besar harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun, 2024

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1-2
1.2 Dasar Hukum.....	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.3.1 Maksud.....	1-4
1.3.2 Tujuan	1-4
1.4 Ruang Lingkup	1-5
1.4.1 Ruang Lingkup Materi.....	1-5
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah	1-6
1.5 Sistem Pelaporan Pekerjaan	1-6
1.6 Sistematika Pelaporan.....	1-8
BAB 2 KEBIJAKAN TERKAIT	
2.1 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.....	2-1
2.2 Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007	2-7
2.3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.....	2-10
2.4 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 26 Tahun 2003	2-12
2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah.....	2-16
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	2-17
2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pengganti Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.....	2-18
2.8 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Prioritas Investasi	2-19
2.9 Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025.....	2-20
2.10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038	2-22
2.11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	2-26
2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.....	2-26
2.13 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang	2-28
2.14 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	2-29

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Wilayah Makro.....	3-2
3.1.1 Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Sumedang.....	3-2
3.1.1.1 Kondisi Letak Geografis Kabupaten Sumedang	3-2
3.1.1.2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Sumedang.....	3-5
3.1.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Sumedang.....	3-6
3.1.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kabupaten Sumedang	3-7
3.1.2.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kabupaten Sumedang.....	3-7
3.1.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan Kabupaten Sumedang	3-11
3.1.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku Kabupaten Sumedang	3-13
3.1.2.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan Kabupaten Sumedang	3-14
3.1.2.5 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sumedang.....	3-14
3.1.3 Kondisi Sosial Demografi Kabupaten Sumedang.....	3-14
3.1.3.1 Kondisi Kependudukan Kabupaten Sumedang	3-16
3.1.3.2 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang	3-17
3.1.3.3 Kondisi Pemerintahan	3-20
3.1.4 Kondisi Perekonomian Wilayah Kabupaten Sumedang	3-22

3.1.4.1	Gambaran Umum Makro Ekonomi Wilayah Kabupaten Sumedang	3-22
3.1.4.2	Gambaran Umum Sektor Unggulan Kabupaten Sumedang	3-24
3.1.4.3	Gambaran Investasi Kabupaten Sumedang.....	3-29
3.2	Gambaran Umum Wilayah Mikro	3-36
3.2.1	Kondisi Fisik Wilayah Kecamatan Buahdua	3-36
3.2.1.1	Kondisi Letak Geografis Kecamatan Buahdua	3-36
3.2.1.2	Kondisi Klimatologi Kecamatan Buahdua	3-38
3.2.1.3	Kondisi Penggunaan Lahan Kecamatan Buahdua	3-38
3.2.2	Kondisi Infrastruktur Wilayah Kecamatan Buahdua	3-41
3.2.2.1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kecamatan Buahdua.....	3-41
3.2.2.2	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan Kecamatan Buahdua	3-42
3.2.2.3	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku Kecamatan Buahdua	3-43
3.2.2.4	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua	3-44
3.2.2.5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Kecamatan Buahdua	3-46
3.2.3	Kondisi Sosial Demografi Kecamatan Buahdua	3-46
3.2.3.1	Kondisi Kependudukan Kecamatan Buahdua.....	3-46
3.2.3.2	Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan Buahdua	3-48
3.2.3.3	Kondisi Pemerintahan Kecamatan Buahdua	3-48
3.2.4	Kondisi Perekonomian Wilayah.....	3-49
3.2.4.1	Gambaran Potensi Ekonomi Wilayah Kecamatan Buahdua	3-49
3.2.4.2	Gambaran Komoditas Unggulan di Kecamatan Buahdua	3-53
3.2.4.3	KGambaran Investasi di Kecamatan Buahdia	3-53

BAB 4 PETA POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

4.1	Analisis Potensi Fisik.....	4-1
4.1.1	Analisis Kemiringan Lereng	4-2
4.1.2	Analisis Potensi Penggunaan Lahan	4-23
4.1.3	Analisis Potensi Hidrologi	4-48
4.1.4	Analisis Kerawanan Bencana.....	4-50
4.2	Analisis Potensi Ketersediaan Infrastruktur	4-53
4.2.1	Ketersediaan Jaringan Jalan.....	4-53

4.2.1.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Jalan	4-53
4.2.1.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Jalan	4-61
4.2.2 Ketersediaan Jaringan Air Baku	4-63
4.2.2.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Air Baku	4-63
4.2.2.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Air Baku.....	4-65
4.2.3 Ketersediaan Jaringan Kelistrikan.....	4-66
4.2.3.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Kelistrikan.....	4-66
4.2.3.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Kelistrikan	4-66
4.2.4 Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi	4-67
4.2.4.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi.....	4-67
4.2.4.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi	4-68
4.3 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan	4-69
4.3.1 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan.....	4-69
4.3.2 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	4-74
4.3.3 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Perdagangan	4-79
4.4 Analisis Potensi Ekonomi.....	4-84
4.4.1 Analisis Potensi Usaha Pertanian Tanaman Pangan	4-85
4.4.2 Analisis Potensi Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura	4-86
4.4.3 Analisis Potensi Usaha Peternakan.....	4-88
4.4.4 Analisis Potensi Usaha Industri Pengolahan	4-89
4.4.5 Analisis Potensi Usaha Pariwisata.....	4-90
4.5 Analisis Potensi Ketersediaan SDM Tenaga Kerja.....	4-93
4.5.1 Analisis Potensi Jumlah Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif dan Tingkat Pendidikan.....	4-93
4.6 Analisis Potensi Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Dukungan Kebijakan	4-105
4.6.1 Potensi Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Dukungan Kebijakan	4-106
4.7 Analisis Pemetaan Potensi Investasi Kecamatan Buahdua	4-107

BAB 5 PERMASALAHAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

5.1 Analisis Permasalahan Pengembangan Potensi Investasi Kecamatan Buahdua.....	5-1
5.1.1 Pemetaan Permasalahan.....	5-2
5.2 Analisis Pengembangan Potensi Investasi Kecamatan Buahdua	5-16
5.2.1 Analisis Pohon Tujuan	5-16

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan	6-1
6.2 Rekomendasi.....	6-2

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	2-7
Gambar 2.2	Klasifikasi Penataan Ruang Berdasarkan Sistem, Fungsi, dan Nilai Strategi Kawasan	2-9
Gambar 2.3	Dasar Perlunya Penataan Ruang di Indonesia	2-12
Gambar 2.4	Tahapan Menyusun Dokumen Penataan Ruang Sebelum adanya UU CK dan sesudah adanya UU CK	2-12
Gambar 2.5	Terobosan dalam Integrasi Tata Ruang (1)	2-13
Gambar 2.6	Terobosan dalam Integrasi Tata Ruang (2)	2-13
Gambar 2.7	Terobosan Penyederhanaan Produk RTR	2-14
Gambar 2.8	Percepatan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	2-14
Gambar 2.9	Digitalisasi dan Transparansi untuk Memasyarakatkan Tata Ruang	2-16
Gambar 2.10	Terobosan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Perijinan Berusaha	2-16
Gambar 3.1	Peta Administrasi Kabupaten Sumedang	3-4
Gambar 3.2	Rencana Struktur Ruang Jaringan Jalan Kabupaten Sumedang 2018-2038	3-8
Gambar 3.3	Grafik Pemasangan Rambu-Rambu (%).....	3-11
Gambar 3.4	Rencana Struktur Ruang Kelistrikan Kabupaten Sumedang 2018-2038	3-12
Gambar 3.5	Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	3-13
Gambar 3.6	Realisasi Investasi di Kabupaten Sumedang	3-30
Gambar 3.7	Peta Administrasi Kecamatan Buahdua.....	3-37
Gambar 3.8	Peta Guna Lahan Kecamatan Buahdua.....	3-40
Gambar 3.9	Infrastruktur Transportasi Kecamatan Buahdua	3-41
Gambar 3.10	Infrastruktur Kelistrikan Kecamatan Buahdua.....	3-42
Gambar 3.11	Potensi Air Baku di Kecamatan Buahdua.....	3-43
Gambar 4.1	Peta Kemiringan Lereng Desa Ciawitali	4-8
Gambar 4.2	Peta Kemiringan Lereng Desa Gendereh	4-9
Gambar 4.3	Peta Kemiringan Lereng Desa Karangbungur	4-10

Gambar 4.4	Peta Kemiringan Lereng Desa Panyindangan	4-11
Gambar 4.5	Peta Kemiringan Lereng Desa Hariang	4-12
Gambar 4.6	Peta Kemiringan Lereng Desa Mekarmukti	4-13
Gambar 4.7	Peta Kemiringan Lereng Desa Citaleus	4-14
Gambar 4.8	Peta Kemiringan Lereng Desa Buahdua.....	4-15
Gambar 4.9	Peta Kemiringan Lereng Desa Nagrak.....	4-16
Gambar 4.10	Peta Kemiringan Lereng Desa Cikurubuk.....	4-17
Gambar 4.11	Peta Kemiringan Lereng Desa Cilangkap	4-18
Gambar 4.12	Peta Kemiringan Lereng Desa Bojongloa.....	4-19
Gambar 4.13	Peta Kemiringan Lereng Desa Sekarwangi	4-20
Gambar 4.14	Peta Kemiringan Lereng Desa Cibitung.....	4-21
Gambar 4.15	Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Buahdua.....	4-22
Gambar 4.16	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Buahdua	4-23
Gambar 4.17	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Cilangkap	4-24
Gambar 4.18	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Sekarwangi ..	4-25
Gambar 4.19	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Nagrak	4-26
Gambar 4.20	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Cibitung	4-27
Gambar 4.21	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Bojongloa	4-27
Gambar 4.22	Peta Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Cikurubuk	4-28
Gambar 4.23	Peta Penggunaan Lahan Desa Ciawitali	4-34
Gambar 4.24	Peta Penggunaan Lahan Desa Gendereh.....	4-35
Gambar 4.25	Peta Penggunaan Lahan Desa Cibitung	4-36
Gambar 4.26	Peta Penggunaan Lahan Desa Panyindangan	4-37
Gambar 4.27	Peta Penggunaan Lahan Desa Bojongloa.....	4-38
Gambar 4.28	Peta Penggunaan Lahan Desa Mekarmukti	4-39
Gambar 4.29	Peta Penggunaan Lahan Desa Cikurubuk	4-40
Gambar 4.30	Peta Penggunaan Lahan Desa Citaleus	4-41
Gambar 4.31	Peta Penggunaan Lahan Desa Hariang	4-42
Gambar 4.32	Peta Penggunaan Lahan Desa Karangbungur	4-43
Gambar 4.33	Peta Penggunaan Lahan Desa Cilangkap	4-44
Gambar 4.34	Peta Penggunaan Lahan Desa Sekarwangi	4-45
Gambar 4.35	Peta Penggunaan Lahan Desa Buahdua	4-46
Gambar 4.36	Peta Penggunaan Lahan Desa Nagrak	4-47

Gambar 4.37	Peta Bencana Gempa Bumi Kecamatan Buahdua	4-51
Gambar 4.38	Peta Bencana Tanah Longsor Kecamatan Buahdua	4-52
Gambar 4.39	Pembagian Wilayah Desa pada Kecamatan Buahdua	4-61
Gambar 4.40	Dukungan Infrastruktur Transportasi Kecamatan Buahdua	4-62
Gambar 4.41	Contoh Pertanian Tanaman Pangan Padi di Kecamatan Buahdua	4-86
Gambar 4.42	Contoh Pertanian Tanaman Hortikultura di Kecamatan Buahdua	4-87
Gambar 4.43	Budidaya Perikanan di Desa Citaleus.....	4-89
Gambar 4.44	Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di Desa Cilangkap	4-90
Gambar 4.45	Destinasi Wisata Situ Biru Desa Hariang.....	4-92
Gambar 4.46	Jumlah Penduduk Desa Sekarwangi Berdasarkan Usia	4-94
Gambar 4.47	Jumlah Penduduk Desa Cilangkap Berdasarkan Usia	4-95
Gambar 4.48	Jumlah Penduduk Desa Cibitung Berdasarkan Usia.....	4-95
Gambar 4.49	Jumlah Penduduk Desa Cikurubuk Berdasarkan Usia.....	4-96
Gambar 4.50	Jumlah Penduduk Desa Bojongloa Berdasarkan Usia.....	4-97
Gambar 4.51	Jumlah Penduduk Desa Nagrak Berdasarkan Usia	4-97
Gambar 4.52	Jumlah Penduduk Desa Panyindangan Berdasarkan Usia	4-98
Gambar 4.53	Jumlah Penduduk Desa Buahdua Berdasarkan Usia.....	4-99
Gambar 4.54	Jumlah Penduduk Desa Gendereh Berdasarkan Usia.....	4-100
Gambar 4.55	Jumlah Penduduk Desa Citaleus Berdasarkan Usia	4-100
Gambar 4.56	Jumlah Penduduk Desa Mekarmukti Berdasarkan Usia	4-101
Gambar 4.57	Jumlah Penduduk Desa Hariang Berdasarkan Usia	4-102
Gambar 4.58	Jumlah Penduduk Desa Karangbungur Berdasarkan Usia	4-103
Gambar 4.59	Jumlah Penduduk Desa Ciawitali Berdasarkan Usia	4-104
Gambar 4.60	Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua.....	4-112
Gambar 5.1	<i>Problem Tree Analysis</i> Potensi Fisik Kecamatan Buahdua.....	5-3
Gambar 5.2	<i>Problem Tree Analysis</i> Ketersediaan Infrastruktur Kecamatan Buahdua	5-4
Gambar 5.3	<i>Problem Tree Analysis</i> Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua	5-6
Gambar 5.4	<i>Problem Tree Analysis</i> Ketersediaan Potensi SDM Kecamatan Buahdua	5-11
Gambar 5.5	<i>Problem Tree Analysis</i> Potensi Ekonomi Kecamatan Buahdua.....	5-14

Gambar 5.6	<i>Objectives Tree</i> Potensi Fisik Kecamatan Buahdua.....	5-17
Gambar 5.7	<i>Objectives Tree</i> Infrastruktur Kecamatan Buahdua	5-19
Gambar 5.8	<i>Objectives Tree</i> Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua.....	5-20
Gambar 5.9	<i>Objectives Tree</i> Potensi SDM Kecamatan Buahdua.....	5-21
Gambar 5.10	<i>Objectives Tree</i> Potensi Ekonomi Kecamatan Buahdua	5-22
Gambar 5.11	Pemetaan Permasalahan Pengembangan Investasi Kecamatan Buahdua	5-25
Gambar 5.12	Konsep Pengembangan Potensi Investasi Berbasis Kewilayahan di Kecamatan Buahdua	5-26

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Luas Wilayah, Kecamatan, Jumlah Desa dan Jumlah kelurahan	3-1
Tabel 3.2	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kecamatan Buahdua	3-6
Tabel 3.3	Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Sumedang.....	3-9
Tabel 3.4	Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk	3-10
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumedang	3-15
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ...	3-16
Tabel 3.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2022 berdasarkan komponen	3-18
Tabel 3.8	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumedang	3-18
Tabel 3.9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat.....	3-19
Tabel 3.10	Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2019-2023	3-20
Tabel 3.11	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.....	3-21
Tabel 3.12	Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha (juta rupiah).....	3-22
Tabel 3.13	Laju Pertumbuhan PDRB Kab Sumedang menurut lapangan usaha.....	3-24
Tabel 3.14	UMKM di Kabupaten Sumedang.....	3-34
Tabel 3.15	Luas Daerah menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Buahdua....	3-35
Tabel 3.16	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kecamatan Buahdua	3-38
Tabel 3.17	Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Buahdua	3-44
Tabel 3.18	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Buahdua	3-44
Tabel 3.19	Perbandingan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang	3-45
Tabel 3.20	Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Kecamatan Buahdua	3-46

Tabel 3.21	Persentase Penduduk, Kepadatan penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Buahdua	3-47
Tabel 3.22	Jumlah Penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin	3-47
Tabel 3.23	Jumlah RW dan RT di Kecamatan Buahdua	3-48
Tabel 3.24	Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Bank Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Bank di kecamatan Buahdua Tahun 2022	3-50
Tabel 3.25	Banyaknya Koperasi Aktif Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Koperasi di Kecamatan Buahdua Tahun 2022	3-51
Tabel 3.26	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa/ Kelurahan dan Jenis Sarana Perdagangan di Kecamatan Buahdua Tahun 2022	3-52
Tabel 4.1	Skor Indikator Fisik Pertimbangan Investasi Kecamatan Buahdua	4-6
Tabel 4.2	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Ciawitali.....	4-2
Tabel 4.3	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Gendereh	4-3
Tabel 4.4	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Karangbungur.....	4-3
Tabel 4.5	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Panyindangan.....	4-3
Tabel 4.6	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Hariang	4-4
Tabel 4.7	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Mekarmukti.....	4-4
Tabel 4.8	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Citaleus.....	4-5
Tabel 4.9	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Buahdua	4-5
Tabel 4.10	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Nagrak	4-5
Tabel 4.11	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Cikurubuk	4-6
Tabel 4.12	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Cilangkap	4-6
Tabel 4.13	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Bojongloa	4-7
Tabel 4.14	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Sekarwangi	4-7
Tabel 4.15	Penilaian Kemiringan Lereng Desa Cibitung	4-7
Tabel 4.16	Tabel Penggunaan Lahan Desa Buahdua	4-24
Tabel 4.17	Tabel Penggunaan Lahan Desa Cilangkap.....	4-24
Tabel 4.18	Tabel Penggunaan Lahan Desa Sekarwangi.....	4-25
Tabel 4.19	Tabel Penggunaan Lahan Desa Nagrak.....	4-26
Tabel 4.20	Tabel Penggunaan Lahan Desa Cibitung.....	4-26
Tabel 4.21	Tabel Penggunaan Lahan Desa Bojongloa	4-28
Tabel 4.22	Tabel Penggunaan Lahan Desa Cikurubuk.....	4-28
Tabel 4.23	Tabel Penggunaan Lahan Desa Mekarmukti	4-29

Tabel 4.24	Tabel Penggunaan Lahan Desa Citaleus	4-29
Tabel 4.25	Tabel Penggunaan Lahan Desa Hariang.....	4-30
Tabel 4.26	Tabel Penggunaan Lahan Desa Panyindangan	4-30
Tabel 4.27	Tabel Penggunaan Lahan Desa Karangbungur	4-31
Tabel 4.28	Tabel Penggunaan Lahan Desa Gendereh	4-31
Tabel 4.29	Tabel Penggunaan Lahan Desa Ciawitali.....	4-33
Tabel 4.30	Total Skor Persentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Buahdua	4-33
Tabel 4.31	Tabel Skor dan Klasifikasi Potensi Hidrologi Kecamatan Buahdua	4-48
Tabel 4.32	Tabel Skor dan Klasifikasi Kerawanan Bencana Kecamatan Buahdua	4-50
Tabel 4.33	Kondisi Eksisting Jaringan Jalan Kecamatan Buahdua	4-54
Tabel 4.34	Analisis Potensi Investasi berdasarkan Jaringan Jalan.....	4-63
Tabel 4.35	Analisis Potensi Investasi Berdasarkan Prasarana Air Baku di Kecamatan Buahdua	4-64
Tabel 4.36	Skor Potensi Ketersediaan Prasarana Air Baku Kecamatan Buahdua	4-65
Tabel 4.37	Analisis Potensi Investasi berdasarkan Jaringan Kelistrikan	4-66
Tabel 4.38	Skor Potensi Ketersediaan Prasarana Kelistrikan Kecamatan Buahdua	4-67
Tabel 4.39	Analisis Potensi Investasi berdasarkan Jaringan Telekomunikasi...	4-68
Tabel 4.40	Skor Potensi Ketersediaan Prasarana Telekomunikasi Buahdua....	4-69
Tabel 4.41	Analisis Potensi Investasi berdasarkan Fasilitas Pendidikan	4-70
Tabel 4.42	Skor Potensi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua	4-71
Tabel 4.43	Analisis Potensi Investasi berdasarkan Fasilitas Kesehatan	4-74
Tabel 4.44	Skor Potensi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Buahdua	4-78
Tabel 4.45	Analisis Potensi Investasi berdasarkan Fasilitas Perdagangan	4-79
Tabel 4.46	Skor Potensi Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Kecamatan Buahdua	4-81
Tabel 4.47	Tabel Skor Indikator Ekonomi.....	4-84
Tabel 4.48	Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Pertanian Tanaman Pangan Padi Kecamatan Buahdua	4-85

Tabel 4.49	Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura Kecamatan Buahdua	4-87
Tabel 4.50	Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Peternakan Kecamatan Buahdua	4-88
Tabel 4.51	Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Industri Besar, Kecil, dan Menengah Kecamatan Buahdua.....	4-90
Tabel 4.52	Tabel Potensi Pariwisata Kecamatan Buahdua.....	4-93
Tabel 4.53	Klasifikasi dan Skoring Tenaga Kerja Berdasarkan Usia Produktif	4-105
Tabel 4.54	Klasifikasi dan Skoring Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4-105
Tabel 4.55	Klasifikasi dan Skoring Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Kesesuaian Dukungan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang	4-107
Tabel 4.56	Pehitungan Pemetaan Potensi Investasi Kecamatan Buahdua	4-109
Tabel 4.57	Pemetaan Potensi Investasi Berdasarkan Desa di Kecamatan Buahdua	4-111
Tabel 5.1	Permasalahan Pengembangan Potensi Investasi di Kecamatan Buahdua	5-15
Tabel 5.2	Analisis Pengembangan Investasi Potensi Fisik di Kecamatan Buahdua	5-18
Tabel 5.3	Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan Infrastruktur di Kecamatan Buahdua	5-19
Tabel 5.4	Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Buahdua	5-21
Tabel 5.5	Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan SDM di Kecamatan Buahdua	5-22
Tabel 5.5	Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan SDM di Kecamatan Buahdua	5-23

An aerial photograph showing a rural landscape with several dirt roads winding through green fields and trees. A few vehicles are visible on the roads. In the background, there are rolling hills and a small cluster of white buildings.

Bab 1

An aerial photograph of a complex highway interchange. It features multiple overpasses and ramps connecting different levels of the road. The surrounding area is green with some buildings and a road in the foreground.

Pendahuluan



1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor ekonomi misalnya pariwisata, perdagangan, ekspor, impor, perbankan, transportasi dan asuransi. Dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain di sekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain “kegiatan investasi” akan memberikan *multiplier effects*, dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD.

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan swasta asing. Pada beberapa Pemerintah Daerah dampak penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Hal ini disebabkan karena penanaman modal pemerintah daerah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasi yang tinggi terhadap perekonomian serta memiliki dampak terhadap investasi swasta (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Sumedang.

Pemerintah sebelumnya telah menertibkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri, maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya

secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada di daerah masing-masing guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selain itu, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memberikan kemudahan kepada investor yang diantaranya berupa informasi potensi investasi yang ada di Wilayah Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Buahdua sebanyak 31.930 orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038, di Wilayah Kecamatan Buahdua terdapat Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.152 Ha.

Dalam rangka mendukung pengembangan investasi perlu dilakukan penyusunan peta potensi investasi di Kecamatan Buahdua. Dengan adanya dokumen peta potensi ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi yang diperlukan oleh investor untuk berinvestasi di Kecamatan Buahdua sehingga bisa memberikan dampak positif untuk perekonomian di sekitarnya.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua disusun berlandaskan yuridis formal meliputi berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Beberapa kebijakan yang digunakan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang; dan
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah:

- a. Melakukan analisis/ reviu/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan makro dan sektoral tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres, RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- b. Mengumpulkan dan mengkompilasi data kondisi geografis, sosial, demografi, ekonomi, prasarana dan infrastruktur/ utilitas di Kecamatan Buahdua;
- c. Mengumpulkan data potensi investasi (berbagai sektor) dan menyusun peta potensi investasi di Kecamatan Buahdua;
- d. Mengidentifikasi permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua; dan
- e. Merumuskan rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari pekerjaan ini adalah:

- a. Tersedianya hasil analisis/ revidi/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan makro dan sektoral tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpred, RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- b. Tersedianya data pendukung potensi investasi (data kondisi geografis, sosial, demografi, prasarana dan infrastruktur/ utilitas) di Kecamatan Buahdua;
- c. Tersedianya data dan peta potensi investasi di Kecamatan Buahdua;
- d. Teridentifikasinya permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua;
- e. Tersedianya rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua.

1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Untuk menyelesaikan kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua ini, diperlukan serangkaian pekerjaan yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan makro dan sektoral tingkat nasional/provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres, RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
 - b. Kebijakan ketataruangan (RTRW) terkait Kecamatan Buahdua;
 - c. Data makro ekonomi (PDRB) terkait Kecamatan Buahdua (jika ada) atau Kabupaten Sumedang;
 - d. Data pendukung potensi investasi (data kondisi geografis, sosial, demografi, prasarana dan infrastruktur/ utilitas) di Kecamatan Buahdua;
2. Melakukan survey lapangan:
 - a. Mengidentifikasi potensi investasi sektoral di Kecamatan Buahdua;
 - b. Cek kondisi infrastruktur jalan, layanan telekomunikasi dan energi/ listrik di wilayah dengan potensi investasi yang signifikan.
3. Melakukan analisis/ revidi/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan

- makro dan sektoral tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres, RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua;
4. Melakukan analisis/ revidi/ kajian terhadap kebijakan ketataruangan (RTRW) terkait Kecamatan Buahdua;
 5. Melakukan analisis/ revidi/ kajian terhadap kebijakan rencana umum penanaman modal (RUPM) terkait Kecamatan Buahdua;
 6. Melakukan analisis/ revidi ketersediaan prasarana/ infrastruktur/ utilitas (jalan, telekomunikasi, energi/ listrik, air baku) dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;
 7. Melakukan analisis/ revidi ketersediaan sarana/ fasilitas kesehatan dan pendidikan dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;
 8. Melakukan analisis/ revidi ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;
 9. Melakukan analisis/ revidi kondisi keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Wilayah Kecamatan Buahdua;
 10. Melakukan identifikasi potensi investasi sektoral di Kecamatan Buahdua;
 11. Melakukan pemetaan potensi investasi sektoral di Kecamatan Buahdua;
 12. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua;
 13. Menyusun rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah pada kajian ini adalah pemetaan potensi investasi yang terdapat di Kecamatan Buahdua. Desa/ Kelurahan yang masuk ke dalam Kecamatan Buahdua diantaranya yaitu Desa/ Kelurahan Sekarwangi, Cilangkap, Cibitung, Cikurubuk, Bojongloa, Nagrak, Panyindangan, Buahdua, Gendereh, Citaleus, Mekarmukti, Hariang, Karangbungur dan Ciawitali.

1.5 SISTEM PELAPORAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam bentuk buku laporan (laporan

pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir) dan ringkasan eksekutif/ *executive summary*. Isi laporan-laporan dan ringkasan eksekutif adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan pendahuluan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua berisi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum wilayah Kecamatan Buahdua (orientasi wilayah, geografis, klimatologis, pemerintahan, demografis, aksesibilitas);
 - c. Metodologi/ pendekatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. Rencana kerja berikutnya.
- 2) Laporan antara Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua berisi:
 - a. Hasil analisis/ revidu/ kajian terhadap kebijakan rencana pembangunan makro tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten (RPJP/D, Perpres, RPJM/D, RTRW, RUPM/D, Renstra OPD) terkait Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
 - b. Hasil analisis/ revidu/ kajian terhadap kebijakan ketataruangan (RTRW) terkait Kecamatan Buahdua;
 - c. Hasil analisis/ revidu/ kajian terhadap kebijakan rencana umum penanaman modal (RUPM) terkait Kecamatan Buahdua;
 - d. Hasil analisis/ revidu ketersediaan prasarana/ infrastruktur/ utilitas (jalan, telekomunikasi, energi/listrik, air baku) dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;
 - e. Hasil analisis/ revidu ketersediaan sarana/ fasilitas kesehatan dan pendidikan dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;
 - f. Hasil analisis/ revidu ketersediaan tenaga kerja dalam mendukung investasi di Kecamatan Buahdua;
 - g. Hasil analisis/ revidu kondisi keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Wilayah Kecamatan Buahdua;
 - h. Hasil identifikasi potensi investasi sektoral di Kecamatan Buahdua;
 - i. Peta potensi investasi sektoral di Kecamatan Buahdua.
- 3) Laporan akhir Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua berisi:
 - a. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua;
 - b. Rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua;

c. Kesimpulan.

1.6 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika dalam Laporan Antara Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, sistem pelaporan pekerjaan dan sistematika pelaporan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang literatur studi dan kebijakan-kebijakan mengenai Penyusunan Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua.

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran awal wilayah Kecamatan Buahdua sebagai wilayah yang dilakukan untuk pemetaan potensi investasi.

BAB 4 PETA POTENSI INVESTASI

Bab ini membahas tentang hasil fakta dan analisis mengenai penyusunan peta potensi investasi Kecamatan Buahdua berdasarkan potensi fisik, potensi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas (pendidikan dan kesehatan), potensi ekonomi, potensi ketersediaan tenaga kerja, potensi keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi berdasarkan dukungan kebijakan, dan pemetaan potensi investasi Kecamatan Buahdua.

BAB 5 PERMASALAHAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI

Bab ini membahas tentang hasil fakta dan analisis mengenai permasalahan dan pengembangan potensi investasi Kecamatan Buahdua.

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua.



Bab 2



Tinjauan Kebijakan



Tinjauan kebijakan berisi mengenai kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan investasi. Kebijakan dari hierarki yang lebih tinggi, yaitu peraturan perundang-undangan sampai Peraturan Daerah.

2.1 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007

Penanaman modal adalah segala bentuk investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan bisnis di Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah dua jenis penanaman modal. PMDN adalah penanaman modal untuk usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sementara PMA adalah penanaman modal untuk usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing.

Tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal ini meliputi beberapa aspek penting:

1. Meningkatkan Investasi
 - Daya Tarik Investasi: Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - Diversifikasi Sektor Ekonomi: Mendorong investasi di berbagai sektor untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
 - Peningkatan PDRB: Penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
 - Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi yang masuk diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi
 - Transfer Teknologi: Mendorong masuknya teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
 - Inovasi Produk dan Proses: Meningkatkan kemampuan inovasi dalam produksi dan layanan.
4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

- PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL: Penanaman modal diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan.
- PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: Mendesak investasi yang ramah lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam.

5. Peningkatan Kualitas Investasi

- INVESTASI BERKUALITAS: Mendorong investasi yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
- REGULASI YANG TRANSPARAN: Menyediakan sistem perizinan dan regulasi yang jelas untuk meminimalkan risiko bagi investor.

6. Peningkatan Daya Saing Nasional

- KETERLIBATAN DALAM RANTAI PASOK GLOBAL: Memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global melalui investasi yang strategis.
- PENINGKATAN KAPASITAS INDUSTRI: Meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri dalam negeri agar lebih kompetitif.

Untuk meningkatkan kekuatan perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal:

- 1) Memberi penanam modal dalam negeri dan asing perlakuan yang sama dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- 2) Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal dari proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memberikan kesempatan untuk berkembang dan melindungi usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha, baik badan hukum maupun usaha perseorangan. Namun, penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas diwajibkan oleh hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan dengan cara lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan asing dapat

melakukannya dengan mengambil bagian dalam pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau melakukan cara lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal kecuali bidang-bidang berikut:

- 1) Produksi senjata api, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- 2) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Presiden, pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berdasarkan standar kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka akan diatur oleh Perda. Penanam modal di Indonesia (PMDN dan PMA) diberi hak, kewajiban, dan tanggung jawab.

- 1) Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- 2) Informasi terbuka tentang bidang usaha yang dijalankannya;
- 3) Hak pelayanan;
- 4) Berbagai fasilitas kemudahan

Penanam Modal Memiliki Kewajiban:

- 1) Menjaga prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 2) Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 3) Membuat laporan dan menyerahkannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4) Menghormati adat istiadat budaya di sekitar lokasi usaha penanaman modal; dan
- 5) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Penanam Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin modal tersedia dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan.

- 2) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal secara sepihak menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan (hal lain yang merugikan negara).
- 3) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi pekerja.
- 4) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan diharuskan untuk mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan mengatur prosedur pemulihan ini diantaranya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya berdasarkan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sering disebut juga dengan otonomi daerah.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Otonomi adalah dasar pemerintahan daerah yang didasarkan pada otonomi. Penataan Daerah adalah bagian dari proses desentralisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuannya sebagai berikut: Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan daya saing pemerintahan di tingkat lokal dan nasional; dan mempertahankan keanekaragaman adat istiadat, tradisi, dan budaya yang unik di daerah.

Menurut Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pembentukan daerah mencakup pembentukan provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan daerah juga mencakup pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Menurut Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016, bidang usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri dari tiga kategori:

- 1) Bidang Usaha Terbuka, yang berarti usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal;

- 2) Bidang Usaha Tertutup, yang berarti usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal; dan
- 3) Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan, yang berarti usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal

Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu yaitu: batasan modal dalam negeri 100% (seratus %), dan atau batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kemitraan dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, sub kontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya. Sementara itu, mengenai daftar bidang usaha yang tertutup:

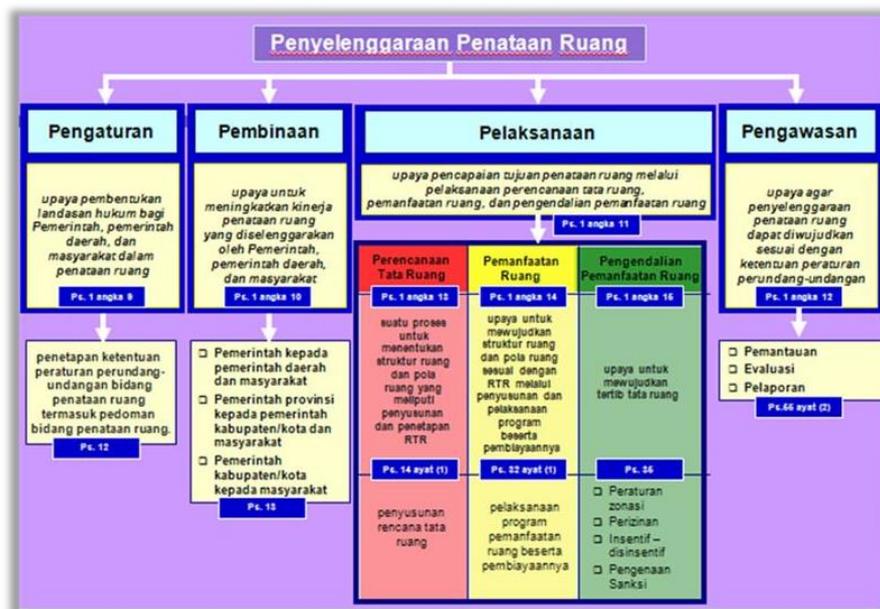
- 1) Budidaya Ganja;
- 2) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
- 3) Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;
- 4) Pemanfaatan (Pengambilan) Koral Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan, Kapur, Kalsium, Akuarium, dan Souvenir Perhiasan, serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coral dari Alam);
- 5) Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri;
- 6) Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan ene;
- 7) Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO) Polychlorinated Bipheny (PcB), Hexachlorobenzene, dan carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (cFc-11) Dichloro Trijloro Ethane (cFc-12), Trichloro Trifluoro Ethane (cFc-113) Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115) Chloro Trifluoro Methane (cFc-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (cFc-11 2) Pentachloro Fluoro Ethane (cFc-111), Chloro Heptafluoro Propane (cFc 217). Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216). Trichloro Propane (cFC-213). Hexachloro Difluoro Propane (CFC-2 1 Bromo chloro Diluoro Methane (Halon1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R502;

- 8) Industri Bahan Kimia Daftar 1 Konvensi Senjata Kimia sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;
- 9) Industri Minuman Keras;
- 10) Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur;
- 11) Industri Minuman Mengandung Malt;
- 12) Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat;
- 13) Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- 14) Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan vessel Traffic Information;
- 15) Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan; dan
- 16) Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

2.2 Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Gambar 2.1 Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang



Sumber: UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

A. Pengaturan Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

B. Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

1. Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan masyarakat.
2. Pembinaan penataan ruang dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang menurut kewenangannya masing-masing.

C. Pelaksanaan Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang yaitu upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

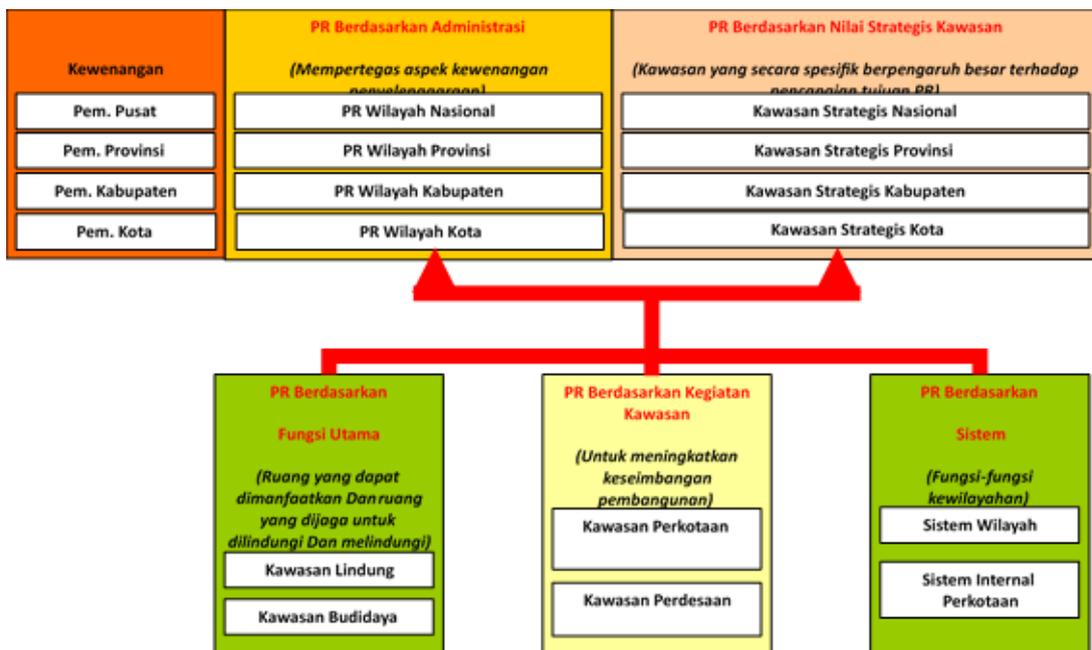
D. Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang yaitu upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
2. Pengawasan terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
3. Pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
5. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Setiap tingkatan rencana tata ruang memiliki cakupan wilayah perencanaan yang berbeda dengan maksud yang berbeda pula. Definisi dan cakupan wilayah perencanaan, maksud, dan skala ketelitian peta yang digunakan setiap tingkatan rencana tata ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Klasifikasi Penataan Ruang Berdasarkan Sistem, Fungsi, dan Nilai Strategi Kawasan



Sumber: Bahan Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007

Dalam setiap proses perumusannya, rencana tata ruang skala kabupaten/kota selalu mengacu kepada kebijakan-kebijakan lain yang secara luas terkait dalam suatu struktur kebijakan pembangunan, yang dimulai dari kebijakan skala nasional, regional hingga kebijakan pembangunan wilayah itu sendiri. Perencanaan tata ruang menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 dilakukan untuk menghasilkan:

- a. Rencana umum tata ruang, secara hirarki terdiri atas:
 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Kota;
- b. Rencana rinci tata ruang, secara hirarki terdiri atas:
 1. Rencana Tata Ruang Pulau, atau kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
 2. Rencana Tata ruang kawasan strategis provinsi.
 3. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota dan rencana tata ruang strategis kabupaten/kota dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

2.3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan

antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan pegawai yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara

tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

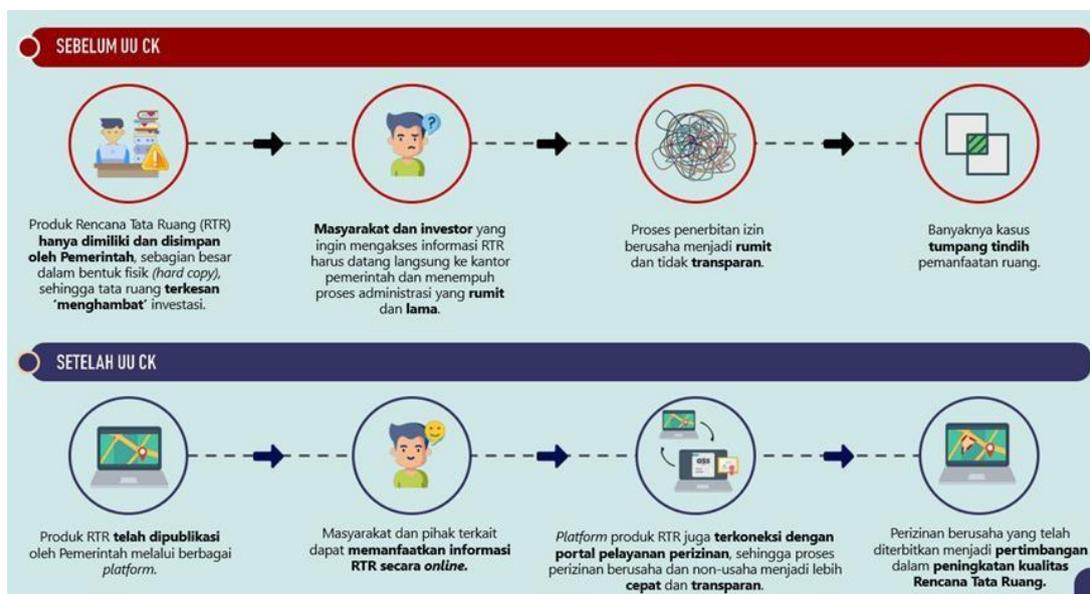
2.4 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 26 Tahun 2003

UU Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Dalam UU Cipta Kerja, terdapat berbagai terobosan kebijakan penataan ruang yang ditargetkan untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Gambar 2.3 Dasar Perlunya Penataan Ruang di Indonesia



Gambar 2.4 Tahapan Menyusun Dokumen Penataan Ruang Sebelum adanya UU CK dan sesudah adanya UU CK



Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.

Gambar 2.5 Terobosan dalam Integrasi Tata Ruang (1)



Sumber:

UU CK: Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (5), (6), (7) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 17 ayat (5) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007; Pasal 18 UU CK: Pasal 7A UU No. 27/2007; Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014; Pasal 36 (poin 1) UU CK: Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999; Pasal 15 ayat (3) UU CK.

RPP PPR: Pasal 6, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayata (2)

Gambar 2.6 Terobosan dalam Integrasi Tata Ruang (2)



Sumber:

UU CK: Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (5), (6), (7) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 17 ayat (5) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007; Pasal 18 UU CK:

Pasal 7A UU No. 27/2007; Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014; Pasal 36 (poin 1) UU CK: Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999; Pasal 15 ayat (3) UU CK.

RPP PPR: Pasal 6, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayata (2)

UU CK dan RPP PPR memandatkan penyederhanaan (*streamlining*) hierarki penataan ruang.

Gambar 2.7 Terobosan Penyederhanaan Produk RTR



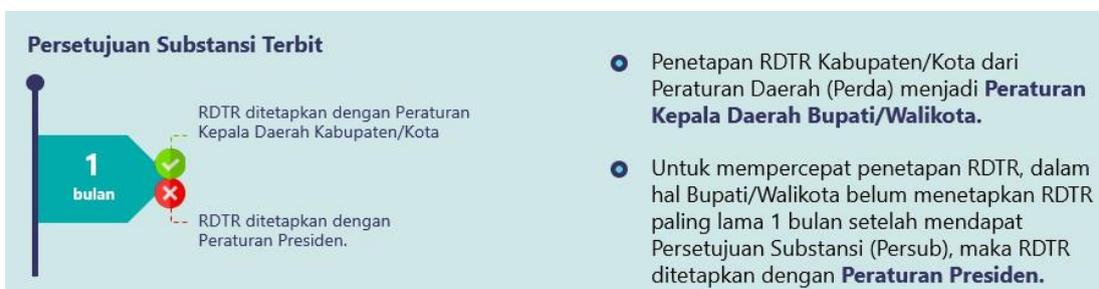
Sumber:

UU CK: Pasal 15 ayat (3) UU CK; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU No. 26/2007.

RPP PPR: Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 20 ayat (1) huruf f

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RTR tidak ditarik ke pusat. Hanya saja, waktu penetapannya dibatasi untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Jika melewati batas waktu, RTR yang telah disusun oleh daerah dan mendapat persetujuan substansi akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Gambar 2.8 Percepatan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)



Sumber:

UU CK: Pasal 17 UU CK: Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (7), (8), (9), Pasal 26 ayat (8), (9), (10) UU No. 26/2007.

RPP PPR: Pasal 18, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 53

Gambar 2.9 Digitalisasi dan Tranparansi untuk Memasyarakatkan Tata Ruang



Untuk penyederhanaan perizinan berusaha, Izin Lokasi sudah tidak ada lagi, dan digantikan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha melalui sistem OSS untuk berbagai skala dan tingkat risiko kegiatan usaha.

Gambar 2.10 Terobosan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Perijinan Berusaha



Sumber: UU CK: Pasal 13, 14, 15 UU CK & RPP PPR: Pasal 59 – Pasal 83

2.5 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip, kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif dan efisien.

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor.

Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah. Kemudian, pemberian kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan investasi langsung konstruksi; kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah yang paling sedikit memuat kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi acuan untuk:

- a. Penyusunan RDTR kabupaten;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- e. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- f. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RDTR kabupaten/kota.

RDTR Kabupaten/Kota paling sedikit memuat:

- a. Tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. Peraturan zonasi.

RDTR Kabupaten/Kota menjadi acuan untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/kota;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

RDTR Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000. Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal wajib mengintegrasikan RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke dalam sistem OSS.

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pengganti Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan melalui pendekatan elektronik. Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dengan mengurangi hambatan birokrasi serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha di Indonesia.

Pendekatan Berbasis Risiko Salah satu inovasi utama dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah penerapan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam perizinan usaha. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang cenderung seragam, pendekatan ini menilai tingkat risiko dari setiap kegiatan usaha dan menentukan jenis perizinan yang diperlukan berdasarkan tingkat risiko tersebut. Kegiatan usaha dikategorikan menjadi:

1. **Risiko Rendah:** Kegiatan usaha yang dianggap tidak berpotensi besar merugikan lingkungan, kesehatan, atau keamanan. Untuk usaha kategori ini, pelaku usaha hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai satu-satunya syarat perizinan.
2. **Risiko Menengah:** Terbagi menjadi dua, yaitu risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah memerlukan

pemenuhan standar usaha, sedangkan untuk risiko menengah tinggi, pelaku usaha harus memperoleh izin berbasis standar yang lebih ketat.

3. **Risiko Tinggi:** Kegiatan usaha yang memiliki potensi risiko besar bagi masyarakat atau lingkungan. Untuk kategori ini, diperlukan izin berusaha yang ketat, dengan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah.

Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan proses perizinan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali terbebani oleh prosedur perizinan yang rumit.

Integrasi dengan Sistem OSS (*Online Single Submission*) PP ini juga mengintegrasikan penyelenggaraan perizinan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan platform elektronik untuk mengurus berbagai bentuk perizinan berusaha secara terintegrasi. Sistem ini diperbarui menjadi OSS Berbasis Risiko, yang menyesuaikan dengan tingkat risiko usaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. OSS bertujuan untuk mengurangi tatap muka antara pelaku usaha dan pemerintah, menghindari praktik percaloan, dan mempercepat waktu proses perizinan.

2.8 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Prioritas Investasi

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Prioritas Investasi diterbitkan sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Perpres ini menggantikan kebijakan daftar negatif investasi (DNI) yang sebelumnya membatasi sektor-sektor usaha tertentu bagi investor asing dan domestik.

Tujuan utama Perpres ini adalah untuk menarik lebih banyak investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, melalui penyusunan Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang memberikan insentif khusus kepada sektor-sektor tertentu. Dengan mencabut DNI dan menggantinya dengan DPI, pemerintah ingin memberikan sinyal positif kepada investor bahwa Indonesia membuka lebih banyak sektor usaha untuk investasi, dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis yang berpotensi besar meningkatkan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Pokok-Pokok Pengaturan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menyusun sektor-sektor usaha yang menjadi prioritas investasi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

1. **Sektor yang menerima insentif fiskal dan non-fiskal:** Pemerintah menawarkan berbagai insentif, seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk, bagi investor yang menanamkan modal di sektor-sektor prioritas. Insentif ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik sektor-sektor strategis, seperti energi terbarukan, industri digital, dan infrastruktur.
2. **Sektor yang terbuka 100% untuk investor asing:** Beberapa sektor yang sebelumnya dibatasi bagi kepemilikan asing kini dibuka sepenuhnya, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi digital. Hal ini diharapkan meningkatkan kompetisi serta alih teknologi dan pengetahuan dari perusahaan asing ke dalam negeri.
3. **Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM):** Meski beberapa sektor terbuka untuk investor asing, terdapat pengecualian bagi sektor-sektor yang ditujukan bagi UMKM. Pemerintah memberikan perlindungan bagi UMKM dengan mengutamakan sektor-sektor tertentu untuk usaha domestik kecil dan menengah, sehingga UMKM tetap dapat berkembang tanpa harus bersaing langsung dengan perusahaan besar.
4. **Sektor yang dilarang untuk investasi:** Ada pula sektor-sektor yang secara tegas dilarang untuk investasi, seperti produksi narkoba, perjudian, dan sektor-sektor lain yang dianggap merugikan kesehatan dan keamanan nasional.

2.9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

Misi Kedua dari RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yaitu **Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri**, adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosioekonomi lokal terutama dalam

agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan keseimbangan lingkungan hidup.

Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosioekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif. Fokus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada Misi Ke-2 RPJPD Tahun 2005-2025 yang berkaitan dengan investasi diantaranya:

- 1) Memperkuat perlindungan dan kapasitas struktur perekonomian daerah, dengan terus mengupayakan dan memantapkan pertumbuhan investasi bagi para pelaku usaha di daerah yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, mendorong penanaman modal dalam negeri dan dana asing bagi peningkatan daya saing perekonomian lokal yang menopang perekonomian regional dan nasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.
- 2) Memberikan jaminan insentif dan disinsentif investasi bagi para pelaku usaha di daerah, berupa perlindungan regulasi bagi keamanan investasi yang ditanamkan serta *punishment* bagi investor yang melanggar aturan, hingga tercipta iklim investasi yang kondusif.
- 3) Meningkatkan kapasitas keuangan dan investasi daerah, sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi regional dan nasional, agar mampu mendukung secara efektif peningkatan pembangunan dan kontribusi infrastruktur, sehingga sesuai dengan sistem dan standar pengelolaan yang sesuai dengan praktik terbaik nasional dan internasional, yang mampu mendorong peningkatan ketahanan perekonomian daerah dan perdesaan serta nilai tambah perekonomian daerah.
- 4) Menguatkan kerjasama investasi infrastruktur daerah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas perekonomian, sosial, budaya dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan memperhatikan keserasian pembangunan antar perdesaan,

perkotaan dan antar daerah serta daya dukung lingkungan. Guna pengembangan infrastruktur daerah terus dikembangkan peningkatan peran serta masyarakat dan investasi swasta.

- 5) Para pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan strategis untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui perlindungan regulasi yang berpihak pada tenaga kerja tanpa mengabaikan hak para investor, sehingga tercipta keseimbangan dan kondusivitas iklim investasi.

2.10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Sumedang Kebijakan Penataan Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. pengembangan Kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang;
- b. pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
- c. pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh Wilayah Kabupaten;
- d. penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata;
- e. penetapan dan pengembangan Kawasan Industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;
- f. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- g. peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
- h. peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi Wilayah;
- i. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- j. penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang;
- k. pengembangan kawasan pendidikan di kabupaten;

- l. pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;
- m. pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
- n. pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kaitannya dengan rencana struktur ruang Kabupaten Sumedang yaitu khusus Kecamatan Buahdua, termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Perkotaan Kawasan BUTOM GEDE. Dengan peran pusat kegiatan sebagai berikut:

- 1. pusat kegiatan bisnis;
- 2. pusat kegiatan perdagangan, jasa, dan pemasaran;
- 3. pusat kegiatan industri;
- 4. pusat pelayanan perumahan dan permukiman;
- 5. pusat pelayanan sosial ekonomi skala regional;
- 6. pusat pelayanan kesehatan; dan
- 7. pusat pelayanan transportasi.

Desa-desanya di Kecamatan Buahdua yang masuk ke dalam Pusat Kegiatan Perkotaan Kawasan BUTOM GEDE diantaranya:

- a. Desa Buahdua;
- b. Desa Hariang;
- c. Desa Ciawitali;
- d. Desa Gendereh; dan
- e. Desa Sekarwangi.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, Kecamatan Buahdua yang awalnya adalah Pusat Pelayanan Lingkungan, karena masuk ke dalam Kawasan Perkotaan BUTOM GEDE, maka diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Perkotaan BUTOM GEDE. Untuk mendukung menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan BUTOM GEDE, berdasarkan rencana jaringan atau struktur ruang untuk Kecamatan Buahdua adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan status kewenangan lokal primer menjadi jalan kolektor primer-3 yang meliputi Conggeang-Buahdua dan Buahdua-Burujul.
- 2) Pembangunan baru terminal penumpang tipe C.
- 3) Pengembangan jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas.

- 4) Pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- 5) Pengembangan prasarana waduk dan bendung, yaitu Situ Cilembang.
- 6) Terkait dengan pengembangan sarana prasarana pengelolaan sampah, masuk ke dalam zona 6 (enam) ke tempat penampungan sementara Ujungjaya.
- 7) Pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu.
- 8) Pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu.
- 9) Pengembangan sistem IPAL industri

Berdasarkan rencana pola ruang, terdapat kawasan hutan lindung yang berfungsi lindung di Kecamatan Buahdua. Buahdua menjadi bagian dari kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 8,776 ha kawasan hutan lindung di Kabupaten Sumedang. Selain menjadi bagian dari kawasan hutan lindung, Kecamatan Buahdua juga menjadi bagian dari kawasan taman wisata berupa Taman Wisata Alam Gunung Tampomas dengan luas kurang lebih 1.074 ha yang juga meliputi Kecamatan Cimalakan dan Conggeang. Berkaitan dengan kerawanan bencana, Kecamatan Buahdua masuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa bumi dan gerakan tanah. Kecamatan Buahdua juga merupakan kawasan lindung geologi, yaitu zona aman cekungan air tanah dan kawasan sempadan mata air. Kecamatan Buahdua diarahkan untuk pengembangan Kawasan Industri Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.152 Ha berada di Kecamatan Buahdua. Selain kegiatan industri, Kecamatan Buahdua juga diarahkan untuk pengembangan pariwisata alam Cipanas Sekarwangi dan Cipanas Cileungsing.

Kecamatan Buahdua menjadi bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buahdua. Pengembangan Kawasan Industri Buahdua dalam rangka mendukung Aerocity Kertajati, kegiatan agroindustri, industri pariwisata dan olahraga.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi Buahdua disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan kegiatan industri besar, menengah dan kecil;
- b. Kegiatan industri besar harus berada pada Kawasan Industri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;

- d. Kegiatan industri yang memanfaatkan sumber air permukaan sesuai ketentuan dan menjaga kelestariannya;
- e. Kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
- f. Penyediaan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- g. Industri besar wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

2.11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dijelaskan bahwa indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah (1) angka kriminalitas; (2) jumlah demonstrasi; (3) lama proses perizinan; (4) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (5) jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Aspek pertama adalah angka kriminalitas yang merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Aspek kedua yaitu Demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Demonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat

secara luas. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Sumedang relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian yang berdampak sistemik.

Aspek ketiga adalah lama proses perizinan. Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain itu, upaya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Pelayanan Perizinan Terpadu bertujuan untuk mempermudah perizinan dan penyebaran informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada.

Aspek keempat yaitu jumlah pajak dan retribusi. Jumlah pajak di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2013 terdiri 10 jenis pajak kemudian bertambah menjadi 12 jenis pajak pada Tahun 2014 hingga Tahun 2017 dengan ditambahkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Sedangkan jumlah retribusi daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari 3 jenis retribusi. Total retribusi daerah di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 cenderung semakin menurun. Hal ini disebabkan terdapat beberapa jenis pelayanan umum dan usaha yang sudah tidak diberlakukan biaya retribusinya. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mensinergikan antara kegiatan peningkatan investasi dan peningkatan PAD, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Pertumbuhan investasi harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Aspek kelima yaitu jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Terdapat satu Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Sumedang yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang.

2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Sumedang. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan investasi. Pemerintah daerah ingin menarik minat investor baik dari dalam maupun luar daerah dengan menawarkan berbagai insentif yang menarik dan kemudahan prosedur perizinan.

Sumedang, sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Jawa Barat, memiliki sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, serta industri pengolahan. Melalui Perda ini, pemerintah daerah bertujuan mengembangkan potensi-potensi tersebut dan meningkatkan kontribusi investasi dalam pembangunan daerah.

Pemberian Insentif Investasi Perda ini menetapkan berbagai jenis insentif yang diberikan kepada investor yang menanamkan modal di Kabupaten Sumedang. Beberapa bentuk insentif tersebut meliputi:

- 1) **Insentif fiskal:** Pemotongan pajak daerah, keringanan atau penghapusan retribusi, serta keringanan biaya untuk fasilitas umum yang diperlukan dalam investasi.
- 2) **Insentif non-fiskal:** Dukungan berupa pemberian izin dan fasilitas pendukung seperti kemudahan akses lahan, bantuan teknis, dan promosi usaha.

Insentif ini diberikan kepada investor yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya, investasi yang mendukung pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, atau investasi di sektor-sektor prioritas seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Kemudahan Perizinan Perda ini juga memperkenalkan penyederhanaan proses perizinan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan birokrasi. Beberapa kemudahan yang ditawarkan antara lain:

1. Pelayanan perizinan terpadu: Integrasi sistem perizinan melalui satu pintu, di mana investor dapat mengurus semua dokumen yang dibutuhkan dalam satu *platform*.
2. Percepatan proses perizinan: Pemangkasan waktu proses perizinan menjadi lebih singkat, dengan prioritas pada sektor yang dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor-Sektor Prioritas Investasi Perda ini juga menetapkan beberapa sektor yang menjadi prioritas untuk menerima insentif dan kemudahan, seperti:

1. Sektor pariwisata: Kabupaten Sumedang memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama dari wisata alam dan budaya. Investasi di sektor ini diharapkan dapat

- meningkatkan pendapatan daerah dan memperkenalkan Sumedang sebagai destinasi wisata unggulan.
2. Sektor pertanian dan agribisnis: Dengan potensi besar di bidang pertanian, terutama dalam produksi pangan lokal, investasi dalam agribisnis diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah.
 3. Sektor industri kreatif dan teknologi: Pemda Sumedang juga mendukung pengembangan industri kreatif dan teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya manusia lokal yang inovatif.

Pemantauan dan Evaluasi Pemda Sumedang akan secara berkala memantau dan mengevaluasi implementasi insentif dan kemudahan investasi yang diberikan, memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Mekanisme evaluasi ini juga untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan insentif.

2.13 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

Visi RUPM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2025 adalah: **“Penanaman Modal yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi pada tahun 2018-2025 maka disusunlah lima misi. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan minat penanaman modal berdasarkan karakteristik dan potensi Kabupaten Sumedang;
2. Mengembangkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan berkeadilan;
3. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); dan
4. Menciptakan penanaman modal yang berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sumedang diantaranya berfokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, dan industri. Kecamatan Buahdua masuk kedalam investasi potensial industri, yang merupakan kawasan peruntukan industri besar dengan luas kurang lebih 4.458 ha di Kabupaten Sumedang.

Pengembangan Kawasan Industri Buahdua Desa Ciawitali dengan luasan kurang lebih 1.152 ha.

2.14 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

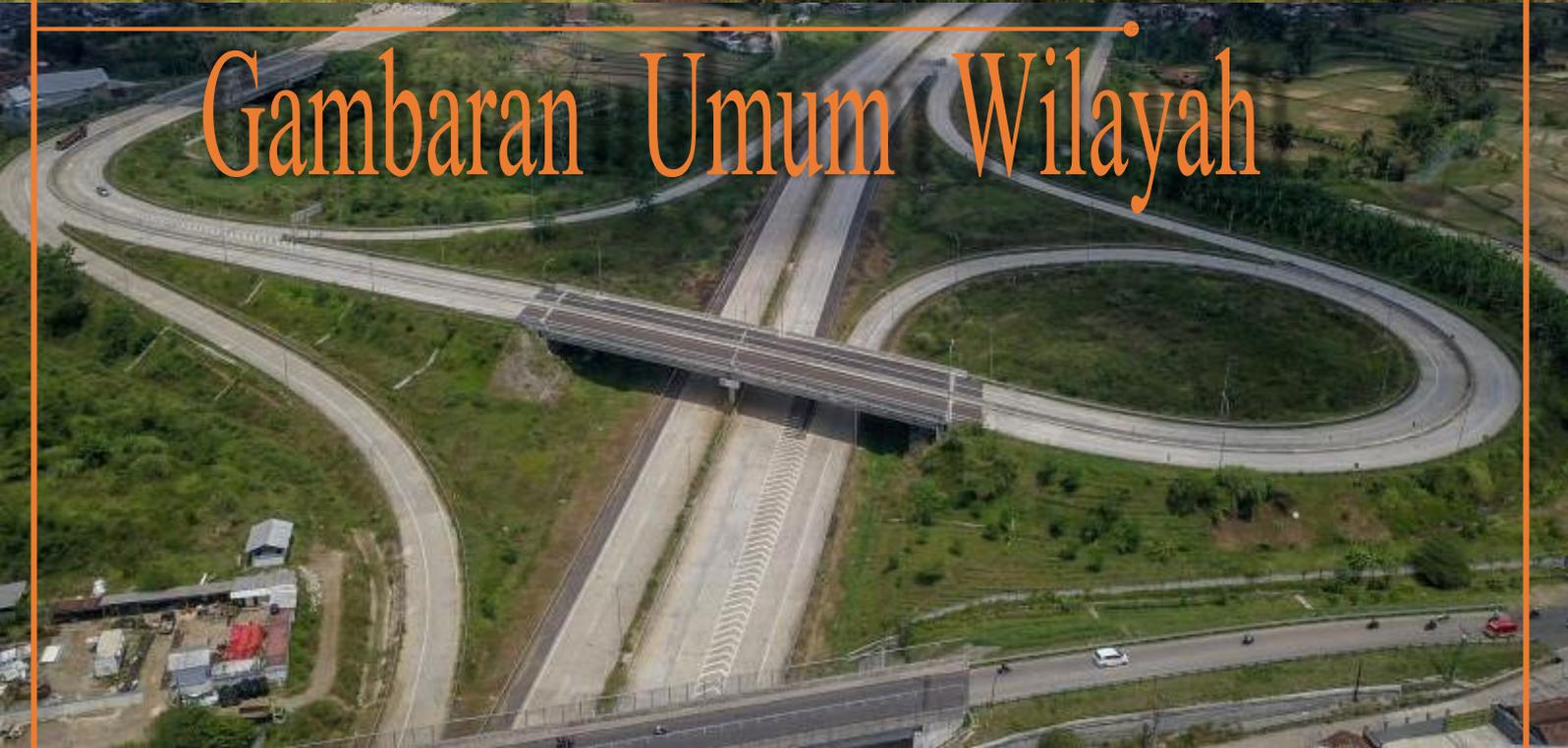
Visi Kabupaten Sumedang adalah **“Sejahtera, Agamis, dan Demokratis pada Tahun 2025”**.

Salah satu Misinya, yaitu Misi ke-2 adalah Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri.

Salah satu sasarannya adalah meningkatnya iklim investasi daerah, dengan strategi perluasan jaringan investasi. Arah kebijakannya yaitu menjalin kerjasama investasi antar daerah dan investor, serta meningkatkan kemudahan berinvestasi.



Bab 3



Gambaran Umum Wilayah



3.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH MAKRO

3.1.1 Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Sumedang

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Sumedang meliputi beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya kondisi letak geografis, kondisi topografi, kondisi klimatologi, dan kondisi penggunaan lahan.

3.1.1.1 Kondisi Letak Geografis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang adalah salah satu kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis. Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan dengan 270 desa Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat $06^{\circ}44' - 7^{\circ}83'$ Lintang Selatan dan antara $107^{\circ}21' - 108^{\circ}21'$ Bujur Timur dan 7 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 1.558,72 km². Secara administratif, Kabupaten Sumedang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
- Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka;
- Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang.

Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Buahdua merupakan wilayah yang paling luas di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang. Luas Wilayah Kecamatan Buahdua adalah 107,68 km². Sedangkan untuk kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Cisarua, dengan luas wilayah 17,71 km². Berikut merupakan luas wilayah dan jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Sumedang.

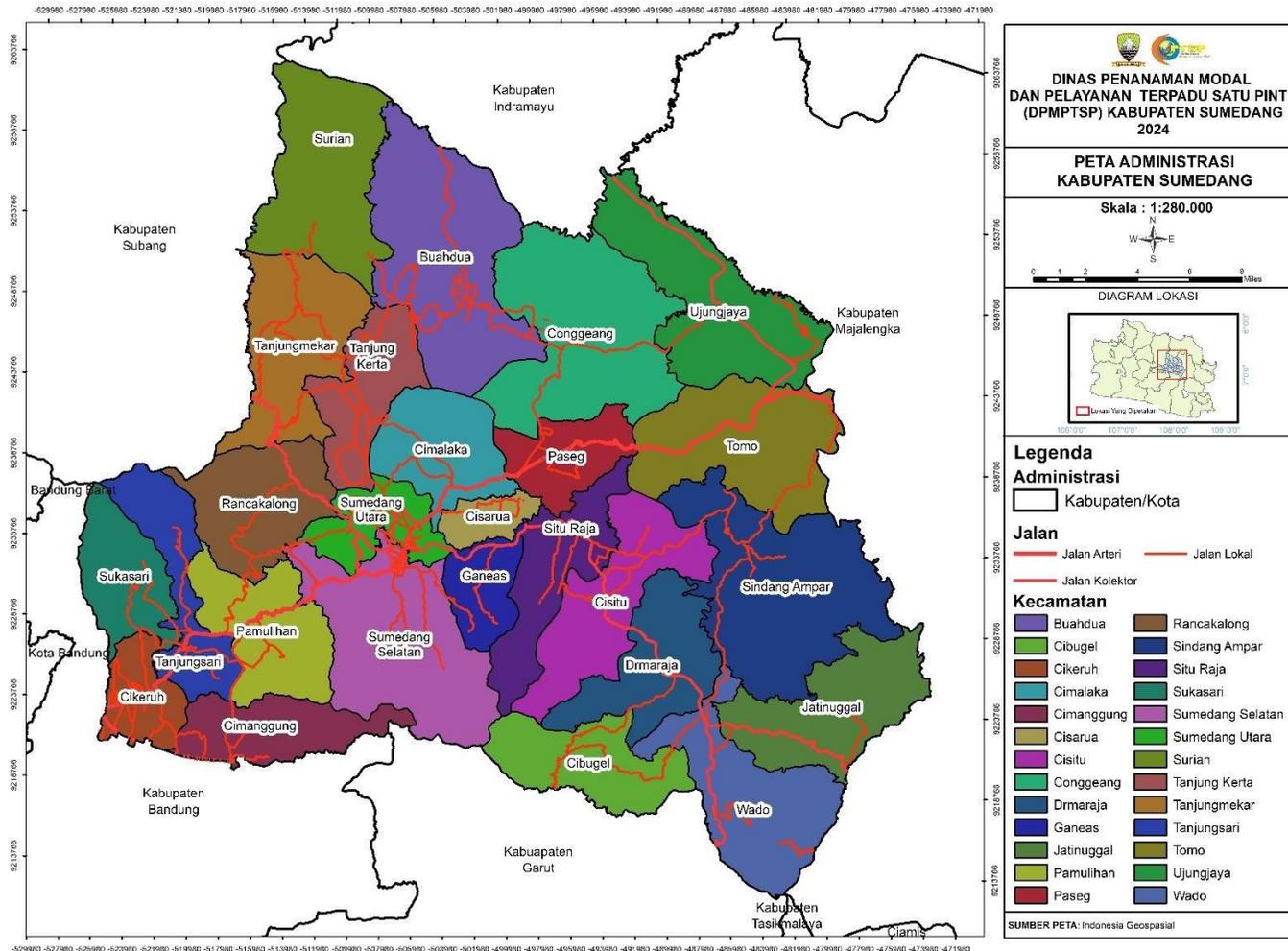
Tabel 3.1 Luas Wilayah, Kecamatan, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Jatinangor	Hegarmanah	31,60	12
2	Cimanggung	Sindangpakuon	55,55	11
3	Tanjungsari	Tanjungsari	44,86	12
4	Sukasari	Sukasari	41,82	7
5	Pamulihan	Ciptasari	50,70	11
6	Rancakalong	Nagarawang	55,07	10
7	Sumedang Selatan	Pasanggrahan Baru	92,51	14
8	Sumedang Utara	Talun	30,40	13

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
9	Ganeas	Cikoneng	22,90	8
10	Situraja	Situraja	43,23	14
11	Cisitu	Situmekar	65,03	10
12	Darmaraja	Darmaraja	49,38	12
13	Cibugel	Cibugel	59,52	7
14	Wado	Wado	84,27	10
15	Jatinunggal	Sirnasari	72,12	9
16	Jatigede	Cijeungjing	106,24	11
17	Tomo	Tomo	84,74	10
18	Ujungjaya	Ujungjaya	86,23	9
19	Conggeang	Conggeang Wetan	106,98	12
20	Paseh	Paseh Kidul	31,62	10
21	Cimalaka	Cimalaka	43,29	14
22	Cisarua	Cisarua	17,71	7
23	Tanjungkerta	Sukamantri	43,72	12
24	Tanjungmedar	Kertamukti	60,67	9
25	Buahdua	Buahdua	107,68	14
26	Surian	Surian	70,88	9
Kab. Sumedang		Sumedang Utara	1558,72	277

Sumber: Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Sumedang



3.1.1.2 Kondisi Klimatologi Kabupaten Sumedang

Curah hujan di Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan pertemuan arus udara. Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada Bulan Februari. Curah hujan mencapai 607 mm³ dengan jumlah hari hujan 24 dan terendah pada Bulan September, yaitu 32 mm³.

Curah hujan pada tahun 2023 cenderung menurun intensitasnya jika dibandingkan dengan tahun 2021. Curah hujan tertinggi sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Sumedang terjadi pada April yang mencapai 416,100 mm/ bulan dengan jumlah hari hujan 19 dan terendah pada Oktober yaitu 1,20 mm/ bulan.

Tabel 3.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kecamatan Buahdua

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	304,20	26
2	Februari	396,50	25
3	Maret	401,20	22
4	April	416,10	19
5	Mei	37,30	12
6	Juni	71,90	8
7	Juli	32,50	2
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	1,20	3
11	November	106,00	17
12	Desember	371,00	21

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka Tahun 2023

Kondisi klimatologi Sumedang dipengaruhi oleh letaknya yang berbukit-bukit dan sebagian besar wilayahnya berada di ketinggian 50 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi menciptakan perbedaan suhu dan pola curah hujan antar kecamatan di kabupaten tersebut.

Suhu udara di Sumedang bervariasi, dengan wilayah dataran tinggi yang lebih sejuk dan wilayah dataran rendah yang lebih hangat. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 18°C hingga 30°C. Daerah yang lebih tinggi seperti Tanjungkerta dan Buahdua memiliki suhu

yang lebih sejuk dibandingkan dengan daerah dataran rendah seperti Jatinangor dan Cimanggung.

Kelembapan di Sumedang tergolong tinggi, berkisar antara 70-90%, terutama selama musim hujan. Kondisi ini mendukung pertumbuhan tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi, seperti teh, kopi, dan sayuran. Kondisi iklim Sumedang yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi dan suhu sejuk di beberapa daerah sangat mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Musim hujan yang panjang juga memberikan keuntungan dalam hal irigasi alami untuk lahan sawah dan kebun.

3.1.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Sumedang

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang sangat dipengaruhi oleh topografi wilayahnya, yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan lembah-lembah. Sebagian besar wilayah Sumedang dimanfaatkan untuk kegiatan agraris, baik pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Berikut adalah profil umum penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang:

- **Pertanian:** Pertanian padi sawah menjadi sektor dominan di Kabupaten Sumedang, terutama di dataran rendah dan lembah yang memiliki sistem irigasi yang baik. Beberapa wilayah seperti Ujungjaya dan Tomo menjadi lumbung padi bagi kabupaten ini. Selain itu, tanaman palawija, jagung, dan sayur-sayuran juga banyak dibudidayakan di berbagai kecamatan.
- **Perkebunan:** Sumedang memiliki lahan yang luas untuk perkebunan, terutama di daerah dataran tinggi seperti Buahdua, Tanjungkerta, dan Conggeang. Tanaman perkebunan utama meliputi kopi, teh, cengkeh, dan kakao. Lahan perkebunan teh di Sumedang menjadi salah satu yang unggul, dengan banyak perkebunan yang juga berfungsi sebagai destinasi wisata agro.
- **Kehutanan:** Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hutan-hutan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber air, serta mendukung sektor kehutanan seperti kayu dan hasil hutan non-kayu (seperti damar dan rotan).
- **Lahan Terbangun (Permukiman dan Industri):** Dengan adanya perkembangan wilayah yang pesat, terutama di kecamatan seperti Jatinangor dan Cimanggung yang berbatasan dengan Kota Bandung, terjadi peningkatan pemanfaatan lahan

untuk permukiman dan kawasan industri. Jatinangor, sebagai pusat pendidikan tinggi dengan adanya Universitas Padjadjaran, juga mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.

- **Lahan Non-produktif:** Sebagian wilayah juga terdiri dari lahan kosong atau tidak produktif, seperti area perbukitan yang sulit dijangkau atau belum dikelola secara optimal untuk pertanian maupun perkebunan.

3.1.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kabupaten Sumedang

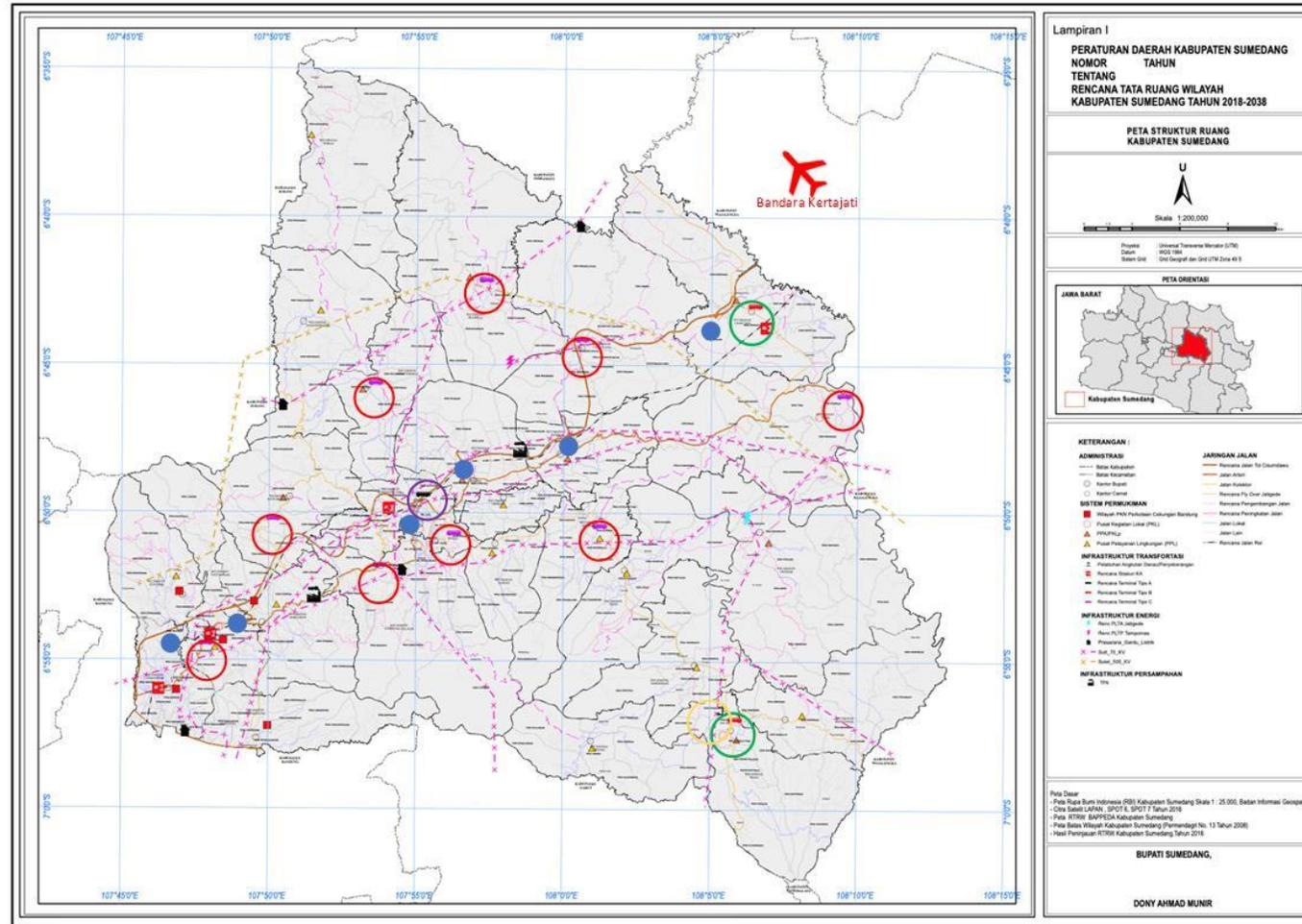
Infrastruktur merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Sumedang, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi yang besar untuk berkembang, namun keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan tersebut. Untuk itu, pada bagian ini akan dilakukan inventarisasi ketersediaan serta kondisi umum infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumedang diantaranya adalah infrastruktur transportasi, kelistrikan, air baku, fasilitas pendidikan serta kesehatan. Dengan mengetahui kondisi terkini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat guna meningkatkan kapasitas infrastruktur demi menunjang kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.

3.1.2.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kabupaten Sumedang

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang mengalami penurunan, semula sepanjang 796,056 km di Tahun 2015-2016, kemudian menurun menjadi 774,606 km di Tahun 2017. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan akibat genangan Waduk Jatigede dan pengurangan akibat pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Secara umum peta jaringan jalan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada dokumen RTRW 2018-2038 Gambar 3.2.

PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

Gambar 3.2. Rencana Struktur Ruang Jaringan Jalan Kabupaten Sumedang 2018-2038



Pada Gambar 3.2, dapat dilihat rencana infrastruktur transportasi yang ada di dalam maupun di sekitar Kabupaten Sumedang antara lain Bandara Kertajati; Terminal Tipe A sebanyak 1 titik (lingkaran ungu); Terminal Tipe B sebanyak 2 titik (lingkaran hijau) di Kecamatan Ujung Jaya dan Kecamatan Wado; serta Terminal Tipe C sebanyak 9 titik (lingkaran merah). Untuk jaringan jalan, Kabupaten Sumedang telah dilintasi dengan Jalan Tol Cisumdawu yang memiliki 6 titik akses tol (lingkaran biru) antara lain Jatiningor, Pamulihan, Sumedang, Cimalaka, Paseh, Cisumdawu Jaya. Sedangkan rencana jalur kereta api akan didukung oleh 4 titik stasiun antara lain: Caringin, Pamegeursari, Mekarjaya dan Ujungjaya. Angkutan penyeberangan direncanakan pada satu titik di wilayah Wado (lingkaran kuning). Dari pola yang terbentuk, dapat dilihat bahwa fokus pengembangan sarana dan prasarana transportasi masih terpusat pada bagian tengah wilayah Kabupaten Sumedang dari Jatiningor ke arah Kertajati.

Selanjutnya persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi kurang baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu-lintas berjalan kurang lancar sesuai dengan kecepatan desain dan terdapat adanya hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang kurang baik. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan Tabel 3.3. Pada Tahun 2015 tercatat 239,75 Km, kemudian meningkat menjadi 345,28 Km di Tahun 2016 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 424,70 Km di Tahun 2017. Dengan demikian pada Tahun 2017 hanya terdapat 54% jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sumedang dari total panjang jalan sebesar 774,61 Km.

Tabel 3.3 Indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Total Panjang Jalan (Km)	796,06	796,06	774,61
2	Panjang Jalan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	239,75	345,28	424,70
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	30,12	43,37	54,83

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan

yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2015- 2017 rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2015 tercatat sebesar 7,2 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 7 km/10.000 jiwa Tabel 3.4.

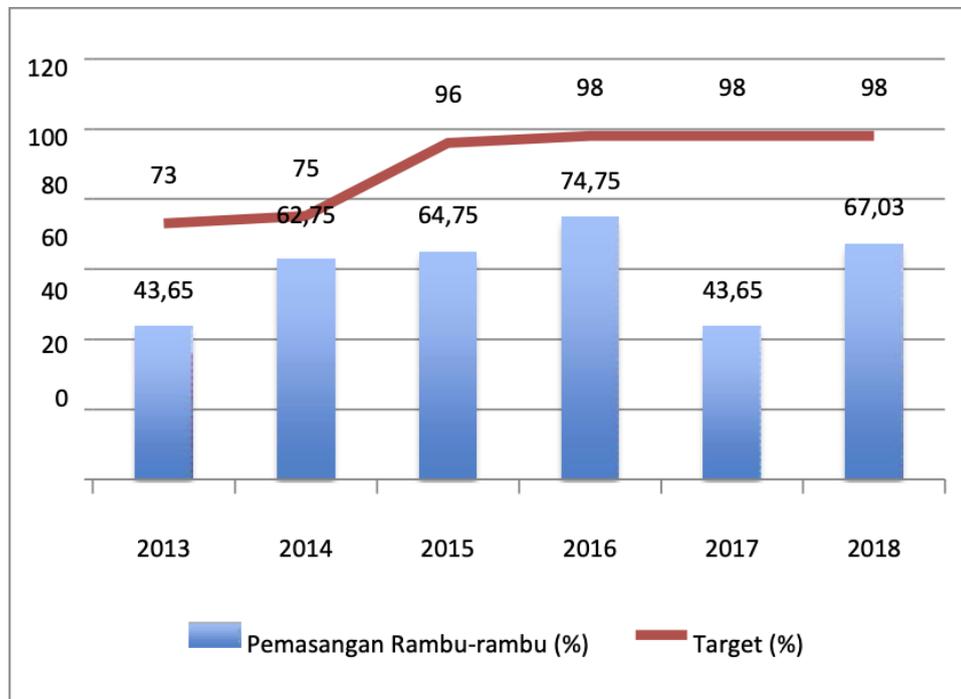
Tabel 3.4 Indikator Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Total Panjang Jalan (Km)	796,06	796,06	774,61
2	Jumlah Penduduk	1.110.841	1.132.459	1.139.564
3	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (Km/jiwa)	0,00072	0,00070	0,00070

Pada periode Tahun 2011-2018 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan. Pada Tahun 2011 tercatat 21.441 penumpang, kemudian meningkat menjadi 47.800 penumpang di Tahun 2018. Sementara itu rasio ijin trayek mengalami tren yang fluktuatif dari semula 23 di Tahun 2013, meningkat menjadi 31,84 di Tahun 2018.

Kemudian indikator jumlah uji KIR angkutan umum secara tren mengalami penurunan, pada Tahun 2011 tercatat 3.497 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian meningkat di Tahun 2013 menjadi 4.288 uji KIR dan di Tahun 2014 sebesar 4.202 uji KIR, pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3.413 serta pada akhir RJPM Tahun 2018 meningkat sebanyak 3,893 uji KIR. Penurunan jumlah uji KIR tersebut dapat bermakna melemahnya pengawasan terhadap ketertiban administrasi kendaraan yang wajib KIR, atau terjadi pengurangan jenis moda transportasi yang wajib KIR. Untuk durasi pelayanan uji KIR selama tiga tahun tidak mengalami perubahan yakni 15 menit per satu kendaraan. Selanjutnya untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, data pada Gambar 3.3 menunjukkan target setiap tahun belum tercapai. Pada Tahun 2017 target sebesar 98% namun realisasi hanya sebesar 43,65% dan pada akhir RJPM Tahun 2018 dari target 100% dengan realisasi 67,03%. Dalam perspektif pembangunan periode Tahun 2019-2023 pemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih tinggi lagi, karena hal ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan dan keamanan serta kenyamanan masyarakat yang dilalui kendaraan yang melintasi pemukiman maupun aktivitas kegiatannya.

Gambar 3.3. Grafik Pemasangan Rambu-rambu (%)

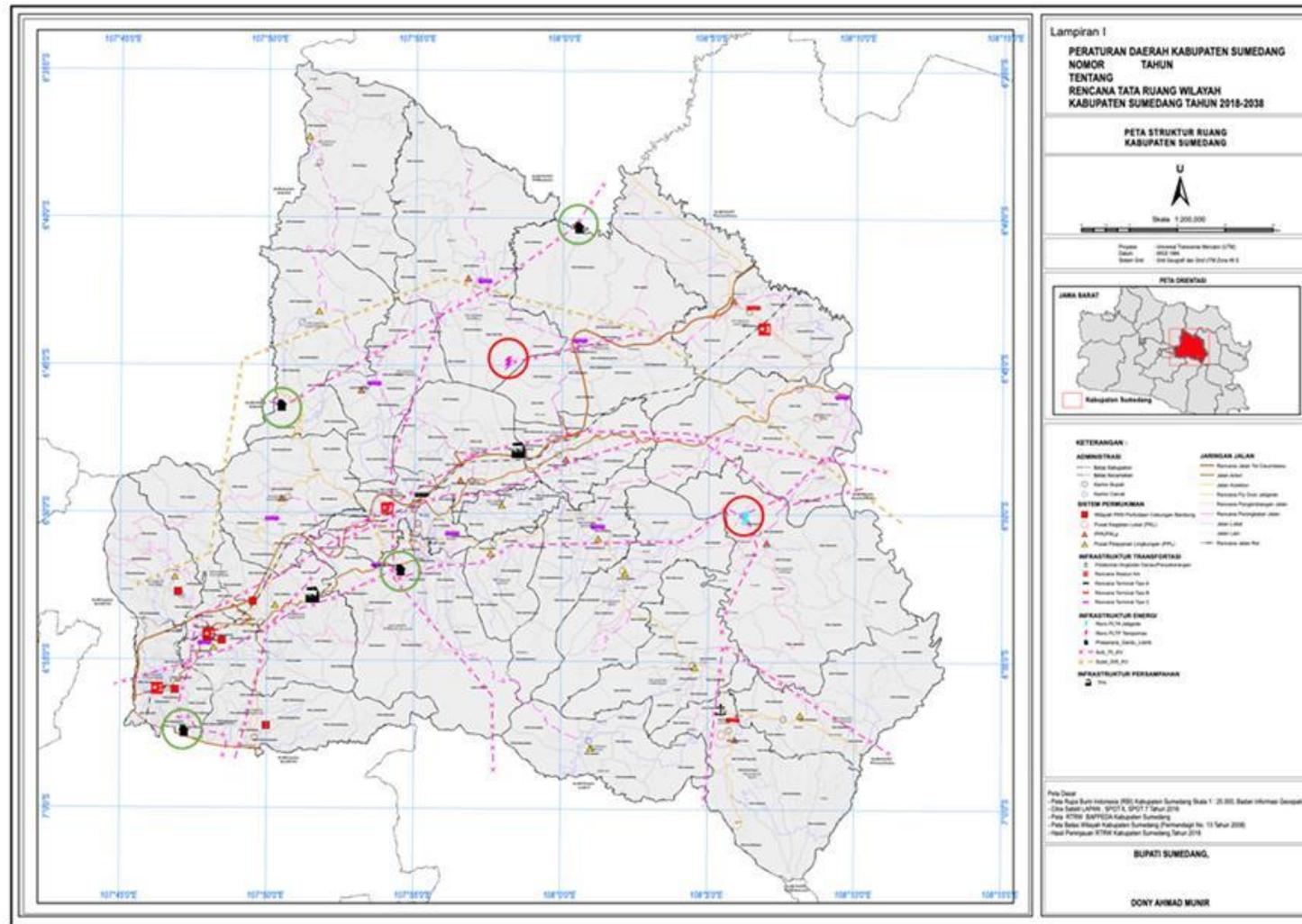


3.1.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan Kabupaten Sumedang

Terkait infrastruktur energi dan kelistrikan Gambar 3.4, wilayah Kabupaten Sumedang direncanakan memiliki dua Pembangkit Listrik yaitu PLTA Jatigede dan PLTP Tampomas. Kedua pembangkit listrik ini akan menyalurkan energi ke empat titik gardu listrik (lingkaran hijau).

Berdasarkan data Survey Potensi Desa Kabupaten Sumedang, pada Tahun 2018 masih terdapat 615 rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian besar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN di Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong.

Gambar 3.4. Rencana Struktur Ruang Kelistrikan Kabupaten Sumedang 2018-2038

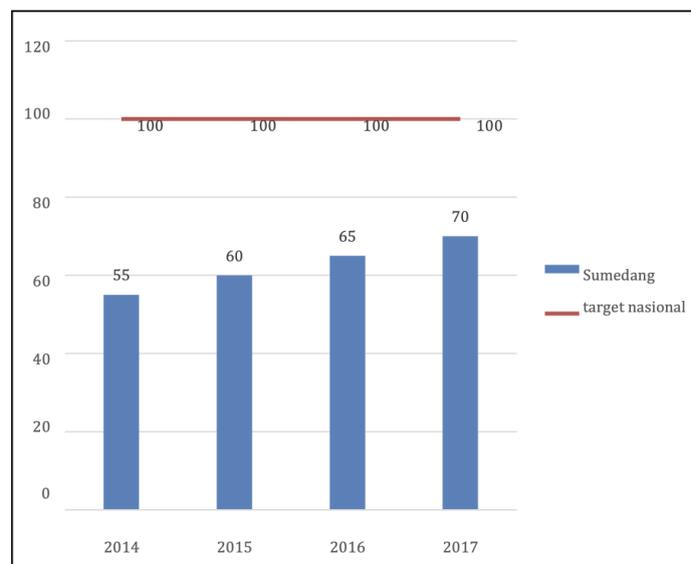


3.1.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku Kabupaten Sumedang

Ketersediaan air baku merupakan syarat mutlak bagi masyarakat untuk nyaman tinggal di suatu wilayah. Visi Sumedang Kota Air merupakan kondisi yang akan diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang agar Sumedang nyaman di tinggali. Gambaran kondisi yang diinginkan adalah Sumedang berkecukupan air sepanjang tahun. Saat ini Sumedang merupakan daerah yang banyak dikelilingi pegunungan (40%) dan merupakan lahan hijau yang masih alami, sehingga mampu menampung resapan air hujan secara tidak langsung yang dapat digunakan untuk air baku memenuhi kebutuhan masyarakat (*ground water harvesting*). Pemanfaatan teknologi dan cara-cara cerdas dapat digunakan untuk mengelola sumber air, termasuk air hujan, dengan baik sehingga ketersediaan air baku masyarakat terpenuhi sepanjang tahun.

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Sumedang cukup sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Berdasarkan grafik di bawah ini Gambar 3.5, rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2017 di Kabupaten Sumedang tercatat 70%. Kondisi tersebut masih jauh di bawah target nasional yakni 100% penduduk berakses air bersih. Namun demikian, perlu dilakukan tinjauan terkini terkait kondisi ketersediaan air bersih dengan identifikasi detail pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan.

Gambar 3.5. Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih



3.1.2.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Pendidikan sebagai salah satu sarana dan media sosial sangat berperan dalam mempengaruhi terbentuknya kondisi sosial masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan pendidikan berkualitas semakin besar. Sebagian masih memperlakukan biaya sekolah, namun tidak sedikit yang tidak memperlakukan biaya sekolah sepanjang sekolahnya berkualitas. Permasalahan lain adalah sebaran sekolah “unggulan” yang tidak merata dan tingkat moralitas anak didik.

Kondisi belajar mengajar yang mampu mewujudkan kondisi sosial yang baik antara lain adanya pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi namun tetap berkarakter Sumedang, penerapan kurikulum pendidikan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang memudahkan masyarakat mengakses pendidikan, termasuk masyarakat yang menyandang disabilitas, serta pengembangan platform edukasi bagi masyarakat.

3.1.2.5 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Salah satu syarat kenyamanan orang tinggal di suatu wilayah adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi penghuninya. Saat ini dan ke depan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang membutuhkan kemudahan akses dan pelayanan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki 3 Rumah Sakit Umum (RSU). Disamping itu banyak rumah sakit swasta dan poliklinik serta dokter, dan bidan praktek. Kondisi yang ingin diwujudkan dengan smart living ini adalah ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang cukup serta layanan yang mudah dan terjangkau. Salah satunya adalah peran asuransi kesehatan dan peran pemerintah daerah untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi semua orang, terutama warga Sumedang.

3.1.3 Kondisi Sosial Demografi Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun kondisi demografi semakin meningkat dan kondisi sosial yang mengalami perubahan. Berikut kondisi sosial demografi Kabupaten Sumedang saat ini:

3.1.3.1 Kondisi Kependudukan Kabupaten Sumedang

Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan Angka Hasil Proyeksi tahun 2023 sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 hasil Sensus Penduduk (SP2020), penduduk Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,81 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan angka fertilitas/kelahiran akan meningkat.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2023 mencapai 756 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 26 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sumedang Utara dengan kepadatan sebesar 3.329 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Surian sebesar 163 jiwa/Km². Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang:

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumedang

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
		2020-2022
(1)	(2)	(3)
Jatinangor	100.108	0,65
Cimanggung	89.838	0,83
Tanjungsari	88.664	1,12
Sukasari	32.958	0,42
Pamulihan	64.475	1,28
Rancakalong	40.477	0,57
Sumedang Selatan	79.928	0,58
Sumedang Utara	101.200	1,03
Ganeas	25.875	0,75
Situraja	42.745	1,19
Cisitu	30.751	1,10
Darmaraja	35.912	0,00
Cibugel	24.589	1,14
Wado	43.831	0,14
Jatinunggal	45.985	0,82
Jatigede	21.930	0,00
Torno	23.016	0,00
Ujungjaya	31.625	0,63
Conggeang	28.274	0,00
Paseh	37.948	0,42
Cimalaka	63.664	0,89

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
		2020-2022
(1)	(2)	(3)
Cisarua	20.620	0,59
Tanjungkerta	33.984	0,11
Tanjungmedar	26.323	0,64
Buahdua	31.930	0,00
Surian	11.585	0,48
Kabupaten Sumedang	1.178.235	0,81

Sumber: Sumedang dalam angka, 2024.

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya, berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui komposisi penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	43.846	41.619	85.465
5-9	42.655	40.933	83.588
10-14	44.447	42.474	86.921
15-19	49.512	46.256	95.768
20-24	50.648	46.748	97.396
25-29	47.579	44.359	91.938
30-34	44.093	42.383	86.476
35-39	40.662	39.717	80.379
40-44	39.998	39.255	79.253
45-49	36.786	37.827	74.613
50-54	35.064	37.047	72.111
55-59	34.213	35.826	70.039
60-64	29.284	30.293	59.577
65-69	23.202	24.223	47.425
70-74	17.006	18.234	35.240
75+	14.820	17.226	32.046
Kabupaten Sumedang	593.815	584.420	1.178.235

Sumber: Sumedang dalam angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur

umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 19 tahun) sebesar 30,87 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 65,13 persen, dan jumlah penduduk lansia (\geq 65 tahun) tergolong kecil yaitu 5,1 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna. Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT).

3.1.3.2 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusia. Secara umum keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Angka IPM Kabupaten Sumedang terus meningkat setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah 74,02. Indeks ini dijelaskan dengan komponen Usia Harapan Hidup (UHH) 75,04 tahun, Harapan Lama sekolah 13,01, Rata-rata lama sekolah adalah 8,73 tahun, serta pengeluaran riil per kapita Rp. 11.136.000.

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2022 berdasarkan komponen

No	Komponen	2019	2020	2021	2022
1.	Usia Harapan Hidup	72.29	72.43	72.62	72.91
2.	Harapan Lama Sekolah	12.96	12.97	12.98	12.99
3.	Rata-rata Lama Sekolah	8.27	8.51	8.52	8.72

No	Komponen	2019	2020	2021	2022
4.	Pengeluaran (000)	10406	10217	10262	10776
5.	IPM	71.46	71.64	71.8	72.69

Sumber: Sumedang dalam angka, 2024

Kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 sudah tergolong baik. Salah satunya terlihat dari kelengkapan sarana pendidikan yang telah tersedia untuk setiap jenjang, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan suatu daerah. HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Berdasarkan perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang mencapai 12,99 tahun 2022. Yang berarti seorang anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Diploma II. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan namun tidak sesuai usianya. APK Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumedang

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5
SD/MI	96,01		107,03	
SMP/MTs	89,17		111,75	
SMA/SMK/MA	44,53		52,97	

Sumber: Sumedang dalam angka, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk bersekolah tepat waktu atau sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolahnya.

Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Sumedang di antaranya adalah 3 rumah sakit umum. Selain itu, terdapat 35 Puskesmas. Juga terdapat 1.646 unit posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Garis kemiskinan di Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah Rp. 396.573. Angka ini meningkat dibandingkan garis kemiskinan tahun sebelumnya, yaitu Rp. 371.870. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Sumedang tahun 2023 adalah sebanyak 111.390 orang atau sebesar 9,36% dari penduduk Kabupaten Sumedang. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 120.120 orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang Meningkat pada Tahun 2022 Mencapai 72,69 poin, dari target 71,9 - 72,4 poin. Peningkatannya mencapai 0,89 poin dari capaian Tahun 2021. Posisi IPM Kabupaten Sumedang menempati posisi 11 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dan menjadi Ke-5 tercepat dilihat dari pertumbuhannya. Tahun 2023 IPM Sumedang tercatat 74,02 poin berada di atas rata-rata IPM Nasional walaupun masih dibawah rata-rata IPM Jawa Barat.

Salah satu komponen penilaian IPM adalah lama Pendidikan. Menurut data BPS, lama rata-rata pendidikan masyarakat Sumedang ada pada angka 8,72 tahun, artinya rata rata masyarakat Sumedang belum menyelesaikan pendidikan ideal 9 tahun (SD – SMP). Hal ini disebabkan diantaranya oleh faktor kurangnya pemahaman & kesadaran masyarakat khususnya orangtua tentang pentingnya pendidikan dasar & menengah untuk kualitas kehidupan kedepannya. Upaya – upaya sosialisasi / penyuluhan dari pemerintah daerah sendiri kepada masyarakat masih sangat minim.

APBD Sumedang 2023 menganggarkan bidang pendidikan pada kategori belanja urusan pemerintahan Sumedang sebesar Rp 951 Milyar. Anggaran pendidikan memiliki proporsi terbesar yaitu 34% dari total APBD yang jumlahnya sebesar Rp 2,7 Triliyun. Meski demikian dari breakdown anggaran diketahui anggaran ini lebih banyak habis untuk operasional pendidikan formal yang sudah berjalan. Perlu optimalisasi dalam menyentuh upaya edukasi masyarakat khususnya orangtua agar memiliki pemahaman & kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak.

Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Bogor	70,60	71,2	73,02
Sukabumi	67,07	67,64	69,71
Cianjur	65,56	65,94	68,18
Bandung	72,73	73,16	74,03
Garut	66,45	67,41	69,22
Tasikmalaya	65,90	66,84	69,38
Ciamis	70,93	71,45	73,12
Kuningan	69,71	70,16	70,99
Cirebon	69,12	70,06	71,81
Majalengka	67,81	68,56	70,76

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Sumedang	71,8	72,69	74,02
Indramayu	67,64	68,55	70,19
Subang	69,13	69,87	71,42
Purwakarta	70,98	71,56	73,43
Karawang	70,94	71,74	73,25
Bekasi	74,45	75,22	76,13
Bandung Barat	68,29	69,04	70,33
Pangandaran	68,28	69,03	70,57
Kota Bogor	76,59	77,17	78,36
Kota Sukabumi	74,6	75,4	77,16
Kota Bandung	81,96	82,5	83,29
Kota Cirebon	75,25	75,89	77,45
Kota Bekasi	81,95	82,46	83,06
Kota Depok	81,37	81,86	82,53
Kota Cimahi	78,06	78,77	79,69
Kota Tasikmalaya	73,31	73,83	75,47
Kota Banjar	71,92	72,55	74,45
Jawa Barat	72,45	73,12	74,24

3.1.3.3 Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Sumedang dari tahun 2010 sampai 2023 banyak mengalami perubahan terutama di daerah bendungan Waduk Jatigede. Wilayah Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 Kecamatan, sedangkan banyaknya desa/kelurahan sebanyak 270 desa dan 7 kelurahan. Berikut jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang:

Tabel 3.4 Jumlah Desa'/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[010] Jatinangor	12	12	12	12	12
[020] Cimanggung	1	11	11	11	11
[030] Tanjungsari	12	12	12	12	12
[031] Sukasari	7	7	7	7	7
[032] Pamulihan	11	11	11	11	11
[040] Rancakalong	10	10	10	10	10
[050] Sumedang Selatan	14	14	14	14	14
[060] Sumedang Utara	13	13	13	13	13
[061] Ganeas	8	8	8	8	8
[070] Situraja	14	14	14	14	14
[071] Cisitu	10	10	10	10	10
[080] Darmaraja	12	12	12	12	12
[090] Cibugel	7	7	7	7	7
[100] Wado	10	10	10	10	10

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[101] Jatinunggal	9	9	9	9	9
[111] Jatigede	11	11	11	11	11
[120] Torno	10	10	10	10	10
[130] Ujungjaya	9	9	9	9	9
[140] Conggeang	12	12	12	12	12
[150] Paseh	10	10	10	10	10
[160] Cimalaka	14	14	14	14	14
[161] Cisarua	7	7	7	7	7
[170] Tanjungkerta	12	12	12	12	12
[171] Tanjungmedar	9	9	9	9	9
[180] Buahdua	14	14	14	14	14
[181] Surian	9	9	9	9	9
Kabupaten Sumedang	277	277	277	277	277

Sumber: Sumedang dalam angka, 2024

Berdasarkan data tabel di atas, Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Situraja, Cimalaka, Situraja dan Buahdua dengan masing-masing terdapat 14 Desa. sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa yang sedikit yaitu kecamatan Sukasari, Cibugel, dan Kecamatan Cisarua dengan jumlah 7 desa.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif tahun 2023, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 51 orang, dengan 42 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi DIV/ SI.

Tabel 3.5 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
PDI Perjuangan	9	3	12
PPP	6		7
GOLKAR	7		7
GERINDRA	5	2	7
PKB	8		8
PKS	4	2	6
PAN		1	4
Kabupaten Sumedang	42	9	51

Sumber: Sumedang dalam angka, 2024

Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari tujuh partai. Partai PDIP memiliki anggota terbanyak, yaitu sebanyak 12 orang, dengan 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Pada tahun 2023 jumlah PNS daerah di Kabupaten Sumedang dengan pendidikan S-1 keatas sebanyak 6.398 orang.

3.1.4 Kondisi Perekonomian Wilayah Kabupaten Sumedang

Kondisi perekonomian Wilayah Kabupaten Sumedang terdiri atas gambaran umum makro ekonomi Kabupaten Sumedang, gambaran umum sektor unggulan Kabupaten Sumedang, dan gambaran investasi Kabupaten Sumedang.

3.1.4.1 Gambaran Umum Makro Ekonomi Wilayah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 mencapai 43.327.148,51 juta rupiah berdasarkan harga tahun berlaku, dan 26.876.861,52 juta rupiah berdasarkan harga konstan tahun 2010. Adapun struktur perekonomian Kabupaten Sumedang dilihat dari proporsi masing-masing sektor perekonomian terhadap total PDRB, dalam kurun waktu 2019-2023 ditunjukkan pada Tabel 4.1 Produk domestik regional bruto (PDRB menurut lapangan usaha (juta rupiah) didominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta pengadaan listrik dan gas.

Tabel 3.6 Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha (juta rupiah)

No	Kategori	PDRB Atas Harga Berlaku			PDRB Atas Harga Konstan		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,826,05	7.477,99	8.143,86	4.054,95	4.266,33	4.387,14
2	Pertambangan dan Penggalian	32,81	33,99	34.06	21,95	2199	21,81
3	Industri Pengolahan	7.493,36	8.185,01	8.441,49	4.873,74	5.207,08	5.257,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	145,30	150,91	154,49	106,09	108,79	111,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	8,66	9,13	10,13	5,93	6,14	6,67
6	Konstruksi	4.143,61	4.507,43	4.740,59	2.745,31	2.846,30	2.931,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.512,76	5.842,52	6.828,20	3.932,68	2.055,90	4.460,92
8	Transportasi dan Pergudangan	1.679,21	1.914,77	2.271,13	989,99	1.100,39	1.224,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	1.648,99	1.960,21	2.189,87	1.054,16	1.212,90	1.332,22
10	Informasi dan Komunikasi	1.434,21	1.499,79	1.583,48	1.494,33	1.580,30	1.679,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.685,45	1.766,79	1.845,10	984,09	972,27	1.007,94
12	Real Estat	590,58	629,66	679,44	480,93	505,58	539,43
13	Jasa Perusahaan	28,76	33,38	40,12	18,87	21,16	24,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.185,90	2.138,79	2.198,23	1.201,81	1.179,70	1.216,15
15	Jasa Pendidikan	2.561,50	2.619,11	2.774,35	1.609,90	1.611,77	1.692,54

No	Kategori	PDRB Atas Harga Berlaku			PDRB Atas Harga Konstan		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	458,3	480,66	514,8	346,48	362,02	382,49
17	Jasa Lainnya	626,33	775,87	877,82	447,5	536,4	601,01
	Produk Domestik Regional Bruto	37.061,77	40.035,01	43.327,15	24.368,73	25.595,02	26.876,86

Sumber : Kab Sumedang dalam Angka, 2024

Secara umum, pertumbuhan ekonomi secara umum yang ditunjukkan dengan PDRB Kabupaten Sumedang mengalami tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, perekonomian Kabupaten Sumedang terus membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, PDRB Kabupaten Sumedang tercatat sebesar Rp. 23,92 triliun. Sektor terbesar yang berkontribusi adalah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2019 mencapai 5,12%. Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Sumedang mengalami penurunan menjadi Rp. 23,67 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2020 tercatat negatif 2,53%. Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Sumedang mulai membaik dan meningkat menjadi Rp. 24,37 triliun. Pemulihan terjadi seiring dengan upaya-upaya penanganan pandemi dan stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2021 mencapai 4,60%. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Sumedang kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 25,60 triliun.

Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2022 mencapai 5,00%. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Sumedang terus meningkat mencapai Rp. 26,88 triliun. Didorong oleh semakin pulihnya berbagai sektor ekonomi, khususnya industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada 2023 mencapai 5,40%. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023, sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan 5,03%.

Tabel 3.7 Laju pertumbuhan PDRB Kab Sumedang menurut lapangan usaha

No	Kategori	PDRB Atas Harga Berlaku			PDRB Atas Harga Konstan		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,42	18,68	18,80	-1,18	5,21	2,83
2	Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,08	0,08	10,81	0,17	-0,84
3	Industri Pengolahan	20,22	20,45	19,48	2,47	6,84	0,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,39	0,38	0,36	8,47	2,55	2,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	4,08	3,57	8,7
6	Konstruksi	11,18	11,26	10,94	13,07	3,68	2,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,87	14,60	15,76	3,99	3,13	9,99
8	Transportasi dan Pergudangan	4,53	4,78	5,24	-4,23	11,15	11,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	4,45	4,90	5,05	2,08	15,06	9,84
10	Informasi dan Komunikasi	3,87	3,75	3,65	4,78	5,75	6,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,55	4,41	4,26	3,77	-1,2	3,67
12	Real Estat	1,59	1,57	1,57	7,55	5,12	6,69
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,09	0,01	12,09	16,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,90	5,34	5,07	0,53	-1,84	3,09
15	Jasa Pendidikan	6,91	6,54	6,40	0,67	0,12	5,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,24	1,2	1,19	7,14	4,49	5,65
17	Jasa Lainnya	1,69	1,94	2,03	0	19,87	12,05
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	2,97	5,03	5,01

Sumber : Kab Sumedang dalam Angka, 2024

Meskipun pada tahun 2020, sub sektor jasa perusahaan mengalami penurunan yang paling besar sebagai dampak adanya wabah pandemic covid 19. Adapun sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2020, yaitu mencapai 34 persen sebagai konsekuensi adanya pembatasan mobilitas sosial terkait dengan pandemic covid 19. Secara umum, sub sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu 2018-2019 meskipun dengan kontribusi PDRB yang masih relatif kecil.

3.1.4.2 Gambaran Umum Sektor Unggulan Kabupaten Sumedang

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan Industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya

pengembangan Industri strategis. Pembiayaan diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan, serta ditunjang oleh pembiayaan dari APBN dan APBD. Terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor Industri, antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan dan ketersediaan jaminan yang dimiliki oleh IKM karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek.

Mengetahui sektor ekonomi unggulan atau basis sangat diperlukan agar kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tepat sasaran. Pengertian sektor basis adalah sektor yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dan juga mampu mengekspor output-nya untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Penentuan sektor basis pada penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Nilai yang dihasilkan menunjukkan apakah sektor tersebut merupakan sektor basis atau tidak. Nilai LQ berkisar dari nol sampai dengan positif tak terhingga. Nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut diklasifikasikan sebagai sektor non basis, sedangkan nilai LQ lebih dari satu ($LQ > 1$) menunjukkan sektor tersebut diklasifikasikan sebagai sektor basis.

Tabel 3.8 Analisis LQ Kabupaten Sumedang berdasarkan PDRB Atas Harga Dasar Konstan Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata	Sektor Basis	Tingkat Spesialisasi	Tingkat Pelayanan
		2017	2018	2019	2020	2021				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,477	2,421	2,377	2,355	2,331	2,386	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
2	Pertambangan dan Penggalian	0,046	0,049	0,049	0,051	0,055	0,050	Sektor Non Basis dan Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
3	Industri Pengolahan	0,419	0,434	0,469	0,477	0,470	0,454	Sektor Non Basis dan Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26,801	26,444	26,491	26,135	25,695	26,313	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,065	0,065	0,067	0,070	0,068	0,067	Sektor Non Basis dan Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
6	Konstruksi	1,296	1,305	1,247	1,252	1,333	1,287	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,136	1,135	1,097	1,083	1,104	1,111	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
8	Transportasi dan Pergudangan	1,021	0,983	0,970	0,932	0,899	0,961	Sektor Non Basis dan Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,701	1,686	1,646	1,641	1,677	1,670	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
10	Informasi dan Komunikasi	1,134	1,146	1,132	1,023	1,004	1,088	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,604	1,599	1,648	1,578	1,597	1,597	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar

12	Real Estate	1,567	1,559	1,519	1,393	1,348	1,477	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
13	M,N. Jasa Perusahaan	0,188	0,188	0,184	0,207	0,200	0,194	Sektor Non Basis dan Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,739	2,727	2,654	2,748	2,835	2,741	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
15	Jasa Pendidikan	2,306	2,296	2,289	2,183	2,208	2,256	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,635	1,625	1,568	1,686	1,732	1,649	Sektor Basis dan Unggulan	Terspesialisasi	Ekspor, mampu melayani Pasar
17	Jasa Lainnya	0,909	0,901	0,879	0,858	0,863	0,882	Sektor Non Basis dan Unggulan	Tidak Terspesialisasi	Non ekspor, belum mampu melayani pasar

Berdasarkan hasil analisis LQ yang dilakukan, bahwa Kabupaten Sumedang dalam periode 2017-2021 sektor ekonominya terbagi menjadi dua yaitu sektor basis atau sektor unggulan dan sektor non basis atau non unggulan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial termasuk sektor basis ($LQ > 1$).

Sedangkan Sektor pertambangan, dan penggalian, industri pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya merupakan sektor yang non basis atau non unggulan ($LQ < 1$) atau sektor yang belum mampu melayani pasar dan belum bisa melakukan proses impor. Walaupun merupakan sektor non basis dan hanya mampu melayani kebutuhan dalam perekonomian daerah (lokal), bukan berarti tidak dapat dikembangkan namun sektor ini harus dipacu untuk dapat lebih berkembang sehingga dapat menjadi sektor basis

Metode *Analisis Shift Share (SSA)* juga digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam kaitannya dengan perekonomian acuan, yaitu wilayah yang lebih luas. Konsep analisis shift share untuk memperbaiki konsep LQ, konsep Indeks Spesialisasi dan konsep Indeks Lokasi. Analisis shift share berfungsi untuk mengetahui perkembangan wilayah terhadap wilayah yang lebih luas misal perkembangan kabupaten terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Dengan *shift share* dapat diketahui perkembangan dan potensi sektor-sektor dibanding sektor lainnya serta dapat membandingkan laju perekonomian disuatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis shift share yang dilakukan, bahwa Kabupaten Sumedang dalam periode 2017-2021 sektor ekonominya terbagi menjadi dua yaitu sektor yang tumbuh progresif (maju) dan kemunduran. Sektor industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial termasuk sektor maju/progresif ($PB > 0$). Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor pertambangan, dan penggalian, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib, dan jasa lainnya termasuk sektor yang mengalami kemunduran ($PB < 0$). SSA digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif subsektor suatu wilayah berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Koefisien SSA dibagi menjadi 3: regional share, proportional shift, dan differential shift (DS). Koefisien yang terakhir dipakai untuk menentukan unggul atau tidaknya suatu subsektor, ditentukan dari nilai DS lebih besar dari 0. Baik LQ maupun SSA adalah nilai yang dibangun berdasarkan perbandingan relative dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jawa Barat.

3.1.4.3 Gambaran Investasi Kabupaten Sumedang

Iklm investasi di Sumedang terus diciptakan kondusif oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa hal yang dilakukan, di antaranya:

- Sumedang Investment Summit (SIS) yang memberikan arahan dan wawasan tentang iklim investasi di Sumedang
- Meminta pelaku usaha untuk melaporkan investasi secara periodik

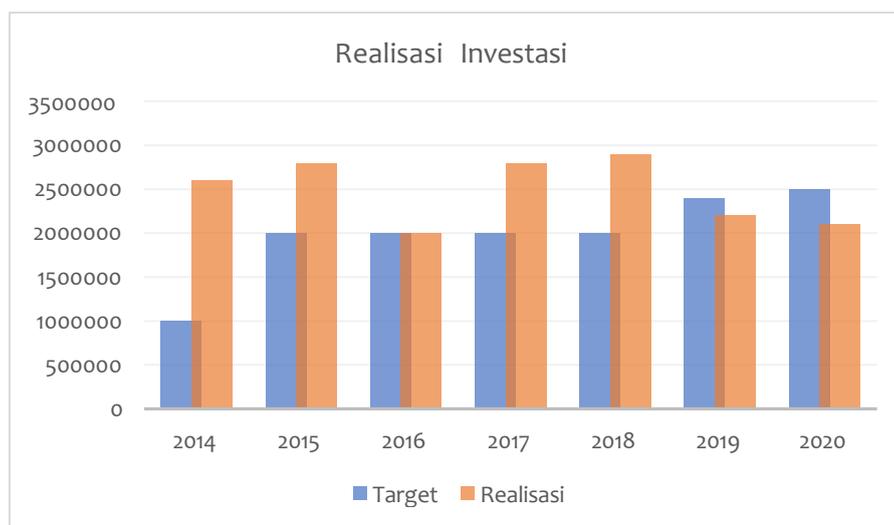
Iklm investasi didefinisikan sebagai kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Pada triwulan I tahun 2023, realisasi investasi di Sumedang mencapai Rp 1,8 triliun.

Pada tahun 2020 terjadi perlambatan perekonomian di Jawa Barat yang disebabkan oleh penurunan realisasi total investasi, terutama disebabkan oleh kontraksi pada penanaman modal asing (PMA). Investor asing mengambil langkah menahan, bahkan menunda investasi ditengah situasi ketidakpastian global pada masa pandemi COVID-19. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat justru tumbuh meningkat sebesar 209,51%. Meskipun demikian persentase realisasi PMDN di Kabupaten Sumedang pada Triwulan I Tahun 2020 termasuk tiga terbesar di Jawa Barat yaitu sebesar 6,30%. Pembangunan Tol Cisumdawu memicu tingginya PMDN di Kabupaten Sumedang. Sepanjang Tahun 2021, investasi di Kabupaten Sumedang menembus Rp 4,2 triliun. Angka tersebut melewati target Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebesar Rp1,6 triliun atau terealisasi 266 % dari IKU. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2020 naik 380% yang jumlahnya Rp1,1 triliun. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2021 yang dirilis DPMTSP Kabupaten Sumedang, capaian investasi sebesar

Rp 4,2 triliun tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 4,1 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 79,6 miliar. Dari angka tersebut, Sektor Tersier mendominasi yakni sebesar Rp 4,1 triliun atau 95,5 % dari total investasi. Sedangkan Sektor Primer hanya Rp 6,19 miliar lebih atau 0,15 % dan Sektor Sekunder Rp141,17 miliar lebih atau 3,32 %

Membuat iklim investasi lebih baik adalah salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Sumedang. Semua kebijakan, institusi, dan lingkungan yang berkaitan dengan investasi mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko investasi dikenal sebagai iklim investasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan berbagai faktor yang terkait dengan lokasi tertentu yang memberikan pemilik modal kesempatan dan insentif untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif dan berkembang. Dengan kata lain, iklim usaha atau investasi yang menguntungkan adalah ketika seseorang dapat melakukan investasi dengan biaya dan risiko yang serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang sangat dibantu oleh investasi atau penanaman modal dalam pembangunan. Karena kemampuan negara berkembang untuk menyediakan modal yang relatif rendah, investasi sangat dibutuhkan oleh negara sedang berkembang. Di sisi lain, mempercepat pembangunan ekonomi membutuhkan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lebih banyak dana untuk pembangunan, berbagai upaya untuk menarik investasi harus dilakukan.

Gambar 3.6. Realisasi Investasi di Kabupaten Sumedang



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana. Percepatan pembangunan Kawasan Rebana meliputi:

- a) Kabupaten Subang;
- b) Kabupaten Sumedang;
- c) Kabupaten Indramayu;
- d) Kabupaten Majalengka;
- e) Kabupaten Cirebon;
- f) Kota Cirebon; dan
- g) Kabupaten Kuningan

UMKM dan Perdagangan

Saat ini terdapat sekitar 12.672 unit usaha yang berada di Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 17 pasar, 145 toko, 510 kios dan 12.000 warung. Pasar/market yaitu 9 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 6 yang dikelola oleh desa. Toko/store yaitu supermarket, minimarket dan mall. Kios yaitu usaha yang menjual keperluan sehari-hari dengan skala menengah. Warung yaitu usaha yang menjual keperluan sehari-hari.

Kawasan peruntukan industri besar meliputi luas kurang lebih 3.007 Ha meliputi optimalisasi Kawasan industri Cimanggung/Rancaekek dengan luas kurang lebih 343 Ha meliputi: Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung. Pengembangan Kawasan Industri Ujungjaya dengan luas kurang lebih 1517 Ha meliputi kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo serta pengembangan Kawasan Industry Buahdua dengan luasan kurang lebih 1.147 Ha di Kecamatan Buahdua.

Secara khusus jika dilihat secara makro pertumbuhan ekonomi pada sektor Industri (Industri pengolahan) selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019-2023 terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 sektor industri mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi sebesar 13,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 sektor ini mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar -1,44 persen. Serta pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 2,26 persen. Berdasarkan hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa sektor Industri merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang

cukup besar bagi struktur ekonomi Kabupaten Sumedang, maka dalam rangka mengembangkan Industri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Sektor Industri yang ada di Kabupaten Sumedang termasuk kedalam tipologi III atau sektor non-basis atau non unggulan tetapi pertumbuhannya cepat. Sektor ini layak untuk dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Tipologi III merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan perkapita yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Pelaku usaha industri di Kabupaten Sumedang sebagian besar belum mendaftarkan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian. Jumlah pelaku usaha industri yang ada di Kabupaten Sumedang tahun 2023 yang telah terdaftar di aplikasi SIINas adalah 161 perusahaan, dengan kategori skala usaha besar 62, skala usaha menengah 8, skala usaha kecil 51 dan 40 sisanya belum melaporkan secara rinci sehingga belum dikelompokkan kedalam kategori-kategori tersebut.

Dalam rangka penataan Kawasan ke depan, saat ini Kabupaten Sumedang telah memiliki Peraturan Daerah Kab Sumedang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) per Mei 2024, usaha mikro di Sumedang menempati urutan pertama dengan jumlah 44.542 atau 89,21 persen, disusul usaha kecil 3.445 (6,89 persen), usaha besar 960 (1,92 persen) dan usaha menengah 647 (1,30 persen). Usaha ini didominasi oleh bidang usaha kerajinan dan pengolahan dari kayu, pengolahan pangan dan makanan serta tembakau.

Sektor perdagangan memiliki kontribusi terhadap PDRB Kab Sumedang cukup besar. Jika dilihat dari jumlah sarana perdagangan yang terdapat di Kab Sumedang hingga tahun 2023 terdapat 108 unit sarana perdagangan yang didominasi oleh sarana perdagangan modern, khususnya jenis minimarket yang mencapai 79 unit dan jenis swalayan sebanyak 3 unit. Sementara sarana perdagangan tradisional (pasar tradisional) berjumlah 26 unit yang sebagian besarnya dikelola oleh pemerintah. Adapun dari sisi lokasi, Kecamatan

Jatinangor memiliki jumlah sarana pasar modern paling besar dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya.

Rasio usaha mikro, kecil dan menengah di Sumedang didominasi oleh usaha mikro. Berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) per Mei 2024, usaha mikro di Sumedang menempati urutan pertama dengan jumlah 44.542 atau 89,21 persen. Disusul usaha kecil 3.445 (6,89 persen), usaha besar 960 (1,92 persen) dan usaha menengah 647 (1,30 persen). Saat ini dilakukan program Pendampingan UMKM Naik Kelas oleh pemda Kab. Sumedang untuk meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan melibatkan 20 orang pendamping dari Pemda. Satu orang pendamping akan membina 17 pelaku UMKM. Program ini melibatkan kurang lebih 340 pelaku UMKM.

Kabupaten Sumedang memiliki ratusan jenis Industri yang digeluti dan dieksploitasi oleh masyarakat setempat maupun para pengusaha besar tingkat nasional maupun internasional termasuk pengusaha asing/luar negeri. Secara garis besar Industri yang berkembang dalam skala kecil dan menengah selain memerlukan perhatian dan fasilitas dari pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, juga merupakan Industri yang terbukti mampu bertahan ditengah badai krisis. Beberapa Industri kecil dan menengah tersebut saat ini sedang dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, baik aspek penataan tempat, lokasi dan sentra maupun penataan kemungkinan untuk dikembangkan sebagai Industri yang memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian daerah khususnya Kabupaten Sumedang.

Beberapa sentra Industri tersebut seperti telah disebutkan diatas meliputi:

- 1) Sentra IKM Opak;
- 2) Sentra IKM Oncom;
- 3) Sentra IKM Emping; 4. Sentra IKM Sale;
- 4) Sentra IKM Mebel Kayu;
- 5) Sentra IKM Anyaman Bongsang;
- 6) Sentra IKM Kerupuk;
- 7) Sentra IKM Konveksi;
- 8) Sentra IKM Gelasan;
- 9) Sentra IKM Kerajinan Wayang Golek;
- 10) Sentra IKM Senapan Angin;
- 11) Sentra IKM Tahu;

- 12) Sentra IKM Tempe;
- 13) Sentra IKM Manisan;
- 14) Sentra IKM Kusen;
- 15) Sentra IKM Ukiran Kayu;
- 16) Sentra IKM Sandang dan Kulit; dan
- 17) Sentra IKM lainnya.

Tabel 3.14 UMKM di Kabupaten Sumedang

No	Bidang	Sektor Industri	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Kecamatan
1	Industri Kerajinan dan Pengolahan dari Kayu	Ukuran Kayu	15	139	Jatinangor
2		Wayang	9	49	Pamulihan
3		Alat Musik	1	1	Jatinangor
4		Anyaman Bambu	2	94	Cisitu, Cimalaka
5		Kerajinan kerey bambu	14	385	Cisitu
6		Sangkar Burung	1	5	Cibugel
7		Angklung	3	3	Sukasari
8		Kerajinan Bambu, Hiasan, Dekorasi, Pajangan	1	0	Cimanggung
9		Mebeul	243	1.642	Paseh, Conggeang
10	Industri Pengolahan Pangan/ Makanan	Tempe	108	3.115	Sumedang Utara
11		Tahu	281	1.030	Sumedang Utara
12		Opak Ketan	274	1.024	Buahdua
13		Oncom	33	102	Paseh
14		Sale Pisang	78	382	Rancakalong
15		Kerupuk	48	225	Sumedang Utara
16		Kerupuk Seblak	9	21	Tanjungkerta
17		Kerupuk Tahu	1	5	Sumedang Utara
18		Kerupuk Usus	2	4	Sumedang Selatan
19		Kerupuk terasi	2	7	Sumedang Selatan, Ganeas
20		Kerupuk sangray	1	3	Jatinangor
21		Kerupuk singkong	4	15	Sukasari
22		Kerupuk susu	2	5	Cisitu, Tanjungsari
23		Kerupuk makaroni pedas	1	2	Tanjungsari
24		Kerupuk sorodot	1	2	Cisarua
25		Kerupuk Gucci	1	3	Cisarua
26		Keripik singkong	10	105	Sumedang Selatan
27		Cireng Kering	4	33	Sumedang Selatan
28		Rangginang	3	11	Tanjungkerta
29		Seblak	7	91	Tanjungkerta
30		Ubi Cilembu	2	13	Pamulihan
31		Makaroni	1	2	Buahdua
32		Emping Singkong	1	8	Paseh
33		Emping Melinjo	26	127	Conggeang
34		Yoghurt	1	1	Cimalaka
35		Kopi	51	8	Rancakalong
36		The	2	0	Sumedang selatan, Cimalaka
37		Bandrek	1	0	Ujungjaya
38		Honje	2	0	Sumedang Selatan
39		Permen Jahe	1	0	Cimanggung
40		Simping	1	0	Sumedang Selatan
41		Kue Jahe	1	0	Sumedang Utara
42		Industri Tekstil, Sandang, Kulit, Alat Kaki dan Aneka	Konveksi	12	0
43	Penjahit Pakaian		4	5	Tanjungkerta
44	Industri Elektronika dan pembangkit Energi	Senapan Angin	80	269	Jatinangor
45	Industri Tembakau	Tembakau	716	811	Pamulihan, Rancakalong
46		Tembakau Iris	84	278	Jatinunggal, Paseh
47		Tembakau Mole	67	282	Situraja
48		Tembakau Rajang	111	111	Waso
49		Tembakau Iris dan Mole	1	1	Darmaraja
50		Mole, Kertas Pahlir	3	5	Darmaraja

3.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH MIKRO

3.2.1 Kondisi Fisik Wilayah Kecamatan Buahdua

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Buahdua meliputi beberapa aspek. Aspek tersebut diantaranya kondisi letak geografis, kondisi topografi, kondisi klimatologi, dan kondisi penggunaan lahan.

3.2.1.1 Kondisi Letak Geografis Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua terletak di bagian timur Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan ini berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjungkerta.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Surian.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Conggeang.

Secara geografis, Kecamatan Buahdua berada di dataran tinggi dengan topografi yang bervariasi, terdiri dari perbukitan hingga lembah-lembah. Ketinggian wilayah Kecamatan Buahdua berkisar antara 400 hingga 800 meter di atas permukaan laut, yang memberikan karakteristik cuaca dan kondisi lahan yang khas untuk pertanian dan perkebunan.

Tabel 3.15 Luas Daerah Menurut Desa/ kelurahan di Kecamatan Buahdua

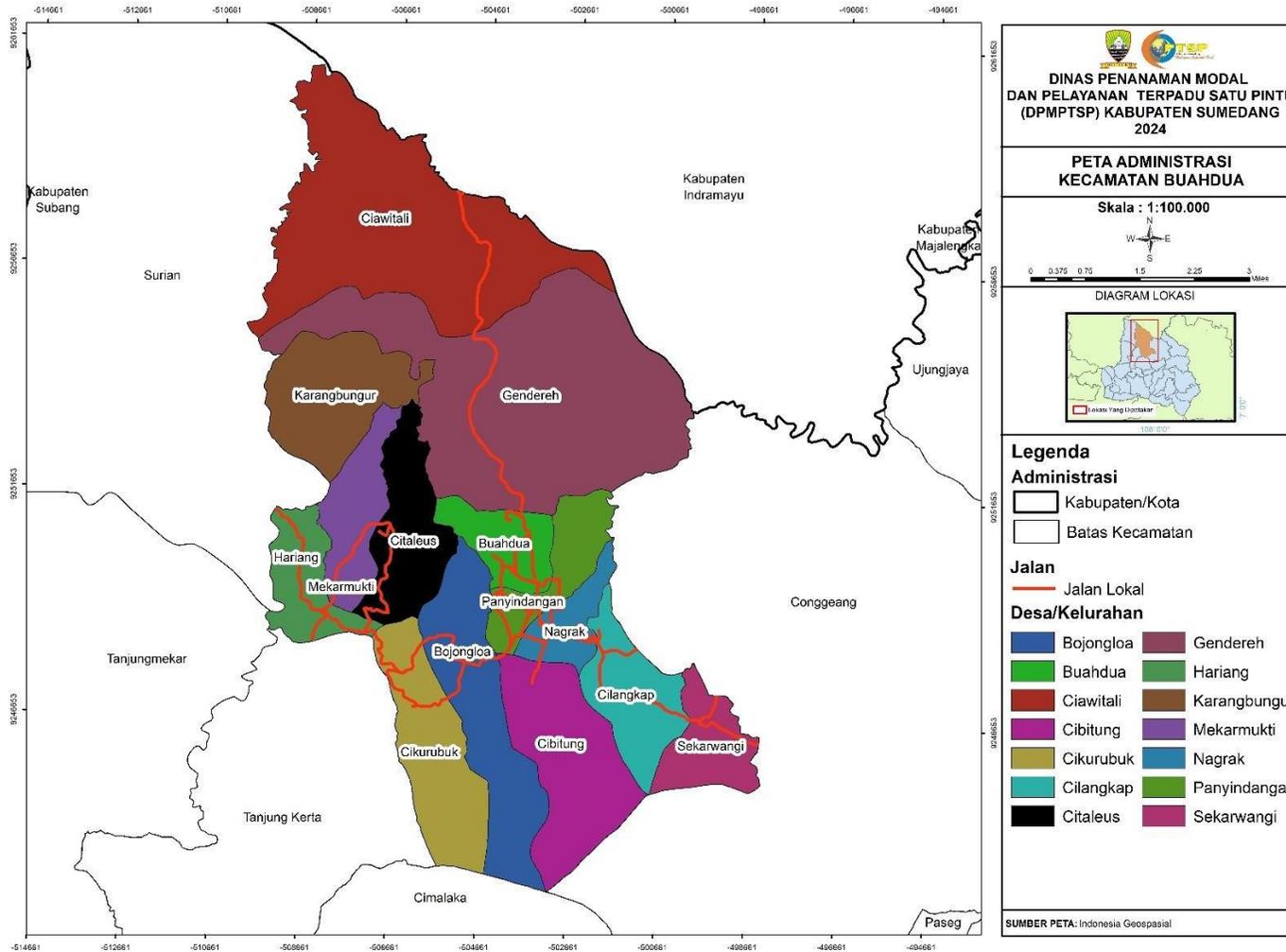
No	Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1	Sekarwangi	3,3	2,98
2	Cilangkap	4,86	4,39
3	Cibitung	8,45	7,63
4	Cikurubuk	6,81	6,15
5	Bojongloa	8,62	7,78
6	Nagrak	2,47	2,23
7	Panyindangan	3,66	3,30
8	Buahdua	3,13	2,82
9	Gendereh	29,74	26,84
10	Citaleus	5,49	4,95

No	Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
11	Mekarmukti	7,26	6,55
12	Hariang	3,85	3,47
13	Karangbungur	6,97	6,29
14	Ciawitali	16,19	14,61

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka Tahun 2023

PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

Gambar 3.7. Peta Administrasi Kecamatan Buahdua



3.2.1.2 Kondisi Klimatologi Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua memiliki iklim tropis, dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, seperti kebanyakan wilayah di Indonesia. Curah hujan di wilayah ini tergolong tinggi, terutama pada bulan-bulan Oktober hingga April, dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun.

Suhu udara di Kecamatan Buahdua cenderung sejuk karena berada di dataran tinggi. Rata-rata suhu harian berkisar antara 20°C hingga 28°C. Kelembapan udara relatif tinggi, terutama selama musim hujan, yang mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan dan pertanian di wilayah ini. Kondisi ini menjadikan Buahdua sebagai daerah yang subur untuk berbagai komoditas pertanian, seperti padi, jagung, dan sayuran.

Tabel 3.16 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kecamatan Buahdua

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	234	-
2	Februari	180	7
3	Maret	200	6
4	April	223	9
5	Mei	137	13
6	Juni	101	8
7	Juli	125	5
8	Agustus	55	1
9	September	118	4
10	Oktober	212	11
11	November	-	-
12	Desember	467	21

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka Tahun 2023

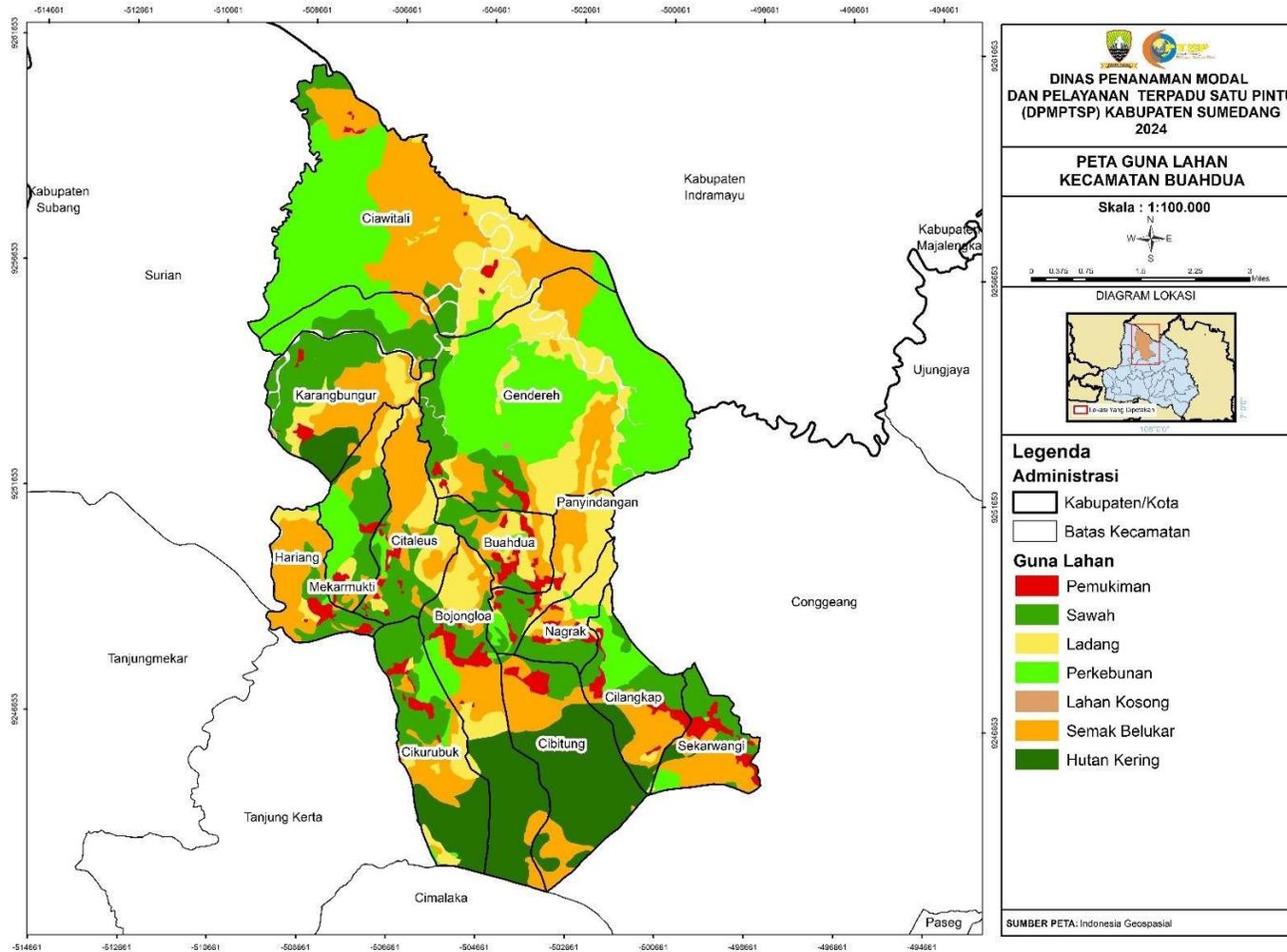
3.2.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan Kecamatan Buahdua

Penggunaan lahan di Kecamatan Buahdua didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah ini dikenal dengan kesuburan tanahnya yang cocok untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Berikut adalah rincian penggunaan lahan di Kecamatan Buahdua:

- **Lahan pertanian:** Sebagian besar lahan di Buahdua digunakan untuk pertanian tanaman pangan, terutama padi sawah, yang memanfaatkan sistem irigasi dari sungai-sungai di sekitar wilayah tersebut. Selain padi, jagung dan palawija juga merupakan komoditas penting.
- **Lahan perkebunan:** Selain tanaman pangan, Buahdua juga memiliki area perkebunan yang luas, terutama untuk tanaman seperti teh, kopi, dan cengkeh. Kebun teh di Buahdua menjadi salah satu sektor unggulan dengan hasil produksi yang signifikan.
- **Lahan hutan:** Sebagian kecil wilayah Buahdua merupakan kawasan hutan lindung, yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber air bagi daerah sekitar.
- **Permukiman:** Wilayah permukiman di Buahdua tersebar di dataran rendah dan dekat dengan pusat kecamatan. Pemukiman umumnya berada di lembah-lembah dan di sepanjang jalan utama yang menghubungkan antar desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Buahdua memiliki potensi besar dalam sektor agrikultur, baik untuk tanaman pangan maupun perkebunan, dengan dukungan kondisi geografis dan klimatologi yang ideal. Keberadaan lahan subur dan curah hujan yang memadai menjadi faktor utama dalam menopang perekonomian wilayah ini.

Gambar 3.8. Peta Guna Lahan Kecamatan Buahdua



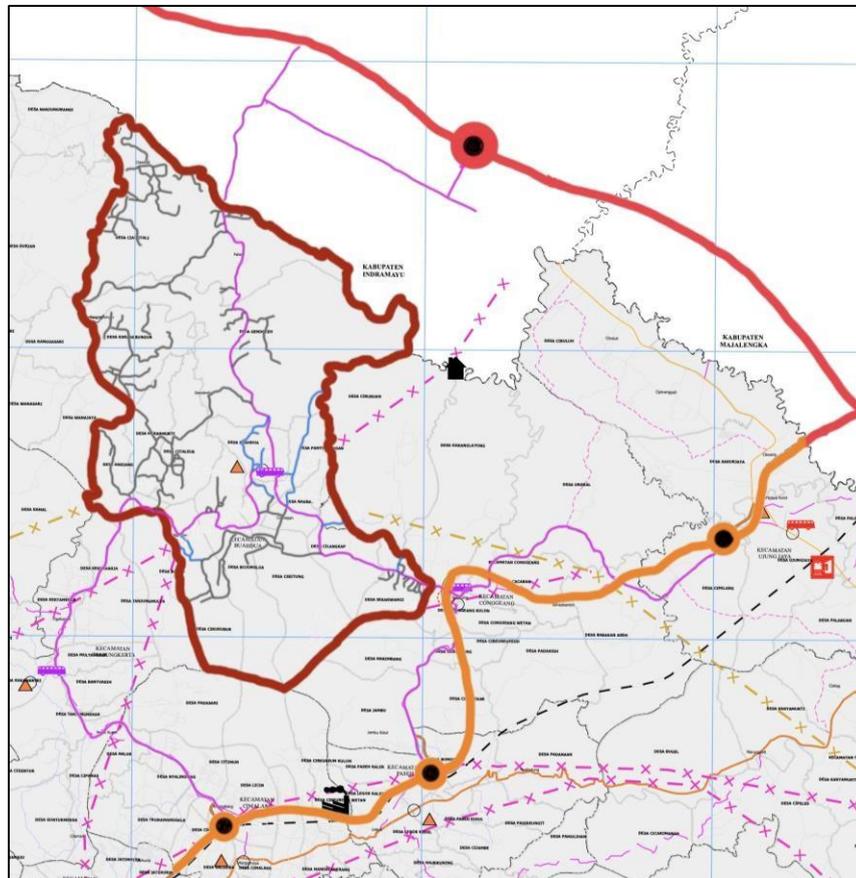
3.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua, yang terletak di Kabupaten Sumedang, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Namun, keberhasilan pembangunan di kecamatan ini sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kondisi infrastruktur di Kecamatan Buahdua, mencakup aspek jalan, transportasi, jaringan air bersih, serta fasilitas publik lainnya. Dengan memahami kondisi terkini infrastruktur, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat, serta mendukung potensi pembangunan wilayah secara optimal.

3.2.2.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kecamatan Buahdua

Sarana dan Prasarana transportasi pendukung akses Kecamatan Buahdua dapat dilihat pada Gambar 5. Keberadaan Jalan Tol Cisumdawu dan Cipali memberikan keuntungan utama terkait akses dari dan ke Kecamatan Buahdua.

Gambar 3.9. Infrastruktur Transportasi Kecamatan Buahdua



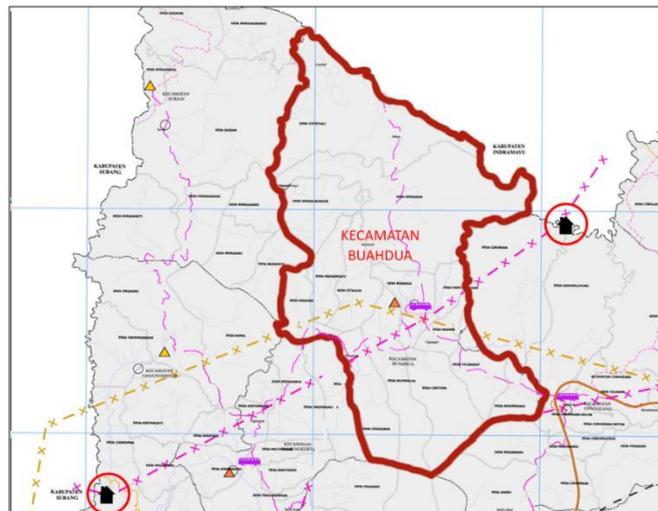
Dapat dilihat setidaknya terdapat empat Gerbang Tol yang mengelilingi Kecamatan Buahdua yang juga secara otomatis mendukung akses dari dan ke Bandara Kertajati. Untuk transportasi umum, Angkutan Umum Perkotaan dapat menjadi andalan dengan dua terminal berada disekitar Kecamatan Buahdua dan satu terminal berada didalam wilayah Kecamatan Buahdua. Terkait stasiun kereta api, saat ini masih belum terlihat potensinya mengingat belum ada infrastruktur eksisting serta rencana stasiun yang paling dekatpun dinilai belum cukup strategis mendukung akses ke Kecamatan Buahdua.

Terkait sistem jaringan jalan, didalam wilayah Kecamatan Buahdua telah tersedia akses jalan utama dari tiga penjuru yaitu di utara kearah Kabupaten Indramayu, tenggara kearah Kecamatan Conggeang dan barat daya kearah Kecamatan Tanjungkerta. Jalan lokal relatif pendek (warna biru) dan masih didominasi oleh jalan warga (warna abu-abu). Namun demikian, potensi pengembangan akses jalan di Kecamatan Buahdua dinilai cukup baik dan akan dilakukan peninjauan detail kondisi jalan untuk memberikan penilaian yang lebih relevan dan detail.

3.2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kelistrikan Kecamatan Buahdua

Terkait kelistrikan, Kecamatan Buahdua dilewati oleh lintasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV serta berada relatif dekat dengan Prasarana Gardu Listrik. Dengan demikian, diperlukan pendataan lebih detail mengenai tingkat ketersediaan dan persebaran penggunaan listrik di Kecamatan Buahdua.

Gambar 3.10. Infrastruktur Kelistrikan Kecamatan Buahdua

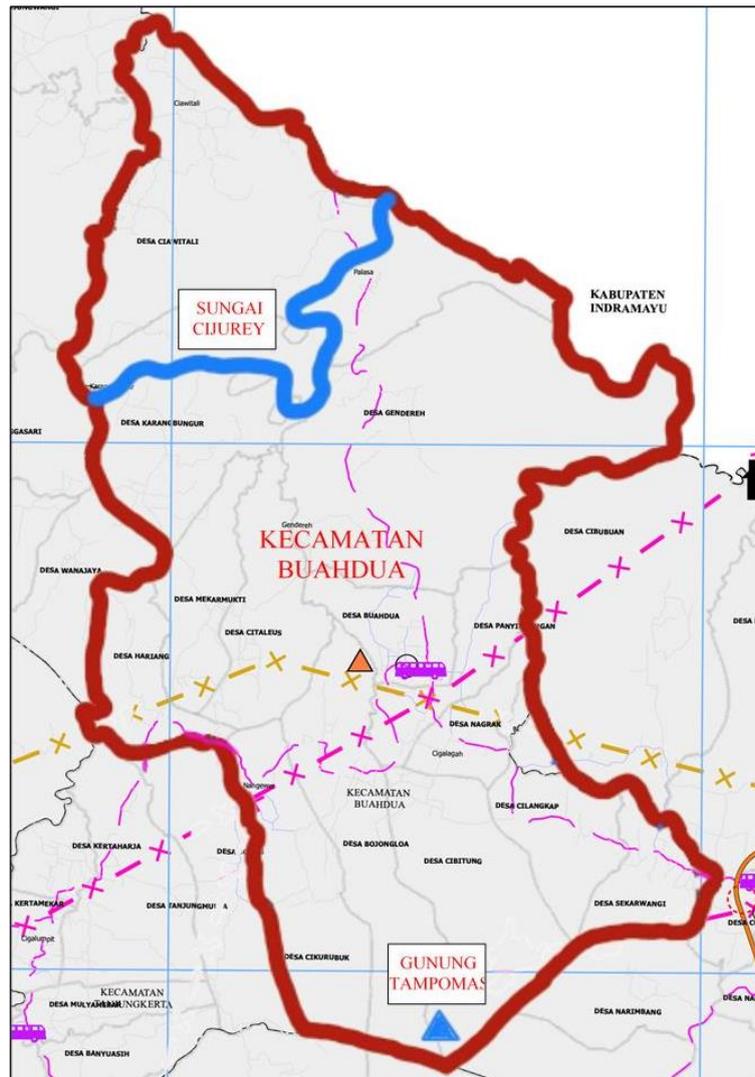


Berdasarkan Pendataan Potensi Desa Tahun 2020, sebanyak 13509 keluarga di Kecamatan Buahdua terdaftar sebagai pengguna listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

3.2.2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Baku Kecamatan Buahdua

Sebagian besar wilayah Kecamatan Buahdua masih berupa lahan terbuka hijau. Dibagian selatan kecamatan ini merupakan kaki gunung Tampomas sedangkan di utara, wilayah kecamatan ini dilewati oleh Sungai Cijurey. Dengan demikian, sumber air bukan dinilai tidak akan menjadi kendala di wilayah ini. Dengan demikian akan dilakukan pendataan lebih lanjut mengenai prasarana air baku serta bagaimana pola pembagian air ke wilayah pemukiman.

Gambar 3.11. Potensi Air Baku Kecamatan Buahdua



3.2.2.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang Tahun 2020 yang telah diperbaharui per tanggal 1 Agustus 2024, terdapat 27 Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Buahdua dengan rincian 26 SD Negeri dan 1 SD Swasta. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kecamatan Buahdua memiliki total 4 SMP dengan rincian 2 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), BPS Kabupaten Sumedang mencatat Kecamatan Buahdua belum memiliki SMA. Detail mengenai jumlah dan lokasi sekolah pada Kecamatan Buahdua dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3.17 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Buahdua

Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
Sekarwangi	2	1	3
Cilangkap	2	0	2
Cibitung	1	0	1
Cikurubuk	2	0	2
Bojongloa	2	0	2
Nagrak	2	0	2
Panyindangan	1	0	1
Buahdua	3	0	3
Gendereh	2	0	2
Citaleus	1	0	1
Mekarmukti	2	0	2
Hariang	2	0	2
Karangbungur	2	0	2
Ciawitali	2	0	2
BUAHDUA	26	1	27

Tabel 3.18 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Buahdua

Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
Sekarwangi	0	1	1
Cilangkap	0	0	0
Cibitung	0	0	0
Cikurubuk	0	0	0
Bojongloa	0	0	0
Nagrak	1	1	2
Panyindangan	0	0	0

Desa/Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
Buahdua	0	0	0
Gendereh	0	0	0
Citaleus	0	0	0
Mekarmukti	0	0	0
Hariang	1	0	1
Karangbungur	0	0	0
Ciawitali	0	0	0
BUAHDUA	2	2	4

3.2.2.5 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Kecamatan Buahdua

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang telah diperbaharui per tanggal 21 Februari 2024, Kecamatan Buahdua memiliki masing-masing satu Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non-Rawat Inap; 3 Klinik Pratama; serta 55 Posyandu. Sedangkan untuk fasilitas Rumah Sakit belum tersedia di kecamatan ini. Perbandingan ketersediaan fasilitas kesehatan antara Kecamatan Buahdua dengan kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3.19 Perbandingan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang

Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Jumlah Klinik Pratama	Jumlah Posyandu
Jatinangor	1		1	1	17	141
Cimanggung				2	14	138
Tanjungsari			1	1	10	144
Sukasari				1		54
Pamulihan				2		112
Rancakalong				1	1	71
Sumedang Selatan	2			2	13	114
Sumedang Utara			2	1	13	109
Ganeas				1	1	39
Situraja				1	2	53
Cisitu			1			39
Darmaraja			1		2	47
Cibugel			1			27
Wado			1		2	49
Jatinunggal			1		4	56
Jatigede			1			39
Tomo			1		1	31

Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap	Jumlah Klinik Pratama	Jumlah Posyandu
Ujung Jaya			1		1	34
Conggeang			1			56
Paseh				1	2	56
Cimalaka			1		2	88
Cisarua				1		34
Tanjungkerta			1	1	4	60
Tanjungmedar				1	1	41
Buahdua			1	1	3	55
Surian			1			26
Sumedang	3		17	18	93	1713

3.2.3 Kondisi Sosial Demografi Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua berada di wilayah Kabupaten Sumedang menjadi salah satu kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan penduduk yang lambat. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai kondisi sosial demografi Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.

3.2.3.1 Kondisi Kependudukan Kecamatan Buahdua

Penduduk Kecamatan Buahdua pada tahun 2023 sebanyak 32.654 jiwa, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 32.941 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Buahdua

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekarwangi	1.315	1.415	2.730
Cilangkap	1.401	1.426	2.827
Cibitung	833	853	1.686
Cikurubuk	851	1.074	1.925
Bojongloa	1.655	1.703	3.358
Nagrak	861	1.075	1.936
Panyindangan	913	902	1.815
Buahdua	1.378	1.737	3.115
Gendereh	1.038	1.038	2.076
Citaleus	1.065	1.093	2.158
Mekarmukti	918	983	1.901
Hariang	1.671	1.685	3.356
Karangbungur	960	963	1.923
Ciawaitali	924	924	1.848
Jumlah	15.783	16.871	32.654

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Desa dengan penduduk terbanyak yaitu Desa Bojongloa sebanyak 3.358 Jiwa dan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Cibitung dengan jumlah warga 1.686 Jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk Kecamatan Buahdua terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Buahdua

Desa/ Kelurahan	Persentase Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
Sekarwangi	8.36	827	92.93
Cilangkap	8.66	582	98.25
Cibitung	5.16	200	97.66
Cikurubuk	5.90	283	79.24
Bojongloa	10.28	390	97.18
Nagrak	5.93	784	80.09
Panyindangan	5.56	496	101.22
Buahdua	9.54	995	79.33
Gendereh	6.36	70	100.00
Citaleus	6.61	393	97.44
Mekarmukti	5.82	262	93.39
Hariang	10.28	872	99.17
Karangbungur	5.89	276	99.69
Ciawaitali	5.66	114	100.00

Sumber: Kecamatan Buahdua dalam angka, 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Buahdua berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3.22 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
USIA 0-4 TAHUN	773	691	1464
USIA 5-9 TAHUN	1142	1040	2182
USIA 10-14 TAHUN	1166	1176	2342
USIA 15-19 TAHUN	949	950	1899
USIA 20-24 TAHUN	1160	1164	2324
USIA 25-29 TAHUN	1136	1035	2171
USIA 30-34 TAHUN	1126	1031	2157
USIA 35-39 TAHUN	1001	1050	2051
USIA 40-44 TAHUN	1068	1164	2232
USIA 45-49 TAHUN	969	964	1933
USIA 50-54 TAHUN	1010	1159	2169

Kelompok Umur	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
USIA 55-59 TAHUN	1092	1213	2305
USIA 60-64 TAHUN	824	1153	1977
USIA 65-69 TAHUN	730	997	1727
USIA 70-74 TAHUN	759	831	1590
USIA >75 TAHUN	878	1253	2131
Total	15783	16871	32654

Sumber: Kecamatan Buahdua dalam angka, 2023

Berdasarkan data di atas, kelompok usia dengan jumlah terbanyak yaitu di usia 20-24 Tahun yaitu sebanyak 2.324 Jiwa dan usia produktif cukup tinggi di Kecamatan Buahdua.

3.2.3.2 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan Buahdua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pada bidang pendidikan, Kecamatan Buahdua memiliki fasilitas pendidikan yang cukup baik.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Buahdua cukup baik dimana Sekolah Dasar yang lumayan banyak yaitu 14 buah, sedangkan untuk tingkat pendidikan cukup sedikit.

3.2.3.3 Kondisi Pemerintahan Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua termasuk wilayah dengan kondisi pemerintahan yang baik. Wilayah Administratif untuk jumlah RT dan RW di Kecamatan Buahdua dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Jumlah RW dan RT di Kecamatan Buahdua

Desa/ Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Sekarwangi	6	29
Cilangkap	7	25
Cibitung	6	20
Cikurubuk	6	25
Bojongloa	14	32
Nagrak	6	23
Panyindangan	6	20

Desa/ Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Buahdua	12	42
Gendereh	4	22
Citaleus	6	14
Mekarmukti	4	17
Hariang	6	22
Karangbungur	3	19
Ciawaitali	6	17
Panyindangan	6	29

Sumber: Kecamatan Buahdua dalam angka, 2017

Berdasarkan data di atas, Desa dengan jumlah RT dan RW paling banyak adalah Desa Buahdua dengan jumlah RW sebanyak 12 dan RT sebanyak 42 maka dapat bekerjasama dengan baik.

3.2.4 Kondisi Perekonomian Wilayah

Kondisi perekonomian wilayah berisi mengenai gambaran potensi ekonomi wilayah Kecamatan Buahdua, gambaran komoditas unggulan dan gambaran investasi di Kecamatan Buahdua.

3.2.4.1 Gambaran Potensi Ekonomi Wilayah Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas darat Kecamatan Buahdua adalah ±8.954.784 Ha, yang terdiri dari tanah perkebunan, sawah, hutan, kolam, dan lain lain. Adapun batas wilayah Kecamatan Buahdua yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka/ Tanjungkerta, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Congeang, dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Surian. Desa yang terdapat di Kecamatan Buahdua berjumlah 13 desa, di antaranya Desa Bojongloa, Buahdua, Buahdua, Cikurubuk, Cilangkap, Citaleus, Gendereh, Hariang, Karangbungur, Mekarmukti, Nagrak, Panyindangan, dan Sekarwangi, dengan jumlah keseluruhan 45 dusun, 84 RW, dan 265 RT. Kabupaten Sumedang merupakan wilayah agraris yang penduduknya masih bergantung pada produksi alam. Begitu juga di Kecamatan Buahdua yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pengolahan komoditas kelapa di Kecamatan Buahdua umumnya berupa pengolahan menjadi gula kelapa. Namun demikian, pengolahan tersebut masih dilakukan

secara tradisional dan belum tersentuh teknologi. Komoditas kelapa sendiri sebenarnya memiliki banyak potensi untuk dikembangkan mulai dari produk hulu hingga produk hilir. Dari sisi peranan sektoralnya dalam PDRB Kabupaten Sumedang, yang paling dominan adalah kategori pertanian yang mencapai 20,35 persen yang kemudian diikuti oleh kategori industri sebesar 18,63 persen dan kategori perdagangan sebesar 16,07 persen. Pada tingkat kecamatan, meliputi Kecamatan Buahdua merupakan kecamatan yang proporsi sektor pertaniannya cukup tinggi, Cibugel dan Kecamatan Ujungjaya dengan persentase proporsinya sebesar 48,95 persen, 47,30 persen dan 44,04 persen.

Daerah Conggeang dan Buahdua memiliki potensi air panas untuk berkembang menjadi daerah tujuan wisata. Cipanas Cileungsing merupakan objek wisata Air Panas yang terletak di Desa Cilangkap Kecamatan Conggeang, sedangkan Cipanas Sekarwangi terletak di Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua.

Potensi ekonomi Kecamatan Buahdua ditunjukkan dengan banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Bank yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.2.1.

Tabel 3.24 Banyaknya Sarana Lembaga Keuangan Bank Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bank di Kecamatan Buahdua Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Koperasi Unit Desa (KUD)	Bank Umum Swasta	Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)
(1)	(2)	(3)	(4)
(001) Sekarwangi	0	0	0
(002) Cilangkap	0	0	0
(003) Cibitung	0	0	0
(004) Cikurubuk	0	0	0
(005) Bojongloa	0	0	0
(006) Nagrak	0	0	0
(007) Panyindangan	1	0	0
(008) Buahdua	1	1	1
(009) Gendereh	0	0	0
(010) Citaleus	0	0	0
(011) Mekarmukti	0	0	0
(012) Hariang	1	0	0
(013) Karangbubur	0	0	0
(014) Ciawitali	0	0	0

Tabel 3.25 Banyaknya Koperasi Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Koperasi di Kecamatan Buahdua Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)
(1)	(2)	(3)
(001) Sekarwangi	0	0
(002) Cilangkap	0	0
(003) Cibitung	0	0
(004) Cikurubuk	0	0
(005) Bojongloa	0	0
(006)Nagrak	0	0
(007) Panyindangan	0	0
(008) Buahdua	1	0
(009) Gendereh	0	0
(010) Citaleus	0	0
(011) Mekarmukti	0	0
(012) Hariang	1	0
(013) Karangbubur	0	0
(014) Ciawitali	0	0

Lanjutan Tabel 3.4.2.2

Desa/Kelurahan	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	Koperasi Lainnya
(1)	(4)	(5)
(001) Sekarwangi	0	0
(002) Cilangkap	0	0
(003) Cibitung	0	0
(004) Cikurubuk	0	0
(005) Bojongloa	0	0
(006)Nagrak	0	0
(007) Panyindangan	0	0
(008) Buahdua	1	0
(009) Gendereh	0	0
(010) Citaleus	0	0
(011) Mekarmukti	0	0
(012) Hariang	1	0
(013) Karangbubur	0	0
(014) Ciawitali	0	0

Tabel 3.26 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Perdagangan di Kecamatan Buahdua Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar Dengan Bangunan Permanen	Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)
(001) Sekarwangi	0	0	0
(002) Cilangkap	1	0	0
(003) Cibitung	0	0	0
(004) Cikurubuk	0	0	0
(005) Bojongloa	0	0	0
(006)Nagrak	0	0	0
(007) Panyindangan	1	0	0
(008) Buahdua	1	1	0
(009) Gendereh	0	0	0
(010) Citaleus	0	0	0
(011) Mekarmukti	0	0	0
(012) Hariang	0	0	1
(013) Karangbubur	0	0	0
(014) Ciawitali	0	0	0

Lanjutan tabel 7.3

Desa/Kelurahan	Pasar Tanpa Bangunan	Mini Market/Swalayan/ Supermarket	Restoran/Rumah Makan
(1)	(5)	(6)	(7)
(001) Sekarwangi	0	2	0
(002) Cilangkap	1	0	0
(003) Cibitung	0	0	0
(004) Cikurubuk	0	0	0
(005) Bojongloa	0	1	0
(006)Nagrak	0	0	0
(007) Panyindangan	1	0	0
(008) Buahdua	0	1	7
(009) Gendereh	0	0	0
(010) Citaleus	0	0	0
(011) Mekarmukti	0	0	0
(012) Hariang	0	1	0
(013) Karangbubur	0	0	0
(014) Ciawitali	0	0	0

3.2.4.2 Gambaran Komoditas Unggulan di Kecamatan Buahdua

Kecamatan Buahdua di Sumedang memiliki beberapa komoditas unggulan yang menjadi andalan perekonomian daerah tersebut. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- Padi: Sebagai salah satu daerah pertanian, Buahdua dikenal menghasilkan padi berkualitas baik. Tanaman ini menjadi sumber utama penghidupan bagi banyak petani di wilayah ini.
- Sayuran: Berbagai jenis sayuran, seperti cabai, bawang, dan sayuran hijau lainnya, juga ditanam di Kecamatan Buahdua. Sayuran ini tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga dipasarkan ke daerah lainnya.
- Buah-buahan: Beberapa jenis buah, seperti durian dan mangga, tumbuh subur di daerah ini. Buah-buahan tersebut memiliki cita rasa yang khas dan sering menjadi favorit di pasar.
- Perikanan: Selain pertanian, sektor perikanan juga menjadi komoditas penting. Budidaya ikan dalam keramba dan kolam menjadi salah satu usaha yang berkembang di kecamatan ini.
- Kerajinan Tangan: Produk kerajinan lokal, seperti anyaman dan kerajinan berbahan dasar bambu, juga menjadi komoditas unggulan. Ini mendukung perekonomian lokal dan melestarikan budaya setempat.

Kecamatan Buahdua memanfaatkan potensi alam dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari pemerintah dan pihak terkait juga penting untuk pengembangan komoditas unggulan ini.

3.2.4.3 Gambaran Investasi di Kecamatan Buahdua

Gambaran investasi di Kecamatan Buah Dua, Sumedang, mencakup beberapa aspek penting yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Berikut adalah beberapa poin yang relevan:

1) Sektor Pertanian

Investasi dalam Pertanian: Banyak petani yang berinvestasi dalam alat pertanian modern, pupuk organik, dan teknologi irigasi untuk meningkatkan hasil produksi.

Koperasi Pertanian: Pembentukan koperasi yang membantu petani dalam memperoleh modal dan akses pasar.

2) Perikanan

Budidaya Ikan: Investasi dalam kolam ikan dan keramba dapat meningkatkan hasil perikanan lokal. Beberapa pelaku usaha juga mulai menggunakan teknologi budidaya yang lebih efisien.

3) Industri Kecil dan Menengah

Kerajinan dan Produk Olahan: Banyak usaha kecil yang berinvestasi dalam pengolahan produk lokal, seperti makanan olahan dan kerajinan tangan, untuk meningkatkan nilai jual. Pengembangan Pasar Lokal: Usaha untuk memperluas akses pasar bagi produk lokal melalui pameran dan promosi.

4) Infrastruktur

Perbaikan Jalan dan Transportasi: Investasi pada infrastruktur jalan untuk mempermudah akses ke pasar dan distribusi produk. Fasilitas Umum: Pembangunan fasilitas umum seperti pasar dan tempat penyimpanan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

5) Dukungan Pemerintah

Program Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah daerah sering mengadakan program pelatihan dan pemberian modal bagi pelaku usaha. Insentif bagi Investor: Kebijakan yang mendukung investasi, seperti pengurangan pajak atau kemudahan perizinan.

6) Potensi Pariwisata

Investasi di Sektor Pariwisata: Pengembangan objek wisata dan homestay dapat menarik wisatawan dan mendukung ekonomi lokal. Dengan berbagai potensi investasi ini, Kecamatan Buahdua memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.



Bab 4



Peta Potensi Investasi
Kecamatan Buahdua



4.1 ANALISIS POTENSI FISIK

Pengembangan kegiatan penanaman modal dibangun dalam perspektif pengembangan daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah pada bidang ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan (Pakdeenurit, member, & Rattanawong, 2017). Oleh karena itu, pengembangan kawasan yang ditujukan untuk kegiatan penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi diantaranya ketersediaan ruang wilayah atau faktor fisik dengan indikator aman dari bencana, berada pada lahan yang mudah untuk dikerjakan dengan kemiringan lereng cenderung datar (0-15%), ketersediaan sumber air baku dan penggunaan lahan yang *mixed-use* atau multifungsi untuk efisiensi dan menarik investasi. Properti *mixed-use landuse* cenderung lebih menarik bagi investor karena menawarkan diversifikasi risiko yang lebih baik dengan adanya berbagai sumber pendapatan dari residensial, komersial dan hiburan (Urban Land Institute, 2020).

Analisis potensi fisik menilai potensi berdasarkan indikator-indikator tersebut. Kondisi fisik wilayah yang sesuai (Taufiqurrahman, 2015) tentunya semakin mendukung untuk investor dalam berinvestasi. Setiap indikator pada variabel potensi fisik wilayah, seperti kerawanan bencana, tata guna lahan, kemiringan lereng, dan hidrologi memiliki skor atau nilai 1, 2, dan 3 untuk menginterpretasikan potensinya. Semakin mendukung kondisi fisik yang ada, maka nilai potensi fisik semakin besar, yaitu bernilai 3. Akan tetapi, untuk indikator kerawanan bencana, ketika semakin tinggi tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah desa, maka semakin kecil nilainya, yaitu bernilai 1 dan sebaliknya, karena kerawanan bencana merupakan masalah. Berikut merupakan penilaian atau skor terhadap indikator potensi fisik wilayah yang digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi.

Tabel 4.1 Skor Indikator Fisik Pertimbangan Investasi Kecamatan Buahdua

Kemiringan Lereng	Klasifikasi	Skor	Keterangan
	Tinggi	3	Kemiringan Lereng 0-15%
	Sedang	2	Kemiringan Lereng 15-25%
	Rendah	1	Kemiringan Lereng 25-40% dan >40%
Tata Guna Lahan	Klasifikasi	Skor	Keterangan
	Tinggi	3	Persentase <i>mixed-use landuse</i> tinggi
	Sedang	2	Persentase <i>mixed-use landuse</i> sedang
	Rendah	1	Persentase <i>mixed-use landuse</i> rendah
Hidrologi	Klasifikasi	Skor	Keterangan
	Tinggi	3	Sumberdaya air sungai tinggi

	Sedang	2	Sumberdaya air sungai sedang
	Rendah	1	Tidak terdapat sumberdaya air sungai dan daerah air langka
Rawan Bencana	Klasifikasi	Skor	Keterangan
	Rendah	3	Kejadian bencana tidak pernah terjadi
	Sedang	2	Kejadian bencana pernah terjadi setidaknya 1 kali
	Tinggi	1	Kejadian bencana terjadi >1 kali

Sumber: Taufiqurahman et al, 2015, dengan modifikasi

4.1.1 Analisis Kemiringan Lereng

Kecamatan Buahdua memiliki kemiringan lereng yang beragam. Bagian wilayah utara – tengah memiliki kelerengan cenderung datar dan landai dengan persentase sekitar 8-15%. Desa-desa di wilayah utara dan tengah dengan kelerengan cenderung datar (0-8%) dan landai (8-15%) diantaranya Ciawitali, Gendereh, Karangbungur, Panyindangan, Hariang, Mekarmukti, Citaleus, Buahdua, dan Nagrak.

Desa Ciawitali memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 912,79 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 881,75 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 249,84 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 31,05 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 1,06 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Ciawitali memiliki luasan paling besar, yaitu 1.794,54 Ha atau sekitar 86,42%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 12,03% atau sebesar 249,84 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,55% atau sebesar 32,11 Ha. Tabel 4.2 berikut merupakan tabel skor atau penilaian terhadap kemiringan lereng yang ada di Desa Ciawitali.

Tabel 4.2 Skor Penilaian Kemiringan Lereng Desa Ciawitali

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Ciawitali	Kemiringan Lereng 0-15%	1.794,54	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	249,84	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	32,11	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Gendereh memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 918,82 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 1171,64 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 481,57 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 40,27 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 3,44 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Gendereh memiliki luasan paling besar, yaitu 2.090,46 Ha atau sekitar 79,92%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 18,41%

atau sebesar 481,57 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,67% atau sebesar 43,72 Ha.

Tabel 4.3 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Gendereh

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Gendereh	Kemiringan Lereng 0-15%	2.090,46	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	481,57	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	43,72	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Karangbungur memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 345,16 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 252,09 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 93,19 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 28,03 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 2,70 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Karangbungur memiliki luasan paling besar, yaitu 597,24 Ha atau sekitar 82,82%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 12,92% atau sebesar 93,19 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 4,26% atau sebesar 30,73 Ha.

Tabel 4.4 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Karangbungur

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Karangbungur	Kemiringan Lereng 0-15%	597,24	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	93,19	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	30,73	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Panyindangan memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 116,90 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 152,11 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 96,66 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 12,55 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,03 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Panyindangan memiliki luasan paling besar, yaitu 269,02 Ha atau sekitar 71,12%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 25,55% atau sebesar 96,66 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 3,23% atau sebesar 12,58 Ha.

Tabel 4.5 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Panyindangan

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Panyindangan	Kemiringan Lereng 0-15%	269,02	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	96,66	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	12,58	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Hariang memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 120,54 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 124,65 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 97,13 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 36,21 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,69 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Hariang memiliki luasan paling besar, yaitu 245,19 Ha atau sekitar 64,66%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 25,61% atau sebesar 97,13 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 9,73% atau sebesar 36,90 Ha.

Tabel 4.6 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Hariang

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Hariang	Kemiringan Lereng 0-15%	245,19	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	97,13	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	36,90	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Mekarmukti memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 149,85 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 168,39 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 93,11 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 15,82 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,05 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Mekarmukti memiliki luasan paling besar, yaitu 318,24 Ha atau sekitar 74,50%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 16,23% atau sebesar 93,11 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 0,60% atau sebesar 15,87 Ha.

Tabel 4.7 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Mekarmukti

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Mekarmukti	Kemiringan Lereng 0-15%	318,24	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	93,11	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	15,87	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Citaleus memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 164,67 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 258,15 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 136,59 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 10,60 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 0,02 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Citaleus memiliki luasan paling besar, yaitu 422,83 Ha atau sekitar 74,17%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 23,96% atau sebesar 136,59 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,86% atau sebesar 10,63 Ha.

Tabel 4.8 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Citaleus

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Citaleus	Kemiringan Lereng 0-15%	422,83	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	136,59	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	10,63	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Buahdua memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 152,89 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 129,94 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 49,18 Ha, dan kemiringan curam (25-45%) sebesar 5,74 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Buahdua memiliki luasan paling besar, yaitu 282,82 Ha atau sekitar 83,74%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 14,56% atau sebesar 49,18 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 1,70% atau sebesar 5,74 Ha.

Tabel 4.9 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Buahdua

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Buahdua	Kemiringan Lereng 0-15%	282,82	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	49,18	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	5,74	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Nagrak memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 131,47 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 78,52 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 39,33 Ha, dan kemiringan curam (25-45%) sebesar 6,46 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Nagrak memiliki luasan paling besar, yaitu 209,99 Ha atau sekitar 82,09%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 15,37% atau sebesar 39,32 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 2,53% atau sebesar 6,47 Ha.

Tabel 4.10 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Nagrak

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Nagrak	Kemiringan Lereng 0-15%	209,99	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	39,32	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	6,47	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Sedangkan bagian wilayah selatan cenderung memiliki kelerengan agak curam dan sedikit sangat curam. Kelerengan agak curam memiliki persentase 15-25% dan curam memiliki persentase sekitar 25-45%. Sedangkan kelerengan sangat curam memiliki persentase

sekitar lebih dari 45%. Desa-desanya di bagian selatan yang memiliki kelerengan agak curam dan curam diantaranya Desa Cikurubuk, Bojongloa, Cilangkap, Sekarwangi, dan Cibitung. Desa Cikurubuk memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 165,47 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 254,27 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 196,33 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 101,56 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 7,73 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Cikurubuk memiliki luasan paling besar, yaitu 419,74 Ha atau sekitar 57,87%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 27,07% atau sebesar 196,33 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 15,07% atau sebesar 109,30 Ha.

Tabel 4.11 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Cikurubuk

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Cikurubuk	Kemiringan Lereng 0-15%	419,74	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	196,33	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	109,30	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Cilangkap memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 130,24 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 134,83 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 120,36 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 96,21 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 21,75 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Cilangkap memiliki luasan paling besar, yaitu 265,07 Ha atau sekitar 52,66%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 23,91% atau sebesar 120,36 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 23,43% atau sebesar 117,96 Ha.

Tabel 4.12 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Cilangkap

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Cilangkap	Kemiringan Lereng 0-15%	265,07	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	120,36	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	117,96	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Bojongloa memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 105,78 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 198,68 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 159,18 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 80,833 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 16,09 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Bojongloa memiliki luasan paling besar, yaitu 304,5 Ha atau sekitar 54%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 28% atau

sebesar 159,2 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 17% atau sebesar 96,9 Ha.

Tabel 4.13 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Bojongloa

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Bojongloa	Kemiringan Lereng 0-15%	304,5	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	159,2	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	96,9	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Desa Sekarwangi memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 129,91 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 118,32 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 72,03 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 41,01 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 1,44 Ha. Kemiringan datar dan cenderung landai di Desa Sekarwangi memiliki luasan paling besar, yaitu 248,25 Ha atau sekitar 68,44%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 19,86% atau sebesar 72,03 Ha serta kemiringan curam dan sangat curam sekitar 11,70% atau sebesar 42,46 Ha.

Tabel 4.14 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Sekarwangi

Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Sekarwangi	Kemiringan Lereng 0-15%	248,25	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	72,03	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	42,46	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

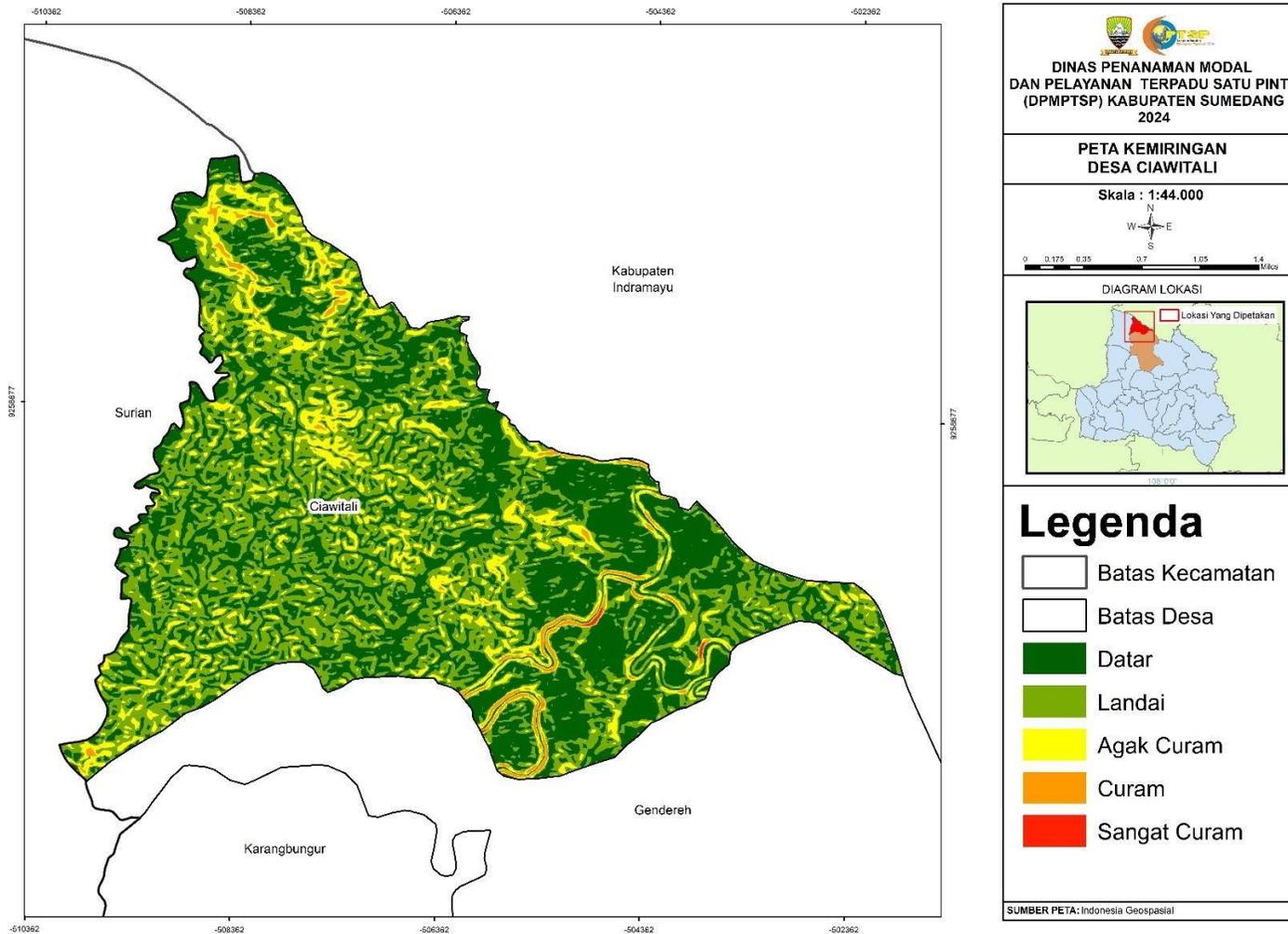
Berbeda dengan desa lainnya di Wilayah Selatan Kecamatan Buahdua, Desa Cibitung memiliki kemiringan datar (0-8%) sebesar 119,72 Ha, kemiringan landai (8-15%) sebesar 120,84 Ha, kemiringan agak curam (15-25%) sebesar 225,95 Ha, kemiringan curam (25-45%) sebesar 313,44 Ha, dan kemiringan sangat curam (>45%) sebesar 95,90 Ha. Kemiringan curam dan sangat curam di Desa Cibitung memiliki luasan paling besar, yaitu 409,35 Ha atau sekitar 46,74%. Sedangkan kemiringan agak curam sekitar 25,80% atau sebesar 225,95 Ha serta kemiringan landai sekitar 27,47% atau sebesar 240,56 Ha.

Tabel 4.15 Penilaian Kemiringan Lereng Desa Cibitung

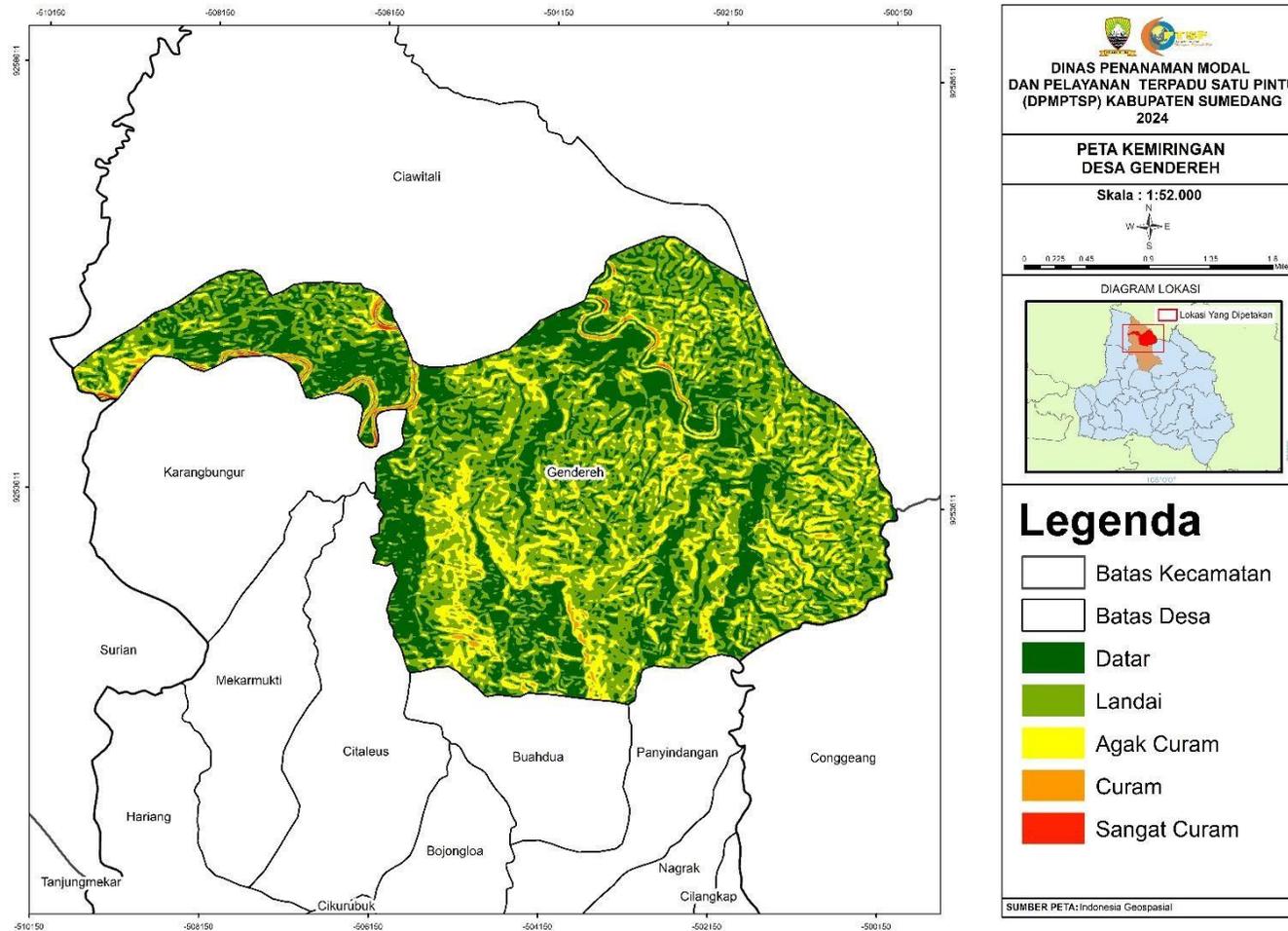
Nama Desa	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Skor	Keterangan
Cibitung	Kemiringan Lereng 0-15%	240,56	3	Tinggi
	Kemiringan Lereng 15-25%	225,95	2	Rendah
	Kemiringan Lereng 25- <40%	409,35	1	Sedang

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

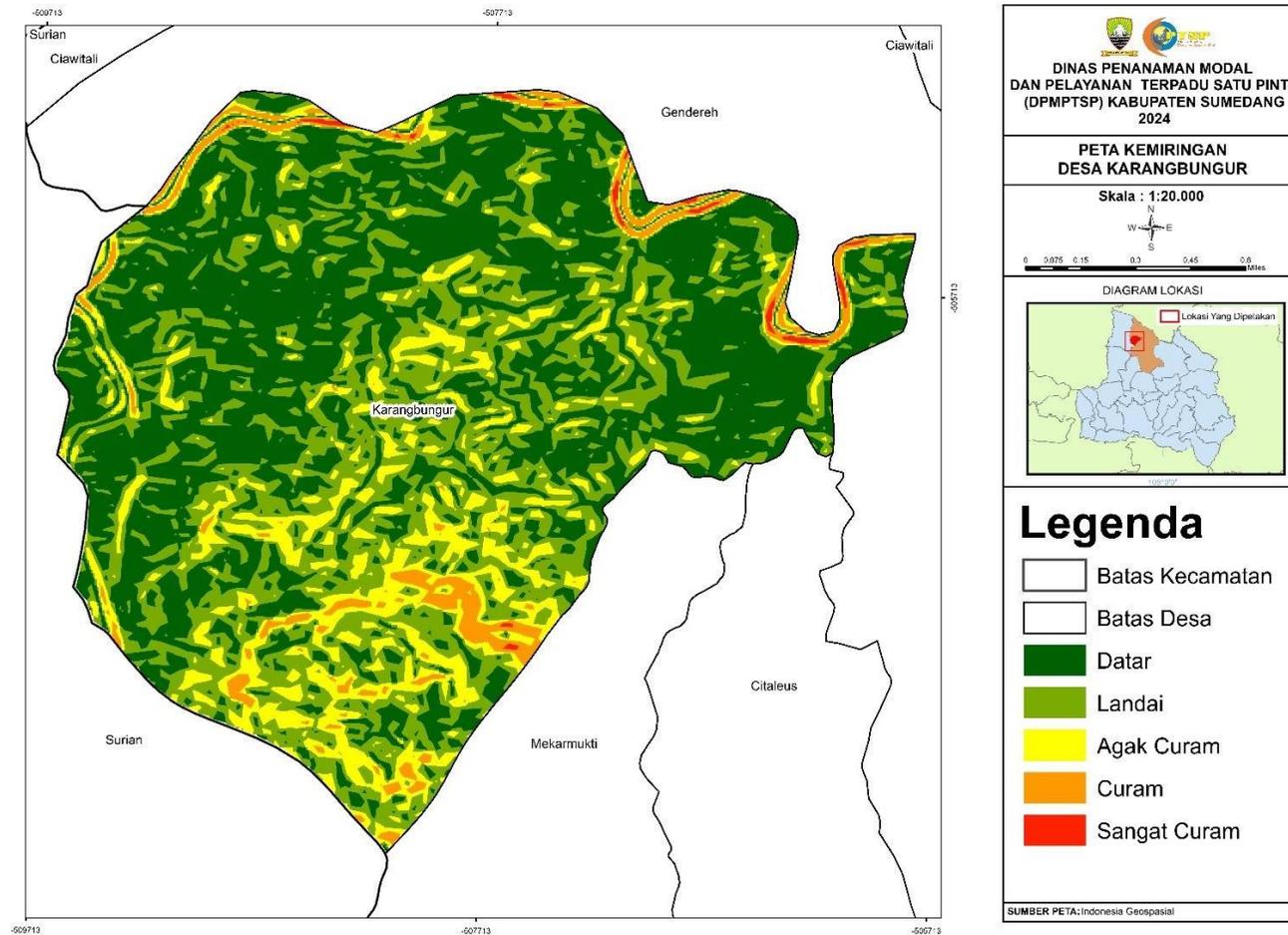
Gambar 4.1. Peta Kemiringan Lereng Desa Ciawitali



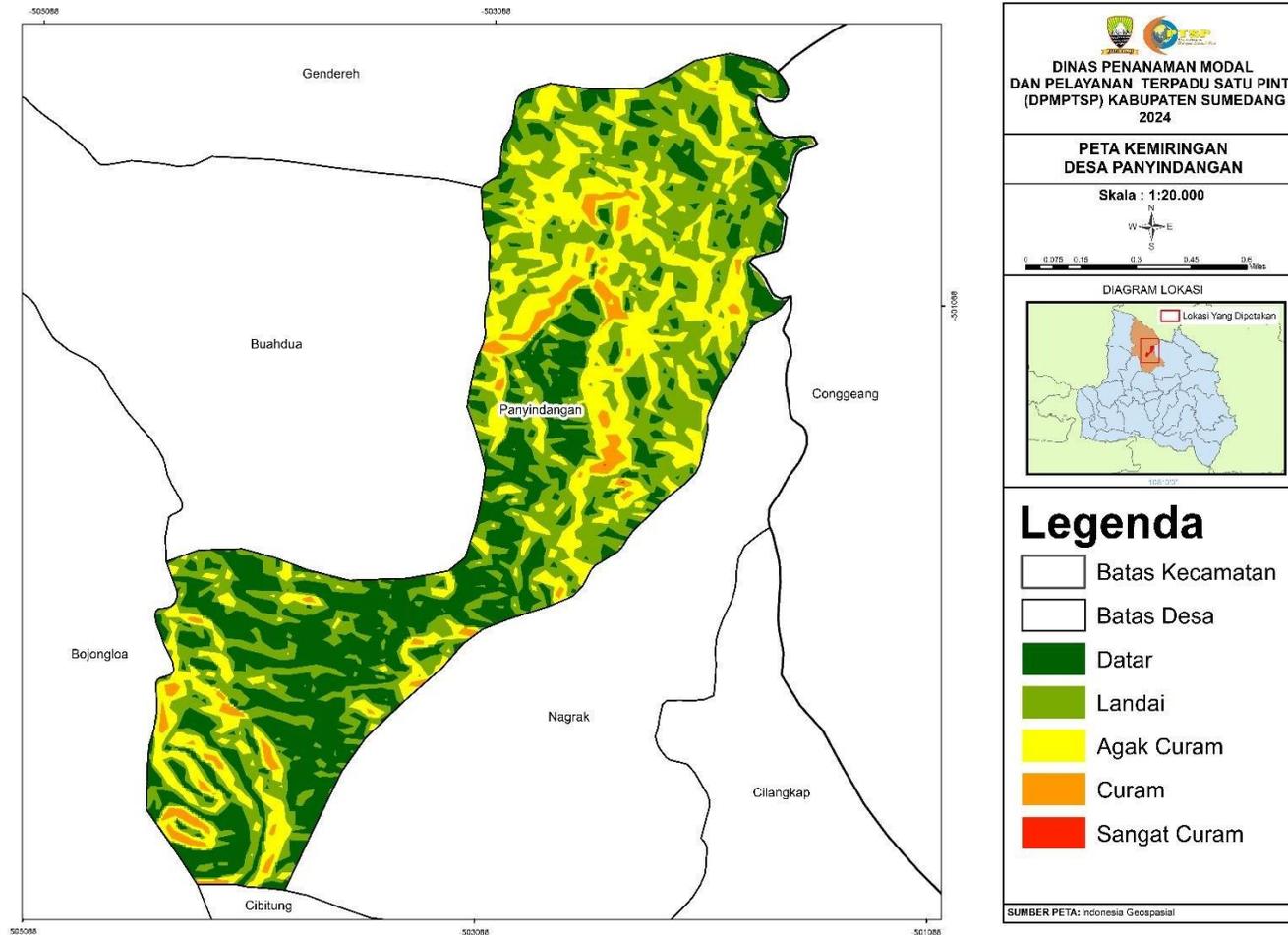
Gambar 4.2. Peta Kemiringan Lereng Desa Gendereh



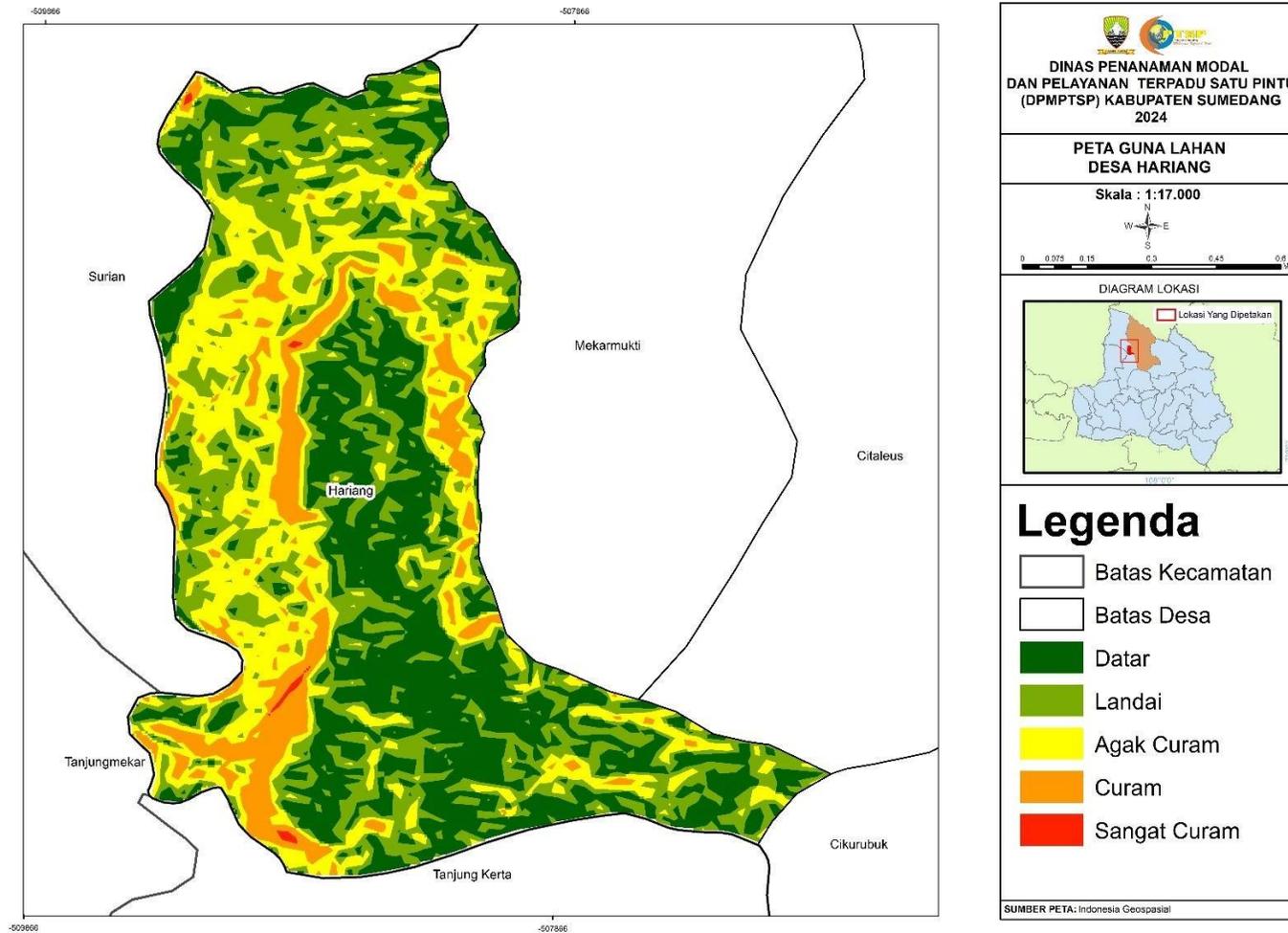
Gambar 4.3. Peta Kemiringan Lereng Desa Karangbungur



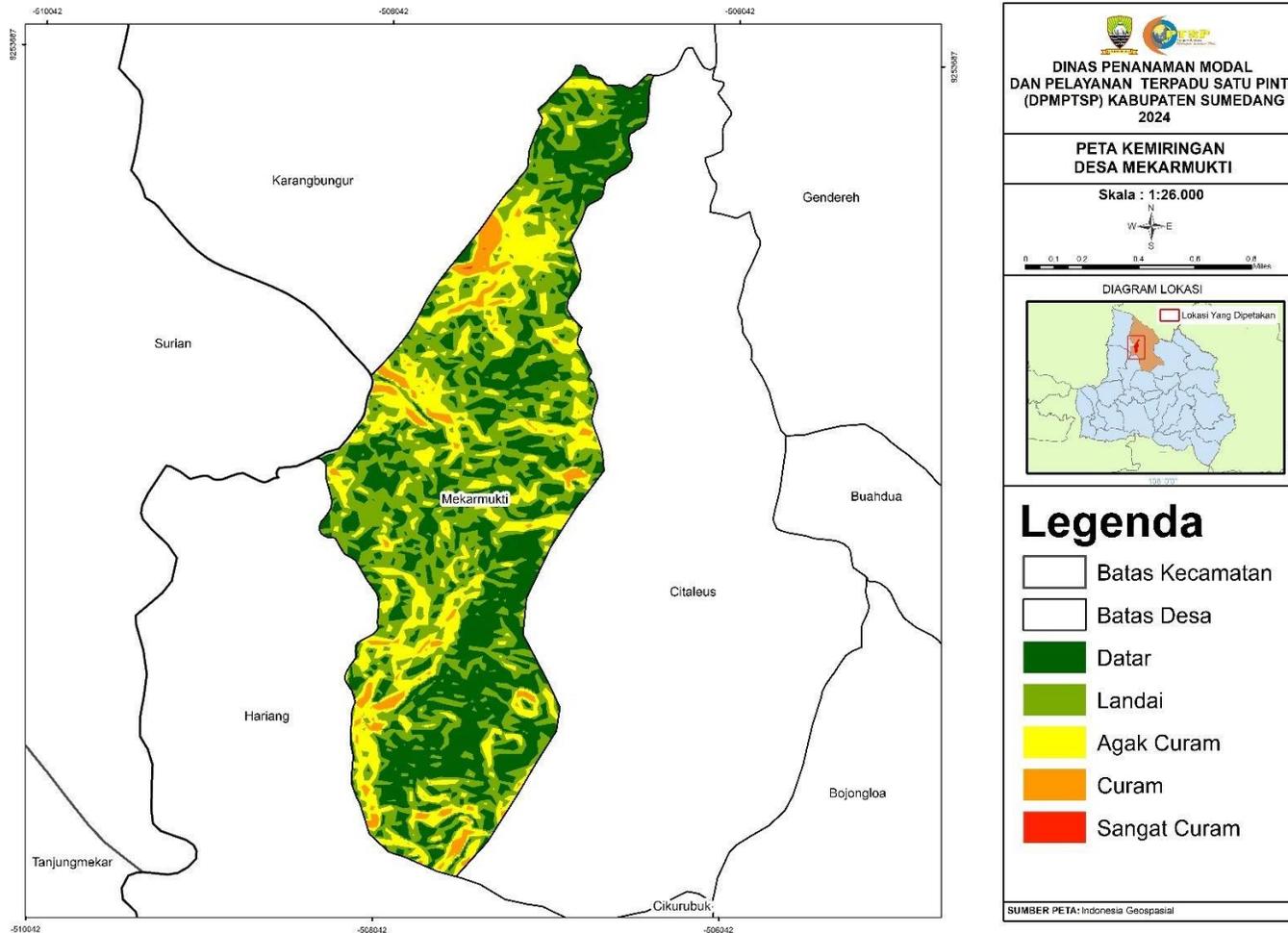
Gambar 4.4. Peta Kemiringan Lereng Desa Panyindangan



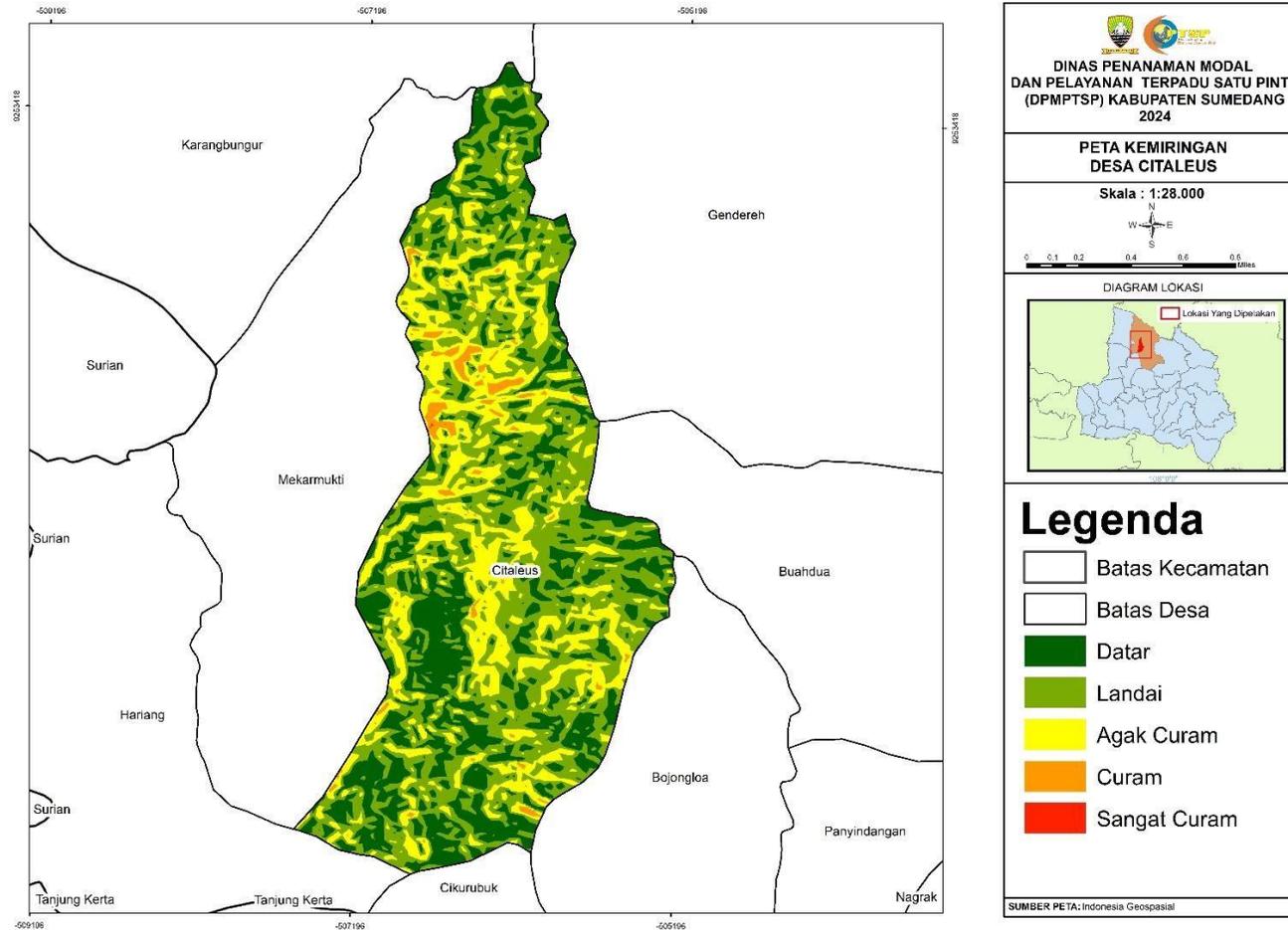
Gambar 4.5. Peta Kemiringan Lereng Desa Hariang



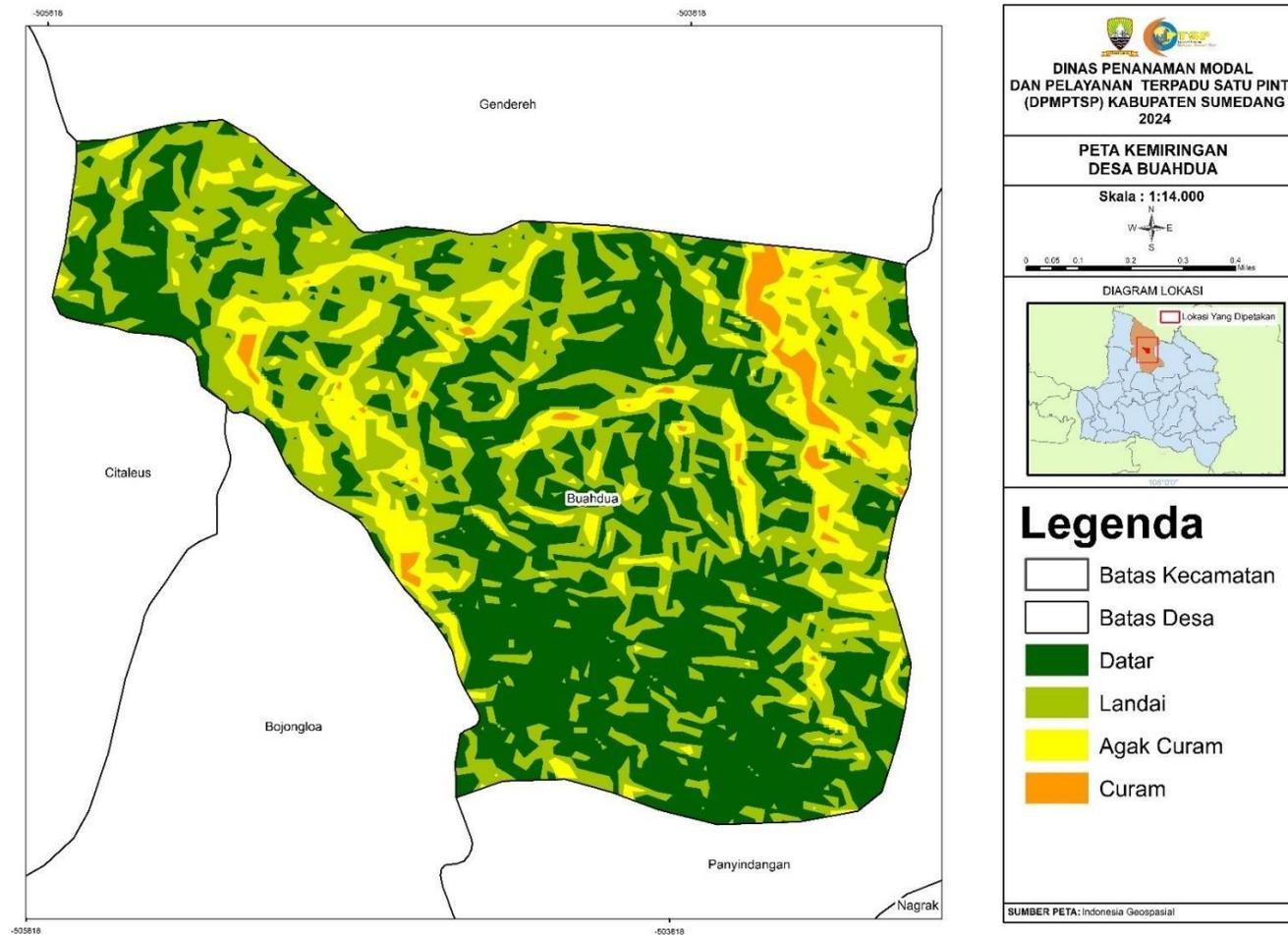
Gambar 4.6. Peta Kemiringan Lereng Desa Mekarmukti



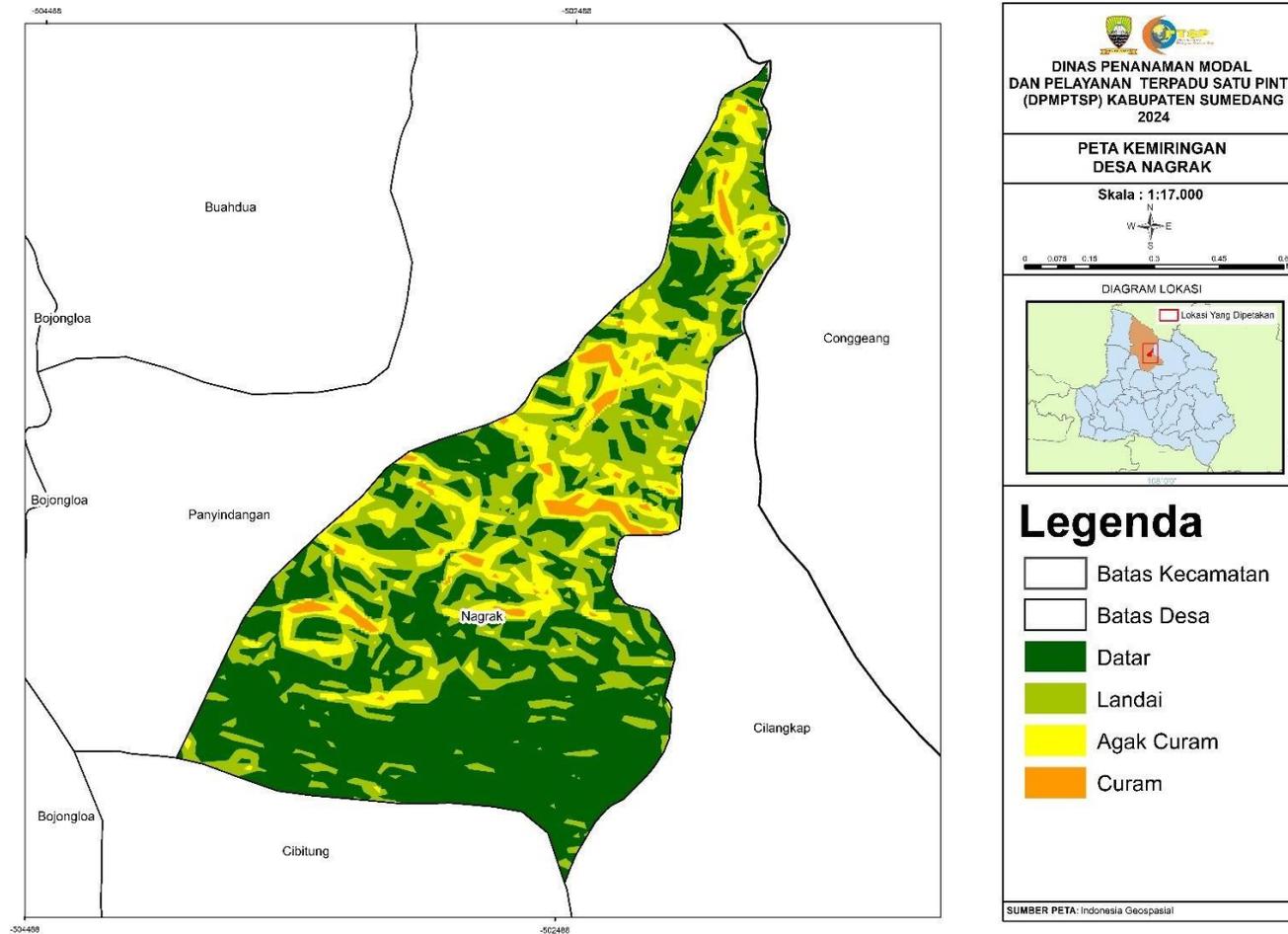
Gambar 4.7. Peta Kemiringan Lereng Desa Citaleus



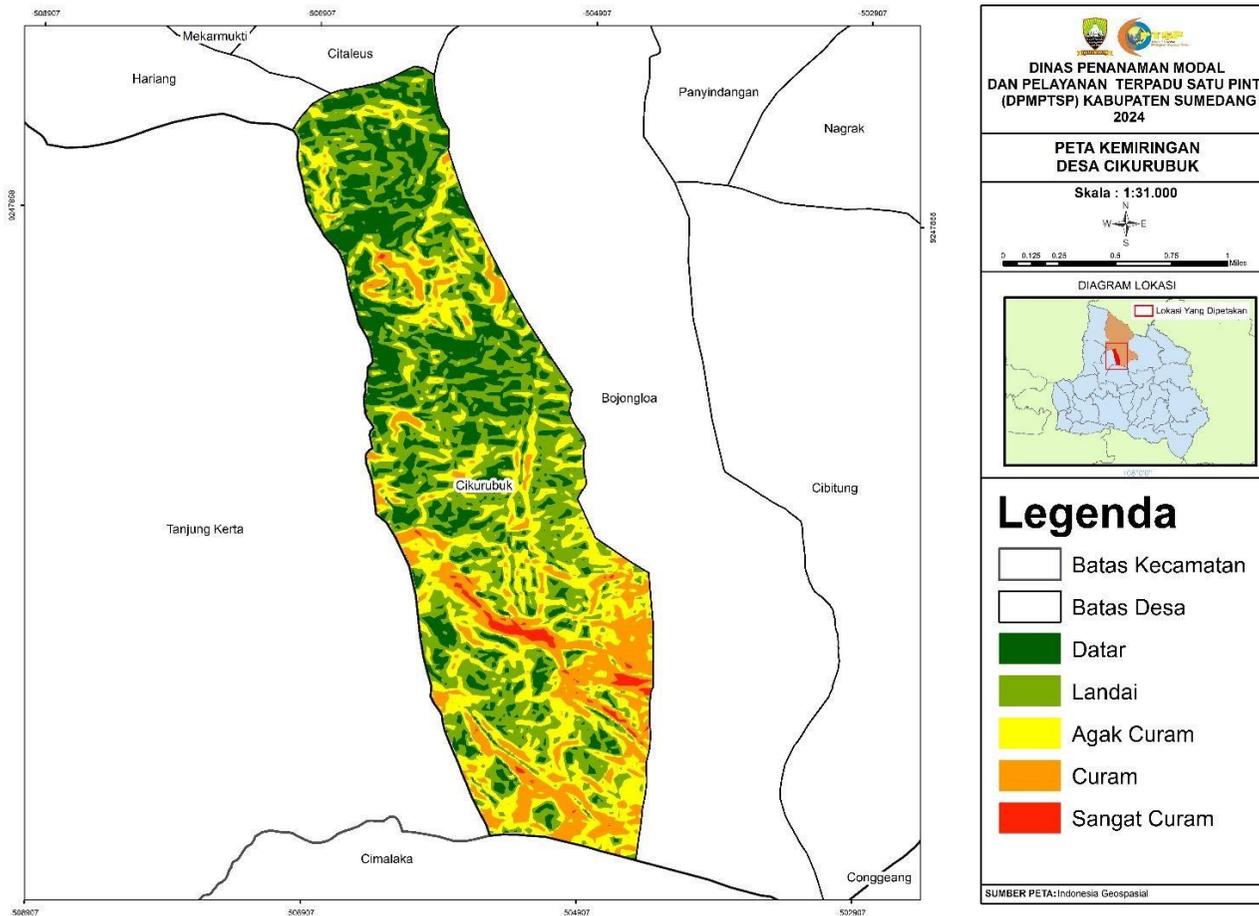
Gambar 4.8. Peta Kemiringan Lereng Desa Buahdua



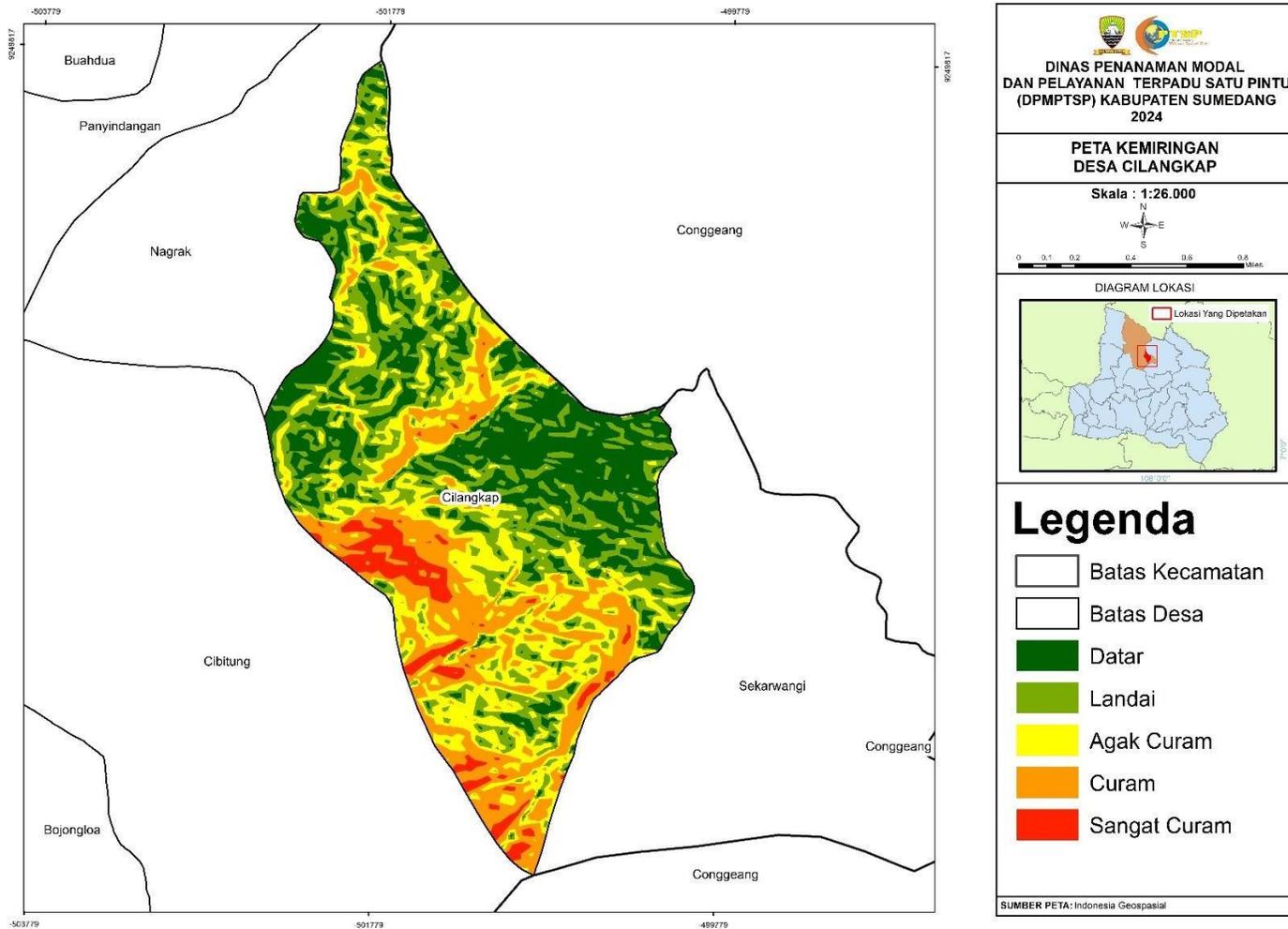
Gambar 4.9. Peta Kemiringan Lereng Desa Nagrak



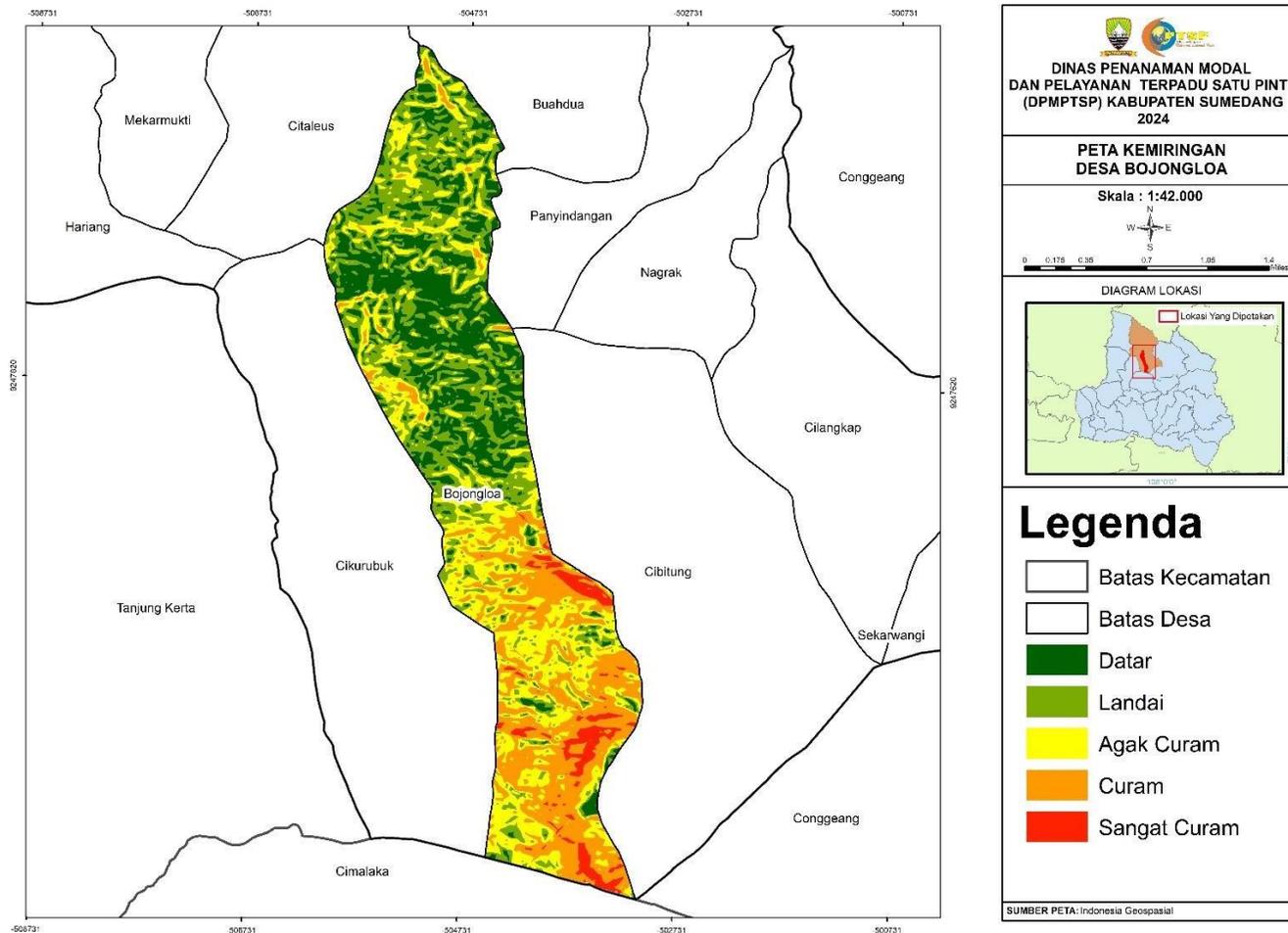
Gambar 4.10. Peta Kemiringan Lereng Desa Cikurubuk



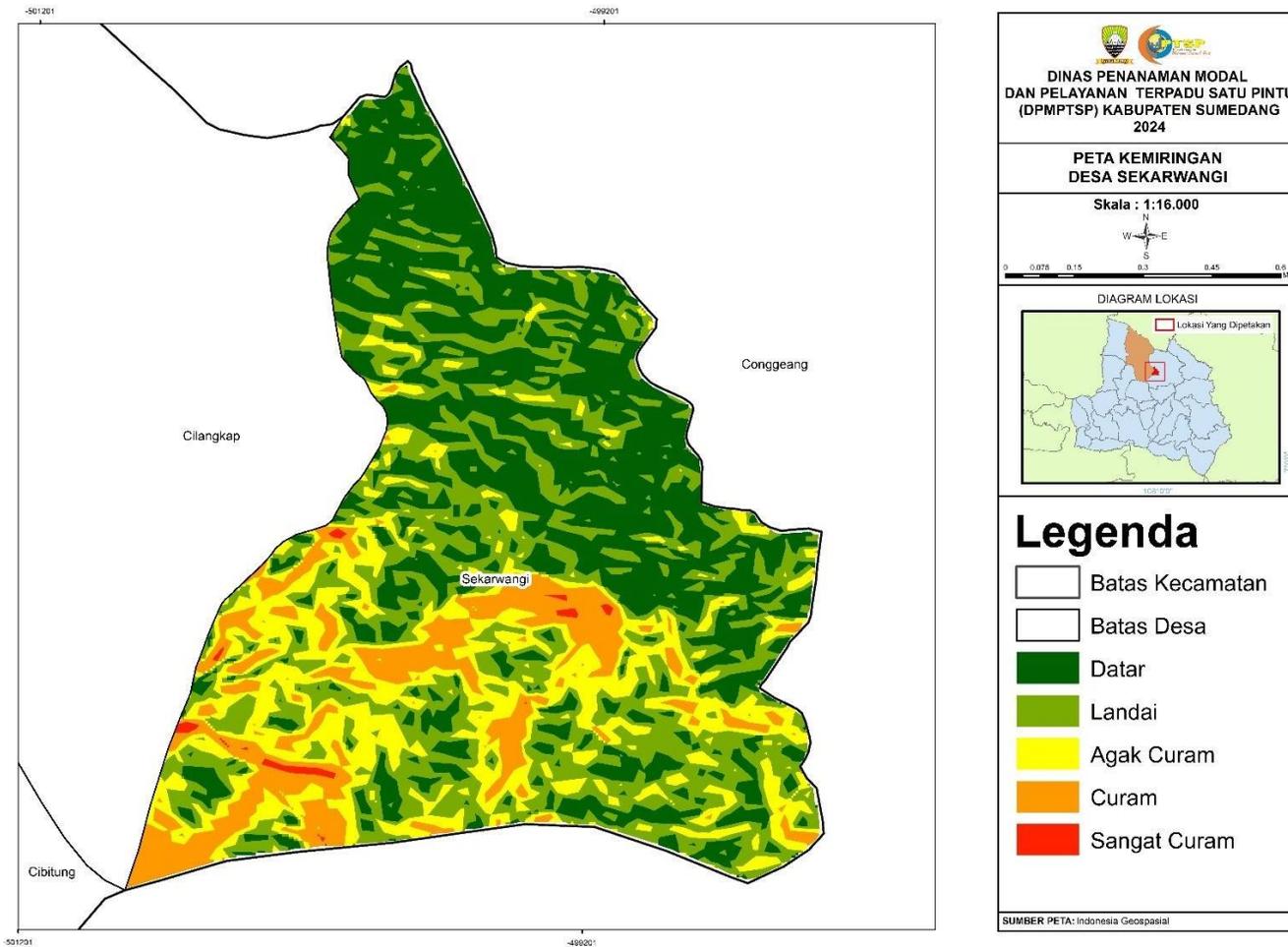
Gambar 4.11. Peta Kemiringan Lereng Desa Cilangkap



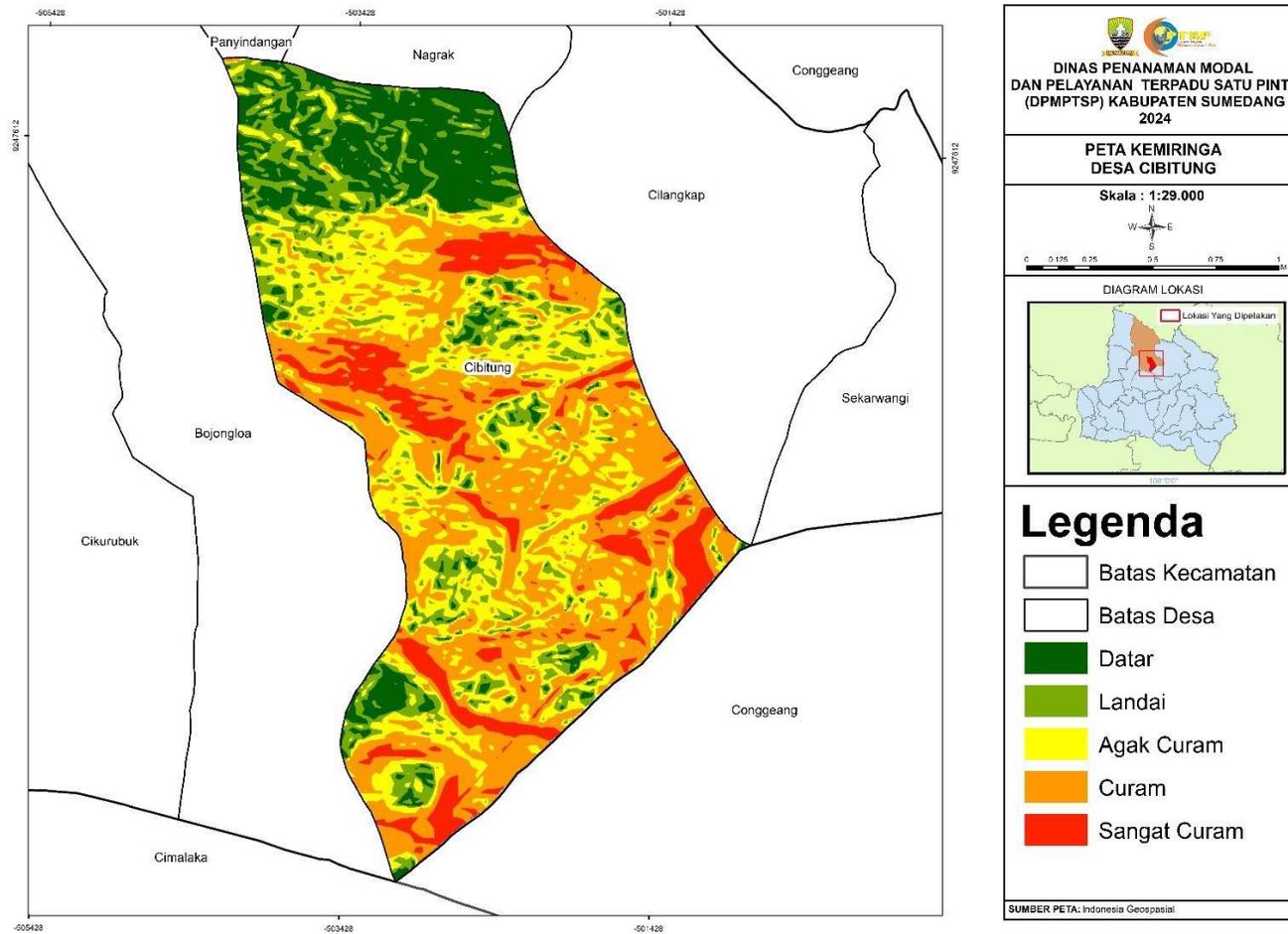
Gambar 4.12. Peta Kemiringan Lereng Desa Bojongloa



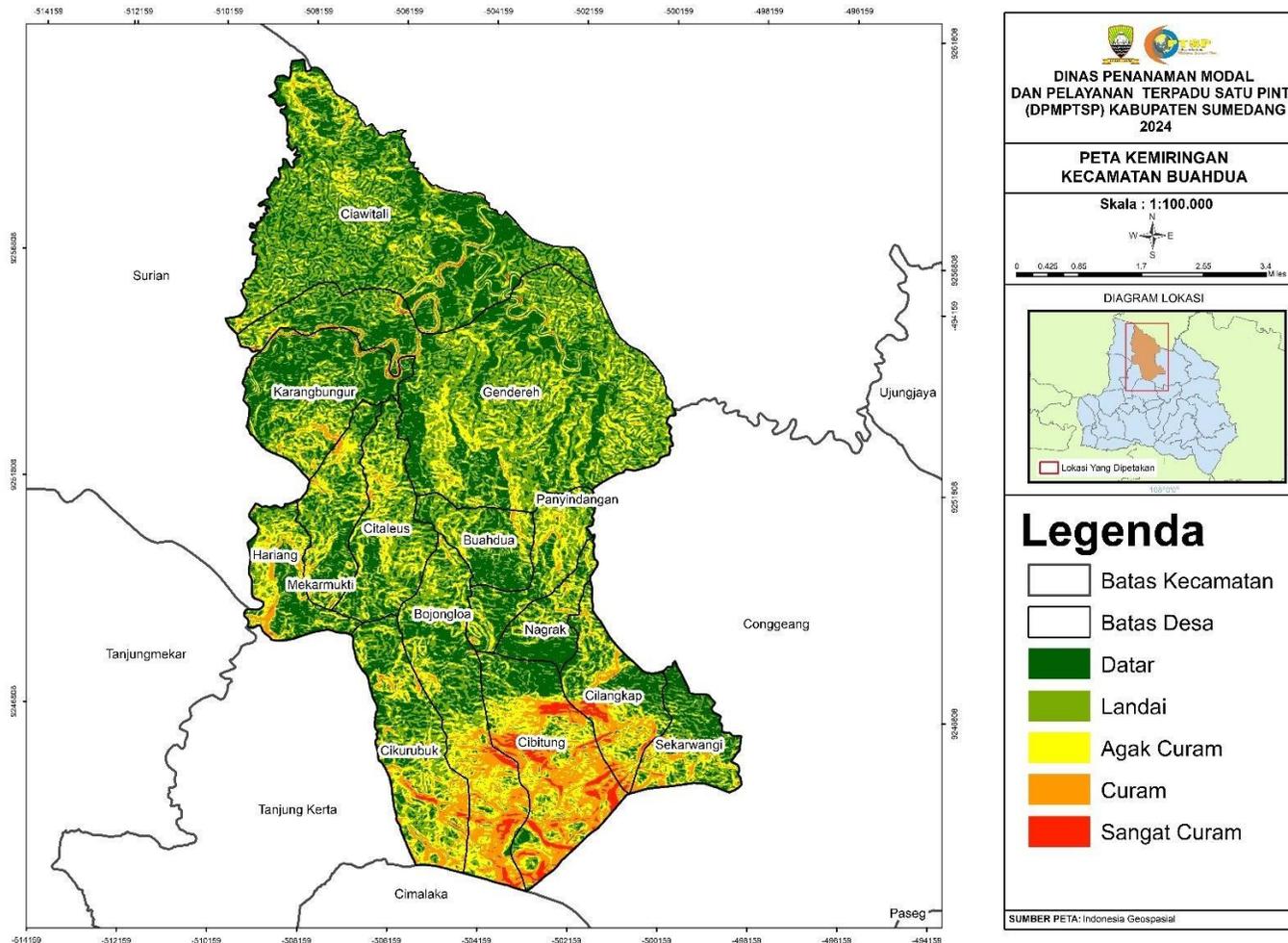
Gambar 4.13. Peta Kemiringan Lereng Desa Sekarwangi



Gambar 4.14. Peta Kemiringan Lereng Desa Cibitung



Gambar 4.15. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Buahdua



4.1.2 Analisis Potensi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Buahdua masih didominasi oleh hutan, perkebunan, ladang, semak belukar, dan sawah pada saat ini. Oleh karena itu, persentase kawasan terbangun atau guna lahan permukiman lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase kawasan non terbangun. Persentase kawasan terbangun atau permukiman dan tempat kegiatan saat ini masih 1,08% jika dibandingkan dengan kawasan non terbangun atau non permukiman dengan persentase 98,92% dari total luas wilayah.

Kondisi tersebut sesuai dengan kondisi penggunaan lahan pada setiap desa di Kecamatan Buahdua yang saat ini juga memiliki dominasi penggunaan lahan non permukiman. Jika dibandingkan, luas permukiman terbesar, desa yang masuk ke dalam wilayah Perkotaan seperti Desa Cilangkap, Sekarwangi, Nagrak dan Buahdua memiliki luasan permukiman jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Buahdua. Besarnya guna lahan non permukiman di setiap desa tersebut pada akhirnya menghasilkan skor yang rendah (1) dalam persentase kawasan terbangun penggunaan lahan *mixed-use*.

Desa Buahdua memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh ladang, dengan luas sebesar 1058,36 Ha atau 52,91%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 64,15 Ha atau 3,21% dari total luas wilayah di Desa Buahdua. Penggunaan lahan perkebunan memiliki luasan yang paling jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Buahdua, yaitu dengan luas 12,78 Ha atau sekitar 0,64%.

Gambar 4.16. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Buahdua



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

Tabel 4.16 Tabel Penggunaan Lahan Desa Buahdua

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	64,15	3,21
2	Sawah	425,09	21,25
3	Ladang	1058,36	52,91
4	Perkebunan	12,78	0,64
5	Semak Belukar	439,77	21,99

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Cilangkap memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh hutan rimba, dengan luas sebesar 4081,32 Ha atau 72,71%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 114,99 Ha atau 2,05% dari total luas wilayah di Desa Cilangkap. Luas permukiman dan tempat kegiatan ini lebih besar jika dibandingkan secara relatif dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Buahdua. Akan tetapi, penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan ini merupakan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Cilangkap.

Gambar 4.17. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Cilangkap



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

Tabel 4.17 Tabel Penggunaan Lahan Desa Cilangkap

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	114,99	2,05
2	Sawah	587,76	10,47
3	Ladang	628,05	11,19
4	Perkebunan	201,19	3,58
5	Semak Belukar	4081,32	72,71

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Sekarwangi memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh semak belukar, dengan luas sebesar 1893,90 Ha atau 43,37%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 130,10 Ha atau 2,98% dari total luas wilayah di Desa Sekarwangi. Penggunaan lahan ladang merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Sekarwangi, dengan luas 1,62 Ha atau 0,04%.

Gambar 4.18. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Sekarwangi



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

Tabel 4.18 Tabel Penggunaan Lahan Desa Sekarwangi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	130,10	2,98
2	Sawah	514,27	11,78
3	Ladang	1,62	0,04
4	Perkebunan	57,72	1,32
5	Semak Belukar	1893,90	43,37
6	Hutan Rimba	1769,38	40,52

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Nagrak memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh sawah, dengan luas sebesar 247,23 Ha atau 52,91%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 41,69 Ha atau 8,92% dari total luas wilayah di Desa Nagrak. Penggunaan lahan semak belukar merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang

paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Nagrak, dengan luas 33,92 Ha atau 7,26%.

Gambar 4.19. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Nagrak



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

Tabel 4.19 Tabel Penggunaan Lahan Desa Nagrak

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	41,69	8,92
2	Sawah	247,23	52,91
3	Perkebunan	144,46	30,91
4	Semak Belukar	33,92	7,26

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Cibitung memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh perkebunan, dengan luas sebesar 205,65 Ha atau 48,78%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 28,36 Ha atau 0,68% dari total luas wilayah di Desa Cibitung. Penggunaan lahan ladang merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Cibitung, dengan luas 83,66 Ha atau 2,01%.

Tabel 4.20 Tabel Penggunaan Lahan Desa Cibitung

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	28,36	0,68
2	Sawah	247,23	5,95

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
3	Ladang	83,66	2,01
4	Perkebunan	2025,65	48,78
5	Semak Belukar	1767,50	42,57

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 4.20. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Cibitung



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

Desa Bojongloa memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh semak belukar, dengan luas sebesar 2137,33 Ha atau 36,32%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 46,46 Ha atau 0,79% dari total luas wilayah di Desa Bojongloa. Penggunaan lahan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Bojongloa.

Gambar 4.21. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Bojongloa



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

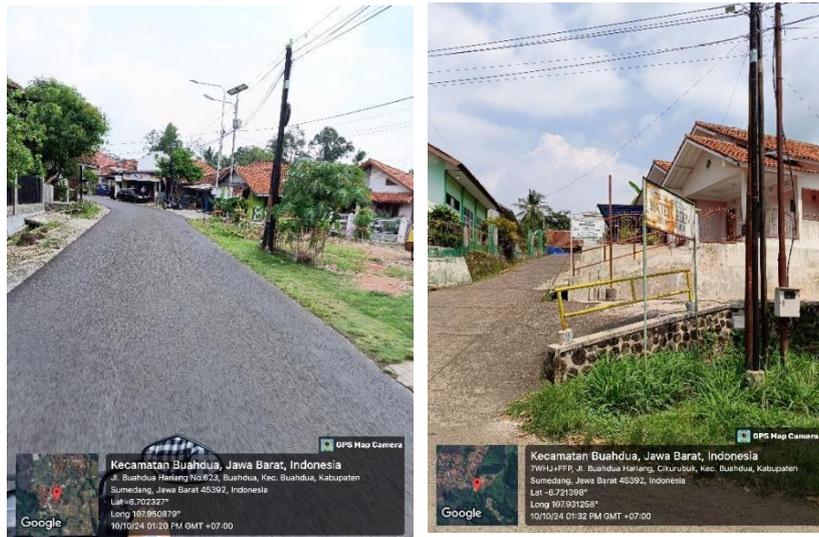
Tabel 4.21 Tabel Penggunaan Lahan Desa Bojongloa

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	46,46	0,79
2	Sawah	1564,12	26,58
3	Ladang	251,53	4,27
4	Perkebunan	117,83	2,00
5	Semak Belukar	2137,33	36,32
6	Hutan Kering	1767,50	30,04

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Cikurubuk memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh semak belukar, dengan luas sebesar 1969,61 Ha atau 52,60%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 42,99 Ha atau 1,15% dari total luas wilayah di Desa Cikurubuk. Penggunaan lahan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Cikurubuk.

Gambar 4.22. Kondisi Penggunaan Lahan Permukiman Desa Cikurubuk



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

Tabel 4.22 Tabel Penggunaan Lahan Desa Cikurubuk

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	42,99	1,15
2	Sawah	1232,95	32,93

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
3	Ladang	210,10	5,61
4	Perkebunan	288,99	7,72
5	Semak Belukar	1969,61	52,60
6	Hutan Rimba	1767,50	47,20
Total		3744,64	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Mekarmukti memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh sawah, dengan luas sebesar 1232,95 Ha atau 52,43%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 22,88 Ha atau 0,97% dari total luas wilayah di Desa Mekarmukti. Penggunaan lahan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Mekarmukti.

Tabel 4.23 Penggunaan Lahan Desa Mekarmukti

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	22,88	0,97
2	Sawah	1232,95	52,43
3	Ladang	74,38	3,16
4	Perkebunan	124,86	5,31
5	Semak Belukar	704,45	29,95
6	Hutan Rimba	192,26	8,18

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Citaleus memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh sawah, dengan luas sebesar 1372,88 Ha atau 68,22%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 27,66 Ha atau 1,37% dari total luas wilayah di Desa Citaleus. Penggunaan lahan perkebunan merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil jika dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Citaleus, dengan luas 0,74%.

Tabel 4.24 Tabel Penggunaan Lahan Desa Citaleus

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	27,66	1,37

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
2	Sawah	1372,88	68,22
3	Ladang	267,46	13,29
4	Perkebunan	14,84	0,74
5	Semak Belukar	329,46	16,37
Total		2012,30	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Hariang memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh sawah, dengan luas sebesar 1269,01 Ha atau 71,76%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 26,71 Ha atau 1,51% dari total luas wilayah di Desa Hariang. Penggunaan lahan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Hariang.

Tabel 4.25 Tabel Penggunaan Lahan Desa Hariang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	26,71	1,51
2	Sawah	1269,01	71,76
3	Ladang	36,19	2,05
4	Perkebunan	124,86	7,06
5	Semak Belukar	311,54	17,62

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Panyindangan memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh perkebunan, dengan luas sebesar 2147,98 Ha atau 45,03%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 35,13 Ha atau 0,74% dari total luas wilayah di Desa Panyindangan. Penggunaan lahan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Panyindangan.

Tabel 4.26 Penggunaan Lahan Desa Panyindangan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	35,13	0,74
2	Sawah	1480,18	31,03
3	Ladang	797,12	16,71

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
4	Perkebunan	2147,98	45,03
5	Semak Belukar	310,15	6,50

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Karangbungur memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh sawah, dengan luas sebesar 294,35 Ha atau 32,30%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 15,03 Ha atau 1,65% dari total luas wilayah di Desa Karangbungur. Penggunaan lahan tanah kosong merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Karangbungur, dengan luas 6,04 Ha atau 0,66%.

Tabel 4.27 Tabel Penggunaan Lahan Desa Karangbungur

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	15,03	1,65
2	Sawah	294,35	32,30
3	Ladang	136,86	15,02
4	Tanah Kosong	6,04	0,66
5	Semak Belukar	266,88	29,28
6	Hutan Rimba	192,26	21,09

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Gendereh memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh perkebunan, dengan luas sebesar 7003,43 Ha atau 67,20%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 23,92 Ha atau 0,23% dari total luas wilayah di Desa Gendereh. Penggunaan lahan tanah kosong merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Gendereh, dengan luas 1,93 Ha atau 0,02%.

Tabel 4.28 Tabel Penggunaan Lahan Desa Gendereh

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	23,92	0,23
2	Sawah	723,05	6,94
3	Ladang	1204,08	11,55
4	Tanah Kosong	7003,43	67,20

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
5	Semak Belukar	1,926912	0,02
6	Hutan Rimba	1465,54	14,06

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Ciawitali memiliki penggunaan lahan yang didominasi oleh perkebunan, dengan luas sebesar 7003,43 Ha atau 81,39%. Sedangkan untuk jenis penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan memiliki luas 14,38 Ha atau 0,17% dari total luas wilayah di Desa Ciawitali. Penggunaan lahan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan yang paling kecil dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya di Desa Ciawitali.

Tabel 4.29 Tabel Penggunaan Lahan Desa Ciawitali

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	14,38	0,17
2	Sawah	260,33	3,03
3	Ladang	388,41	4,51
4	Perkebunan	7003,43	81,39
5	Semak Belukar	938,58	10,91

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap penggunaan lahan setiap desa di Kecamatan Buahdua, diketahui bahwa rata-rata persentase penggunaan lahan kawasan terbangun campuran (*mixed-use*) masih rendah, yaitu sekitar 1,88%. Oleh karena itu, skor potensi penggunaan lahan untuk setiap desa bernilai 1. Akan tetapi, jika dibandingkan secara relatif antar desa berdasarkan nilai persentase penggunaan lahan permukiman dan tempat kegiatan, Desa Buahdua, Desa Sekarwangi dan Desa Nagrak memiliki persentase yang tinggi.

Tabel 4.30 Tabel Skor Persentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Persentase Penggunaan Lahan <i>mixed-use</i> (%)	Skor	Klasifikasi
Ciawitali	0,17	1	Rendah
Gendereh	0,23	1	Rendah
Cibitung	0,68	1	Rendah
Panyindangan	0,74	1	Rendah
Bojongloa	0,79	1	Rendah
Mekarmukti	0,97	1	Rendah
Cikurubuk	1,15	1	Rendah
Citaleus	1,37	1	Rendah

Nama Desa	Persentase Penggunaan Lahan <i>mixed-use</i> (%)	Skor	Klasifikasi
Hariang	1,51	1	Rendah
Karangbungur	1,65	1	Rendah
Cilangkap	2,05	1	Rendah
Sekarwangi	2,98	1	Rendah
Buahdua	3,21	2	Sedang
Nagrak	8,92	3	Tinggi

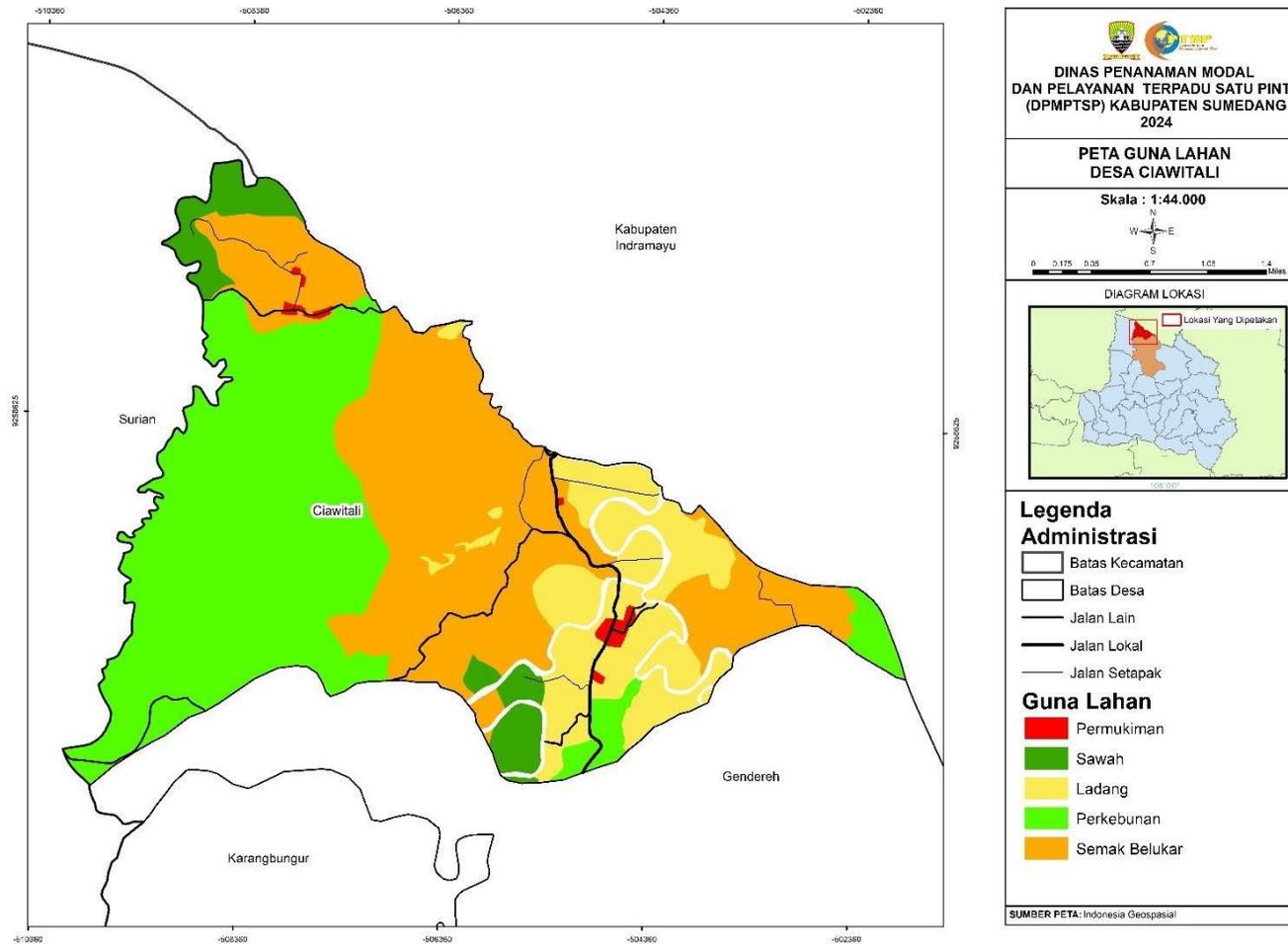
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Desa Buahdua dan Desa Sekarwangi sudah berkembang menjadi permukiman perkotaan. Berdasarkan RDTR Pemutakhiran Tahun 2023-2043, Desa Buahdua diarahkan menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang juga diarahkan menjadi pusat pemerintahan, kawasan pusat pelayanan kesehatan, serta perdagangan jasa dan pemasaran.

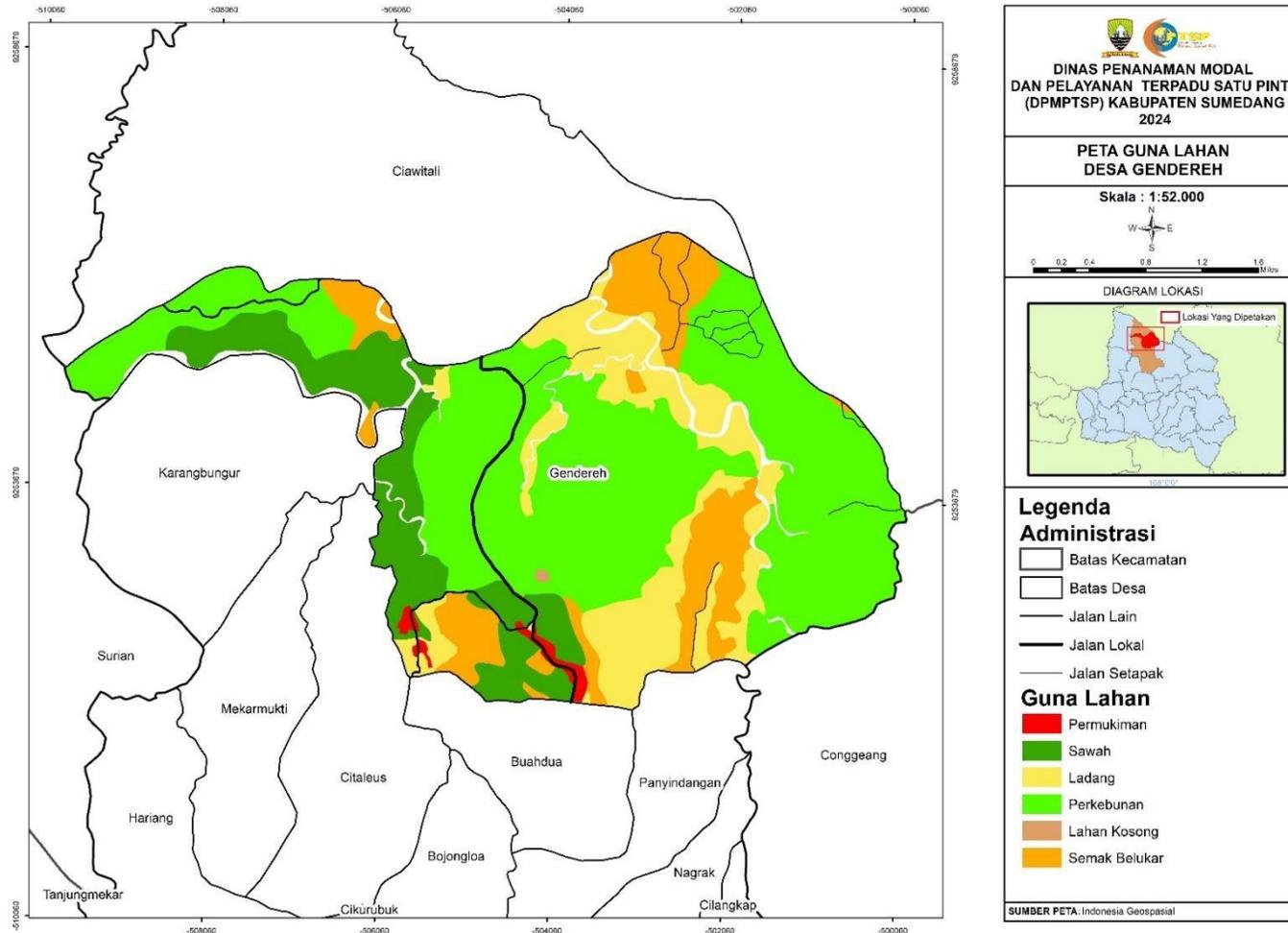
Desa Sekarwangi menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang juga diarahkan untuk kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian dan perikanan, serta kawasan industri. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi perkotaan dan penggunaan lahan *mixed-use* cenderung lebih banyak di desa-desa tersebut. Walaupun begitu, tetap saja penilaian skor rendah dan sedang juga sudah sesuai dengan kondisi eksisting. Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran RDTR Kecamatan Buahdua Tahun 2023-2043, tidak terdapat arahan rencana pengembangan untuk zona campuran. Zona perumahan Desa Buahdua dan Sekarwangi pun diarahkan untuk Zona Perumahan Kepadatan Sedang.

Sedangkan Desa Nagrak memiliki persentase kawasan permukiman yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya karena luas wilayahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Buahdua, bukan karena *mixed-use landuse* yang lebih tinggi. Pengembangan kawasan peruntukan campuran atau *mixed-use landuse* memang mendukung efisiensi dalam hal biaya transportasi, karena kegiatan perumahan, perkantoran, dan komersil berada dalam satu kawasan yang menjadi salah satu pertimbangan investor. Saat ini potensi penggunaan lahan campuran di Kecamatan Buahdua sudah ada, terutama pada Desa Buahdua dan Desa Sekarwangi. Selanjutnya adalah mengenai dukungan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tepat dalam hal memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi.

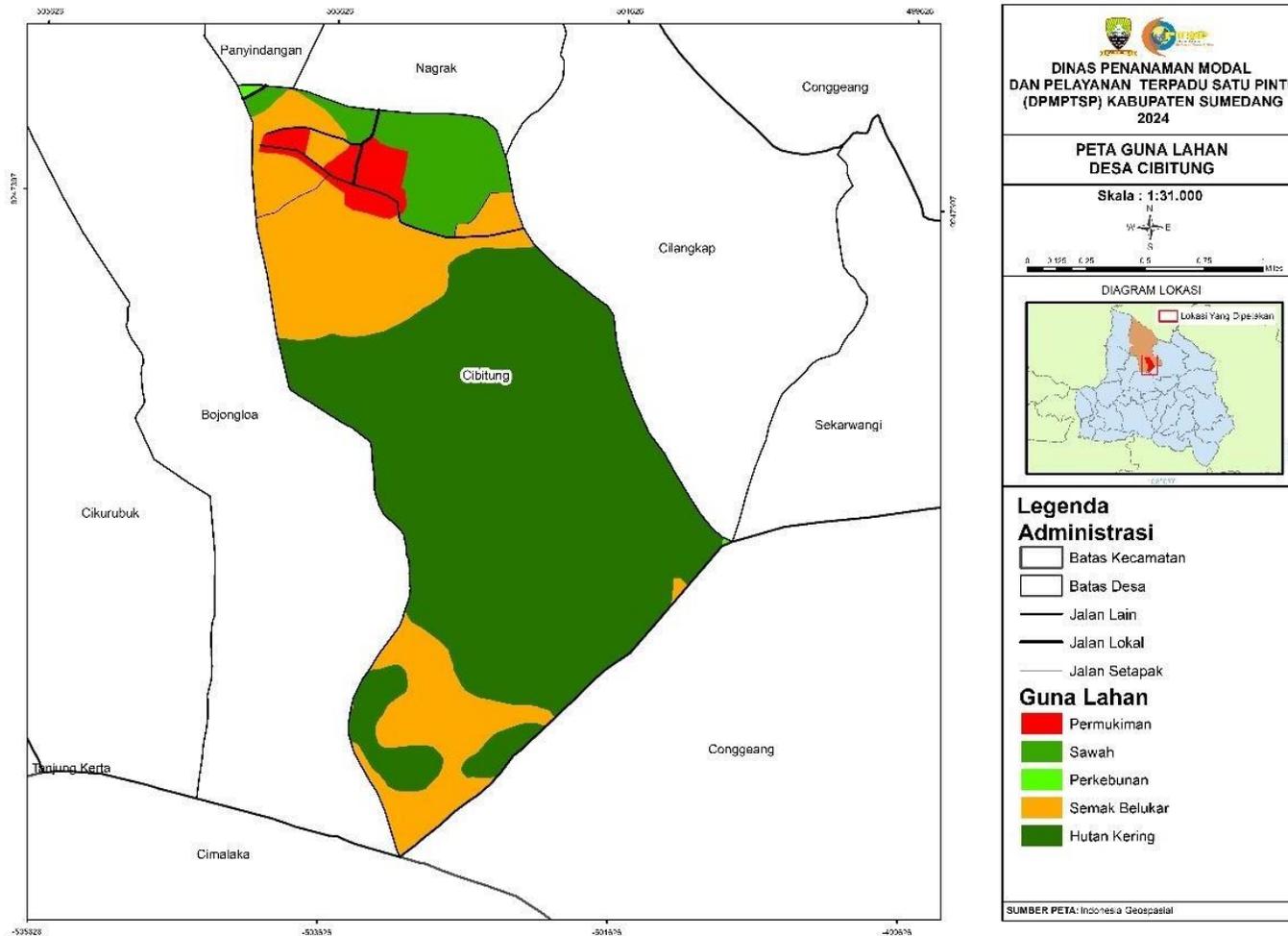
Gambar 4.23. Peta Penggunaan Lahan Desa Ciawitali



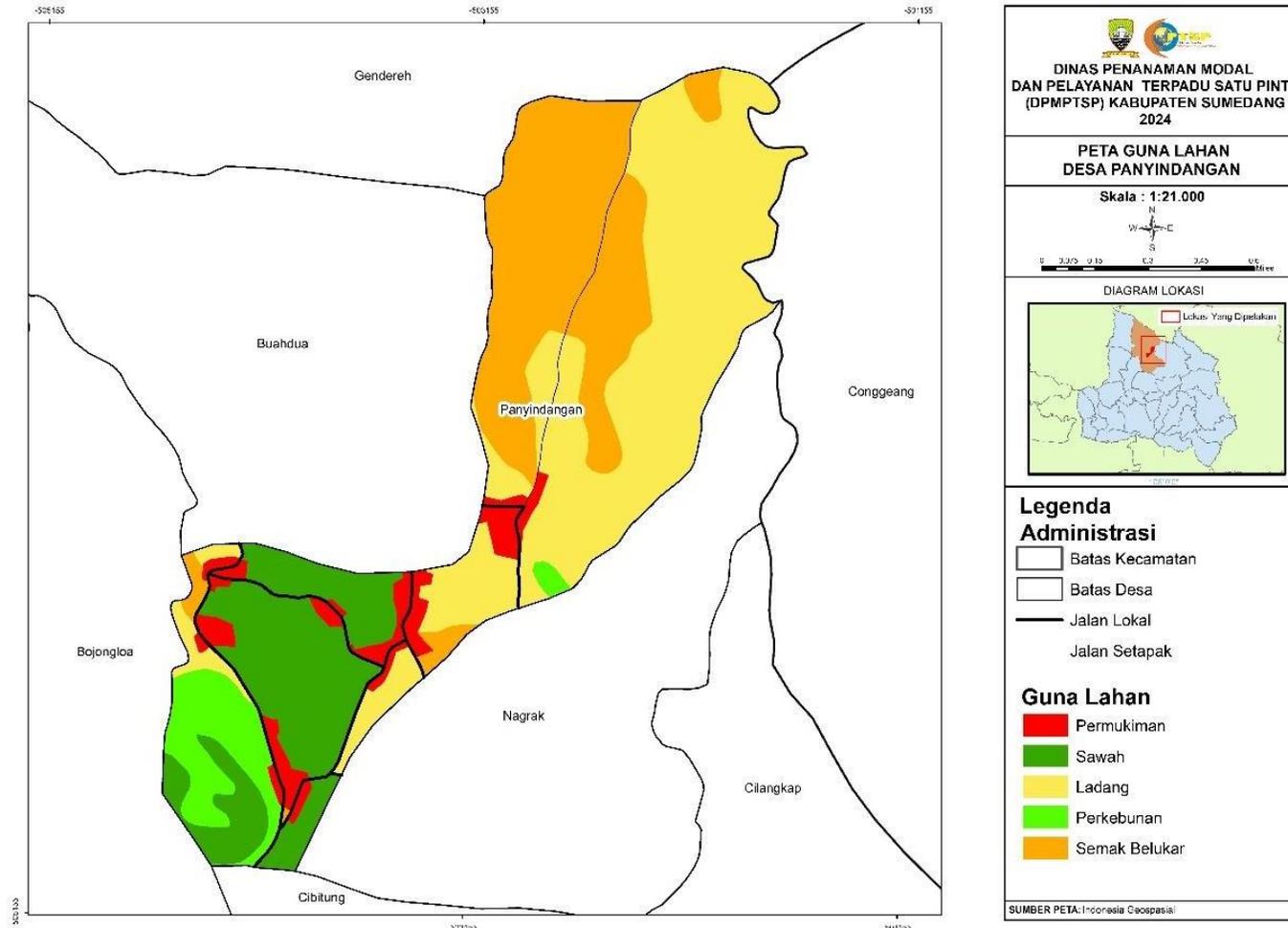
Gambar 4.24. Peta Penggunaan Lahan Desa Gendereh



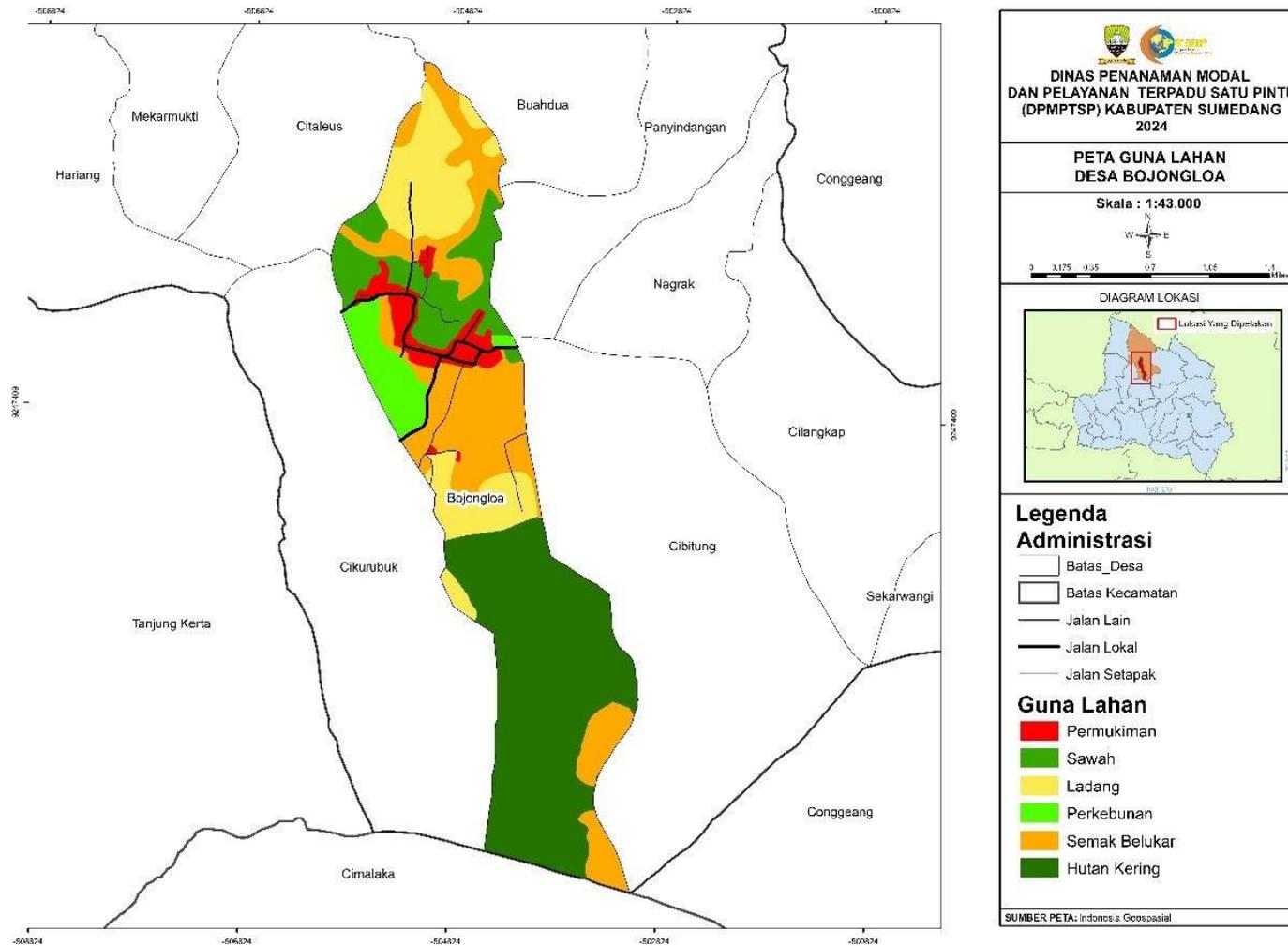
Gambar 4.25. Peta Penggunaan Lahan Desa Cibitung



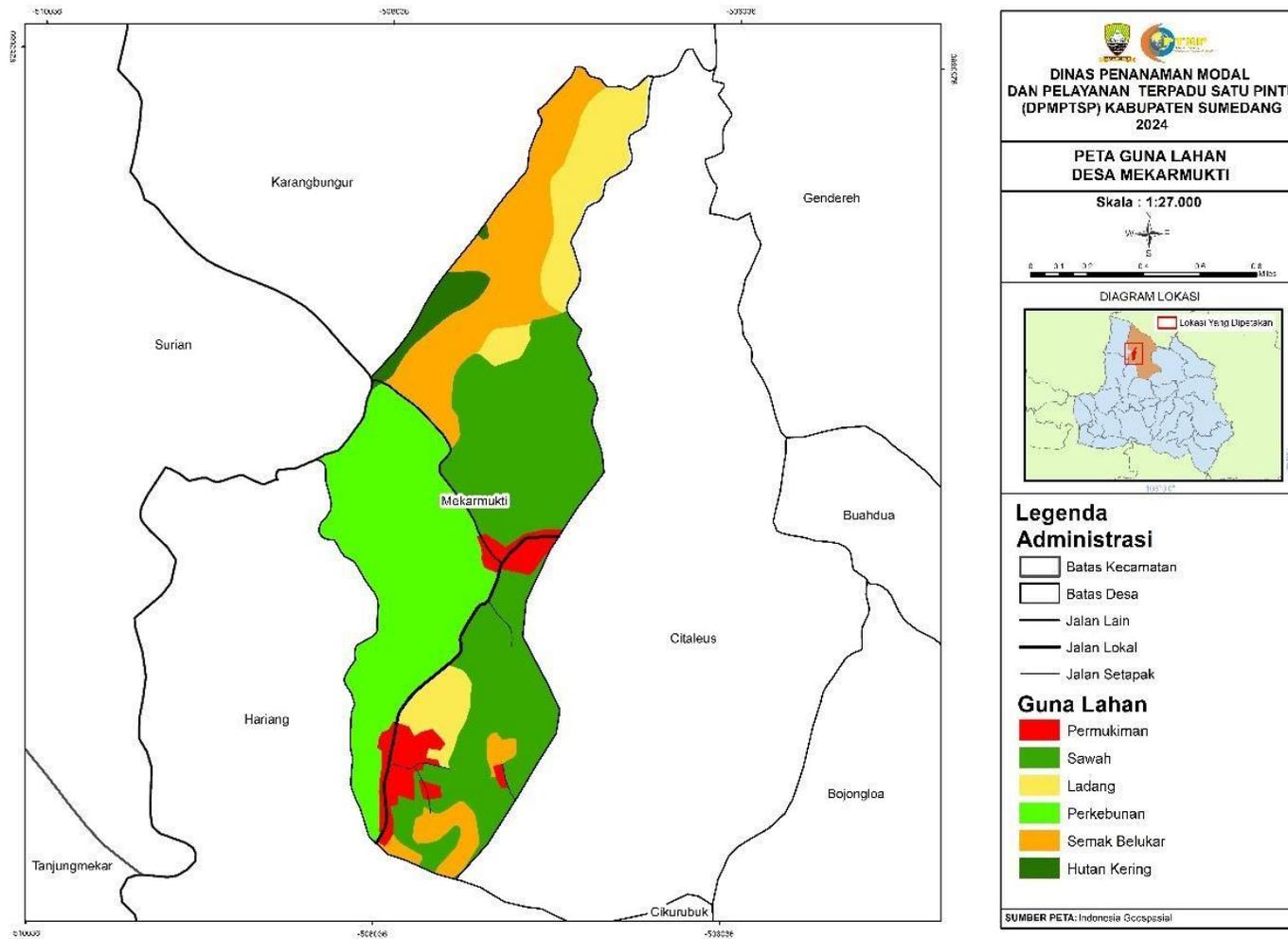
Gambar 4.26. Peta Penggunaan Lahan Desa Panyindangan



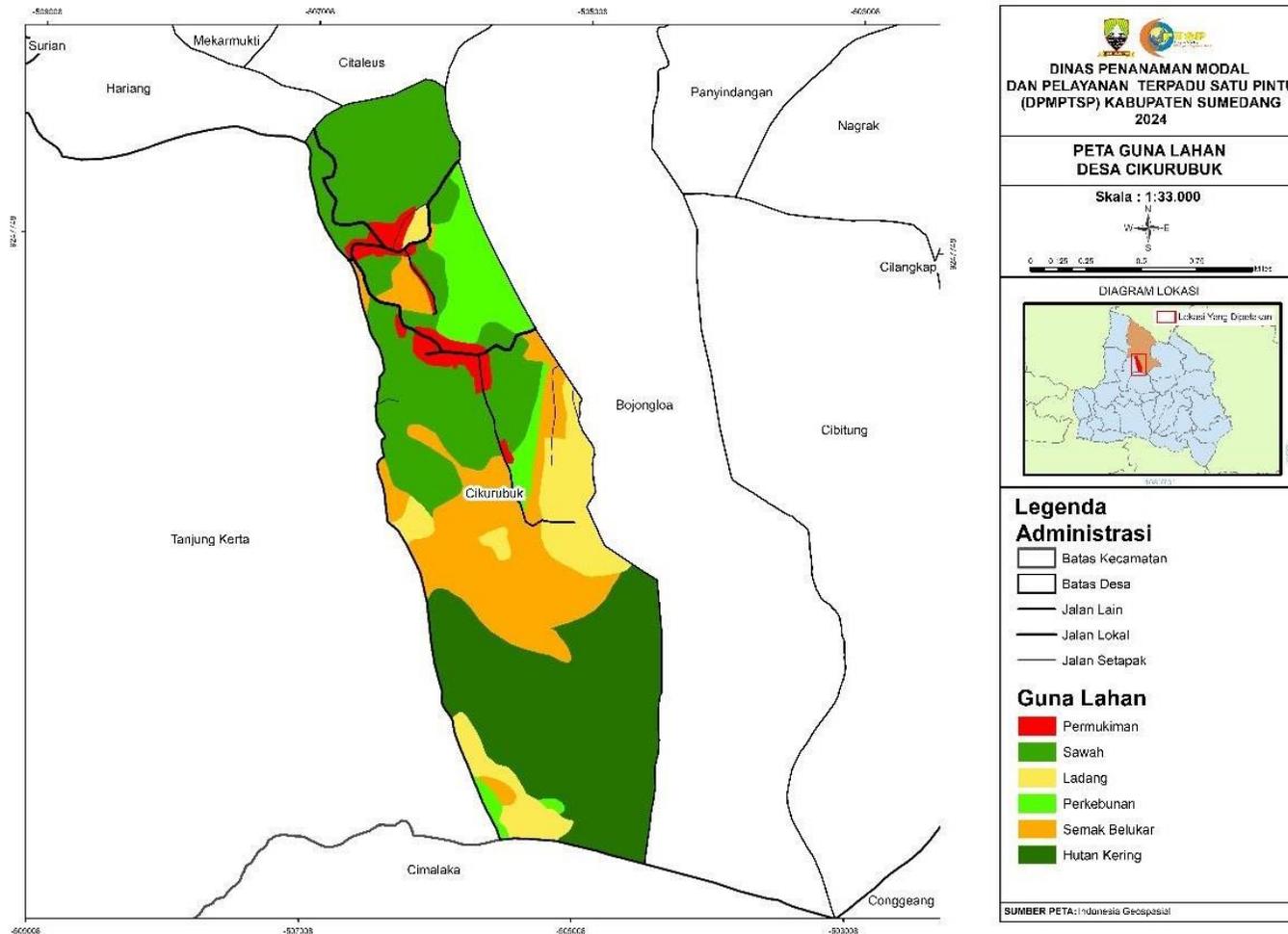
Gambar 4.27. Peta Penggunaan Lahan Desa Bojongloa



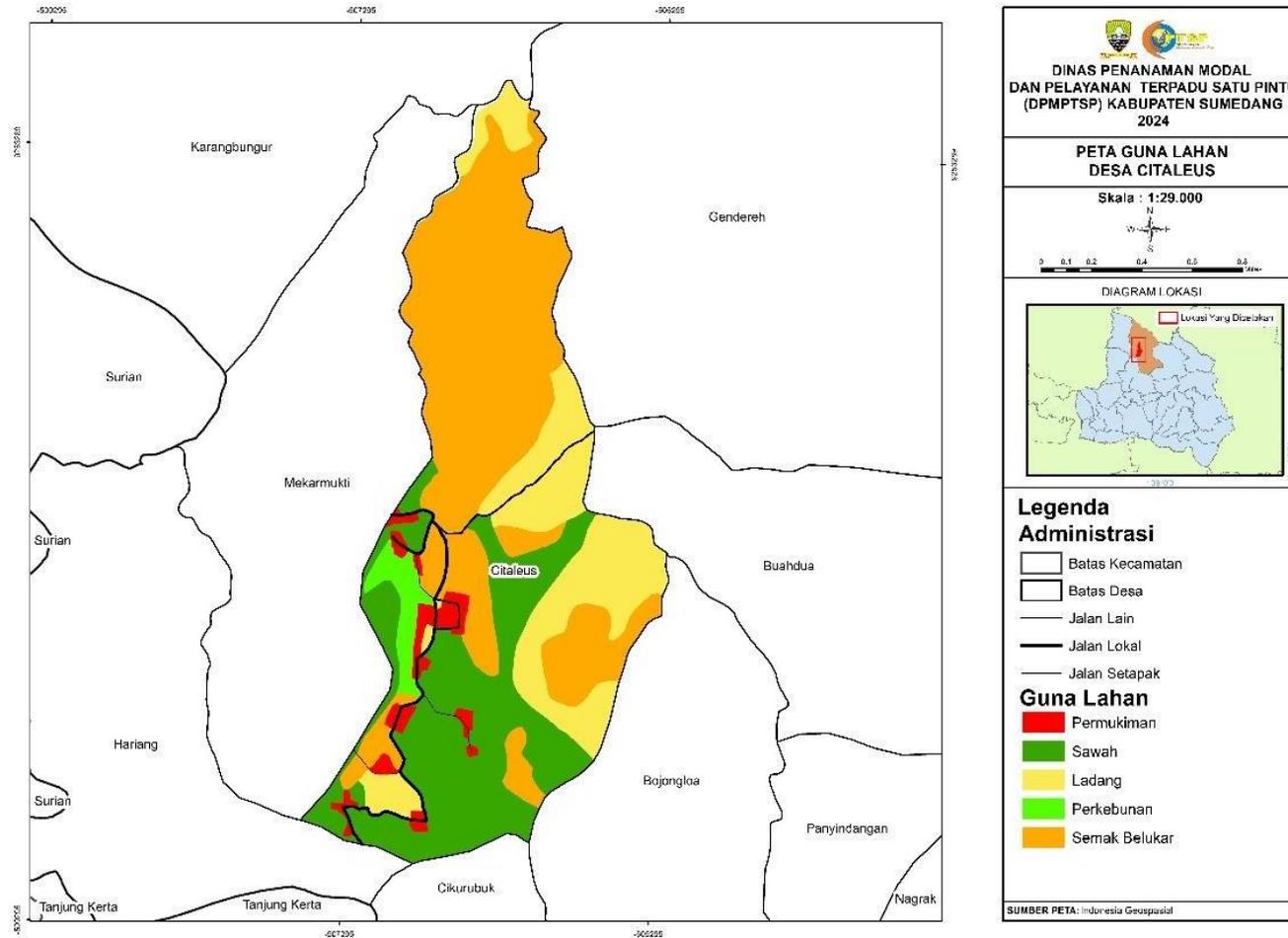
Gambar 4.28. Peta Penggunaan Lahan Desa Mekarmukti



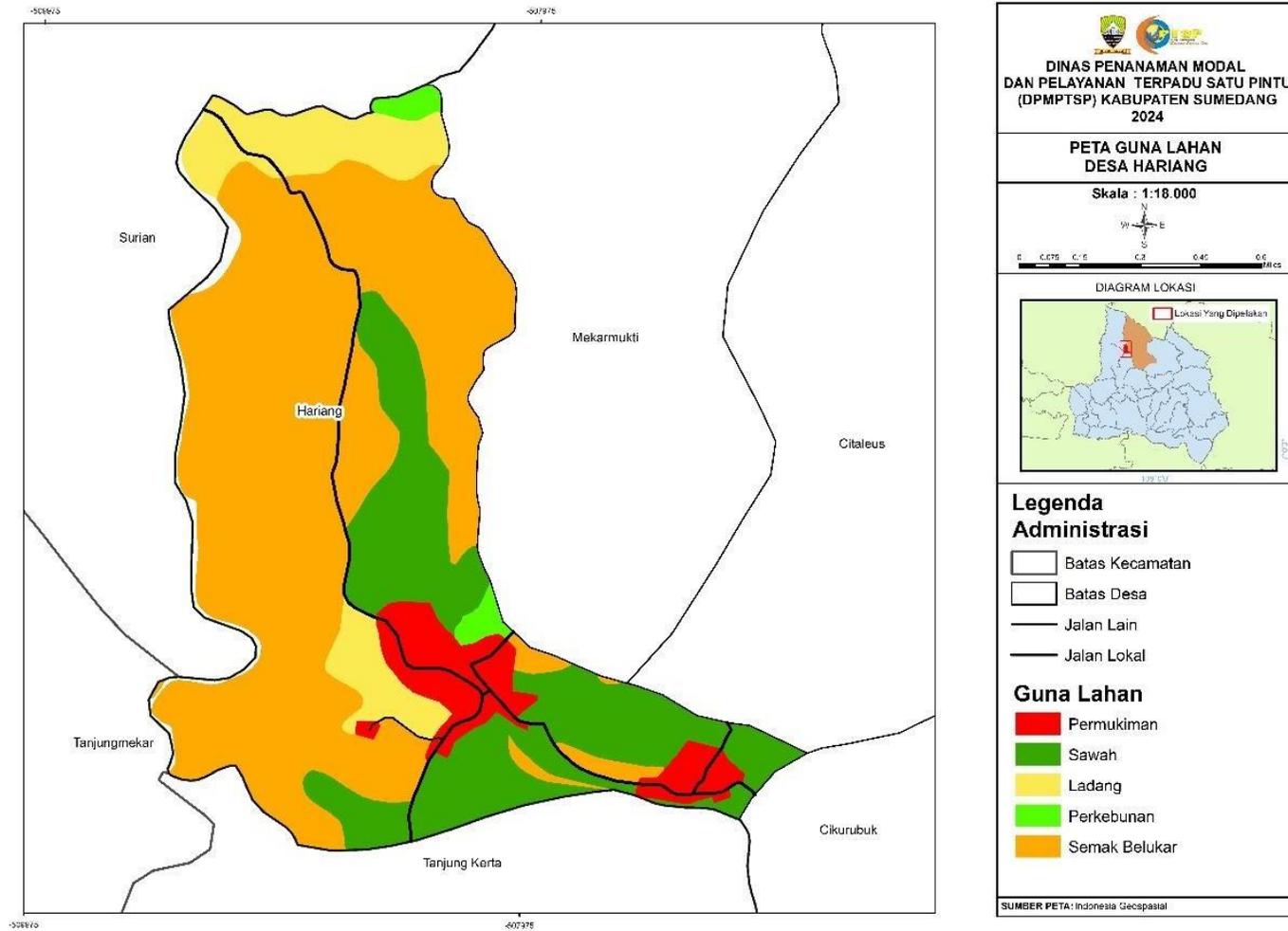
Gambar 4.29. Peta Penggunaan Lahan Desa Cikurubuk



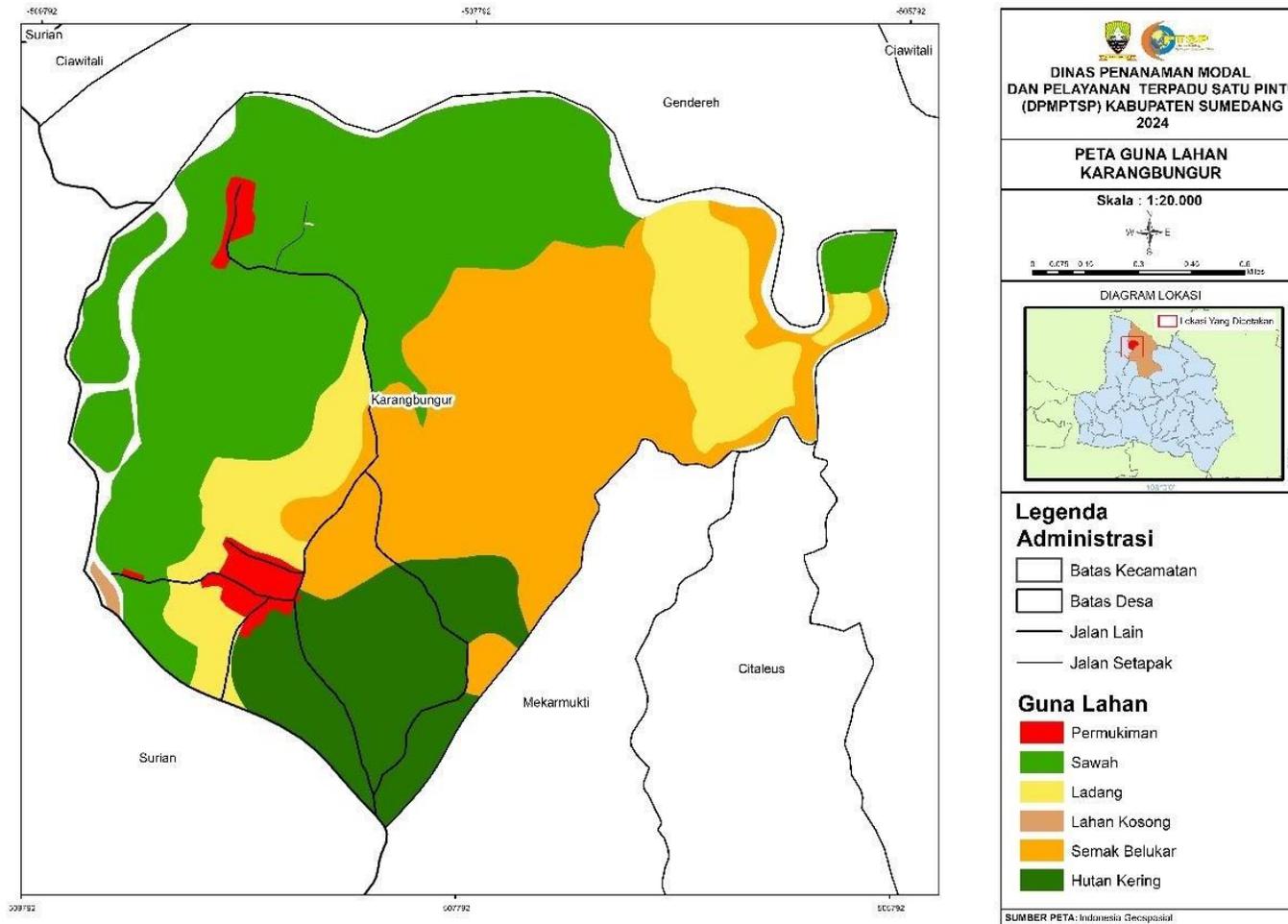
Gambar 4.30. Peta Penggunaan Lahan Desa Citalaus



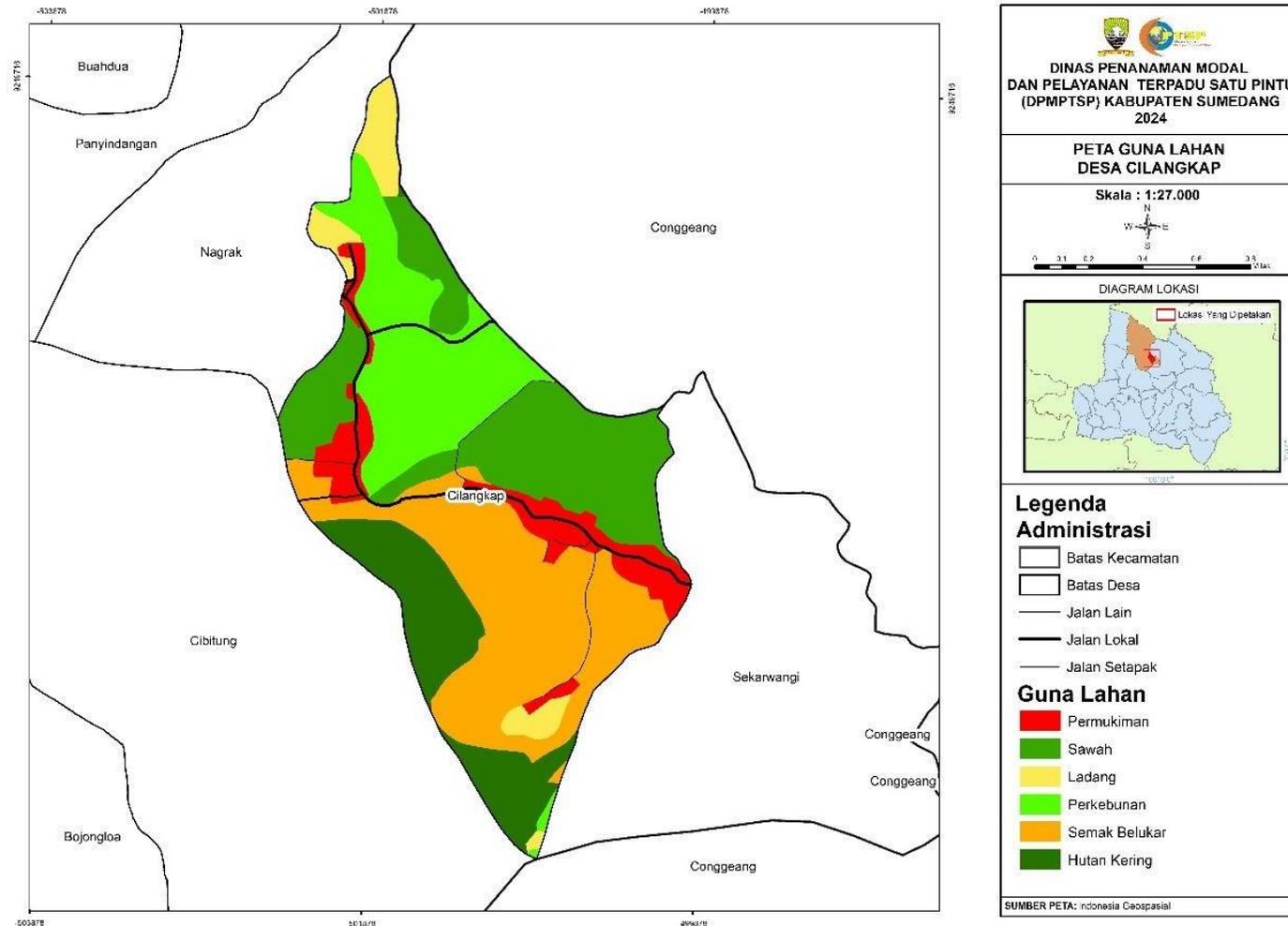
Gambar 4.31. Peta Penggunaan Lahan Desa Hariang



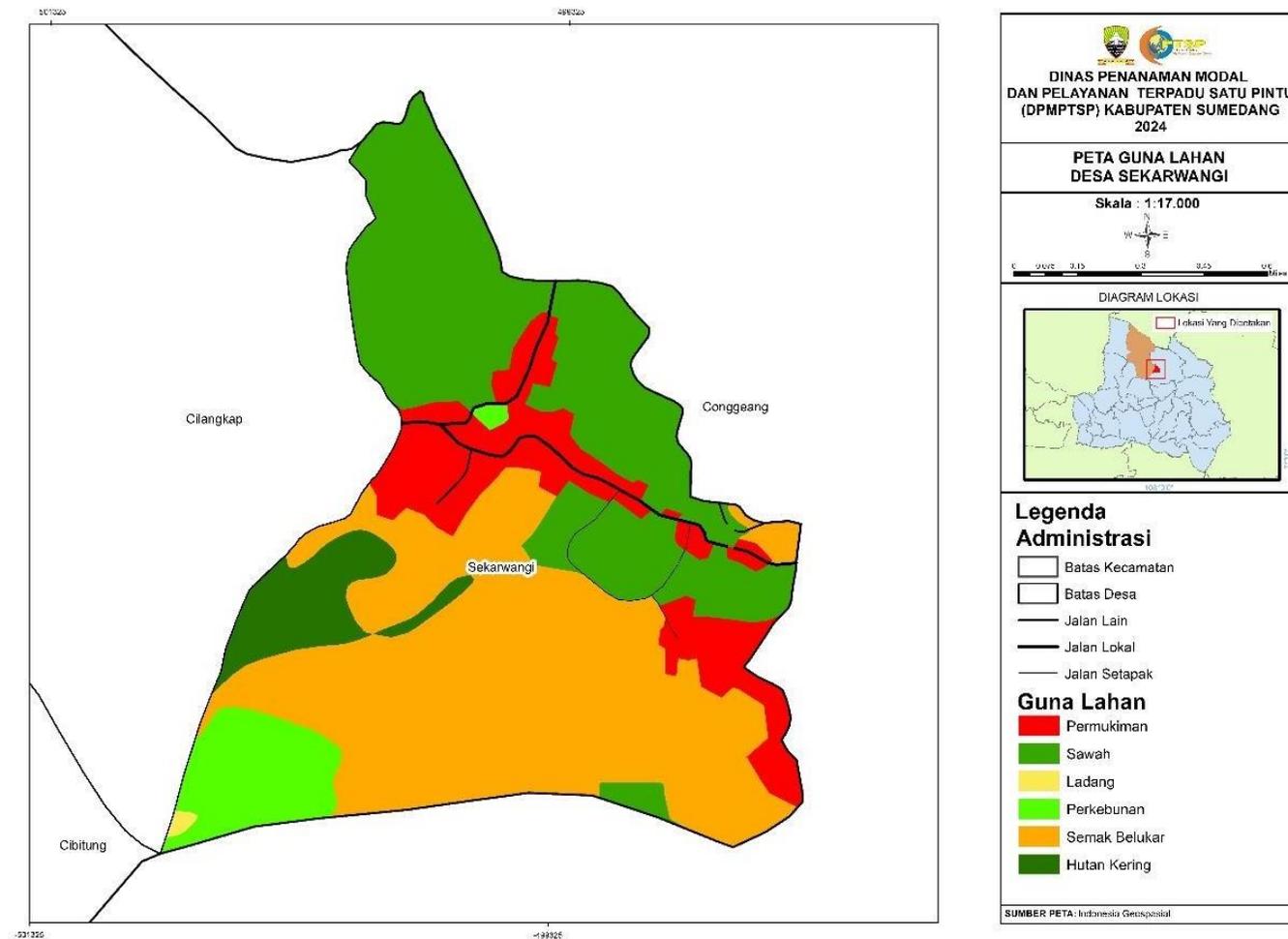
Gambar 4.32. Peta Penggunaan Lahan Desa Karangbungur



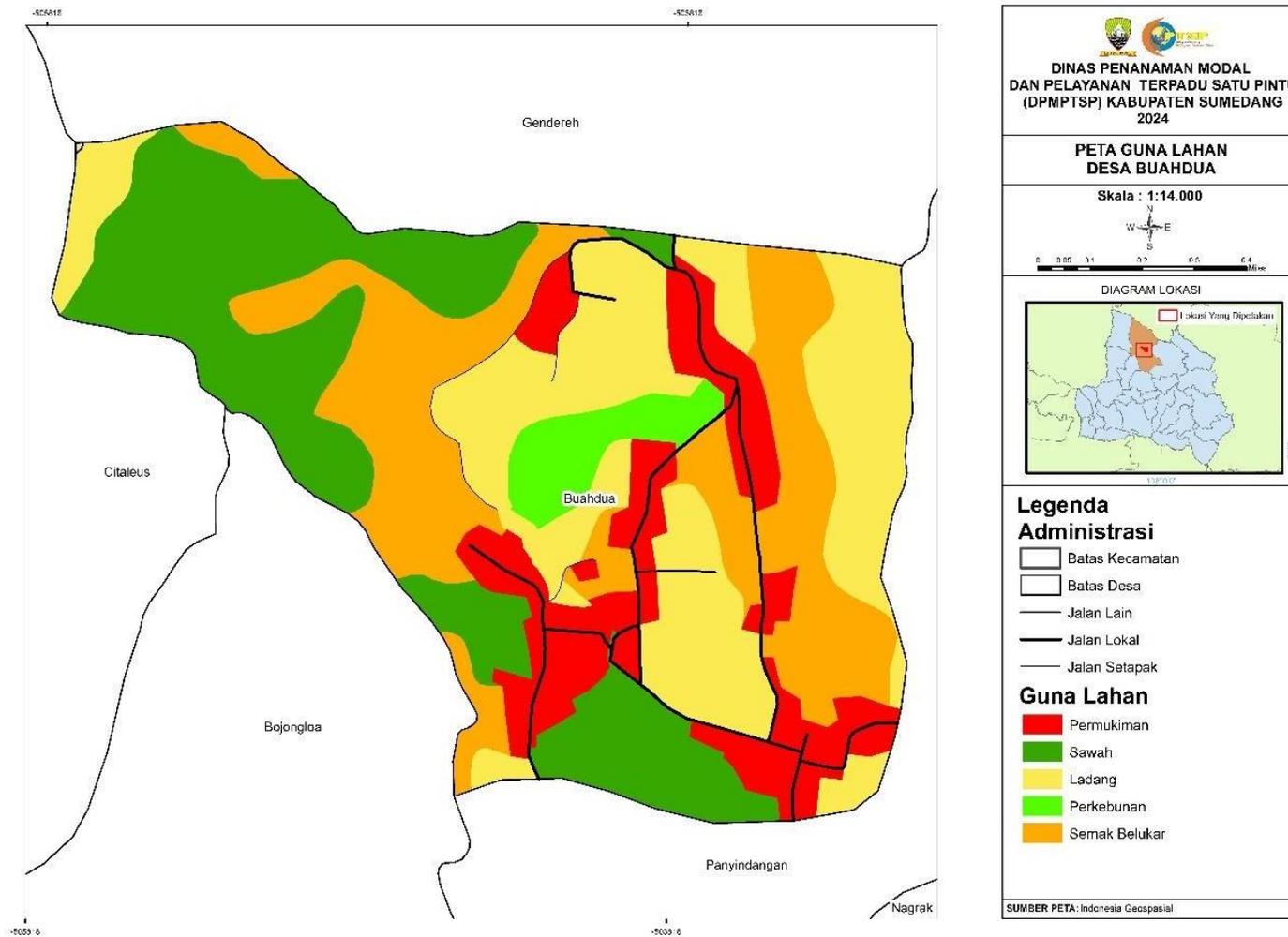
Gambar 4.33. Peta Penggunaan Lahan Desa Cilangkap



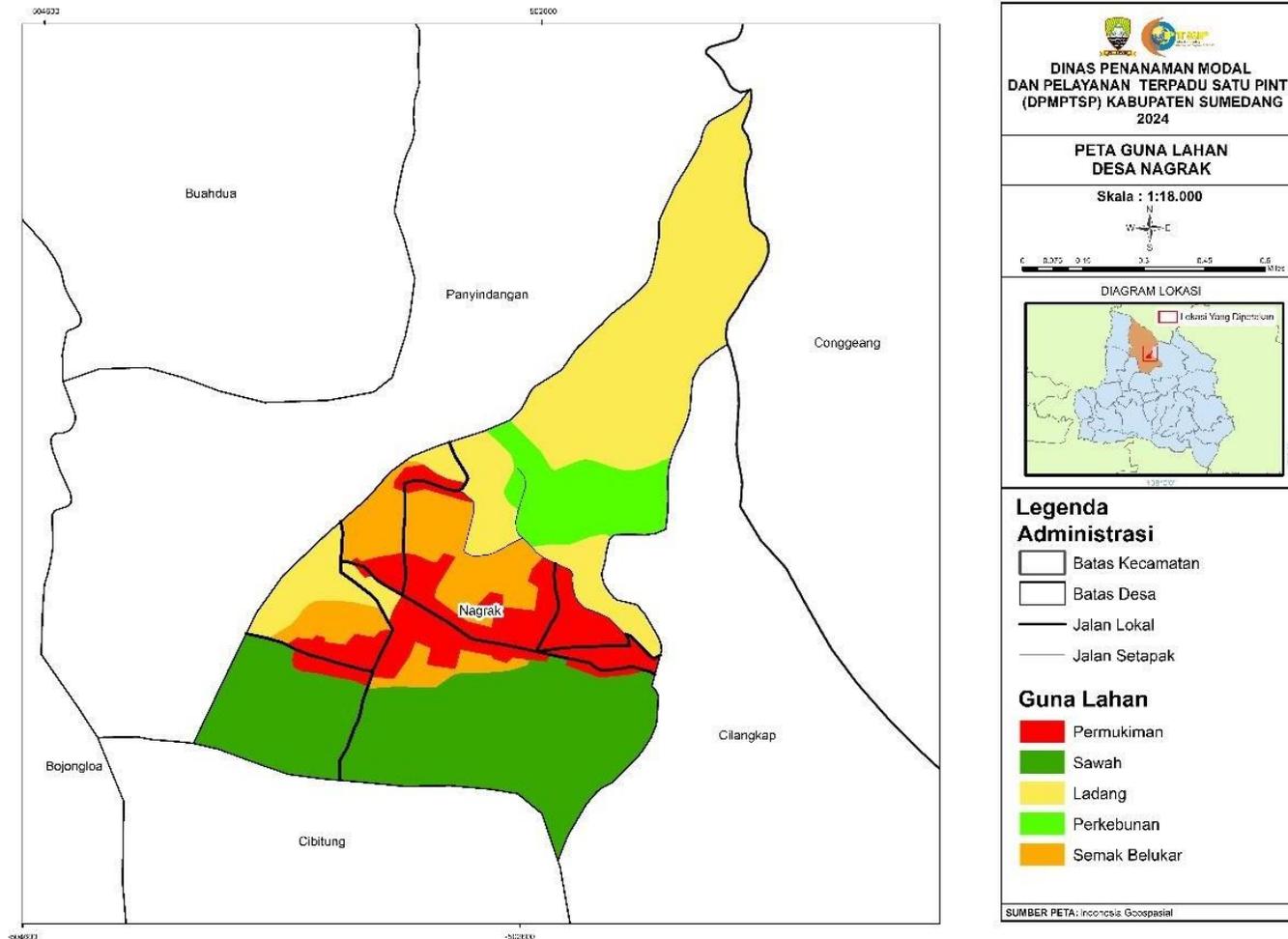
Gambar 4.34. Peta Penggunaan Lahan Desa Sekarwangi



Gambar 4.35. Peta Penggunaan Lahan Desa Buahdua



Gambar 4.36. Peta Penggunaan Lahan Desa Nagrak



4.1.3 Analisis Potensi Hidrologi

Ketersediaan hidrologi dan penarikan investasi memiliki hubungan yang signifikan, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan air dalam jumlah besar, seperti pertanian, manufaktur, energi, dan pariwisata. Hidrologi yang stabil dan terkelola dengan baik merupakan faktor penting dalam menarik investasi, terutama dalam industri-industri yang membutuhkan pasokan air tinggi, seperti tekstil, pangan, dan farmasi. Kawasan yang memiliki sumber daya air yang melimpah cenderung lebih menarik bagi investasi dalam sektor-sektor ini. Kawasan dengan pengelolaan sumber daya air yang baik lebih menarik bagi investor yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Ketersediaan hidrologi yang baik ditambah dengan regulasi yang mendukung konservasi air menjadi daya tarik bagi perusahaan yang akan menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder, ditemukan bahwa setiap desa yang ada di Kecamatan setidaknya memiliki lebih dari satu sungai yang dapat menjadi sumber air baku. Sesuai dengan hasil penilaian potensi fisik dari indikator hidrologi, desa-desa yang terdapat di Kecamatan Buahdua rata-rata memiliki potensi hidrologi rendah. Hasil analisis statistik distribusi frekuensi memperlihatkan bahwa desa dengan potensi hidrologi tinggi di Kecamatan Buahdua adalah Desa Ciawitali. Desa-desa lainnya memiliki potensi hidrologi sedang dan rendah.

Akan tetapi, menurut informasi hasil wawancara survey lapangan dan penggalan isu-masalah pada penyusunan Dokumen RDTR Pemutakhiran Kecamatan Buahdua Tahun 2023-2043, terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan infrastruktur air bersih baik dengan sistem perpipaan atau non-perpipaan. Desa yang memiliki masalah dalam penyediaan infrastruktur air bersih diantaranya Desa Panyindangan, Buahdua, Gendeh, Mekarmukti, Hariang, Citaleus, dan Buahdua. Saat ini, Desa Citaleus, Mekarmukti dan Hariang membeli air bersih dari Desa Cikurubuk. Bahkan Desa Citaleus tidak memiliki mata air. Sedangkan Desa Ciawitali mendapatkan air bersih dari Desa Buahdua. Penilaian terhadap ketersediaan air bersih dilakukan pada analisis potensi infrastruktur. Berikut merupakan jumlah keberadaan sungai dan penilaian terhadap sumber daya air yang dapat menjadi sumber air baku dalam rangka mendukung investasi di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.31 Tabel Skor dan klasifikasi Potensi Hidrologi Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Sungai yang melewati	Jumlah Sungai	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Bubuan ▪ Ci Kumutuk ▪ Ci Banara 	3	1	Rendah
Cilangkap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Galang ▪ Ci Bubuan ▪ Ci Banara ▪ Ci Bujur ▪ Ci Peureu 	5	2	Sedang
Cibitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Bubuan ▪ Ci Banara ▪ Ci Peureu 	3	1	Rendah

Nama Desa	Sungai yang melewati	Jumlah Sungai	Skor	Klasifikasi
Cikurubuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Mamut ▪ Ci Akar ▪ Ci Kurubuk ▪ Ci Walung 	4	1	Rendah
Bojongloa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Akar ▪ Logang ▪ Ci Peureu 	3	1	Rendah
Nagrak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Galang ▪ Ci Rateun ▪ Ci Peureu 	3	1	Rendah
Panyindangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Galang ▪ Ci Ranteun ▪ Ci Logang ▪ Ci Porong 	4	1	Rendah
Buahdua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Ranteun ▪ Ci Logang ▪ Ci Porong ▪ Ci Walung 	4	1	Rendah
Gendereh	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Galang ▪ Ci Ranteun ▪ Ci Kuda 	3	1	Rendah
Citaleus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Logang ▪ Ci Kuda ▪ Ci Akar ▪ Ci Kurubuk ▪ Ci Walung 	5	2	Sedang
Mekarmukti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Jambe ▪ Ci Akar ▪ Ci Mamut ▪ Ci Kurubuk ▪ Ci Saat 	5	2	Sedang
Hariang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Mamut ▪ Ci Garukgak ▪ Ci Kandung 	3	1	Rendah
Karangbungur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Jambe ▪ Ci Nungkulan ▪ Ci Kandung ▪ Ci Saat ▪ Ci Tareh 	5	2	Sedang
Ciawitali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ci Beber ▪ Ci Karo ▪ Ci Kawung Leutik ▪ Ci Galagah ▪ Ci Kandung ▪ Ci Mener ▪ Ci Kawung ▪ Ci Barengkok 	8	3	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.1.4 Analisis Kerawanan Bencana

Kecamatan Buahdua adalah salah satu kecamatan yang memiliki kerawanan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Kecamatan Buahdua memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang beragam. Berdasarkan data dari inaRISK tahun 2024, rata-rata tingkat kerawanan bencana di Kecamatan Buahdua adalah rendah, dengan luas sebesar 8.176,60 Ha. Tingkat kerawanan bencana sedang memiliki luas 3.099,53 Ha. Sedangkan untuk tingkat kerawanan bencana tinggi memiliki luas 31,02 Ha, yang tersebar di Desa Cibitung, Nagrak, Mekarmukti, Hariang dan Karangbungur.

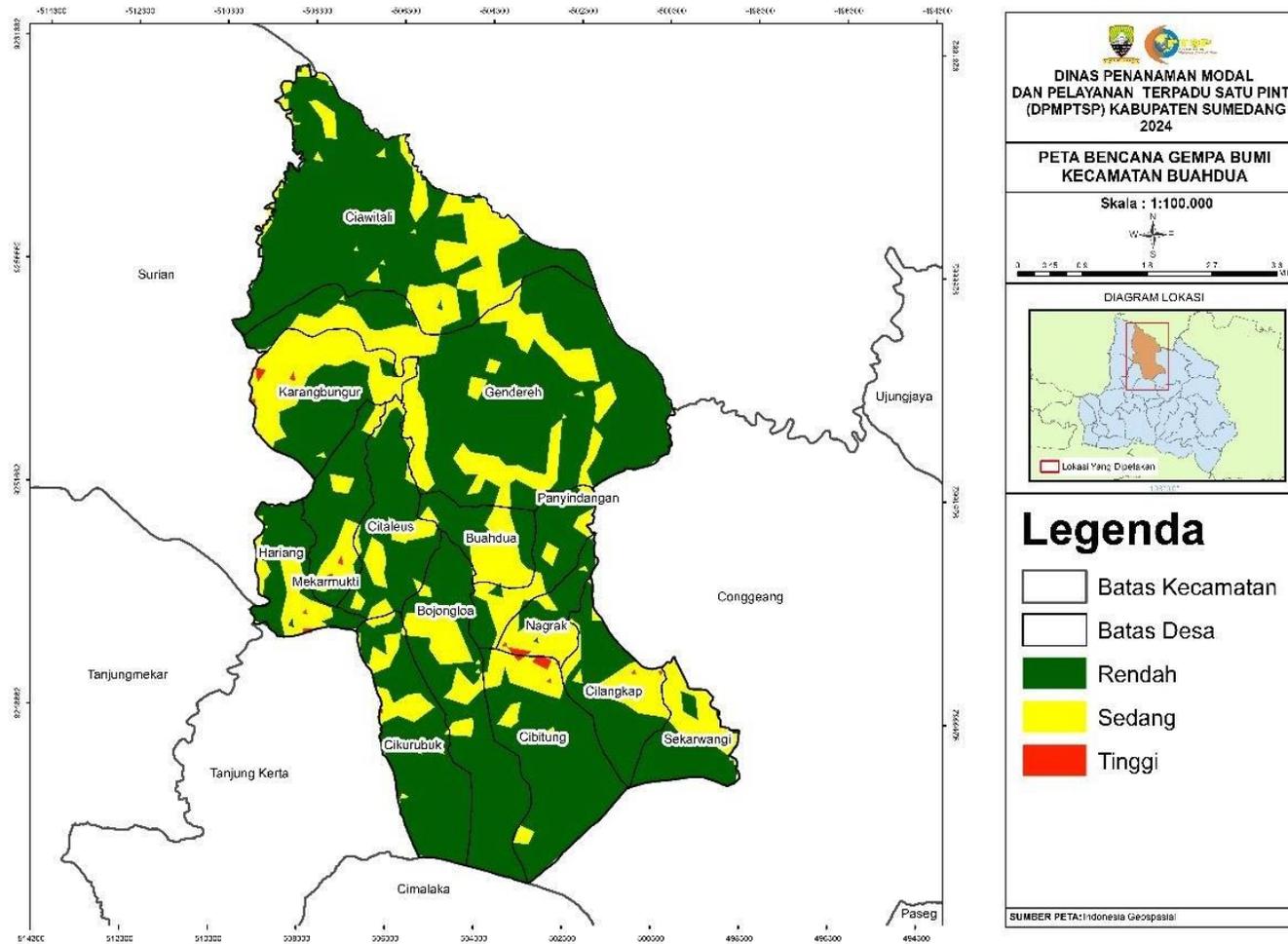
Tingkat kerawanan bencana longsor di Kecamatan Buahdua juga beragam untuk setiap desa. Tingkat kerawanan tinggi lebih luas jika dibandingkan dengan kerawanan sedang dan rendah. Luas tingkat kerawanan tinggi sebesar 3.507 Ha dan tersebar di beberapa desa, terutama hampir sebagian Desa Cibitung, Bojongloa, Cikurubuk, Cilangkap, Nagrak dan Panyindangan. Selain memiliki tingkat kerawanan gempa bumi dan tanah longsor tinggi, Desa Cibitung juga memiliki kemiringan lereng yang tinggi. Luas kerawanan bencana tanah longsor dengan tingkat sedang adalah 740 Ha dan tingkat rendah 597 Ha yang banyak tersebar di Desa Gendereh dan Karangbungur.

Penilaian terhadap kerawanan bencana yang merupakan salah satu indikator fisik dalam investasi dilakukan dengan menilai kejadian bencana yang pernah terjadi di Kecamatan Buahdua. Berdasarkan data statistik BPS Kecamatan Buahdua Dalam Angka Tahun 2024, kejadian bencana gempa bumi pernah terjadi pada seluruh desa di Kecamatan Buahdua setidaknya 1 kali dalam setahun. Selain gempa bumi, terdapat desa yang telah terjadi bencana tanah longsor setidaknya sekali dalam 1 tahun, yaitu Desa Karangbungur. Oleh karena itu, berdasarkan parameter kerawanan bencana berdasarkan kejadian bencana, rata-rata desa yang berada di Kecamatan Buahdua memiliki kerawanan bencana sedang. Desa Karangbungur memiliki kerawanan bencana tidak hanya gempa bumi, tetapi juga tanah longsor pada tahun yang sama, sehingga tingkat kerawanan bencananya tinggi.

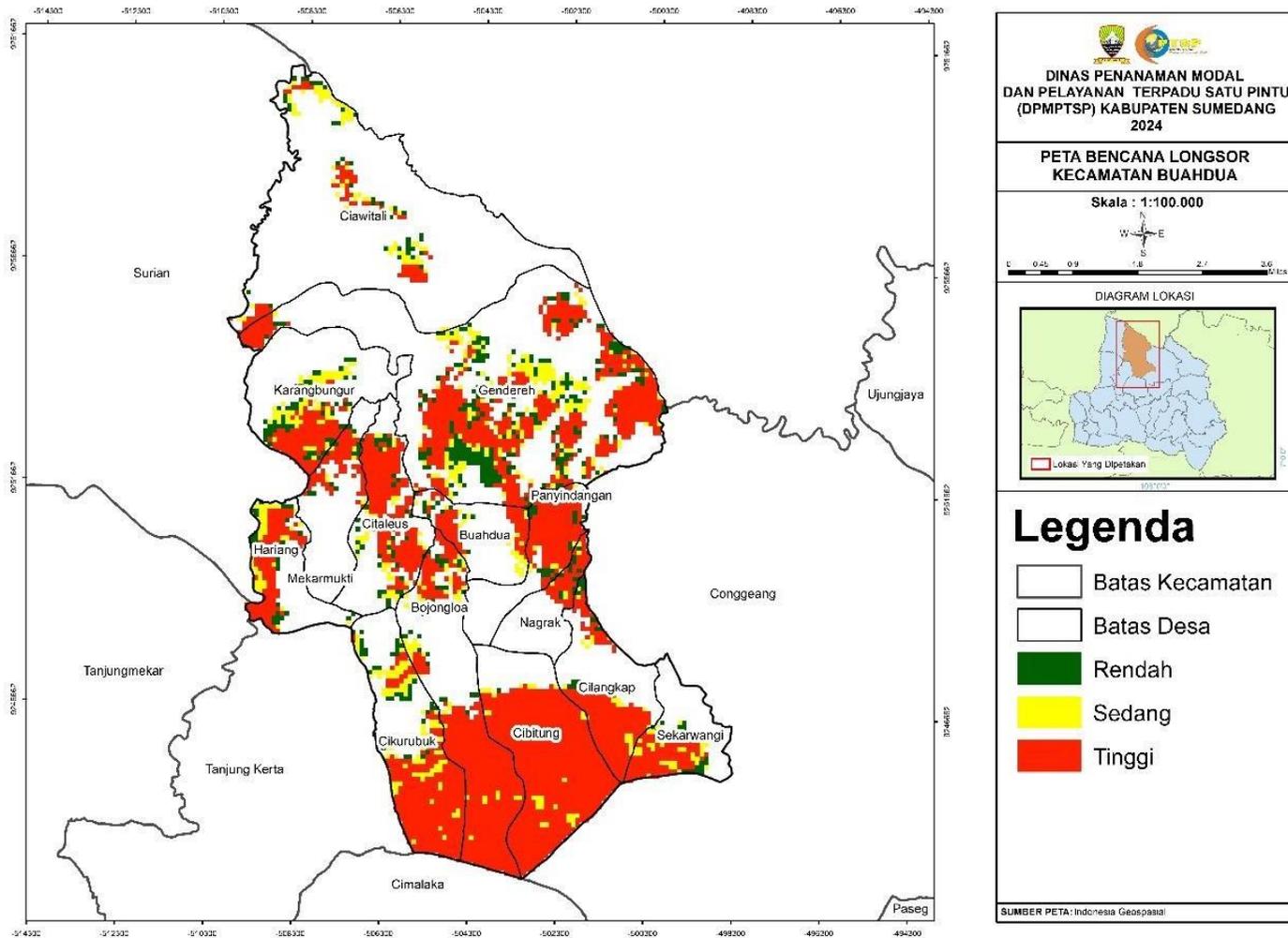
Tabel 4.32 Tabel Skor dan klasifikasi Kerawanan Bencana Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Skor Aktual				Skor	Klasifikasi	Keterangan
	GB	Ts	GM	TL			
Sekarwangi	1	-	-		2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Cilangkap	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Cibitung	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Cikurubuk	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Bojongloa	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Nagrak	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Panyindangan	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Buahdua	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Gendereh	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Citaleus	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Mekarmukti	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Hariang	1	-	-	-	2	Sedang	Rawan Bencana sedang
Karangbungur	1	-	-	1	3	Tinggi	Rawan Bencana tinggi
Ciawitali	1	-	-		2	Sedang	Rawan Bencana sedang

Gambar 4.37. Peta Bencana Gempa Bumi Kecamatan Buahdua



Gambar 4.38. Peta Bencana Tanah Longsor Kecamatan Buahdua



4.2 ANALISIS POTENSI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

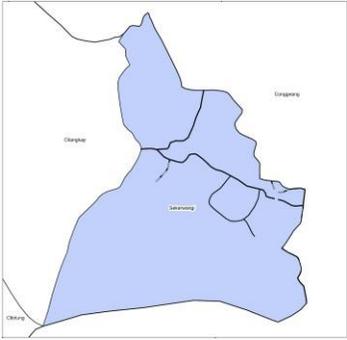
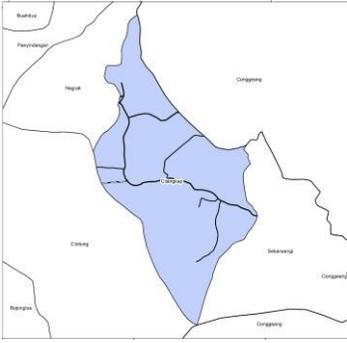
Bagian ini akan memberikan gambaran dan analisis mengenai ketersediaan infrastruktur pada masing-masing desa yang berada pada Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang dalam rangka mendukung potensi investasi dimasa mendatang. Jenis infrastruktur yang menjadi tinjauan analisis antara lain jaringan jalan, jaringan air baku, jaringan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi. Masing-masing analisis ketersediaan infrastruktur akan dijelaskan dalam dua bagian yaitu gambaran mengenai kondisi eksisting dan analisis mengenai potensi desa berdasarkan dukungan infrastruktur eksisting yang tersedia.

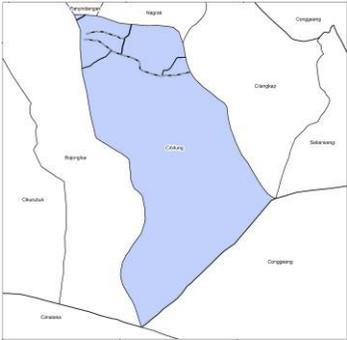
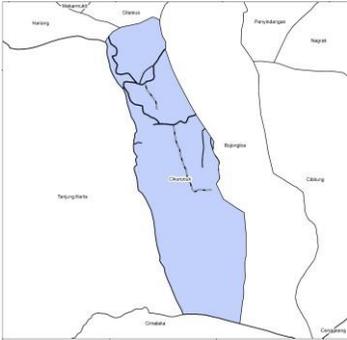
4.2.1 Ketersediaan Jaringan Jalan

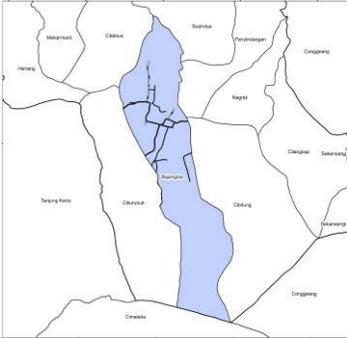
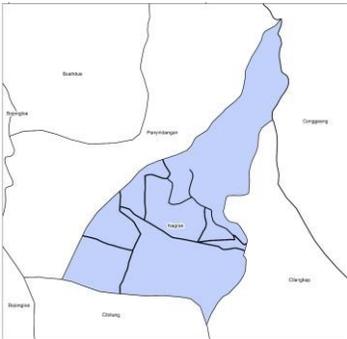
4.2.1.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Jalan

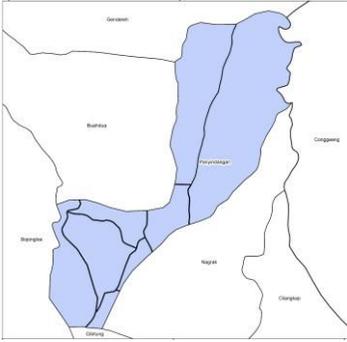
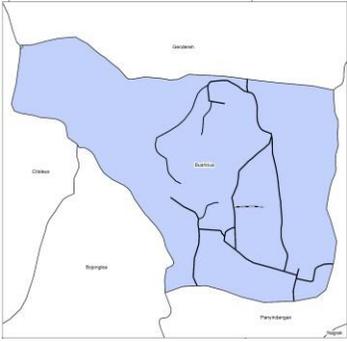
Tabel 4.33 dibawah ini merupakan rangkuman dari hasil survey yang dilakukan mengenai kondisi eksisting jaringan jalan pada masing-masing desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Pada bagian ini, dilakukan identifikasi mengenai panjang jalan yang tersedia pada masing-masing desa serta jembatan yang menghubungkan tiap wilayah. Selain itu, disertakan pula sampel dari beberapa kondisi jalan yang ditemukan pada saat survey dan dinilai mewakili kondisi umum dari kondisi jaringan jalan masing-masing desa.

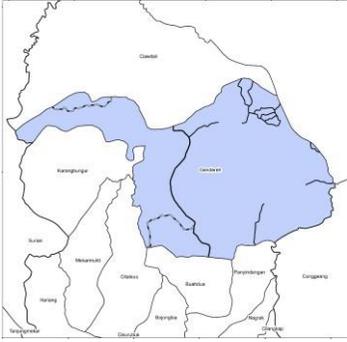
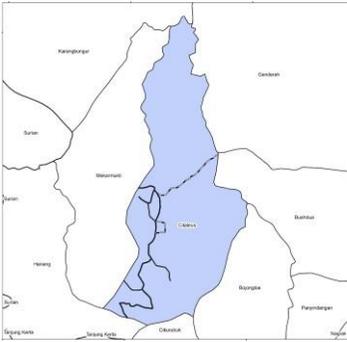
Tabel 4.33 Kondisi Eksisting Jaringan Jalan Kecamatan Buahdua

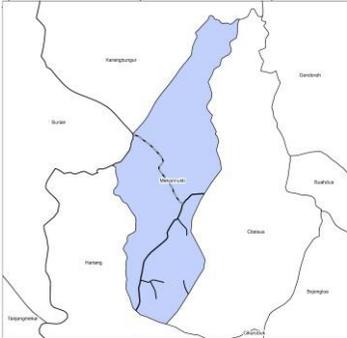
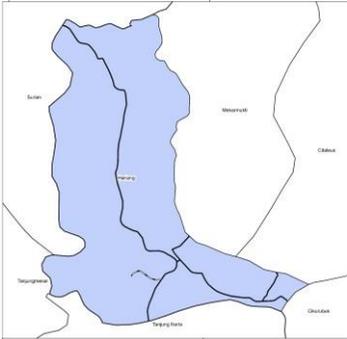
No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
1	Sekarwangi	3	2	-		
2	Cilangkap	3,2	4	-		

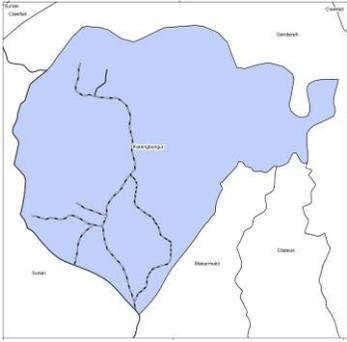
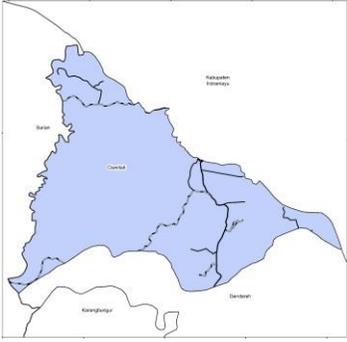
No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
3	Cibitung	7	-	-		 Kecamatan Buahdua, Jawa Barat, Indonesia 72044924, Cibitung, Kec. Buahdua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45392 Lat -6723709°
4	Cikurubuk	2,5	1	-		

No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
5	Bojongloa	7	3	2		
6	Nagrak	7	1	2		

No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
7	Panyindangan	1	1	-		
8	Buahdua	10	1	-		

No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
9	Gendereh	4	8,3	5		
10	Citaleus	4	-	-		

No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
11	Mekarmukti	2	3	2		
12	Hariang	2,7	14	-		

No	Nama Desa	Panjang Jalan (km)		Jembatan Besi (buah)	Peta Jaringan Jalan Desa	Sampel Kondisi Jalan
		Desa	Kab.			
13	Karangbungur	6	3	1		
14	Ciawitali					

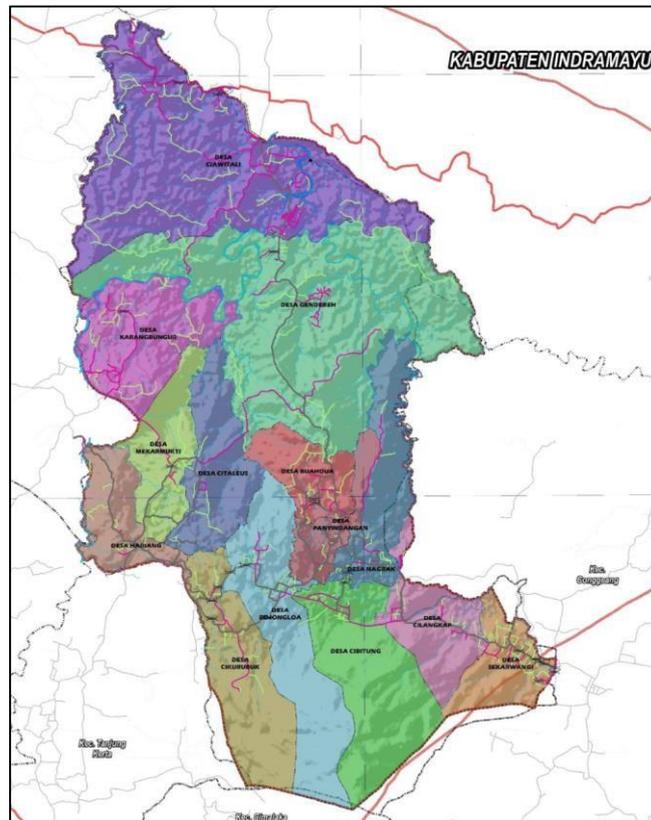
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Sebagai gambaran awal, beberapa wilayah desa telah memiliki infrastruktur jalan dengan kondisi baik secara khusus wilayah-wilayah desa dibagian tenggara Kecamatan Buahdua seperti Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap, Desa Buahdua dll. Detail lebih lanjut mengenai analisis potensi ketersediaan jaringan jalan akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

4.2.1.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Jalan

Berdasarkan analisis terhadap kondisi jaringan jalan secara internal pada Kecamatan Buahdua, beberapa desa dinilai memiliki potensi signifikan untuk mendukung investasi dilihat dari panjang jalan serta kondisi umum yang baik dari jalan yang tersedia (Tabel 4.33). Beberapa desa potensial tersebut antara lain: Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap, Desa Cibitung, Desa Cikurubuk, Desa Bojongloa, Desa Nagrak, Desa Panyindangan dan Desa Buahdua. Jika dilihat pada Gambar 4.39, wilayah desa yang disebutkan tersebut relatif berada pada bagian selatan dari Kecamatan Buahdua.

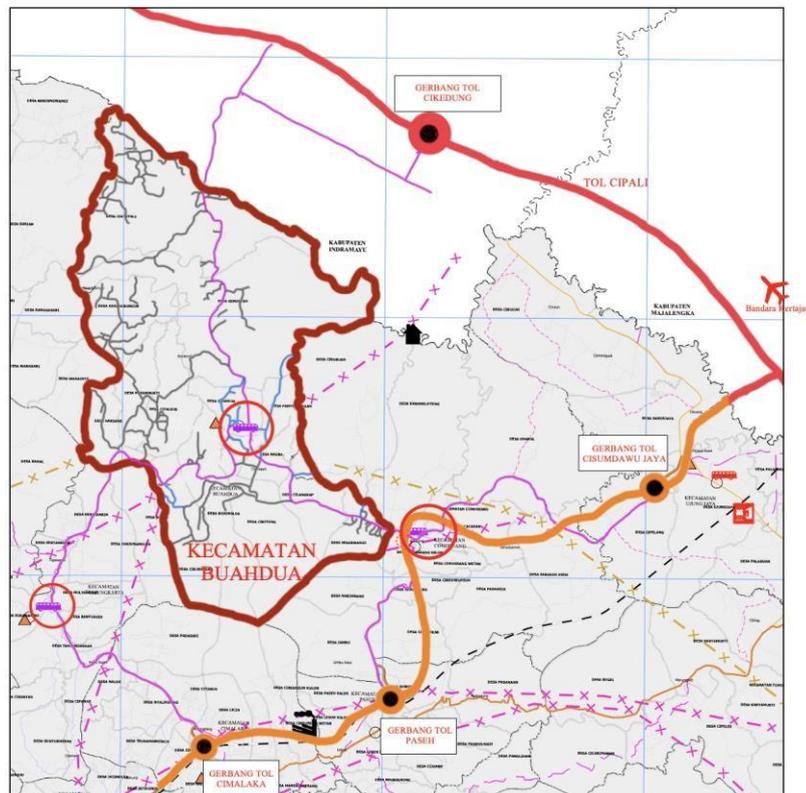
Gambar 4.39. Pembagian Wilayah Desa pada Kecamatan Buahdua



Jika dihubungkan dengan dukungan infrastruktur disekitar Kecamatan Buahdua (Gambar 4.40), dapat dilihat bahwa infrastruktur jaringan jalan yang cukup baik pada wilayah

dibagian selatan Kecamatan Buahdua didukung juga dengan akses Tol Cisumdawu melalui Gerbang Tol Paseh yang berjarak relatif dekat dengan kecamatan ini. Hal ini semakin mendukung pengembangan wilayah untuk mendukung investasi dibagian selatan wilayah Kecamatan Buahdua. Namun demikian, wilayah utara tetap menyimpan potensi mengingat adanya akses tol yang tersedia (Gerbang Tol Cikédung, Tol Cipali), meskipun jaraknya tidak sedekat jika dibandingkan dengan wilayah selatan.

Gambar 4.40. Dukungan Infrastruktur Transportasi Kecamatan Buahdua



Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan kuantifikasi terhadap data kondisi jaringan jalan berdasarkan tiga kriteria, antara lain:

1. Cakupan jaringan jalan terhadap luas wilayah, yang dinilai berdasarkan perbandingan panjang jalan desa terhadap luas wilayah desa;
2. Kondisi jaringan jalan secara umum berdasarkan visualisasi hasil survey; dan
3. Jarak desa dari jalur akses tol terdekat.

Masing-masing kriteria diukur dalam tiga klasifikasi yaitu rendah (skor 1); sedang (skor 2); dan tinggi (skor 3). Hasil dari analisis potensi investasi berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dapat dilihat pada Tabel 4.34 berikut.

Tabel 4.34 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Jaringan Jalan

No	Nama Desa	Cakupan	Kondisi	Jarak Akses Tol	Skor	Klasifikasi
1	Sekarwangi	2	3	3	2,67	Sedang
2	Cilangkap	3	3	3	3,00	Tinggi
3	Cibitung	1	2	3	2,00	Sedang
4	Cikurubuk	2	3	2	2,33	Sedang
5	Bojongloa	2	3	2	2,33	Sedang
6	Nagrak	2	2	3	2,33	Sedang
7	Panyindangan	3	3	2	2,67	Sedang
8	Buahdua	3	3	2	2,67	Sedang
9	Gendereh	3	2	2	2,33	Sedang
10	Citaleus	2	2	2	2,00	Sedang
11	Mekarmukti	2	2	2	2,00	Sedang
12	Hariang	3	2	3	2,67	Sedang
13	Karangbungur	2	2	2	2,00	Sedang
14	Ciawitali	2	2	3	2,33	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan demikian, berdasarkan Tabel 4.34 diperoleh desa dengan jaringan jalan yang paling berpotensi mendukung investasi yaitu Desa Cilangkap, Sekarwangi, Panyindangan dan Buahdua karena memiliki skor relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Buahdua. Desa Cilangkap memiliki skor tertinggi, dengan cakupan jalan, kondisi jalan dan jarak akses tol yang baik.

4.2.2 Ketersediaan Jaringan Air Baku

4.2.2.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Prasarana Air Baku

Tabel 4.35 di bawah ini merupakan rangkuman hasil survey mengenai kondisi eksisting ketersediaan prasarana air baku pada desa-desa yang berada pada Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Prasarana ketersediaan air baku yang ditinjau antara lain: Hidran Umum; Penampungan Air Hujan; Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); Pengolahan Air Bersih; Sumur Gali; Sumur Pompa; dan Tangki Air Bersih.

Tabel 4.35 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Prasarana Air Baku Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Prasarana Air Baku Kecamatan Buahdua						
		Hidran Umum (buah)	Penampungan Hujan (buah)	PAMSIMAS (buah)	Pengolahan Air Bersih (buah)	Sumur Gali (buah)	Sumur Pompa (buah)	Tangki Air Bersih (buah)
1	Sekarwangi	-	-	1	-	30	30	30
2	Cilangkap	-	-	1	-	10	-	-
3	Cibitung	-	-	-	-	70	-	70
4	Cikurubuk	-	-	1	-	-	-	40
5	Bojongloa	-	-	1	-	10	2	-
6	Nagrak	-	-	-	-	60	-	-
7	Panyindangan	-	-	1	-	-	-	-
8	Buahdua	-	-	-	-	-	-	-
9	Gendereh	-	-	-	-	-	2	-
10	Citaleus	-	-	1	-	-	-	-
11	Mekarmukti	1	-	1	1	10	-	-
12	Hariang	-	-	1	-	-	-	-
13	Karangbungur	-	-	-	-	20	-	-
14	Ciawitali							

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

4.2.2.2 Analisis Potensi Ketersediaan Prasarana Air Baku

Berdasarkan data kondisi eksisting ketersediaan prasarana air baku pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dilakukan pemeringkatan desa dengan kondisi prasarana air baku untuk melihat potensi desa dalam mendukung investasi dalam konteks ketersediaan air baku. Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan perhitungan jumlah prasarana air baku (Tabel 4.36) dan diperoleh indikasi sebagai berikut:

1. Desa Sekarwangi dan Desa Mekarmukti menjadi desa dengan jenis prasarana air baku terbanyak (4 jenis) yaitu PAMSIMAS, sumur gali, sumur pompa dan tangki air bersih di Desa Sekarwangi; dan hidran umum, PAMSIMAS, pengolahan air bersih dan sumur gali di Desa Mekarmukti.
2. Desa Cibitung menjadi desa dengan jumlah prasarana air baku terbanyak (140 buah) disusul oleh Desa Sekarwangi (91 buah) dan Desa Nagrak (60 buah).

Tabel 4.36 Skor Potensi Ketersediaan Prasarana Air Baku Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Jumlah Jenis Prasarana Air Baku	Jumlah Prasarana Air Baku	Total	Skor	Klasifikasi
1	Sekarwangi	4	91	95	2	Sedang
2	Cilangkap	2	11	13	1	Rendah
3	Cibitung	2	140	142	3	Tinggi
4	Cikurubuk	2	41	43	1	Rendah
5	Bojongloa	3	13	16	1	Rendah
6	Nagrak	1	60	61	2	Sedang
7	Panyindangan	1	1	2	1	Rendah
8	Buahdua	-	-	-	-	Rendah
9	Gendereh	2	2	4	1	Rendah
10	Citaleus	1	1	2	1	Rendah
11	Mekarmukti	4	13	17	1	Rendah
12	Hariang	1	1	2	1	Rendah
13	Karangbungur	1	20	21	1	Rendah
14	Ciawitali	-	-	-	-	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan demikian, diperoleh desa dengan prasarana air baku yang dinilai paling mendukung investasi berturut-turut yaitu Desa Cibitung, Desa Sekarwangi, dan Desa Nagrak. Ketiga desa tersebut memiliki potensi ketersediaan prasarana air baku yang tinggi dan sedang.

4.2.3 Ketersediaan Jaringan Kelistrikan

4.2.3.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Kelistrikan

Tabel 4.37 dibawah ini merupakan rangkuman hasil survey peninjauan kondisi jaringan kelistrikan pada tiap desa di wilayah Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Infrastruktur jaringan kelistrikan yang ditinjau antara lain: ketersediaan jaringan listrik desa, jumlah gardu listrik dan penerangan jalan umum (PJU).

Tabel 4.37 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Jaringan Kelistrikan

No	Nama Desa	Jaringan Kelistrikan Kecamatan Buahdua		
		Jaringan Kelistrikan	Gardu Listrik (buah)	PJU (buah)
1	Sekarwangi	Tersedia	1	12
2	Cilangkap	Tersedia	-	30
3	Cibitung	Tersedia	0	10
4	Cikurubuk	Tersedia	2	10
5	Bojongloa	Tersedia	3	9
6	Nagrak	Tersedia	2	4
7	Panyindangan	Tersedia	-	9
8	Buahdua	Tersedia	3	20
9	Gendereh	Tersedia	3	9
10	Citaleus	Tersedia	-	-
11	Mekarmukti	Tersedia	1	7
12	Hariang	Tersedia	3	20
13	Karangbungur	Tersedia	1	10
14	Ciawitali	Tersedia		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

4.2.3.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Kelistrikan

Berdasarkan data kondisi eksisting ketersediaan jaringan kelistrikan pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dilakukan pemeringkatan desa berdasarkan ketersediaan jaringan kelistrikan untuk melihat potensi desa dalam mendukung investasi. Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan perbandingan jumlah prasarana kelistrikan (Tabel 4.38) dan diperoleh indikasi sebagai berikut:

1. Seluruh desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang telah tersambung dengan jaringan kelistrikan. Hal ini menjadi potensi yang baik dalam mendukung investasi mengingat pentingnya ketersediaan listrik dalam mendukung pelayanan publik dan penggunaan teknologi.
2. Beberapa desa seperti Desa Bojongloa, Desa Buahdua, Desa Gendereh dan Desa Hariang memiliki jumlah gardu listrik terbanyak (3 buah) dibanding desa-desa lain.

3. Terkait ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), beberapa desa berikut memiliki keunggulan dibanding desa lain yaitu Desa Cilangkap dengan jumlah PJU terbanyak (30 buah) disusul oleh Desa Buahdua dan Desa Hariang yang masing-masing memiliki 20 buah PJU.

Tabel 4.38 Skor Potensi Ketersediaan Prasarana Kelistrikan Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Gardu Listrik (Buah)	PJU (Buah)	Total	Skor	Klasifikasi
1	Sekarwangi	1	12	13	2	Sedang
2	Cilangkap	-	30	30	3	Tinggi
3	Cibitung	0	10	10	1	Rendah
4	Cikurubuk	2	10	12	1	Rendah
5	Bojongloa	3	9	12	1	Rendah
6	Nagrak	2	4	6	1	Rendah
7	Panyindangan	-	9	9	1	Rendah
8	Buahdua	3	20	23	3	Tinggi
9	Gendereh	3	9	12	1	Rendah
10	Citaleus					
11	Mekarmukti	1	7	8	1	Rendah
12	Hariang	3	20	23	3	Tinggi
13	Karangbungur	1	10	11	1	Rendah
14	Ciawitali					

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Dengan demikian, diperoleh desa dengan ketersediaan jaringan kelistrikan yang dinilai paling mendukung investasi berturut-turut yaitu Desa Buahdua dan Desa Hariang yang keduanya memiliki gardu dan jumlah PJU relatif banyak serta Desa Cilangkap yang memiliki PJU paling banyak.

4.2.4 Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi

4.2.4.1 Kondisi Eksisting Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi

Tabel 4.39 di bawah ini merupakan rangkuman hasil survey peninjauan kondisi jaringan telekomunikasi pada tiap desa di wilayah Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Infrastruktur jaringan telekomunikasi yang ditinjau antara lain: ketersediaan jaringan telepon, jaringan satelit dan jaringan *fiber optic* serta jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) setiap desa di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.39 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Jaringan Telekomunikasi

No	Nama Desa	Jaringan Telekomunikasi Kecamatan Buahdua			
		Jaringan Telepon	Jaringan Satelit	Jaringan Fiber Optic	BTS (buah)
1	Sekarwangi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	1
2	Cilangkap	-	-	Tersedia	2
3	Cibitung	-	-	Tersedia	-
4	Cikurubuk	-	-	Tersedia	-
5	Bojongloa	-	-	-	-
6	Nagrak	Tersedia	-	Tersedia	-
7	Panyindangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
8	Buahdua	-	-	Tersedia	1
9	Gendreh	-	-	-	-
10	Citaleus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-
11	Mekarmukti	Tersedia	Tersedia	-	-
12	Hariang	Tersedia	Tersedia	-	-
13	Karangbungur	Tersedia	Tersedia	-	-
14	Ciawitali	Tersedia	Tersedia	Tersedia	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

4.2.4.2 Analisis Potensi Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi

Berdasarkan data kondisi eksisting ketersediaan jaringan telekomunikasi pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dilakukan skoring desa berdasarkan ketersediaan jaringan telekomunikasi untuk melihat potensi desa dalam mendukung investasi. Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan perbandingan jumlah prasarana jaringan telekomunikasi (Tabel 4.40) dan diperoleh indikasi tiga desa yang unggul dalam ketersediaan jaringan telekomunikasi yaitu:

1. Desa Sekarwangi memiliki satu menara BTS yang didukung dengan semua jenis jaringan telekomunikasi yang ditinjau yaitu jaringan *fiber optic*, jaringan satelit dan jaringan telepon;
2. Desa Cilangkap memiliki dua menara BTS yang didukung dengan ketersediaan jaringan *fiber optic*; dan
3. Desa Buahdua yang memiliki satu menara BTS dan ketersediaan jaringan *fiber optic*.

Dengan demikian, ketiga desa tersebut dinilai menjadi desa yang paling mendukung investasi dalam konteks ketersediaan jaringan telekomunikasi. Berikut merupakan skoring potensi ketersediaan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.40 Skor Potensi Ketersediaan Prasarana Telekomunikasi Buahdua

No	Nama Desa	Jumlah Jenis Prasarana Telekomunikasi	Jumlah BTS	Total	Skor	Klasifikasi
1	Sekarwangi	3	1	4	3	Tinggi
2	Cilangkap	1	2	3	2	Sedang
3	Cibitung	1		1	1	Rendah
4	Cikurubuk	1		1	1	Rendah
5	Bojongloa	0		0	0	Rendah
6	Nagrak	2		2	2	Sedang
7	Panyindangan	3		3	2	Sedang
8	Buahdua	1	1	2	2	Sedang
9	Gendereh	0		0	0	Rendah
10	Citaleus	3		3	2	Sedang
11	Mekarmukti	2		2	2	Sedang
12	Hariang	2		2	2	Sedang
13	Karangbungur	2		2	2	Sedang
14	Ciawitali	3		3	2	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.3 ANALISIS POTENSI KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERDAGANGAN

Bagian ini akan memberikan gambaran dan analisis mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan pada masing-masing desa yang berada pada Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang dalam rangka mendukung potensi investasi dimasa mendatang. Prasarana pendidikan yang ditinjau antara lain Perpustakaan, Sekolah dan Perguruan Tinggi. Untuk prasarana kesehatan yang ditinjau yaitu Puskesmas, Poskesdes, Posyandu dan Polindes. Sedangkan prasarana perdagangan antara lain: Pertokoan, Pasar semi Permanen dan Pasar Permanen. Masing-masing analisis ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan akan dijelaskan dalam dua bagian yaitu gambaran mengenai kondisi eksisting dan analisis mengenai potensi desa berdasarkan dukungan prasarana eksisting yang tersedia.

4.3.1 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, diperoleh data ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersebar pada desa-desa yang berada di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat jumlah fasilitas pendidikan untuk mendukung akses warga pada pendidikan yang kemudian akan meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dalam mengelola investasi di wilayah tersebut. Hasil survey tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.41.

Tabel 4.41 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Fasilitas Pendidikan

No	Nama Desa	Perpus takaan (buah)	Sekolah (buah)					Perguruan Tinggi (buah)
			PAUD	TK	SD	SMP	SMA	
1	Sekarwangi	1	3	3	4	4	2	-
2	Cilangkap	-	3	-	2	-	-	-
3	Cibitung	1	1	-	1	-	-	-
4	Cikurubuk	-	1	1	1	-	-	-
5	Bojongloa	1	1	2	2	-	1	-
6	Nagrak	1	2	1	2	2	-	-
7	Panyindangan	-	2	-	1	-	-	-
8	Buahdua	1	2	2	3	1	-	-
9	Gendereh	-	2	2	-	-	-	-
10	Citaleus	-	2	-	1	-	-	-
11	Mekarmukti	1	1	-	2	-	-	-
12	Hariang	-	3	1	2	1	-	-
13	Karangbungur	-	2	-	2	-	-	-
14	Ciawitali	1	1	-	2	1	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan data kondisi eksisting ketersediaan fasilitas pendidikan pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dilakukan pemeringkatan desa berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikan untuk melihat potensi desa dalam mendukung investasi. Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan perbandingan jumlah fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk (Tabel 4.42), dengan indikasi awal yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara umum tidak ditemukan fasilitas pendidikan perguruan tinggi di Kecamatan Buahdua.
2. Desa Sekarwangi menjadi desa dengan jenis fasilitas pendidikan yang paling lengkap dibanding desa-desa lain. Selain itu, desa ini juga memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang relatif unggul dibanding desa-desa lain.
3. Desa Buahdua dan Desa Nagrak menjadi desa berikutnya yang memiliki jumlah dan jenis fasilitas pendidikan yang relatif baik, meskipun belum ada fasilitas pendidikan SMA di desa ini.
4. Berikutnya Desa Bojongloa memiliki kondisi yang hampir mirip dengan Desa Buahdua dan Desa Nagrak, bedanya desa ini memiliki fasilitas pendidikan SMA namun tidak memiliki SMP.

Tabel 4.42 Skor Potensi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Fasilitas Pendidikan					Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Pendidikan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Pendidikan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				PAUD	TK	SD	SMP	SMA					
				Nilai Standar (jiwa)	2500	1250	1600	4800					
1	Sekarwangi	2715	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	2	1	1	0	0	9	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	3	3	4	4	2					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0	0	0					
2	Cilangkap	3093	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	2	1	1	3	4	-2	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	3	0	2	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	1	1					
3	Cibitung	1683	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	1	1	0	0	1	1	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	0	1	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	1	0	0	0					
4	Cikurubuk	2496	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	2	1	1	4	4	-4	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	1	1	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	1	1	1	1					
5	Bojongloa	3327	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	3	2	1	1	2	2	-2	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	2	2	0	1					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	1	0	1	0					
6	Nagrak	2194	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	1	3	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	2	1	2	2	0					

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Fasilitas Pendidikan					Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Pendidikan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Pendidikan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				PAUD	TK	SD	SMP	SMA					
				Nilai Standar (jiwa)	2500	1250	1600	4800					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	1	0	0	0					
7	Panyindangan	1815	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	2	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	2	0	1	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	0	0					
8	Buahdua	3611	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	3	2	1	1	2	2	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	2	2	3	1	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	1	0	0	1					
9	Gendereh	2215	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	1	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	2	2	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0	0					
10	Citaleus	2232	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	2	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	2	0	1	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	0	0					
11	Mekarmukti	1916	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	2	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	0	2	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	0	0					
12	Hariang	3294	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	3	2	1	1	2	3	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	3	1	2	1	0					

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Fasilitas Pendidikan					Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Pendidikan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Pendidikan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				PAUD	TK	SD	SMP	SMA					
				Nilai Standar (jiwa)	2500	1250	1600	4800					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	0	1					
13	Karangbungur	2066	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	2	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	2	0	2	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	0	0					
14	Ciawitali	1892	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	2	1	0	0	1	2	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	0	2	1	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	2	0	0	0					

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis skoring, Desa Sekarwangi memiliki skor tinggi karena memiliki jumlah jenis fasilitas pendidikan paling lengkap dengan jumlah fasilitas pendidikan yang relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Desa Buahdua, Nagrak, dan Hariang memiliki skor sedang untuk ketersediaan fasilitas pendidikan. Desa Bojongloa masih masuk ke dalam kategori rendah jika berdasarkan hasil analisis statistik distribusi frekuensi.

4.3.2 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, diperoleh pula data ketersediaan fasilitas kesehatan yang tersebar pada desa-desa yang berada di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat jumlah fasilitas kesehatan untuk mendukung akses warga pada pendidikan yang kemudian akan mendukung kualitas sumber daya manusia dalam mengelola investasi di wilayah tersebut. Hasil survey tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.43.

Tabel 4.43 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Fasilitas Kesehatan

No	Nama Desa	Puskesmas (buah)	Puskesmas Pembantu (buah)	Poskesdes	Posyandu dan Polindes
1	Sekarwangi	-	1	-	4
2	Cilangkap	-	-	1	4
3	Cibitung	-	1	-	4
4	Cikurubuk	-	1	-	3
5	Bojongloa	-	1	-	4
6	Nagrak	-	1	-	3
7	Panyindangan	-	-	-	6
8	Buahdua	1	-	-	5
9	Gendereh	-	1	-	1
10	Citaleus	-	-	-	5
11	Mekarmukti	-	-	-	1
12	Hariang	-	1	-	5
13	Karangbungur	-	1	-	1
14	Ciawitali	-	1	-	15

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan data kondisi eksisting ketersediaan fasilitas kesehatan pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dilakukan pemeringkatan desa berdasarkan ketersediaan fasilitas kesehatan untuk melihat potensi desa dalam mendukung investasi.

Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan perbandingan jumlah fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk (Tabel 4.44), dimana indikasi awal yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hanya Desa Buahdua yang memiliki Puskesmas karena merupakan pusat kecamatan dan ditunjang dengan lima Posyandu dan Polindes.
2. Desa Ciawitali memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbanyak dengan satu Puskesmas Pembantu serta 15 Posyandu dan Polindes.
3. Hanya Desa Cilangkap yang memiliki Poskesdes dan ditunjang oleh empat Posyandu dan Polindes.
4. Setiap desa di Kecamatan Buahdua paling tidak telah memiliki Posyandu dan Polindes.

Tabel 4.44 Skor Potensi Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Prasarana Kesehatan				Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Kesehatan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Kesehatan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Poskesdes	Posyandu dan Polindes					
			Nilai Standar (jiwa)	30000	120000	2500	1250					
1	Sekarwangi	2715	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	1	1	2	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	4					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
2	Cilangkap	3093	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	0	0	2	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	1	4					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0	0					
3	Cibitung	1683	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	1	1	1	3	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	4					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
4	Cikurubuk	2496	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	1	1	1	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	3					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
5	Bojongloa	3327	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	3	1	1	1	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	4					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
6	Nagrak	2194	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	1	1	1	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	3					

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Prasarana Kesehatan				Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Kesehatan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Kesehatan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Poskesdes	Posyandu dan Polindes					
				Nilai Standar (jiwa)	30000	120000	2500					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
7	Panyindangan	1815	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	1	1	1	4	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0	6					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
8	Buahdua	3611	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	3	1	1	2	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	0	0	5					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
9	Gendreh	2215	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	2	2	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	1					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	1					
10	Citaleus	2232	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	1	1	2	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0	5					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
11	Mekarmukti	1916	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	2	2	-2	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0	1					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	1					
12	Hariang	3294	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	3	1	1	2	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	5					

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Prasarana Kesehatan				Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Kesehatan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Kesehatan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Poskesdes	Posyandu dan Polindes					
				Nilai Standar (jiwa)	30000	120000	2500					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					
13	Karangbungur	2066	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	2	2	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	1					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	1					
14	Ciawitali	1892	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	1	2	1	1	13	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	1	0	15					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	1	0					

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Dengan demikian, mayoritas desa di Kecamatan Buahdua dinilai memiliki kuantitas fasilitas kesehatan yang memadai dan mendukung investasi dalam konteks ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Buahdua. Desa Buahdua sebagai pusat kecamatan memiliki ketersediaan fasilitas kesehatan skala kecamatan, yaitu Puskesmas. Desa Hariang dan Desa Ciawitali sama-sama memiliki Puskesmas Pembantu dengan jumlah Posyandu dan Polindes relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Buahdua.

4.3.3 Analisis Potensi Ketersediaan Fasilitas Perdagangan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang (Kecamatan Buahdua Dalam Angka, 2024) serta hasil peninjauan lapangan, diperoleh data ketersediaan fasilitas perdagangan yang tersebar pada desa-desa yang berada di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Jumlah fasilitas perdagangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.45.

Tabel 4.45 Analisis Potensi Investasi berdasarkan Fasilitas Perdagangan

No	Nama Desa	Kelompok Pertokoan (buah)	Pasar Permanen (buah)	Pasar Semi Permanen (buah)
1	Sekarwangi	-	-	-
2	Cilangkap	-	-	-
3	Cibitung	-	-	-
4	Cikurubuk	-	-	-
5	Bojongloa	-	-	-
6	Nagrak	-	-	-
7	Panyindangan	-	-	-
8	Buahdua	1	1	-
9	Gendereh	-	-	-
10	Citaleus	-	-	-
11	Mekarmukti	-	-	-
12	Hariang	1	-	1
13	Karangbungur	-	-	-
14	Ciawitali	-	-	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan data kondisi eksisting ketersediaan fasilitas perdagangan pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, dilakukan pemeringkatan desa berdasarkan ketersediaan fasilitas perdagangan yang tersedia untuk melihat potensi desa dalam mendukung investasi. Untuk memperoleh nilai potensi yang jelas, dilakukan

perbandingan jumlah fasilitas perdagangan terhadap jumlah penduduk (Tabel 4.46) disertai indikasi sebagai berikut:

1. Hanya Desa Buahdua dan Desa Hariang yang memiliki fasilitas perdagangan.
2. Desa Buahdua menjadi satu-satunya desa yang memiliki fasilitas pasar permanen, sedangkan pasar semi permanen dimiliki oleh Desa Hariang. Untuk kelompok pertokoan, Desa Buahdua dan Desa Hariang memiliki masing-masing satu kelompok pertokoan.

Secara umum dapat dilihat bahwa ketersediaan fasilitas perdagangan yang relatif minim di Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.46 Skor Potensi Ketersediaan Fasilitas Perdagangan Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Prasarana Perdagangan			Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Perdagangan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Perdagangan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen					
Nilai Standar (jiwa)				6000	30000	30000					
1	Sekarwangi	2715	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
2	Cilangkap	3093	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	0	0	1	1	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	1	0	0					
3	Cibitung	1683	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
4	Cikurubuk	2496	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
5	Bojongloa	3327	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	0	0	1	1	-1	1	Rendah
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	1	0	0					
6	Nagrak	2194	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	2	Sedang	

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Prasarana Perdagangan			Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Perdagangan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Perdagangan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen					
			Nilai Standar (jiwa)	6000	30000	30000					
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
7	Panyindangan	1815	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
8	Buahdua	3611	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	0	0	0	0	1	3	Tinggi
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	1	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
9	Gendereh	2215	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
10	Citaleus	2232	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
11	Mekarmukti	1916	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
12	Hariang	3294	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	1	0	0	0	0	1	3	Tinggi

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Eksisting (Jiwa)	Kriteria Analisis	Jenis Prasarana Perdagangan			Kebutuhan Berdasarkan Jenis Fasilitas Perdagangan	Kebutuhan Berdasarkan Jumlah Fasilitas Perdagangan	Penilaian (Surplus/ Defisit)	Skor	Klasifikasi
				Kelompok Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen					
			Nilai Standar (jiwa)	6000	30000	30000					
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	1	0	1					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
13	Karangbungur	2066	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					
14	Ciawitali	1892	Jumlah Fasilitas Ideal (unit)	0	0	0	0	0	0	2	Sedang
			Jumlah Fasilitas Eksisting (unit)	0	0	0					
			Kebutuhan Fasilitas (unit)	0	0	0					

Sumber: Hasil Analisis, 2024



4.4 ANALISIS POTENSI EKONOMI

Potensi ekonomi daerah dan investasi sangat berkaitan erat karena daya Tarik ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan aliran investasi yang masuk dan sebaliknya, investasi yang tepat dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah. Daerah yang kaya akan sumber daya, seperti mineral, pariwisata, atau tanah pertanian yang subur, sering kali memiliki potensi ekonomi yang kuat. Sumber daya ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi daya tarik investasi. Investasi masuk dapat mendukung pengembangan infrastruktur, teknologi, dan pengolahan sumber daya ini, yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi lokal dan daya saing daerah.

Secara keseluruhan, potensi ekonomi daerah berperan sebagai magnet yang menarik investasi. Sebaliknya, investasi yang masuk dapat memperkuat potensi ekonomi daerah dengan membuka kesempatan baru, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang selama ini kurang berkembang. Kombinasi antara potensi ekonomi yang optimal dan investasi yang tepat akan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Potensi ekonomi di Kecamatan Buahdua diantaranya pertanian tanaman pangan seperti padi, hortikultura, peternakan, pariwisata, dan industri pengolahan kecil dan menengah yang mengolah makanan. Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam menganalisis potensi ekonomi di Kecamatan Buahdua diantaranya adalah mengidentifikasi kondisi eksisting setiap usaha ekonomi yang ada di desa-desa Kecamatan Buahdua, diantaranya usaha pertanian tanaman pangan/ padi, usaha pertanian tanaman hortikultura, usaha pertanian tanaman perkebunan, usaha peternakan, usaha industri pengolahan atau IKM, dan usaha pariwisata. Analisis potensi ekonomi dilihat berdasarkan semakin besar usaha ekonomi yang dijalankan, maka potensinya semakin besar. Data usaha ekonomi diambil dari data Kecamatan Buahdua Dalam Angka Tahun 2023 dan juga hasil survey lapangan. Berikut merupakan penilaian atau skor terhadap indikator ekonomi yang digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi.

Tabel 4.47 Tabel Skor Indikator Ekonomi

Usaha Pertanian Tanaman Pangan/ Padi	Klasifikasi	Skor	Keterangan
	Rendah	3	Usaha Pertanian Tanaman Pangan Besar

	Sedang	2	Usaha Pertanian Tanaman Pangan Sedang
	Tinggi	1	Usaha Pertanian Tanaman Pangan Rendah
Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura	Klasifikasi	Skor	
	Tinggi	3	Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura Besar
	Sedang	2	Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura Sedang
	Rendah	1	Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura Rendah
Usaha Peternakan	Klasifikasi	Skor	
	Tinggi	3	Usaha Peternakan Besar
	Sedang	2	Usaha Peternakan Sedang
	Rendah	1	Usaha Peternakan Rendah
Usaha Industri Pengolahan atau IKM	Klasifikasi	Skor	
	Tinggi	3	Usaha Industri Pengolahan atau IKM Besar
	Sedang	2	Usaha Industri Pengolahan atau IKM Sedang
	Rendah	1	Usaha Industri Pengolahan atau IKM Rendah
Usaha Pariwisata	Klasifikasi	Skor	
	Tinggi	3	Usaha Pariwisata Besar
	Sedang	2	Usaha Pariwisata Sedang
	Rendah	1	Usaha Pariwisata Rendah

Sumber: Hasil Modifikasi, Tahun 2024

4.4.1 Analisis Potensi Usaha Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman pangan padi merupakan salah satu jenis pertanian yang banyak ditemukan di Kecamatan Buahdua. Total jumlah usaha pertanian tanaman pangan/ padi perorangan di Kecamatan Buahdua adalah 4.076 unit. Desa Buahdua, Desa Cilangkap dan Desa Citaleus merupakan salah satu penghasil usaha pertanian tanaman pangan/ padi perorangan terbesar di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.48 Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Pertanian Tanaman Pangan Padi Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Jumlah Usaha Pertanian Tanaman Pangan/ Padi Perorangan	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	283	2	Sedang
Cilangkap	370	3	Tinggi
Cibitung	257	1	Rendah
Cikurubuk	279	2	Sedang

Nama Desa	Jumlah Usaha Pertanian Tanaman Pangan/ Padi Perorangan	Skor	Klasifikasi
Bojongloa	342	3	Tinggi
Nagrak	253	1	Rendah
Panyindangan	224	1	Rendah
Buahdua	371	3	Tinggi
Gendereh	311	2	Sedang
Citaleus	343	3	Tinggi
Mekarmukti	247	1	Rendah
Hariang	290	2	Sedang
Karangbungur	216	1	Rendah
Ciawitali	290	2	Sedang

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis skoring, diketahui bahwa seluruh desa di Kecamatan Buahdua memiliki potensi pertanian tanaman pangan/ padi. Desa-desa yang sudah memiliki usaha pertanian tanaman pangan/ padi perorangan dengan jumlah besar diantaranya Desa Cilangkap, Bojongloa, Buahdua, dan Citaleus.

Gambar 4.41. Contoh Pertanian Tanaman Pangan Padi di Kecamatan Buahdua



(a) Pertanian Padi Organik di Desa Cikurubuk



(b) Pertanian Padi di Desa Bojongloa

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

4.4.2 Analisis Potensi Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura

Total jumlah usaha pertanian tanaman hortikultura perorangan di Kecamatan Buahdua adalah 1.726 Unit. Desa Ciawitali, Desa Citaleus dan Desa Cikurubuk merupakan penghasil usaha pertanian tanaman hortikultura perorangan terbesar di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.49 Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Jumlah Usaha Pertanian Tanaman Pangan/ Padi Perorangan	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	100	2	Sedang
Cilangkap	179	3	Tinggi
Cibitung	118	2	Sedang
Cikurubuk	181	3	Tinggi
Bojongloa	116	2	Sedang
Nagrak	36	1	Rendah
Panyindangan	54	1	Rendah
Buahdua	158	2	Sedang
Gendereh	21	1	Rendah
Citaleus	232	3	Tinggi
Mekarmukti	70	1	Rendah
Hariang	166	2	Sedang
Karangbungur	43	1	Rendah
Ciawitali	252	3	Tinggi

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis skoring, diketahui bahwa seluruh desa di Kecamatan Buahdua memiliki potensi pertanian hortikultura. Desa Ciawitali merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pertanian hortikultura tinggi, komoditas unggulannya antara lain: cabai, terong, dan jeruk nipis. Sedangkan desa lainnya yang juga memiliki potensi tinggi untuk tanaman hortikultura di Kecamatan Buahdua adalah Desa Citaleus. Komoditas unggulan di desa tersebut antara lain: pisang, mangga dan rambutan.

Gambar 4.42. Contoh Pertanian Tanaman Hortikultura di Kecamatan Buahdua



(a) Pertanian Hortikultura di Desa Ciawitali (b) Pertanian Hortikultura di Desa Citaleus

Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

4.4.3 Analisis Potensi Usaha Peternakan

Usaha peternakan merupakan salah satu jenis potensi kegiatan ekonomi yang terdapat di Kecamatan Buahdua. Total jumlah usaha pertanian tanaman hortikultura perorangan di Kecamatan Buahdua adalah 1.286 unit. Desa Citaleus, Desa Cikurubuk dan Desa Bojongloa merupakan penghasil usaha peternakan perorangan terbesar di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.50 Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Peternakan Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Jumlah Usaha Pertanian Tanaman Pangan/ Padi Perorangan	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	56	1	Rendah
Cilangkap	61	1	Rendah
Cibitung	102	2	Sedang
Cikurubuk	171	3	Tinggi
Bojongloa	142	3	Tinggi
Nagrak	53	1	Rendah
Panyindangan	41	1	Rendah
Buahdua	83	1	Rendah
Gendereh	51	1	Rendah
Citaleus	182	3	Tinggi
Mekarmukti	103	2	Sedang
Hariang	82	1	Rendah
Karangbungur	77	1	Rendah
Ciawitali	82	1	Rendah

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis skoring, diketahui bahwa seluruh desa di Kecamatan Buahdua memiliki potensi peternakan. Desa Citaleus merupakan salah satu desa yang memiliki potensi peternakan tinggi. Berdasarkan hasil survey lapangan yang sudah dilakukan, saat ini ada peternakan ayam di Dusun Tiga, Desa Citaleus. Selain itu, terdapat juga budidaya perikanan oleh Dinas Perikanan di Desa Citaleus.

Desa Cikurubuk juga memiliki potensi peternakan yang rencananya akan dikembangkan untuk peternakan sapi di lahan seluas 10 Ha pada tahun 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Selain Desa Citaleus dan Desa Cikurubuk, kegiatan usaha peternakan yang sudah berjalan berada di Desa Ciawitali. Terdapat peternakan ayam petelur PT CPJF di Blok Loceng 7,5 Ha dan di Blok Cekdam 15 Ha. Peternakan ayam pedaging 3 kandang juga terdapat di Blok Kebon Kalapa, Desa Ciawitali. Oleh karena itu, potensi peternakan di Desa Ciawitali skornya dapat berubah menjadi sedang karena sudah memiliki kegiatan usaha peternakan yang dilakukan oleh perusahaan peternakan berbadan hukum.

Gambar 4.43. Budidaya Perikanan di Desa Citaleus



Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2024

4.4.4 Analisis Potensi Usaha Industri Pengolahan

Berdasarkan hasil survey lapangan, Kecamatan Buahdua memiliki potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mengolah makanan tradisional seperti sale pisang, dan opak. Industri Kecil dan Menengah tersebut terdapat di Desa Buahdua, Desa Panyindangan, Desa Sekarwangi, Desa Citaleus, Desa Cikurubuk, dan Desa Bojongloa. Selain itu, Desa Nagrak juga memiliki IKM pengolahan minyak kelapa asli yang terdapat di RW 4, RT 11 dan sudah ekspor sampai ke luar negeri.

Industri besar saat ini diarahkan di Desa Ciawitali dan Gendereh. Terdapat kurang lebih 100 Ha lahan yang diarahkan untuk pengembangan industri besar di Desa Ciawitali dan Desa Gendereh. Penilaian potensi usaha industri besar, kecil dan menengah berdasarkan keberadaan atau tidak potensi tersebut, bukan berdasarkan jumlahnya. Berikut adalah klasifikasi dan skoring potensi usaha industri besar, kecil dan menengah di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.51 Klasifikasi dan Skoring Potensi Usaha Industri Besar, Kecil dan Menengah Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Potensi Industri Kecil dan Menengah	Potensi Industri Besar	Jumlah	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	1	0	1	2	Sedang
Cilangkap	0	0	0	0	Rendah
Cibitung	0	0	0	0	Rendah
Cikurubuk	1	0	1	2	Sedang
Bojongloa	1	0	1	2	Sedang
Nagrak	0	0	0	0	Rendah

Nama Desa	Potensi Industri Kecil dan Menengah	Potensi Industri Besar	Jumlah	Skor	Klasifikasi
Panyindangan	1	0	1	2	Sedang
Buahdua	1	0	1	2	Sedang
Gendereh	0	1	1	2	Sedang
Citaleus	1	0	1	2	Sedang
Mekarmukti	0	0	0	0	Rendah
Hariang	0	0	0	0	Rendah
Karangbungur	0	0	0	0	Rendah
Ciawitali	0	1	1	2	Sedang

Sumber: Kecamatan Buahdua Dalam Angka dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis skoring, diketahui bahwa terdapat beberapa desa di Kecamatan Buahdua yang secara relatif memiliki potensi industri pengolahan. Desa Sekawarngi, Cikurubuk, Bojongloa, Panyindangan, Buahdua, Gendereh, dan Ciawitali secara relatif memiliki potensi untuk industri pengolahan.

4.4.5 Analisis Potensi Usaha Pariwisata

Beberapa desa di Kecamatan Buahdua sudah memiliki daya tarik wisata, seperti di Desa Cilangkap yang memiliki pemandian Cigirang dan pemandian air panas Cileungsing yang sudah memiliki wisatawan regional, seperti Indramayu dan lokal Sumedang. Kedua sumber mata air ini menawarkan daya tarik alam yang sangat unik dan dapat menjadi destinasi wisata unggulan di Desa Cilangkap, baik untuk wisatawan yang mencari kesejukan mata air jernih maupun yang ingin melakukan relaksasi di pemandian air panas. Pengembangan potensi desa ini mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan sektor pariwisata desa dan mendukung perekonomian lokal.

Gambar 4.44. Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di Desa Cilangkap



Sumber: detik.com

Desa lainnya yang memiliki daya tarik wisata adalah Desa Sekarwangi. Desa ini memiliki pemandian air panas (Cipanas) Turuban dan Keueum. Selain itu, Sekarwangi juga memiliki

potensi bumi perkemahan dan wisata alam batu bilik yang lokasinya berada di Lebaknaga, Cikapa, RW 16. Bilik ini merupakan formasi batu yang terbentuk secara alami dan sering dikaitkan dengan nilai arkeologis serta dianggap sebagai peninggalan budaya. Wisata Batu Bilik ini merupakan aset budaya dan sejarah yang berharga, yang dapat dioptimalkan baik untuk kepentingan pelestarian budaya maupun pengembangan ekonomi melalui pariwisata berbasis budaya di Desa Sekarwangi.

Desa Cibitung memiliki potensi wisata yang cukup menarik, terutama dari alam juga pegunungannya yang dapat dijadikan destinasi wisata alam. Selain itu, terdapat juga *Waterboom* yang terletak di RT 1 RW 4, yang menjadi daya tarik tambahan bagi pengunjung yang ingin menikmati rekreasi air di daerah yang masih cukup terjaga alamnya. Desa Cibitung juga memiliki potensi wisata religi Situs Makam Pagaden.

Desa Cikurubuk juga memiliki warisan budaya berupa kesenian Kuda Renggong yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya yang sangat menarik. Desa ini juga memiliki sumber mata air yang cocok untuk arung jeram dan menawarkan peluang besar dalam pengembangan wisata alam yang lebih menantang. Mata air tersebut adalah Cijaha dan Ciembutan. Desa Cikurubuk juga memiliki potensi wisata budaya religi berupa situs makam keramat: Makam Aki Sipan, Makam Singawangi, Makam keramat Candi Karang, Makam Eyang Cakradirama, dan Makam Eyang Daniswara. Potensi wisata lainnya adalah terdapat wisata sejarah berupa bekas markas TNI pada masa perjuangan.

Desa Bojongloa juga memiliki potensi wisata Bumi Perkemahan yang menawarkan kepada para wisatawan untuk kegiatan berkemah dan rekreasi alam. Selain itu, terdapat 6 situs makam keramat yang berpotensi untuk dijadikan tempat wisata religi. Terdapat mata air Cigirang, Ciembutan dan Cilogang yang berpotensi untuk wisata alam.

Desa Nagrak memiliki sejumlah potensi unggulan, salah satunya adalah daya tarik wisata Batusangian yang terletak di RW 2 desa Nagrak. Terdapat juga potensi wisata religi dengan adanya Situs Makam Eyang Paria yang merupakan prajurit kerajaan Pajajaran dan Situs Makam Eyang Medang yang berada di daerah Gunung Medang.

Potensi lainnya di Desa Mekarmukti yaitu terdapat lahan luas yang belum dikelola dengan kontur yang cocok untuk pembangunan tempat wisata *oflroad* dan *adventure*. Desa Karangbungur juga memiliki potensi unggulan di bidang seni, terutama seni ukir dan seni lukis yang menjadi ciri khas desa ini dan berpotensi menjadi wisata budaya.

Desa Hariang memiliki potensi wisata yang besar, terutama dengan keberadaan Situ Biru di Cilembang, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Situ ini terkenal karena airnya yang jernih berwarna biru dan pemandangan alam yang indah dan dikelilingi oleh batu batu besar, hingga menarik banyak pengunjung setiap minggunya. Beberapa rencana pembangunan di tempat wisata situ cibiru seperti pembangunan *gazebo*, *flying fox*, dan tempat untuk beristirahat bagi para pengunjung. Selain itu, desa hariang juga mempunyai lahan kosong dengan kontur yang sesuai untuk pembangunan wisata *ofload*, yang menambah variasi atraksi wisata.

Gambar 4.45. Destinasi Wisata Situ Biru Desa Hariang



Sumber: *sumedangtandang.com*, Tahun 2024

Penilaian potensi pariwisata berdasarkan jumlah keberadaan potensi dan objek wisata eksisting. Berikut adalah klasifikasi dan skoring potensi pariwisata di Kecamatan Buahdua.

Tabel 4.52 Tabel Potensi Pariwisata Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Potensi dan Objek Wisata Eksisting	Jumlah	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cipanas Turuban ▪ Cipanas Keueum ▪ Bumi perkemahan ▪ Wisata alam batu bilik 	4	2	Sedang
Cilangkap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemandian Cigirang ▪ Pemandian air panas Cileungsing 	2	1	Rendah
Cibitung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Waterboom</i> ▪ Wisata religi Situs Makam Pagaden 	2	1	Rendah

Nama Desa	Potensi dan Objek Wisata Eksisting	Jumlah	Skor	Klasifikasi
Cikurubuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya Kuda Renggong ▪ Mata Air Cijaha dan Ciembutan ▪ Wisata budaya religi ▪ Wisata sejarah 	4	2	Sedang
Bojongloa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Bumi Perkemahan ▪ Wisata religi ▪ Wisata alam Cigirang, Ciembutan dan Cilogang 	3	2	Sedang
Nagrak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Batusangian ▪ Wisata religi 	2	1	Rendah
Panyindangan	-	-	1	Rendah
Buahdua	-	-	1	Rendah
Gendereh	-	-	1	Rendah
Citaleus	-	-	1	Rendah
Mekarmukti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata <i>oflroad</i> dan <i>adventure</i> 	1	1	Rendah
Hariang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Situ Biru Cilembang ▪ Wisata <i>oflroad</i> 	2	1	Rendah
Karangbungur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata budaya 	1	1	Rendah
Ciawitali	-	-	1	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis skoring, diketahui bahwa terdapat beberapa desa di Kecamatan Buahdua yang secara relative memiliki potensi pariwisata. Desa Sekawarngi, Cikurubuk, Bojongloa secara relatif memiliki potensi untuk pariwisata dan diarahkan menjadi bagian yang dikembangkan sebagai pusat pariwisata.

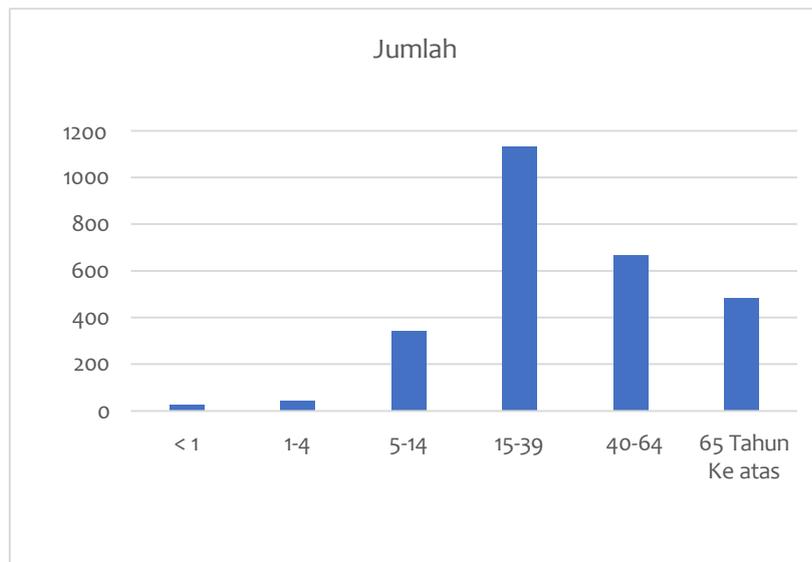
4.5 ANALISIS POTENSI KETERSEDIAAN SDM TENAGA KERJA

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja adalah salah satu faktor penting dalam menarik investasi ke suatu daerah. SDM tenaga kerja yang memadai dari segi jumlah, keterampilan, dan kualitas dapat menjadi daya tarik utama bagi investor.

4.5.1 Analisis Potensi Jumlah Ketersediaan Tenaga Kerja Usia Produktif dan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Sekarwangi berjumlah 2715 orang yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1335 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1380 orang. Dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 1092 kk. Sebagian masyarakat Desa Sekarwangi berada pada kisaran usia 15-39 tahun yaitu sebanyak 1133 orang dan kisaran usia 40-64 tahun yaitu sebanyak 669 orang.

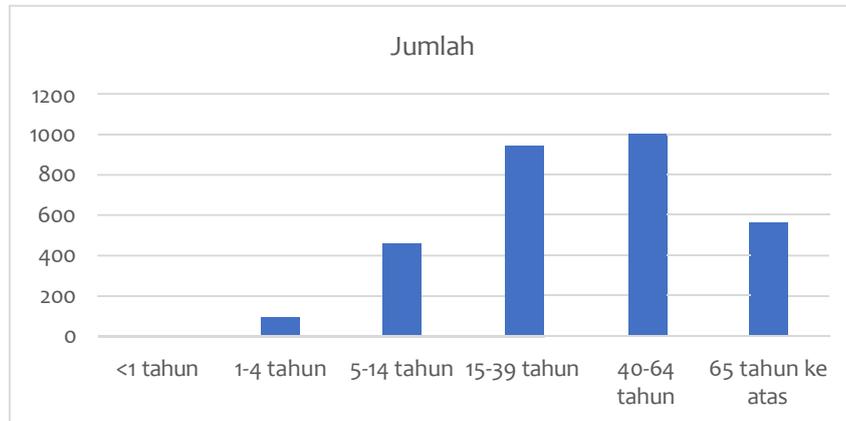
Gambar 4.46. Jumlah Penduduk Desa Sekarwangi Berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

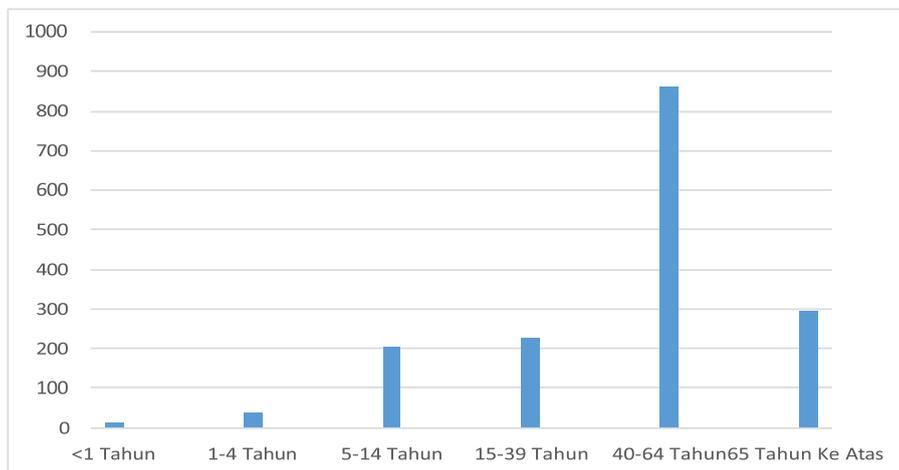
Penduduk Desa Sekarwangi sebagian besar berada pada usia produktif yaitu sebesar 58% sehingga berpotensi untuk menunjang investasi yang akan ditetapkan di Kecamatan Buahdua. Penyelenggaraan iklim investasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Desa Sekarwangi sedang berjalan penghijauan salah satunya pembibitan buah seperti alpukat dan lain-lain.

Jumlah Penduduk di Desa Cilangkap sebanyak 3093 orang, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1525 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1568 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1279 kk. Jumlah penduduk Desa Cilangkap berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.47. Jumlah Penduduk Desa Cilangkap Berdasarkan Usia

Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Jumlah penduduk di Desa Cibitung sebanyak 1683 orang dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 838 orang dan penduduk perempuan sebanyak 845 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Cibitung sebanyak 655 kk.

Gambar 4.48. Jumlah Penduduk Desa Cibitung berdasarkan Usia

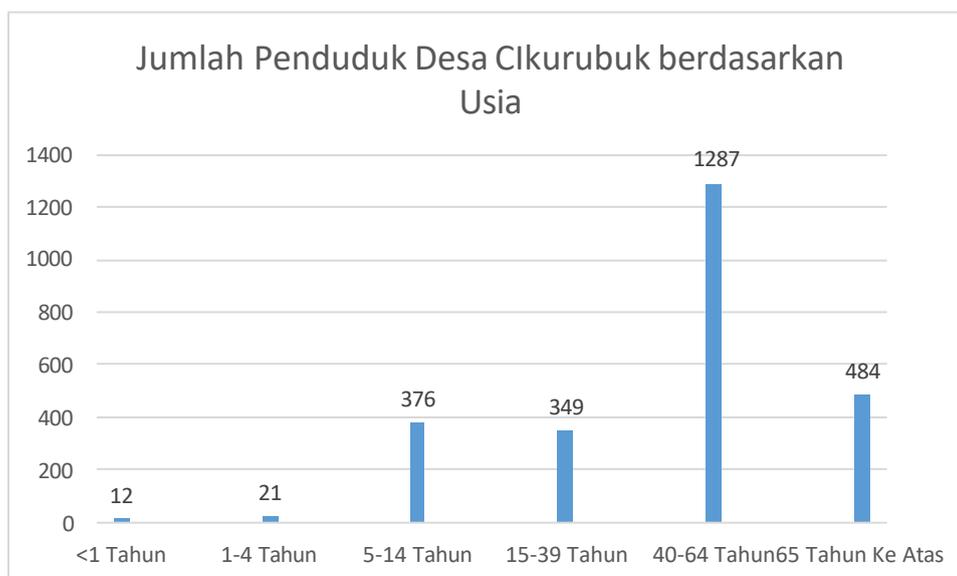
Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Cibitung didasarkan pada usia yang paling banyak jumlah penduduk pada usia 40-65 tahun yaitu sebanyak 862 orang dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 292 orang. Dilihat dari tabel tersebut terlihat bahwa sebagian masyarakat Desa Cibitung memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat menunjang pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua. Apalagi Desa Cibitung memiliki potensi pariwisata dan perkebunan yang dapat dimanifestasikan untuk investasi. Dilihat

berdasarkan pendidikan dan pendapatan, Desa Cibitung termasuk pada kategori desa maju. Sebagian besar penduduk mayoritas berpendidikan SMA. Dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia, Penduduk Desa Cibitung memiliki potensi untuk pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua yaitu sebesar 65%.

Jumlah penduduk Desa Cikurubuk sebanyak 2496 orang, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1249 orang dan perempuan sebanyak 1247 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Cikurubuk sebanyak 918 kk. Penduduk didasarkan pada usia sebagian besar berada pada usia produktif.

Gambar 4.49. Jumlah Penduduk Desa Cikurubuk berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

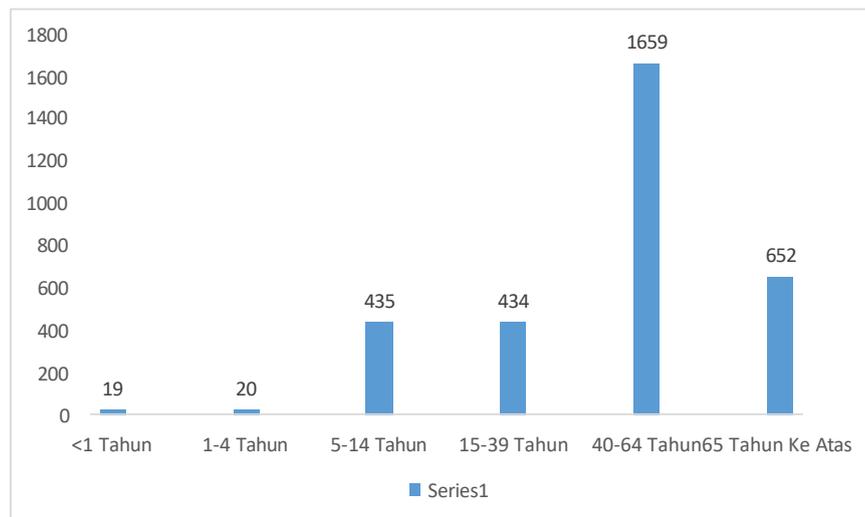
Berdasarkan data di atas, sebagian masyarakat di Desa Cikurubuk berada pada kelompok usia 40-64 tahun yaitu sebanyak 1287 orang. Pada bidang pendidikan, masyarakat Desa Cikurubuk berpendidikan SMA. Jumlah potensi sumber daya manusia sebesar 51, 6% mampu menjadi pendukung pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua terutama di Desa Cikurubuk.

Jumlah penduduk Desa Bojongloa pada tahun 2024 ini berjumlah 3327 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1649 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1678 orang. Jumlah Kepala keluarga di Desa Bojongloa sebanyak 1.407.

Jumlah penduduk Desa Bojongloa terbanyak berada pada kisaran usia 40-64 tahun. Kisaran usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif. Pada bidang pendidikan masih banyak masyarakat yang memiliki pendidikan dengan tamatan SMP.

Keterampilan membuat piring dengan menggunakan lidi membuat kue Sayon. Jumlah potensi sumber daya manusia tenaga kerja diperkirakan sebesar 48% mampu menjadi pendukung pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua terutama di Desa Bojongloa. Desa Cibitung dan Bojongloa merupakan sentra produksi gula kelapa karena mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah pengrajin gula kelapa.

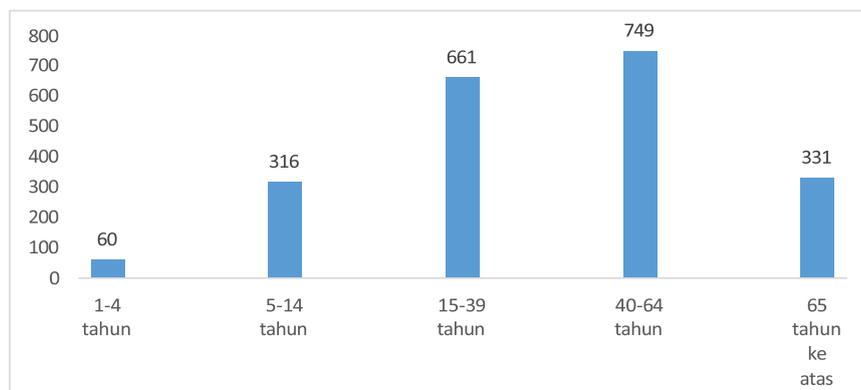
Gambar 4.50. Jumlah Penduduk Desa Bojongloa berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Jumlah penduduk Desa Nagrak tahun 2024 berjumlah 2194 dimana penduduk laki-laki berjumlah 1108 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1086. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Nagrak berjumlah 869 kk.

Gambar 4.51. Jumlah Penduduk Desa Nagrak berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

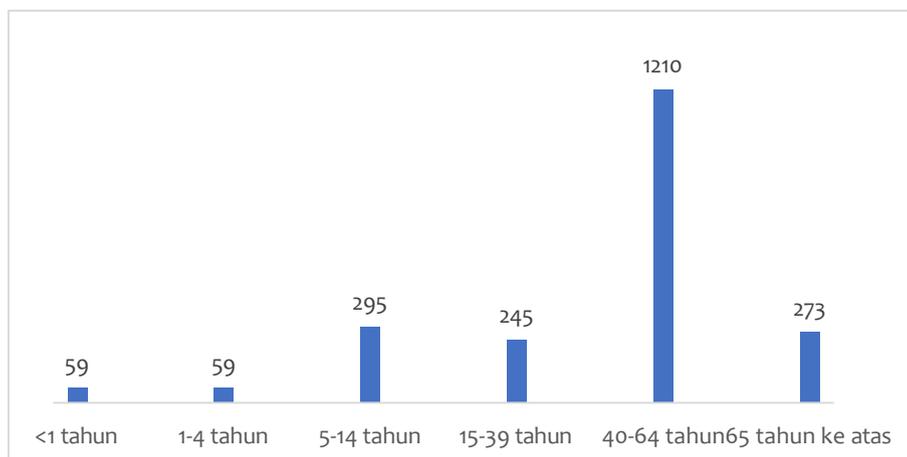
Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Nagrak paling banyak berada pada usia antara 40-64 tahun yaitu sebanyak 749 orang dan kisaran usia 15-39 tahun sebanyak 661 orang dimana penduduk berada pada usia produktif. Sebagian besar masyarakat Desa Nagrak berpendidikan SMA/Sederajat dan tidak ada masyarakat yang mengalami putus sekolah.

Sebagaimana disampaikan bahwa Desa Nagrak sendiri untuk potensi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja berada pada kapasitas produktif yaitu sekitar 66,6% mampu ikut serta dalam pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi terlebih dahulu terhadap masyarakat.

Jumlah penduduk Desa Panyindangan tahun 2024 sebanyak 1815 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 903 orang dan penduduk perempuan sebanyak 912 orang. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Untuk jumlah kepala keluarga di Desa Panyindangan yaitu sebanyak 696 kk dimana kepala keluarga perempuan sebanyak 50kk. Desa Panyindangan sebagian penduduknya berada pada usia produktif.

Berdasarkan grafik, jumlah penduduk Desa Panyindangan yang paling banyak berada pada kisaran usia 40-64 tahun yaitu sebanyak 1210 orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Panyindangan sebagian besar lulus SMA. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Desa Panyindangan sebanyak 67,9% memadai untuk membantu pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua.

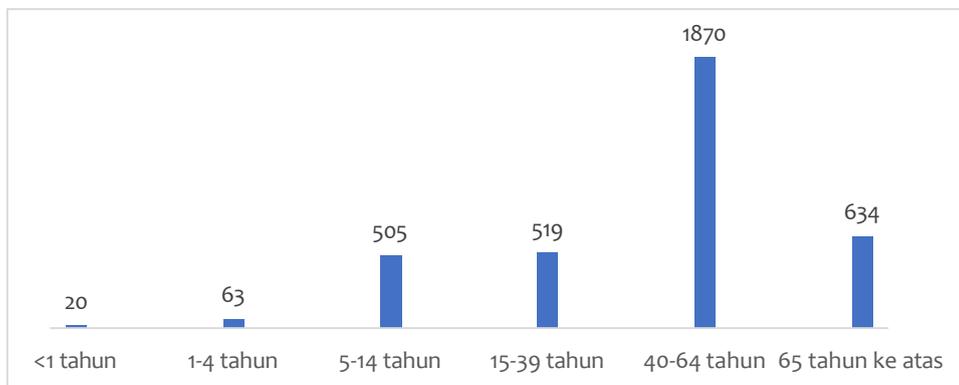
Gambar 4.52. Jumlah Penduduk Desa Panyindangan berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Desa Buahdua menjadi desa dengan jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Buahdua. Jumlah penduduk Desa Buahdua pada tahun 2024 sebanyak 3611 orang dimana penduduk laki-laki sebanyak 1809 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1802 orang. Jumlah kepala keluarga di Desa Buahdua sebanyak 1854 kk, dengan kepala keluarga perempuan sebanyak 473 kk. Desa Buahdua sebagian besar berada pada usia produktif.

Gambar 4.53. Jumlah Penduduk Desa Buahdua berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Berdasarkan grafik di atas, penduduk Desa Buahdua paling banyak berada pada kisaran usia 40-64 tahun sebanyak 1870 orang dan selebihnya berada pada kisaran 15-39 tahun sebanyak 519 dan kisaran usia 65 tahun ke atas sebanyak 634 orang. Pendidikan sampai SLTA pendidikan wajib 12 tahun dan lalu tidak ada masyarakat miskin ekstrim. Desa Buahdua ini belum mendapatkan investasi yang masuk dari manapun. Didasarkan dari jumlah penduduk produktif sebanyak 66,16% penduduk dapat mendukung pengembangan Investasi di Kecamatan Buahdua.

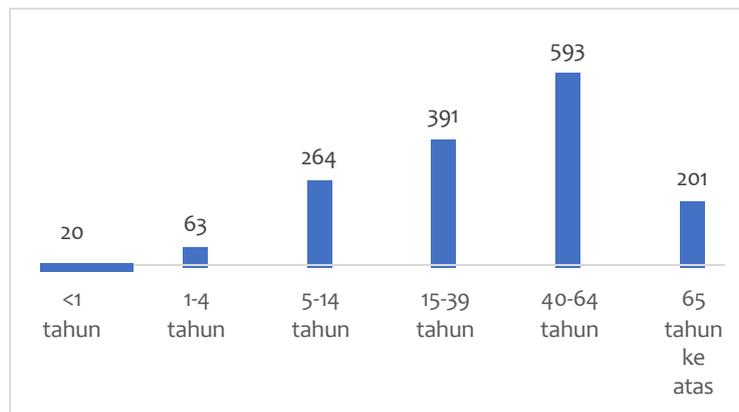
Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Desa Gendereh, menurut data BPS tentang Profil Desa Se-Kecamatan Buahdua tahun 2024, sebanyak 2.215 orang. Rinciannya, sebanyak 1.059 orang laki-laki dan 1.156 orang perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 879 KK. Kepadatan penduduk Desa Gendereh sebesar 286, 18 orang untuk tiap km persegi wilayahnya.

Penduduk Desa Gendereh paling banyak berada pada kisaran usia 40-64 tahun sebanyak 1025 orang dan selebihnya berada pada kisaran 15-39 tahun sebanyak 624 dan kisaran usia

65 tahun ke atas sebanyak 406 orang. Kondisi sosial masyarakat Desa Gendereh yaitu untuk SD lebih dari SMP dan SMA kurang.

Desa Gendereh berdasarkan rentang usia yang ada berada pada usia produktif dimana Sumber Daya Manusia di Desa Gendereh mampu mendukung pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua sebesar 66,7%. Sebelumnya telah ada investasi untuk di Desa Gendereh dimana masyarakat bekerja program investasi 60% dari desa 10% dari luar 30% dari kecamatan.

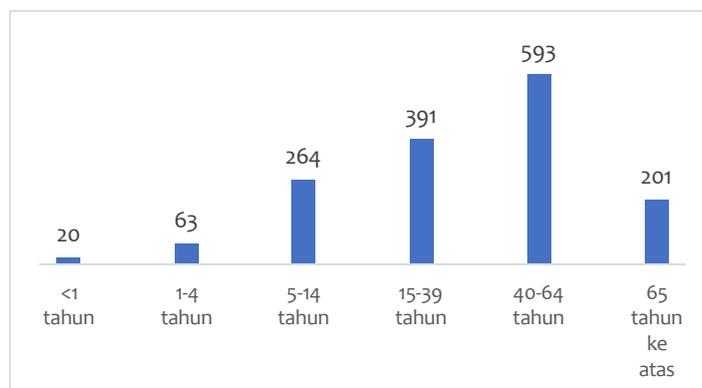
Gambar 4.54. Jumlah Penduduk Desa Gendereh Berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Tahun 2024 Desa Citaleus dihuni oleh penduduk dengan jumlah sebanyak 2.232 jiwa. Komposisi sebanyak 1.113 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 1.119 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 747 KK dengan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 40 KK. Kepadatan penduduk untuk tiap kilometer persegi luas wilayah Desa Citaleus dihuni penduduk rata-rata sebanyak 363,42 orang.

Gambar 4.55. Jumlah Penduduk Desa Citaleus berdasarkan Usia



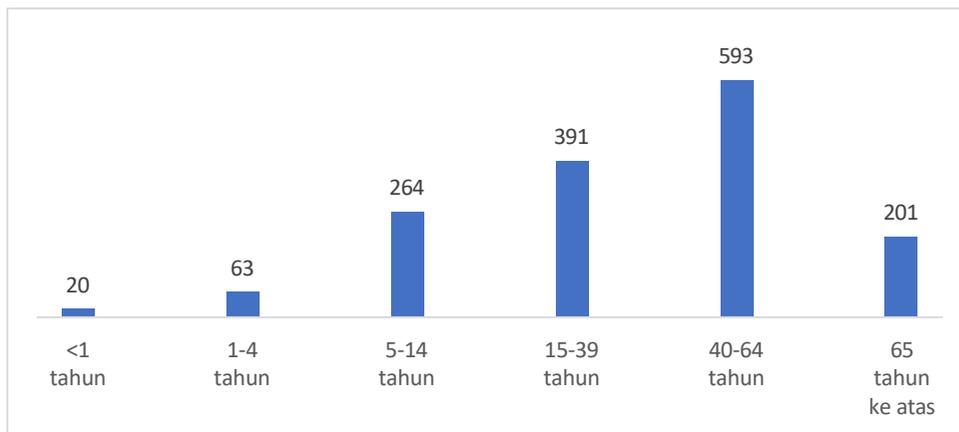
Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Berdasarkan grafik di atas, Penduduk Desa Citaleus sebagian besar berada pada rentang usia 40-64 tahun yaitu sebanyak 1137 orang dan rentang usia 15-39 tahun sebanyak 345 orang dan 65 tahun ke atas sebanyak 304 orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa hampir sebagian besar masyarakat Desa Citaleus berada pada usia produktif untuk bekerja.

Kondisi sosial masyarakat di bidang pendidikan yaitu sebanyak 50% mendapatkan 12 tahun belajar. Pendapatan masyarakat 3 bulan rata-rata kurang lebih 1 juta. Pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh masyarakat lokal agar dapat menjadi Tenaga Kerja yang terserap jika terdapat investasi di Desa Citaleus diantaranya adalah keterampilan terhadap teknologi untuk menghadapi investasi yang masuk. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia di Desa Citaleus sebanyak 68% memadai untuk mendukung pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua.

Berdasarkan Data Desa Mekarmukti tahun 2024, jumlah penduduknya adalah 1916 orang dimana penduduk Laki-laki 933 jiwa Perempuan 983 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Desa Mekarmukti yaitu sebanyak 914 KK dimana Kepala keluarga perempuan sebanyak 165 KK. Sementara kepadatan penduduk Desa Mekarmukti, untuk tiap kilometer persegi luas wilayahnya dihuni penduduk rata-rata sebanyak 471,67 orang.

Gambar 4.56. Jumlah Penduduk Desa Mekarmukti Berdasarkan Usia



Sumber: PortalDesa Jawa Barat, 2024

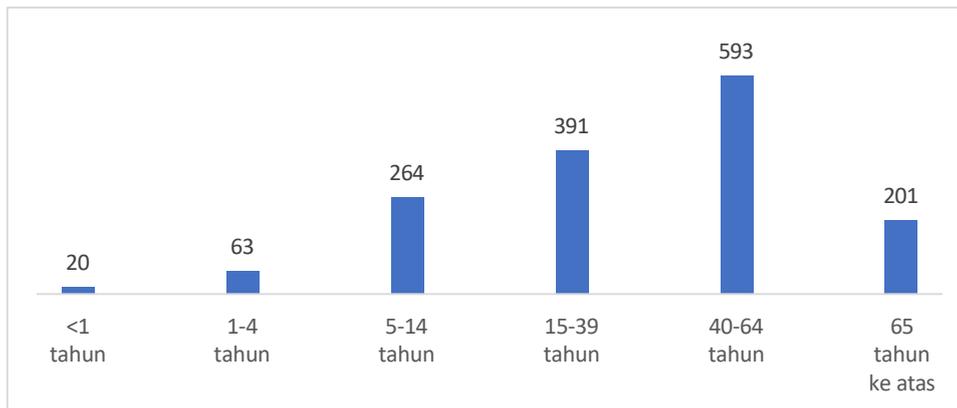
Berdasarkan grafik di atas, sebagian penduduk Desa Mekarmukti berada pada rentang usia 40-64 tahun sebanyak 1689 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Desa Mekarmukti masih berada pada tahap usia produktif. Untuk pendidikan dari

masyarakat sudah cukup baik dimana rata-rata lulusan SMA. Sedangkan untuk Pendapatan yang diterima masyarakat masih kurang.

Minimnya sumber daya manusia yang berpendidikan sarjana bagi Aparatur Desa Mekarmukti sangat berpengaruh terhadap pemahaman administrasi pada organisasi yang ada di Desa Mekarmukti. Sumber Daya Manusia tenaga kerja Desa Mekarmukti yang berada di usia produktif sebanyak 73% cukup memadai untuk membantu mengembangkan investasi. Akan tetapi kurang optimal apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan dari masyarakat setempat. Perlu ada pendidikan dan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat sekitar terkait investasi.

Desa Hariang dihuni penduduk sebanyak 3.294 orang. Dengan komposisi sebanyak 1.650 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 1.644 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 1.254 KK. Sementara kepadatan penduduk Desa Hariang, untuk tiap kilometer persegi luas wilayahnya dihuni penduduk rata-rata sebanyak 360,85 orang.

Gambar 4.57. Jumlah Penduduk Desa Hariang Berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

Berdasarkan grafik di atas, Penduduk di Desa Hariang sebagian besar berada pada kisaran usia 15-39 tahun sebanyak 1063 orang dan kisaran usia 40-64 tahun sebanyak 1056 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Desa Hariang sebagian besar berada pada usia produktif untuk bekerja.

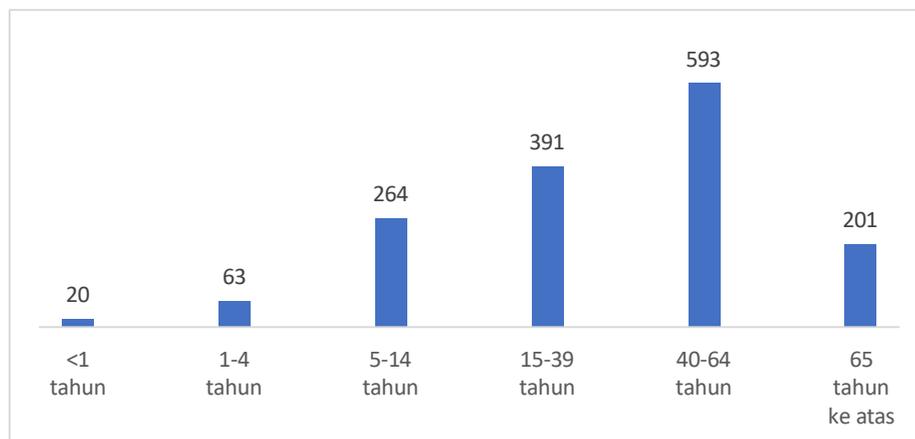
Kondisi sosial masyarakat (dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan) yang ada di Desa Hariang dimana tingkat pendidikan sudah cukup baik hanya 1 % tidak

melanjutkan. Tingkat pendapatan pun hampir seluruhnya kurang karena banyak yang bekerja sebagai serabutan sebagai buruh tani sehingga bergantung pada pemilik tanah.

Untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dimiliki oleh masyarakat lokal agar dapat menjadi Tenaga Kerja yang terserap jika terdapat investasi di Desa Hariang ini. Pengetahuan berupa pengelolaan pariwisata dimana terdapat Situ Cibiru dan keterampilan dalam inovasi produk serta kemasan. Dilihat dari kondisi Sumber Daya Manusia tenaga kerja di Desa Hariang masih produktif untuk bekerja yaitu sebanyak 64% dari jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Desa Karangbungur sebanyak 2.066 orang. Dengan komposisi sebanyak 1.016 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 1.050 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 856 KK. Kepadatan penduduk Desa Karangbungur sebesar 272,26 orang untuk tiap kilometer persegi luas wilayahnya.

Gambar 4.58. Jumlah Penduduk Desa Karangbungur berdasarkan Usia



Sumber: Portaldesa Jawa Barat, 2024

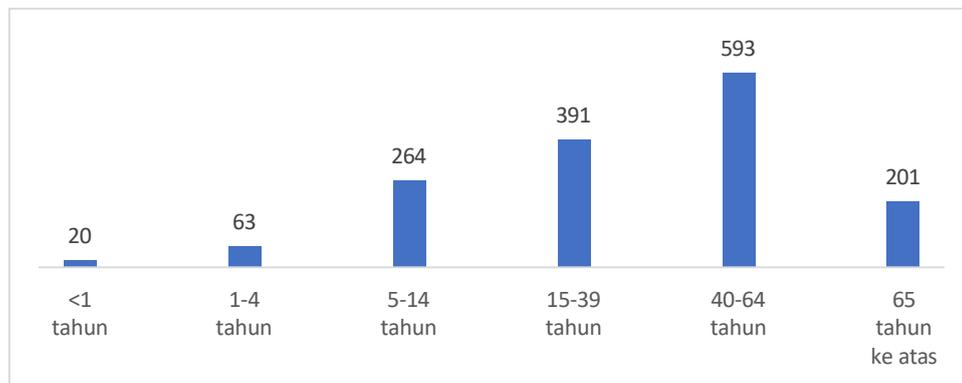
Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk Desa Karangbungur sebagian besar berada pada rentang usia 40 – 64 tahun yaitu sebanyak 750 orang dan rentang usia 65 tahun ke atas sebanyak 755 orang. Hal tersebut mengindikasikan sebagian penduduk Desa Karangbungur berada pada usia produktif untuk bekerja.

Sumber Daya manusia tenaga kerja di Desa karangbungur sebanyak 57,11 % cukup potensial untuk bekerja dan memadai untuk pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua. Adanya investasi yang akan dilaksanakan tentu akan mampu meningkatkan

taraf hidup masyarakat. Masyarakat akan mampu mengembangkan wilayahnya sendiri melalui adanya investasi tersebut.

Berdasarkan data BPS dari Profil Desa Se-Kecamatan Buahdua tahun 2024, Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Desa Ciawitali sebanyak 1.892 orang. Rinciannya adalah sebanyak 955 orang laki-laki dan 937 orang perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 746 KK, dimana kepala keluarga perempuan sebanyak 43 KK. Kepadatan penduduk Desa Ciawitali sebesar 431,69 orang untuk setiap km persegi luas wilayahnya.

Gambar 4.59. Jumlah Penduduk Desa Ciawitali berdasarkan Usia



Sumber: Portal Desa Jawa Barat, 2024

Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar penduduk Desa Ciawitali berada pada rentang usia 40-64 tahun yaitu sebanyak 593 orang dan usia 15-39 tahun yaitu sebanyak 264 orang. Sebagian besar penduduk Desa Ciawitali berpendidikan SMA.

Sumber Daya Manusia tenaga kerja di Desa Ciawitali cukup memadai dari produktif yaitu sebesar 64,22% untuk pengembangan investasi. Sebelumnya telah ada arahan dari pemerintah untuk peruntukkan industri untuk menekan sejahteraan masyarakat dan menurunkan jumlah pengangguran, namun belum ada pengelola. Daya tarik investasi belum cukup bersaing belum ada pengelola yang siap mengelola kawasan industri. Berdasarkan jumlah ketersediaan tenaga kerja berdasarkan usia produktif dan tingkat pendidikan SLTA, terdapat 3 (tiga) desa yang memiliki potensi paling tinggi. Desa-desa tersebut diantaranya adalah Desa Buahdua, Desa Cilangkap dan Hariang. Hanya satu desa, yaitu Gendereh yang rata-rata penduduk tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan SLTP.

Tabel 4.53 Klasifikasi dan Skoring Tenaga Kerja Berdasarkan Usia Produktif

Nama Desa	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	1802	2	Sedang
Cilangkap	1961	3	Tinggi
Cibitung	1154	1	Rendah
Cikurubuk	1287	1	Rendah
Bojongloa	1659	2	Sedang
Nagrak	1410	2	Sedang
Panyindangan	1210	1	Rendah
Buahdua	2389	3	Tinggi
Gendereh	1649	2	Sedang
Citaleus	1482	2	Sedang
Mekarmukti	1689	2	Sedang
Hariang	2119	3	Tinggi
Karangbungur	750	1	Rendah
Ciawitali	857	1	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 4.54 Klasifikasi dan Skoring Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat pendidikan

Nama Desa	Tingkat Pendidikan	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	SLTA	3	Tinggi
Cilangkap	SLTA	3	Tinggi
Cibitung	SLTA	3	Tinggi
Cikurubuk	SLTA	3	Tinggi
Bojongloa	SLTA	3	Tinggi
Nagrak	SLTA	3	Tinggi
Panyindangan	SLTA	3	Tinggi
Buahdua	SLTA	3	Tinggi
Gendereh	SMP	2	Sedang
Citaleus	SLTA	3	Tinggi
Mekarmukti	SLTA	3	Tinggi
Hariang	SLTA	3	Tinggi
Karangbungur	SLTA	3	Tinggi
Ciawitali	SLTA	3	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.6 ANALISIS POTENSI KEAMANAN DAN KENYAMANAN BERDASARKAN DUKUNGAN KEBIJAKAN

Faktor yang mempengaruhi keamanan dan kenyamanan berkaitan dengan kondisi stabilitas ekonomi dan politik, hukum, keamanan fisik, risiko ekonomi, daya tarik

infrastruktur, dan kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi. Analisis keamanan dan kenyamanan yang dilakukan berdasarkan pada dukungan kebijakan terhadap investasi untuk setiap desa. Dukungan kebijakan tersebut berasal dari kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam mengarahkan investasi di Kecamatan Buahdua.

Salah satu faktor keberhasilan meningkatkan daya saing dan menarik investasi diantaranya adalah jaminan Rencana Tata Ruang Wilayah yang pro investasi (Susilowati, 2020). Analisis keamanan dan kenyamanan berdasarkan dukungan kebijakan yaitu dengan melakukan review terhadap kebijakan yang mendukung percepatan investasi pada setiap desa di Kecamatan Buahdua. Dukungan kebijakan dapat berupa Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang, seperti RTRW Kabupaten Sumedang dan RDTR Kecamatan Buahdua. Selain itu, terdapat juga kebijakan sektoral seperti RUPM Kabupaten Sumedang dan kebijakan pemberian insentif bagi investor. Semakin besar dukungan kebijakan, maka membuat investor merasa aman dan nyaman.

4.6.1 Potensi Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Dukungan Kebijakan

Berdasarkan Dokumen Pemutakhiran RDTR Kecamatan Buahdua Tahun 2023-2043, terdapat pembagian Sub WP di Kawasan Buahdua sebagai berikut:

- 1) Sub WP A: Sub WP A terdiri atas Desa Sekarwangi, Desa Cibitung, Desa Cikurubuk, Desa Cilangkap, dan Desa Bojongloa. Adapun tema Sub WP A sebagai berikut: “Kawasan Sub WP A sebagai kawasan pusat pariwisata, kawasan pusat permukiman perkotaan, kawasan pertanian dan perikanan, serta kawasan industri.”
- 2) Sub WP B: Sub WP B terdiri atas Desa Nagrak, Desa Hariang, Desa Buahdua, Desa Panyindangan, Desa Mekarmukti, dan Desa Citaleus. Adapun tema pada Sub WP B “termasuk dalam kawasan pusat pelayanan kesehatan, pusat pemerintahan, perdagangan jasa dan pemasaran, kawasan pusat permukiman perkotaan, serta kawasan pusat pariwisata.”
- 3) Sub WP C: Sub WP C terdiri atas Desa Karangbungur, Desa Gendereh, Desa Ciawitali. Termasuk dalam kawasan pusat kegiatan industri, permukiman perkotaan, serta kawasan pertanian.

Pembagian Sub WP tersebut telah sesuai dengan karakteristik potensi dari setiap desa di Kecamatan Buahdua. Arahkan baik untuk pusat pelayanan, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang pro investasi telah sesuai. Berdasarkan RUPM Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2025, Desa Ciawitali diarahkan untuk menjadi kawasan industri. Terdapat kesesuaian antara dokumen rencana pembangunan investasi dengan rencana tata ruang, bahwa Desa Ciawitali yang masuk ke dalam Sub WP C menjadi pusat industri. Berdasarkan Dokumen Perda No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sudah diatur kegiatan apa saja di Kabupaten Sumedang yang akan diberikan insentif. Pemberian insentif terutama bidang lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Dokumen ini sudah sesuai dengan kondisi dan karakteristik potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Buahdua yang saat ini masih didominasi oleh pertanian. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendukung investasi melalui berbagai dukungan kebijakan yang saling terintegrasi.

Tabel 4.55 Klasifikasi dan Skoring Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Kesesuaian Dukungan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang

Nama Desa	Dukungan Kebijakan	Skor	Klasifikasi
Sekarwangi	Sesuai	3	Tinggi
Cilangkap	Sesuai	3	Tinggi
Cibitung	Sesuai	3	Tinggi
Cikurubuk	Sesuai	3	Tinggi
Bojongloa	Sesuai	3	Tinggi
Nagrak	Sesuai	3	Tinggi
Panyindangan	Sesuai	3	Tinggi
Buahdua	Sesuai	3	Tinggi
Gendereh	Sesuai	3	Tinggi
Citaleus	Sesuai	3	Tinggi
Mekarmukti	Sesuai	3	Tinggi
Hariang	Sesuai	3	Tinggi
Karangbungur	Sesuai	3	Tinggi
Ciawitali	Sesuai	3	Tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2024

4.7 ANALISIS PEMETAAN POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

Analisis pemetaan potensi investasi Kecamatan Buahdua adalah dengan melakukan perhitungan pada setiap skor potensi investasi sektoral yang sudah dilakukan.

Tabel 4.56 Perhitungan Pemetaan Potensi Investasi Kecamatan Buahdua

Nama Desa	Potensi Fisik				Potensi Ketersediaan Infrastruktur				Potensi Ketersediaan Fasiitas		
	Kemiringan Lereng	Penggunaan Lahan	Hidrologi	Kerawanan Bencana	Jaringan Jalan	Jaringan Air Baku	Jaringan Ketenagalistrikan	Jaringan Telekomunikasi	Pendidikan	Kesehatan	Perdagangan
Sekarwangi	3	1	1	2	3	2	2	3	3	3	2
Cilangkap	3	1	2	2	3	1	3	2	1	3	1
Cibitung	1	1	1	2	2	3	1	1	1	3	2
Cikurubuk	3	1	1	2	2	1	1	1	1	3	2
Bojongloa	3	1	1	2	2	1	1	0	1	3	1
Nagrak	3	1	1	2	2	2	1	2	3	3	2
Panyindangan	3	1	1	2	3	1	1	2	1	3	2
Buahdua	3	1	1	2	3	-	3	2	2	3	3
Gendereh	3	1	1	2	2	1	1	0	2	1	2
Citaleus	3	1	2	2	2	1	-	2	1	3	2
Mekarmukti	3	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2
Hariang	3	1	1	2	3	1	3	2	1	3	3
Karangbungur	3	2	2	3	2	1	1	2	2	1	2
Ciawitali	3	3	3	2	2	-	-	2	2	3	2
Total	40	17	20	29	33	16	19	23	22	36	28

Nama Desa	Potensi Ekonomi					Potensi Ketersediaan SDM Tenaga Kerja		Potensi Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Dukungan Kebijakan	Total
	Usaha Pertanian Tanaman Pangan	Usaha Pertanian Tanaman Hortikultura	Usaha Peternakan	Usaha Industri Pengolahan	Usaha Pariwisata	Ketersediaan tenaga Kerja Produktif	Ketersediaan Tenaga Kerja dari Tingkat Pendidikan	Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Dukungan Kebijakan	
Sekarwangi	2	2	1	2	2	2	3	3	42
Cilangkap	3	3	1	0	1	3	3	3	39
Cibitung	1	2	2	0	1	1	3	3	31
Cikurubuk	2	3	3	2	2	1	3	3	37
Bojongloa	3	2	3	2	2	2	3	3	36
Nagrak	1	1	1	0	1	2	3	3	34
Panyindangan	1	1	1	2	1	1	3	3	33
Buahdua	3	2	1	2	1	3	3	3	41
Gendereh	2	1	1	2	1	2	2	3	30
Citaleus	3	3	3	2	1	2	3	3	39
Mekarmukti	1	1	2	0	1	2	3	3	31
Hariang	2	2	1	0	1	3	3	3	38
Karangbungur	1	1	1	0	1	1	3	3	32
Ciawitali	2	3	1	2	1	1	3	3	38
Total	27	27	22	16	17	26	41	42	501

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Berdasarkan Tabel 4.56 pemetaan potensi investasi Kecamatan Buahdua di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel potensi keamanan dan kenyamanan berdasarkan dukungan kebijakan, variabel potensi ketersediaan SDM tenaga kerja parameter ketersediaan tenaga kerja dari tingkat pendidikan, dan variabel potensi fisik parameter kemiringan lereng yang landai merupakan variabel potensi investasi di Kecamatan Buahdua yang dapat dipertimbangkan oleh Investor. Nilai variabel tersebut secara relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan variabel lainnya.

Selain itu, variabel potensi ketersediaan infrastruktur parameter ketersediaan jaringan jalan dan jaringan telekomunikasi, variabel potensi ketersediaan fasilitas dengan parameter ketersediaan fasilitas kesehatan dan perdagangan, serta variabel potensi ekonomi dengan parameter usaha pertanian tanaman pangan dan usaha pertanian tanaman hortikultura juga menjadi potensi lain yang dapat dipertimbangkan oleh Investor mengenai potensi investasi di Kecamatan Buahdua.

Berdasarkan lokasi dengan nilai potensi investasi tertinggi secara relatif di Kecamatan Buahdua adalah Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap, Desa Buahdua dan Desa Citaleus. Desa Sekarwangi dan Desa Buahdua merupakan desa yang sudah tumbuh menjadi kawasan perkotaan di Kecamatan Buahdua. Desa Sekarwangi menjadi pusat kawasan pariwisata dengan banyaknya destinasi dan potensi wisata yang dimiliki. Desa Sekarwangi juga memiliki potensi investasi Geothermal yang dapat menghasilkan listrik sebesar 32 MW. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melakukan studi berkaitan dengan Pengembangan Geothermal di Wilayah Gunung Tampomas, nilai investasi yang dapat dihasilkan sebesar 2,56 Triliun Rupiah. Desa Buahdua merupakan pusat ibukota kecamatan yang memiliki ketersediaan terhadap fasilitas pemerintahan dan perdagangan sehingga memiliki potensi investasi yang mendukung kegiatan tersebut.

Desa Cilangkap memiliki nilai potensi investasi yang sama dan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Buahdua. Desa Cilangkap juga memiliki potensi pariwisata seperti wisata pemandian air panas Cipanas Cileungsing dan juga bagian dari Wilayah Geothermal Gunung Tampomas yang dapat menghasilkan listrik sebesar 32 MW. Desa Citaleus memiliki potensi peternakan yang tinggi, dengan komoditas peternakan ayam dan budidaya perikanan serta menjadi bagian Wilayah Geothermal Gunung Tampomas. Desa lainnya yang memiliki potensi peternakan yang tinggi adalah Desa Cikurubuk dan Desa Ciawitali.

Desa Cikurubuk juga memiliki potensi pertanian padi organik, peternakan sapi, dan bagian Wilayah Geothermal Gunung Tampomas. Desa Ciawitali merupakan desa yang diarahkan untuk dikembangkan industri pengolahan seluas 1.125 Ha. Rencana pengembangan industri pengolahan ini masuk ke dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) Sumedang Tahun 2023-2043. Rencana pengembangan kawasan industri berupa *Industrial Park* yang terintegrasi dengan KPI Ujungjaya dan KPI Tomo. Desa lainnya yang memiliki potensi investasi unggulan dengan nilai hasil perhitungan potensi investasi relatif tinggi adalah Desa Bojongloa, dengan potensi investasi peternakan dan geothermal Gunung Tampomas. Berikut merupakan tabel dan peta potensi investasi di Kecamatan Buahdua.

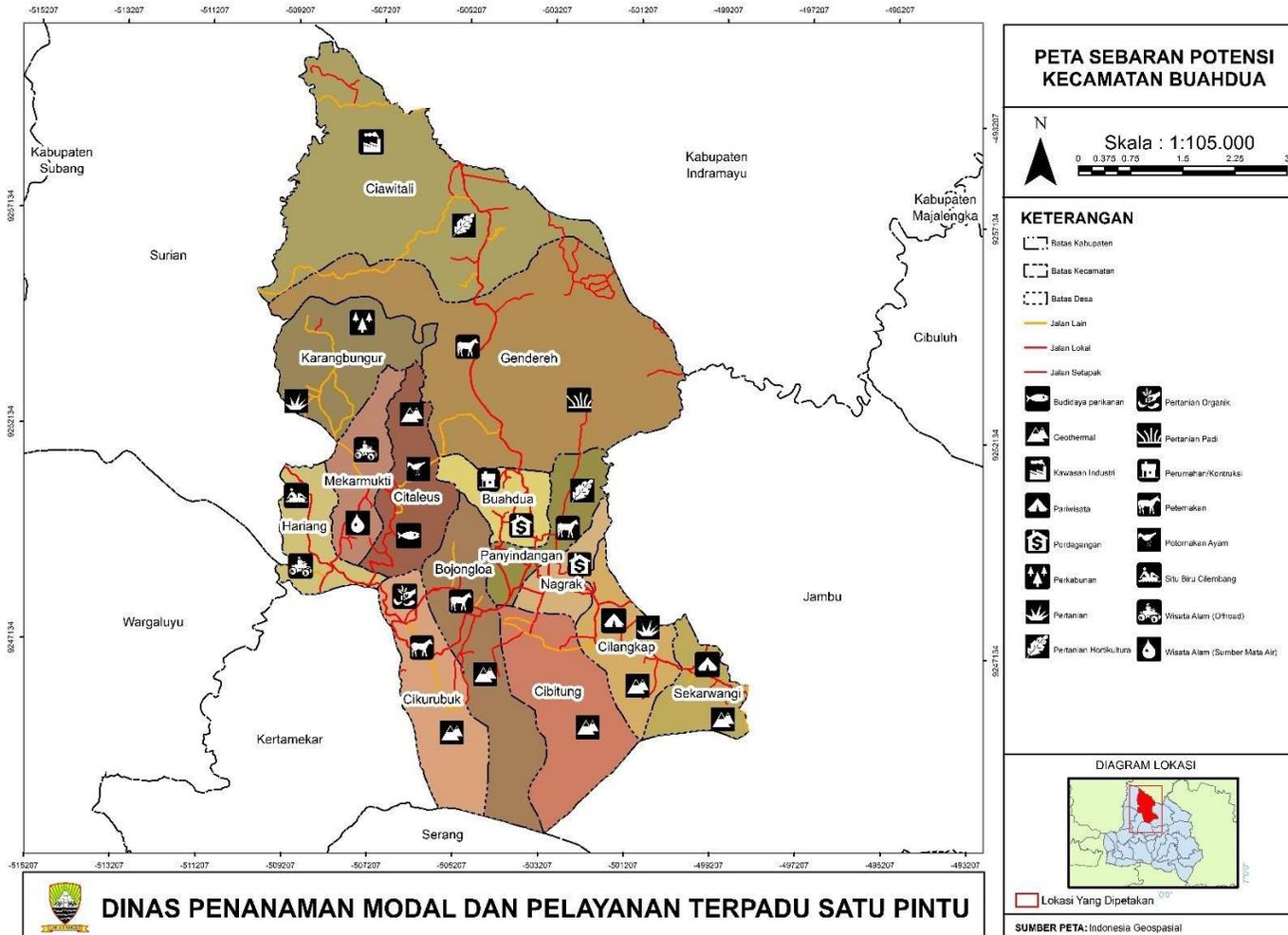
Tabel 4.57 Pemetaan Potensi Investasi Berdasarkan Desa di Kecamatan Buahdua

No	Nama Desa	Potensi Investasi
1	Sekarwangi	Pariwisata dan Geothermal (32MW)
2	Cilangkap	Pariwisata, Geothermal (32MW), dan Pertanian
3	Cibitung	Geothermal (32MW)
4	Cikurubuk	Pertanian Organik, Peternakan dan Geothermal (32MW)
5	Bojongloa	Peternakan dan Geothermal (32MW)
6	Nagrak	Perdagangan
7	Panyindangan	Pertanian Hortikultura dan Peternakan
8	Buahdua	Perdagangan dan Konstruksi/ Perumahan
9	Gendereh	Pertanian Padi dan Peternakan
10	Citaleus	Peternakan Ayam, Budidaya Perikanan, dan Geothermal (32MW)
11	Mekarmukti	Wisata Alam (<i>oflroad</i> dan sumber mata air)
12	Hariang	Wisata Alam (Situ Biru Cilembang dan <i>oflroad</i>)
13	Karangbungur	Pertanian dan Perkebunan
14	Ciawitali	Kawasan Industri (1125 Ha) dan Pertanian Hortikultura

Sumber: Hasil Analisis, 2024

PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

Gambar 4.60. Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua





Bab 5



Permasalahan
Pengembangan Potensi
Investasi Kecamatan
Buahdua



5.1 ANALISIS PERMASALAHAN PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

5.1.1 Pemetaan Permasalahan

Pemetaan permasalahan dilakukan untuk merumuskan permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua. Analisis pemetaan permasalahan dilakukan berdasarkan permasalahan pada potensi fisik, infrastruktur, fasilitas, ekonomi, SDM, dan keamanan serta kenyamanan dalam berinvestasi di Kecamatan Buahdua. Identifikasi permasalahan dilakukan menggunakan analisis pohon masalah atau *Problem Tree Analysis* berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif. Setelah itu, permasalahan utama dikelompokkan untuk dapat dianalisis pengembangannya.

Kecamatan Buahdua merupakan salah satu kecamatan yang paling luas di Kabupaten Sumedang yaitu 7,15% dari total luas Kabupaten Sumedang. Kondisi fisik yang didominasi oleh perbukitan karena secara geografis Kecamatan Buahdua berada di bawah kaki Gunung Tampomas. Desa Cibitung merupakan salah satu desa di Kecamatan Buahdua yang memiliki permasalahan pada kemiringan lereng curam dan sangat curam terluas, yaitu 409,35 Ha atau sekitar 46,74% dari total luas wilayahnya. Sedangkan desa lainnya di Kecamatan Buahdua memiliki kelerengan relatif lebih landai, yaitu dengan kemiringan lereng sekitar 0-8% dan 8-15%, sehingga memiliki potensi investasi dari sisi fisik kemiringan lereng yang lebih baik.

Kondisi penggunaan lahan di Kecamatan Buahdua juga masih didominasi oleh hutan, perkebunan, ladang, semak belukar dan sawah. Oleh karena itu, persentase kawasan terbangun atau guna lahan permukiman lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase kawasan non terbangun pada setiap desa di Kecamatan Buahdua. Persentase kawasan terbangun atau permukiman dan tempat kegiatan saat ini masih 1,08% jika dibandingkan dengan kawasan non terbangun atau non permukiman dengan persentase 98,92% dari total luas wilayah. Desa Sekarwangi dan Desa Buahdua merupakan wilayah yang sudah berkembang untuk menjadi permukiman perkotaan. Sedangkan desa lainnya relatif belum dapat mengembangkan penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi perkotaan, karena dominasi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Permasalahan optimalisasi penggunaan lahan untuk kegiatan perekonomian perkotaan terutama pada wilayah yang diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan seperti Desa

Sekarwangi dan Desa Buahdua menjadi penting. Pengembangan kawasan peruntukan campuran atau *mixed-use landuse* diperlukan untuk mendukung dalam efisiensi biaya transportasi, kegiatan perumahan, perkantoran, komersil dan industri yang menjadi salah satu pertimbangan investor. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan investasi tinggi, seperti Desa Sekarwangi dan Desa Buahdua perlu untuk melakukan optimalisasi penggunaan lahan dalam mendukung investasi.

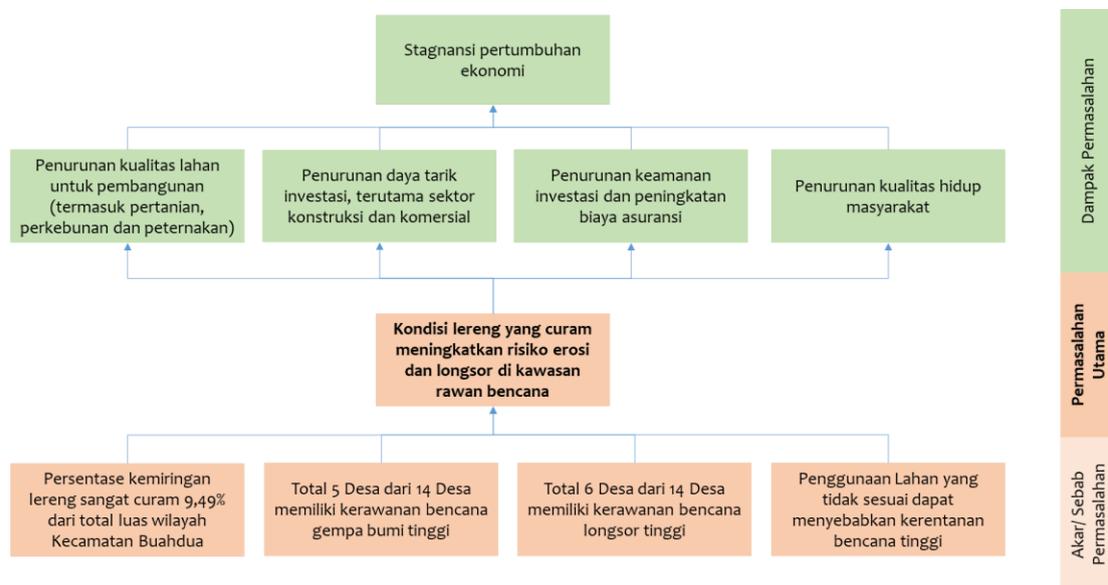
Terkait dengan potensi hidrologi, setiap desa yang ada di Kecamatan Buahdua setidaknya memiliki lebih dari satu sungai yang dapat menjadi sumber air baku. Berdasarkan hasil penilaian potensi fisik dari indikator hidrologi, desa-desa di Kecamatan Buahdua rata-rata memiliki potensi hidrologi rendah. Dampaknya adalah terdapat beberapa permasalahan dalam penyediaan infrastruktur air bersih dengan sistem perpipaan atau non-perpipaan. Desa yang memiliki masalah dalam penyediaan infrastruktur air bersih diantaranya Desa Panyindangan, Buahdua, Gendereh, Mekarmukti, Hariang, Citaleus dan Buahdua. Desa Citaleus, Mekarmukti dan Hariang membeli air bersih dari Desa Cikurubuk. Sedangkan Desa Citaleus tidak memiliki mata air. Desa Ciawitali mendapatkan air bersih dari Desa Buahdua. Permasalahan ketersediaan air baku yang mendukung infrastruktur air bersih di Kecamatan Buahdua menjadi penting untuk menarik investasi.

Permasalahan fisik lainnya adalah Kecamatan Buahdua adalah salah satu kecamatan yang memiliki kerawanan bencana gempa bumi dan tanah longsor. Berdasarkan data inaRisk Tahun 2024, tingkat kerawanan bencana tinggi memiliki luas 32,02 Ha yang tersebar di Desa Cibitung, Nagrak, Mekarmukti, Hariang, dan Karangbungur. Sedangkan tingkat kerawanan bencana longsor tinggi sebesar 3.507 Ha dan tersebar di beberapa desa, terutama hampir sebagian Desa Cibitung, Bojongloa, Cikurubuk, Cilangkap, Nagrak, dan Panyindangan.

Berdasarkan data statistik BPS Kecamatan Buahdua Dalam Angka Tahun 2024, kejadian bencana gempa bumi pernah terjadi pada seluruh desa di Kecamatan Buahdua setidaknya 1 kali dalam setahun. Selain gempa bumi, terdapat desa yang telah terjadi bencana tanah longsor setidaknya sekali dalam 1 tahun, yaitu Desa Karangbungur. Oleh karena itu, berdasarkan parameter kerawanan bencana berdasarkan kejadian bencana, rata-rata desa yang berada di Kecamatan Buahdua memiliki kerawanan bencana sedang. Desa Karangbungur memiliki kerawanan bencana tidak hanya gempa bumi, tetapi juga tanah longsor pada tahun yang sama, sehingga tingkat kerawanan bencananya tinggi.

Kerawanan bencana menjadi salah satu permasalahan yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi. Kerawanan bencana bisa diminimalisir dampaknya dengan kebijakan dan implementasi perencanaan tata ruang yang mengarahkan pengembangan pemanfaatan ruang sesuai dengan kondisi fisik wilayah Kecamatan Buahdua. Gambar 5.1 berikut merupakan diagram alir analisis masalah kondisi fisik di Kecamatan Buahdua menggunakan metode *Problem Tree Analysis*.

Gambar 5.1. Problem Tree Analysis Potensi Fisik Kecamatan Buahdua

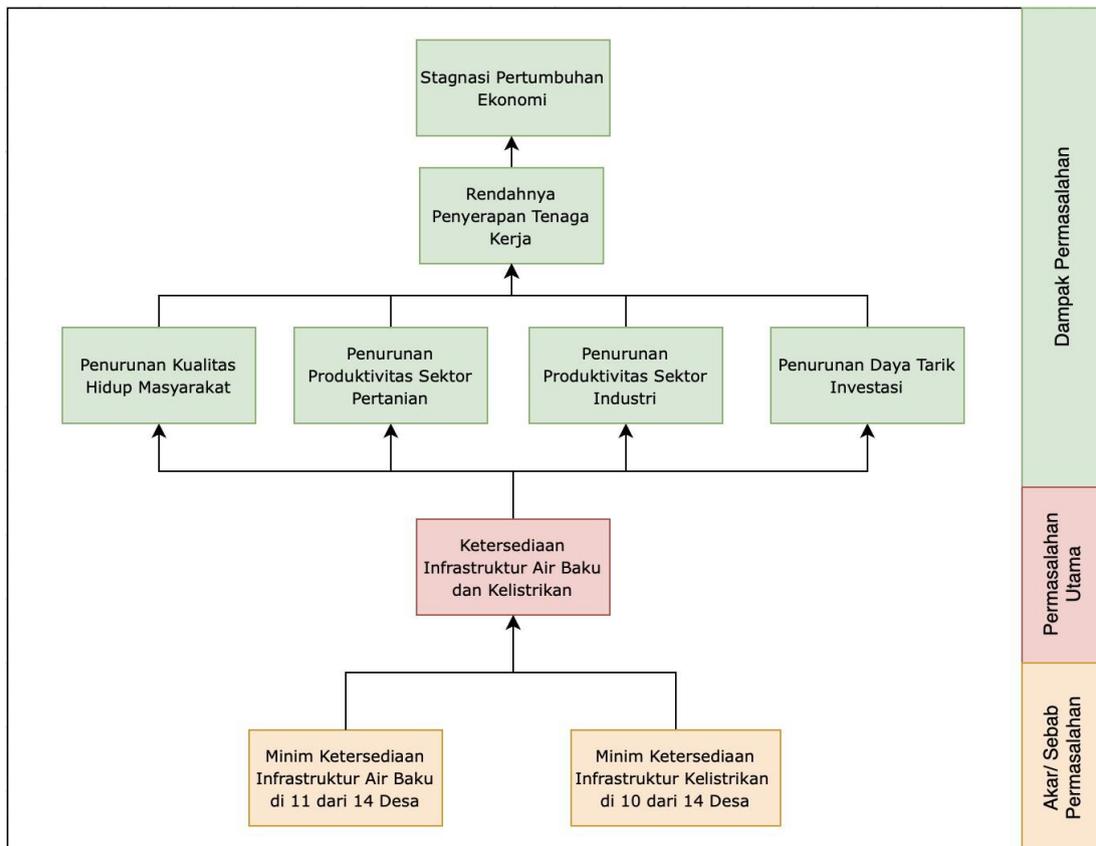


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa permasalahan kondisi lereng yang curam meningkatkan risiko erosi dan longsor di kawasan bencana. Salah satu penyebabnya yaitu penggunaan lahan yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerentanan bencana tinggi. Permasalahan kerawanan bencana akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga penurunan kualitas lahan berdampak pada pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan. Jika tidak diatasi, permasalahan fisik ini akan menghambat penarikan investasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap stagnansi ekonomi. Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai desa dengan potensi besar dalam sektor pertanian dan pariwisata. Namun, pengembangan wilayah ini masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur, termasuk keterbatasan fasilitas air bersih, kelistrikan dan sarana pendukung ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi infrastruktur desa-desa di Kecamatan Buahdua

menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, diperoleh permasalahan utama terkait ketersediaan infrastruktur desa-desa di Kecamatan Buahdua yang berakar pada 2 variabel yaitu ketersediaan infrastruktur air baku dan infrastruktur kelistrikan. Pada infrastruktur air baku (Tabel 4.36), 11 dari total 14 desa (78,6%) di Kecamatan Buahdua termasuk dalam klasifikasi ketersediaan yang rendah. Sedangkan untuk infrastruktur kelistrikan (Tabel 4.38), 10 dari total 14 desa (71,4%) di Kecamatan Buahdua termasuk dalam klasifikasi ketersediaan yang rendah. Kondisi ini dinilai menjadi potensi permasalahan utama terkait infrastruktur yang kemungkinan besar akan menghambat investasi pada desa-desa di Kecamatan Buahdua. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang dimiliki serta data literatur terkait, dilakukan analisis penyebab-dampak dari permasalahan infrastruktur ini dengan menggunakan metode *Problem Tree Analysis*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2. Problem Tree Analysis Ketersediaan Infrastruktur Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Gambar 5.2, dapat dilihat bahwa permasalahan ketersediaan infrastruktur di Kecamatan Buahdua akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, sektor pertanian, sektor industri, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Secara teoritis, pembangunan infrastruktur - dalam hal ini infrastruktur air baku dan kelistrikan - secara tidak langsung akan memancing investasi dari sektor swasta yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rama, 2023). Zein et. al. menyatakan ketersediaan infrastruktur seperti air baku dan listrik, memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung sektor pertanian dan industri, serta menjadi faktor menarik bagi investasi.

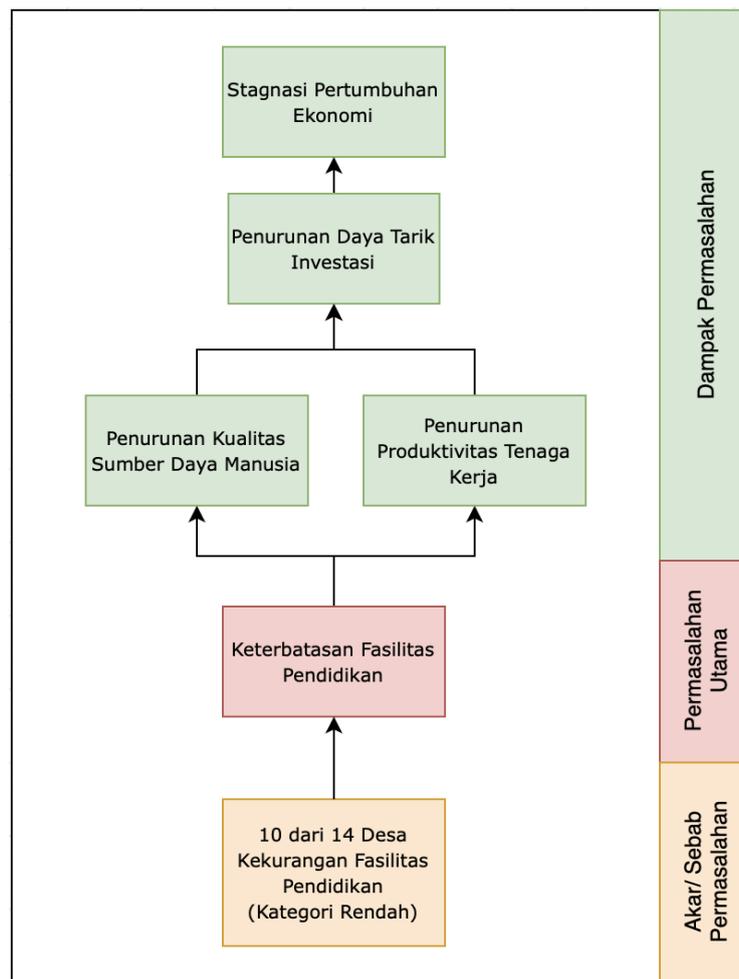
Berdasarkan Dokumen Materi Teknis Pemutakhiran RDTR Kecamatan WP Buahdua Tahun 2023, permasalahan kelistrikan masih terjadi di Kecamatan Buahdua. Terdapat desa yang belum semua warga terlayani akses listrik, diantaranya Desa Cikurubuk. Desa tersebut merupakan desa yang secara relatif memiliki potensi investasi tinggi berdasarkan hasil perhitungan pemetaan potensi investasi. Permasalahan pemerataan distribusi jaringan kelistrikan menjadi penting agar dapat menarik investasi di Kecamatan Buahdua. Dengan demikian, rencana tujuan pada masa mendatang dalam konteks ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan daya tarik investasi pada desa-desa di Kecamatan Buahdua yaitu melalui peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur air baku dan ketenagalistrikan.

Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang, memiliki potensi investasi yang menjanjikan di berbagai sektor. Namun pengembangan wilayah ini memerlukan dukungan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Saat ini, beberapa desa di Kecamatan Buahdua masih menghadapi keterbatasan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, diperoleh permasalahan utama dalam konteks fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Buahdua adalah terkait ketersediaan fasilitas pendidikan.

Terkait infrastruktur pendidikan pada desa-desa di Kecamatan Buahdua, 8 dari total 14 desa (64,5%) memiliki tingkat ketersediaan yang rendah (Tabel 4.42). Sedangkan untuk infrastruktur kesehatan (Tabel 4.44), hanya 3 dari total 14 desa (21,4%) yang masuk dalam kategori rendah. Dengan demikian, kebutuhan akan infrastruktur Pendidikan dinilai menjadi permasalahan utama pada analisis ini. Oleh karena itu, berdasarkan informasi

yang dimiliki serta data literatur terkait, dilakukan analisis penyebab-dampak dari permasalahan infrastruktur ini dengan menggunakan metode *Problem Tree Analysis*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.3 berikut.

Gambar 5.3. Problem Tree Analysis Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Gambar 5.3 dapat dilihat bahwa permasalahan terkait ketersediaan fasilitas pendidikan akan berdampak pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia (Yasin, 2022). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali berkorelasi dengan tingkat produktivitas dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, sehingga meningkatkan kelayakan kerja mereka saat mencari pekerjaan.

Selain itu, perusahaan juga lebih tertarik untuk memperkerjakan orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Nazila et. al.,). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang akhirnya menarik investasi di suatu daerah.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari rencana tujuan pada masa mendatang dalam konteks ketersediaan fasilitas pendidikan, perlu dilakukan pemerataan pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan desa-desa di Kecamatan Buahdua, sehingga mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan menarik investasi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam pembangunan jangka panjang terutama di Kecamatan Buahdua. Kecamatan Buahdua memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Untuk mewujudkan potensi tersebut, adanya investasi menjadi hal yang sangat krusial. Peningkatan sumber daya manusia memiliki manfaat yang besar dalam pembangunan jangka panjang di Kecamatan Buahdua. Dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, Kecamatan Buahdua akan mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.

Sumber daya manusia yang terampil dan terdidik akan mendorong inovasi dan kreativitas di Kecamatan Buahdua. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan industri, pariwisata, serta sektor lainnya yang ada di Kecamatan Buahdua. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, tingkat pengangguran di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Buahdua akan berkurang. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan akan membantu individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Buahdua masih banyak berada pada klasifikasi desa rendah dan sedang walaupun terdapat pula desa yang berada di klasifikasi tinggi, baik itu dari segi usia produktif maupun pendidikan. Desa Sekarwangi memiliki sebagian besar usia warga produktif berada pada taraf sedang dan pendidikan sebagian besar sampai SMA. Sumber Daya Manusia yang kurang produktif tentu akan berdampak pada kualitas dari Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas dikarenakan faktor usia yang tidak mendukung. Desa Cilangkap sebagian besar warga berada pada usia produktif dengan didukung pendidikan yang potensial. Hal tersebut tentu berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang optimal dalam menunjang pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua.

Desa Cibitung memiliki masyarakat yang berada pada taraf rendah untuk usia produktif bekerja, walaupun ditunjang dengan pendidikan yang cukup tinggi. Hal tersebut tentu akan mengurangi intensitas kinerja dari Sumber Daya Manusia yang ada dalam menunjang pengembangan investasi daerah. Sama halnya dengan Desa Cikurubuk bahwa Sumber Daya Manusia di desa kurang potensial karena terkendala usia produktif warga dalam bekerja, sehingga kurang mampu menjadi penunjang pengembangan investasi daerah.

Desa Bojongloa menjadi salah satu desa dengan taraf usia produktif yang sedang, dimana sebagian masyarakat dapat ikut andil dalam pengembangan investasi daerah dikarenakan taraf pendidikan yang sebagian warga cukup tinggi. Sama halnya dengan Desa Nagrak yang berada pada taraf sumber daya manusia yang sedang, dimana masih mampu untuk menunjang pengembangan investasi daerah.

Sedangkan Desa Panyindangan memiliki taraf hidup masyarakat yang kurang karena usia produktif masyarakat sangat kurang. Sebagian besar warga di desa tersebut berada pada usia sudah tidak produktif lagi. Hal tersebut tentu kurang menunjang pengembangan investasi daerah walaupun ada dukungan pendidikan yang cukup tinggi bagi warga. Masyarakat lebih memilih untuk bertani atau bercocok tanam untuk menghidupi keluarga. Selain itu ditunjang pula dengan pendidikan warga yang tidak terlalu tinggi yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja lebih dari pendidikan mereka. Keterampilan yang dimiliki pun tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Desa Buahdua sebagai ibukota Kecamatan Buahdua tentu memiliki sumber daya manusia yang cukup tinggi dan terbilang produktif. Masyarakat sebagian besar berada pada usia produktif dengan pendidikan yang cukup tinggi. Desa Buahdua ditunjang dengan sarana prasarana yang mendukung pendidikan dari masyarakat dan masyarakat dengan pekerjaan yang bekerja sebagai pegawai tidak hanya bertani. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penunjang pengembangan investasi di kawasan Kecamatan Buahdua.

Sumber Daya Manusia di Desa Gendereh dari segi usia sebagian masyarakat berada pada taraf produktif yang mampu menunjang pengembangan investasi daerah. Akan tetapi dari segi pendidikan sebagian masyarakat hanya berpendidikan SMP, sehingga dari segi kualitas sangat kurang. Rendahnya pendidikan masyarakat dikarenakan pola pikir masyarakat bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Sehingga banyak warga yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah menjadi salah satu penyebab orang tua tidak mampu untuk

menyekolahkan anak-anak mereka dan anak-anak pun menjadi tidak berminat untuk melanjutkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi atau putus sekolah. Selain itu ada pemikiran dari masyarakat untuk lebih baik bekerja daripada harus sekolah yang akan mengeluarkan biaya untuk sekolah. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai dan kurang menjadi alasan lain masyarakat tidak melanjutkan sekolahnya.

Desa Citaleus menjadi desa dengan sumber daya manusia yang cukup mampu untuk menunjang pengembangan investasi daerah. Selain karena faktor usia masyarakat yang berada pada kategori sedang juga pendidikan masyarakat yang masuk ke dalam kategori tinggi. Desa Citaleus mampu untuk mendukung pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua. Sama halnya dengan Desa Mekarmukti yang sebagian masyarakat berada pada usia produktif untuk bekerja, sehingga mampu untuk mendukung penyelenggaraan investasi daerah di Kecamatan Buahdua. Berdasarkan dari segi pendidikan masyarakat berada pada kategori tinggi mampu untuk mendukung pengembangan Investasi daerah. Desa Hariang menjadi salah satu desa dengan Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi untuk menjadi pendukung dalam pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua. Hal tersebut terlihat dari masyarakat desa yang berada pada usia produktif untuk bekerja dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi untuk sebagian masyarakat. Berdasarkan segi pekerjaan pun masyarakat banyak yang bekerja sebagai karyawan swasta dan berdagang dibandingkan sebagai petani. Sedangkan Desa Karangbungur memiliki masyarakat yang sebagian besar berada pada usia non produktif. Hampir sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, karena masyarakat yang kebanyakan usianya sudah berada di atas usia produktif dan yang belum produktif. Walaupun demikian, taraf pendidikan sebagian masyarakat cukup tinggi. Hanya saja keinginan untuk bekerja lebih dirasa kurang dikarenakan lebih berkeinginan untuk bekerja sebagai petani. Desa Ciawitali menjadi salah satu desa dengan tingkat usia produktif yang kurang. Sebagian masyarakatnya lebih banyak pergi ke kota untuk bekerja dan di desa sendiri sebagian besar lebih ke usia non produktif dan bekerja sebagai petani. Akan tetapi, dari segi pendidikan cukup tinggi. Oleh karena itu, Desa Ciawitali cukup berpotensi untuk menunjang pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua.

Tingkat pendidikan masyarakat pada sebagian desa di Kecamatan Buahdua belum optimal, karena keterbatasan pada ketersediaan sarana pendidikan yang belum memadai. Selain itu, pergantian kurikulum yang cepat dan tidak semua wilayah cepat beradaptasi

berakibat pada belum meratanya kualitas pendidikan di Kecamatan Buahdua. Kurikulum yang sering berganti dan kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik juga menjadi hambatan utama.

Permasalahan SDM yang masih rendah disebabkan pada ketimpangan ekonomi dan sosial. Tingginya ketimpangan ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja daripada harus bersekolah dan mengeluarkan biaya yang banyak. Umumnya dalam aspek pendidikan di perkotaan dan desa terdapat perbedaan. Fasilitas dan sarana pendidikan di perkotaan yang lebih baik dibandingkan desa membuat warga kota mendapatkan pendidikan yang sangat baik.

Namun perbedaan terlihat pada desa-desa di Kecamatan Buahdua. Beberapa desa di Kecamatan Buahdua yang masih rendah dalam tingkat pendidikannya. Walaupun tidak semua desa, tapi kebanyakan desa masih rendah dalam tingkat pendidikannya. Sarana dan fasilitas yang masih kurang baik, lingkungan yang masih belum sadar terhadap pentingnya pendidikan dan faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab mengapa tingkat pendidikan di desa masih rendah.

Orang tua atau kepala keluarga yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dengan tingkat pendidikan yang terbilang rendah menjadi salah satu rendahnya tingkat pendidikannya di sana. Hal tersebut karena tingkat pendidikan orang tua sebelumnya pun rendah.

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang baik masih menjadi *privilege* bagi sebagian kecil masyarakat, menyebabkan banyak potensi SDM tidak tergarap maksimal. Kualitas kesehatan yang rendah di Indonesia, tercermin dalam masalah gizi buruk dan tingginya angka *stunting*, secara langsung mempengaruhi produktivitas SDM. Beberapa desa di Kecamatan Buahdua hanya terdapat SD, namun untuk jenjang lebih tinggi seperti SMP dan SMA belum ada. Jika ingin melanjutkan pendidikan SMP atau SMA warga harus pergi bersekolah ke wilayah terdekat yang memiliki fasilitas pendidikan SMP dan SMA. Dominasi warga yang tingkat pendidikannya rendah membuat orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut tidak akan memiliki dorongan dan motivasi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Motivasi dan dorongan yang belum muncul dalam diri sendiri menjadikan salah satu penyebab mengenai kesadaran untuk pentingnya mengenyam pendidikan tinggi.

Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, menjadi faktor penting dalam rendahnya kualitas SDM. Kurangnya lapangan kerja berkualitas membuat banyak lulusan tidak dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari. Penyebab lainnya, kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja. Permasalahan SDM dengan menggunakan metode *Problem Tree Analysis* ditunjukkan pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4. Problem Tree Analysis Potensi SDM Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Permasalahan SDM yang masih rendah dengan dampak pada banyaknya pengangguran menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Buahdua. Jumlah Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 yaitu 43.485 orang. Permasalahan yang paling menonjol dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang lamban, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, angka kemiskinan yang belum menurun secara signifikan, dan distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua, perlu untuk melihat kondisi perekonomian makro.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang akan tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang sudah menunjukkan tren positif sejak berkontraksi akibat Pandemi Covid19 di tahun 2020. Berkat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2022 mampu mencapai 5,03 % dari target 4,70 - 5,70 atau meningkat sebesar 1,86 persen poin atau meningkat 58,68 persen dibandingkan capaian tahun 2021. PDRB per kapita juga tumbuh 4,36% (ADHK) atau naik 2,33 juta rupiah (ADHB) menjadi 34,46 juta rupiah dari target 32,0 - 33,8 juta rupiah. Capaian ini tentu sudah melampaui target karena pencapaian PDRB yang kembali tumbuh setelah pandemi. Berdasarkan nilai harga konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sumedang masih bisa lebih cepat dari Jawa Barat (4,12%), meski secara nilai nominal atau harga berlaku masih berada di bawah Jawa Barat yang mencapai 49,04 juta rupiah. Rekapitulasi Capaian indikator Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 menunjukkan anggaran 3.151.546.497 dengan realisasi 2.963.526.309 yang berarti presentasi capaian sebesar 94.03%

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang selama masa pandemi covid 19 mengalami penurunan, namun dengan berjalannya waktu dengan situasi pandemi covid 19 berstatus melandai, kondisi ekonomi Kabupaten Sumedang secara perlahan mengalami peningkatan kearah positif. Hal tersebut dapat kita lihat dari data BPS Kabupaten Sumedang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,03 % dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3.17% ini menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,13 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Sektor pertanian di Kabupaten Sumedang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi wilayah dengan kontribusi sebesar 18,80% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (BPS Kabupaten Sumedang, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Buahdua. Sektor pertanian di

Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Buahdua saat ini masih belum memiliki daya saing yang tinggi, sehingga *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan penyediaan makan minum yang terkait dengan pariwisata masih kurang.

Permasalahan lainnya terkait pengembangan pertanian pangan dan hortikultura di Kecamatan Buahdua adalah pasar yang tidak efisien, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan usaha pertanian, produksi komoditas pertanian yang rendah, serta persaingan dengan produk impor. Rata-rata jumlah usaha pertanian pangan/padi perorangan di Kecamatan Buahdua masuk ke dalam klasifikasi sedang-rendah. Desa-desanya yang sudah memiliki usaha pertanian tanaman pangan/padi perorangan dengan jumlah besar diantaranya Desa Cilangkap, Bojongloa, Buahdua, dan Citaleus.

Sedangkan untuk rata-rata jumlah usaha pertanian hortikultura masuk ke dalam klasifikasi rendah. Hanya desa-desa tertentu yang memiliki potensi dari sisi produksi yang banyak untuk pertanian hortikultura, diantaranya adalah Desa Ciawitali dan Desa Cikurubuk.

Berdasarkan hasil survey lapangan, saat ini belum ada usaha skala besar pengolahan hasil pertanian padi dan hortikultura di Kecamatan Buahdua. Walaupun terdapat IKM (Industri Kecil Menengah) di Desa Buahdua, Panyindangan, Sekarwangi, Citaleus, Cikurubuk, dan Bojongloa yang sudah mengolah hasil pertanian menjadi makanan tradisional seperti pisang sale dan opak, akan tetapi skalanya masih kecil. Desa Nagrak juga memiliki IKM pengolahan minyak kelapa asli yang terdapat di RT 11, RW 4 dan sudah ekspor sampai ke luar negeri, akan tetapi skalanya masih kecil. Oleh karena itu, permasalahan utama terkait dengan pertanian padi dan hortikultura di Kecamatan Buahdua adalah masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dan hortikultura.

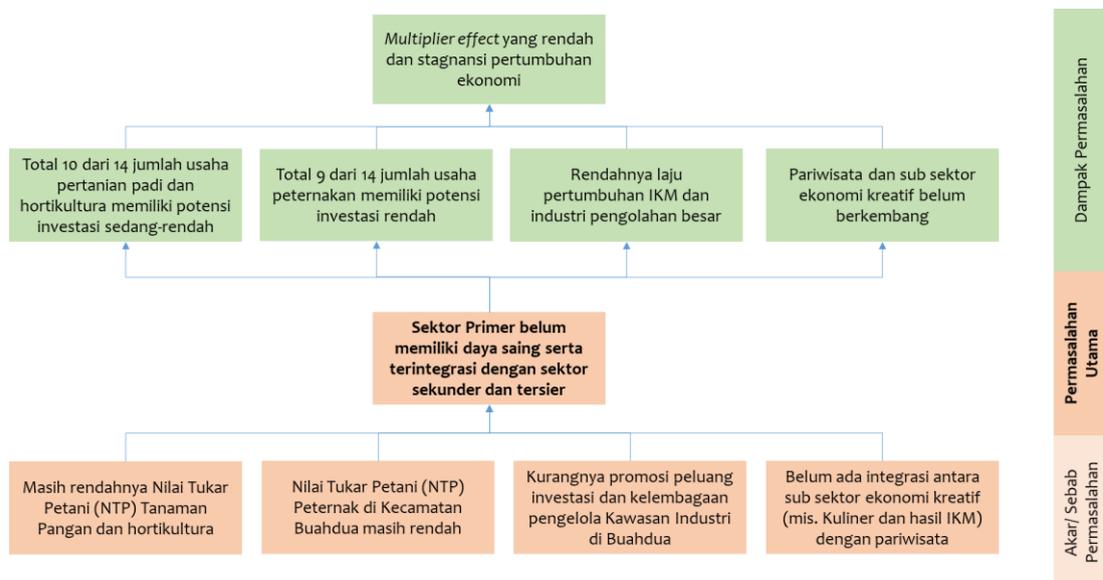
Permasalahan pada pengembangan potensi peternakan pun juga tidak terlalu berbeda dengan pertanian pangan/padi dan hortikultura. Walaupun sudah terdapat perusahaan peternakan besar seperti di Desa Citaleus, Cikurubuk dan Ciawitali, akan tetapi Nilai Tukar Petani (NTP) Peternak di Kecamatan Buahdua masih rendah. Berdasarkan hasil survey lapangan, penyebab permasalahan utama tersebut karena kurangnya akses teknologi modern, rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternak terhadap teknologi usaha peternakan dan inovasi.

Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) petani dan peternak di Kecamatan Buahdua berkaitan dengan permasalahan rendahnya laju pertumbuhan industri pengolahan, terutama IKM.

Salah satu penyebab permasalahan tersebut karena kurangnya investasi baik untuk IKM atau pun industri pengolahan besar di Kecamatan Buahdua. Masih kurangnya promosi peluang investasi dan kelembagaan pengelola Kawasan Industri di Buahdua, yaitu Desa Ciawitali menjadi salah satu akar masalah penyebab rendahnya laju pertumbuhan industri pengolahan di Kecamatan Buahdua.

IKM pengolah hasil makanan tradisional pun saat ini belum terintegrasi secara langsung dengan pengembangan pariwisata di Kecamatan Buahdua. Potensi pengembangan usaha kuliner maupun IKM penghasil makanan tradisional dapat mendukung integrasi dengan pariwisata di Kecamatan Buahdua. Hasil pengolahan makanan tradisional merupakan penunjang pariwisata dari sisi *something to buy* bagi pengunjung. Pengembangan sentra oleh-oleh yang menjual berbagai hasil pengolahan produk unggulan khas dari desa-desa di Kecamatan Buahdua merupakan bentuk dari kontribusi sektor ekonomi kreatif kuliner terhadap pariwisata. Permasalahan pengembangan potensi investasi ekonomi dengan menggunakan metode *Problem Tree Analysis* ditunjukkan pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5. Problem Tree Analysis Potensi Ekonomi Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pengembangan potensi investasi dari aspek fisik, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas, SDM serta ekonomi di Kecamatan Buahdua, maka diketahui terdapat 5 (lima) masalah utama. Permasalahan utama tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Permasalahan Pengembangan Potensi Investasi di Kecamatan Buahdua

Aspek Potensi	Permasalahan Utama	Akar/ Sebab Permasalahan	Dampak Permasalahan
Fisik	Kondisi lereng yang curam meningkatkan risiko erosi dan longsor di kawasan rawan bencana	Persentase kemiringan lereng sangat curam 9,49% dari total luas wilayah Kecamatan Buahdua	Penurunan kualitas lahan untuk pembangunan (termasuk pertanian, perkebunan dan peternakan)
		Total 5 Desa dari 14 Desa memiliki kerawanan bencana gempa bumi tinggi	Penurunan daya tarik investasi, terutama sektor konstruksi dan komersial
		Total 6 Desa dari 14 Desa memiliki kerawanan bencana longsor tinggi	Penurunan keamanan investasi dan peningkatan biaya asuransi
		Penggunaan Lahan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerentanan bencana tinggi	Penurunan kualitas hidup masyarakat
Infrastruktur	Ketersediaan infrastruktur air baku dan kelistrikan	Minim ketersediaan infrastruktur air baku di 11 dari 14 Desa	Penurunan kualitas hidup masyarakat
		Minim ketersediaan infrastruktur kelistrikan di 10 dari 14 desa	Penurunan produktivitas sektor pertanian
			Penurunan daya Tarik investasi
Fasilitas	Keterbatasan fasilitas pendidikan	10 dari 14 Desa kekurangan fasilitas pendidikan (kategori rendah)	Penurunan kualitas Sumber Daya Manusia
			Penurunan produktivitas tenaga kerja
Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang rendah	Kesulitan akses pendidikan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai	Tidak ada keinginan untuk sekolah tinggi berdampak pada kualitas pendidikan yang rendah
		Kualitas kesehatan yang buruk karena ketimpangan sosial ekonomi	Gizi buruk dan stunting berdampak pada tidak mampu membiayai sekolah
		Lapangan kerja tidak berkualitas dan tidak sesuai karena kurang pelatihan dan	Keterampilan Masyarakat yang kurang berdampak pada keterampilan

Aspek Potensi	Permasalahan Utama	Akar/ Sebab Permasalahan	Dampak Permasalahan
		pengembangan keterampilan	Masyarakat yang kurang
Ekonomi	Sektor Primer belum memiliki daya saing serta terintegrasi dengan sektor sekunder dan tersier	Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan dan hortikultura	Total 10 dari 14 jumlah usaha pertanian padi dan hortikultura memiliki potensi investasi sedang-rendah
		Nilai Tukar Petani (NTP) Peternak di Kecamatan Buahdua masih rendah	Total 9 dari 14 jumlah usaha peternakan memiliki potensi investasi rendah
		Kurangnya promosi peluang investasi dan kelembagaan pengelola Kawasan Industri di Buahdua	Rendahnya laju pertumbuhan IKM dan industri pengolahan besar
		Belum ada integrasi antara sub sektor ekonomi kreatif (mis. Kuliner dan hasil IKM) dengan pariwisata	Pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif belum berkembang

Sumber: Hasil Analisis, 2024

5.2 ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI KECAMATAN BUAHDUA

5.2.1 Analisis Pohon Tujuan

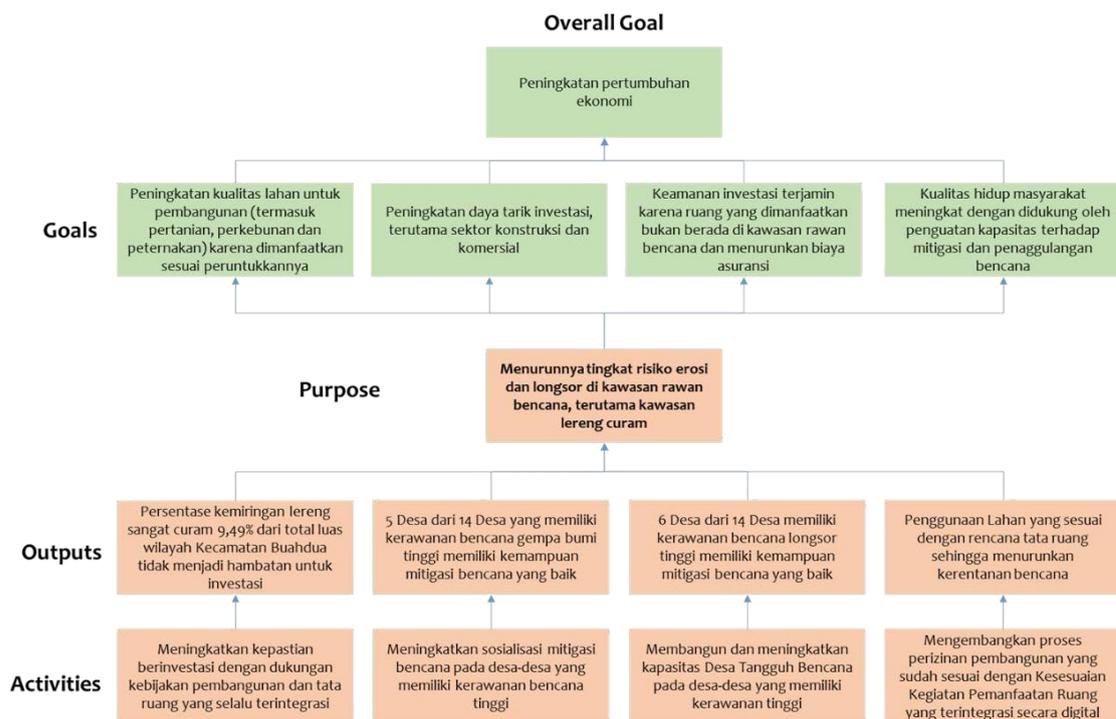
Pengembangan potensi investasi Kecamatan Buahdua dilakukan melalui analisis pohon tujuan atau *objectives tree*. Analisis pohon tujuan dimulai dari analisis pohon masalah dan mengubah pernyataan masalah (negatif) menjadi pernyataan tujuan/ hasil yang ingin dicapai pada masa depan. Analisis pohon tujuan yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan (*overall goal, goal, purpose, dan output*) yang memiliki jenjang/ hierarki sesuai “*The Program Logic*” atau “*Vertical Logic*” tanpa mengubah pohon masalah dari setiap aspek potensi investasi di Kecamatan Buahdua. Hirarki tujuan-tujuan yang ada dalam pohon tujuan diantaranya:

1. *Overall Goal/ Tujuan Umum*; merupakan orientasi strategik dari proyek/ program atau secara singkat merupakan dampak lebih luas (nasional/ sektoral/ regional) yang biasanya dicapai dalam jangka panjang.

2. *Goal/ Tujuan*; merupakan perbaikan situasi (manfaat) yang dikehendaki kelompok-kelompok sasaran biasanya dalam jangka menengah (3-5 tahun).
3. *Purpose/ Sasaran*; merupakan “*change of KAPP (Knowhow, Attitude, Practice/ Performance)*” dari kelompok-kelompok sasaran proyek.
4. *Output/ Keluaran*; merupakan fasilitas, barang/ jasa yang dihasilkan proyek.

Setelah analisis pohon tujuan dilakukan, biasanya diturunkan pada analisis *LogFrame* atau sering dikenal dengan Matriks Perencanaan Proyek (MPP). Akan tetapi, pada studi ini dibatasi kedalaman analisis pengembangan potensi investasi hanya berdasarkan hasil analisis pohon tujuan dan konsep pengembangan potensi investasi menggunakan pendekatan wilayah saja. Analisis *LogFrame* dapat dilakukan pada studi lanjutan dalam pengembangan investasi di Kecamatan Buahdua yang berbasis perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terkait melalui *Focus Group Discussion (FGD)*. Berikut merupakan penjabaran hasil analisis pohon tujuan yang sudah dilakukan untuk setiap permasalahan pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua.

Gambar 5.6. Objectives Tree Potensi Fisik Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Purpose atau sasaran terkait dengan pengembangan potensi fisik di Kecamatan Buahdua berdasarkan hasil analisis pohon tujuan yaitu “menurunnya tingkat risiko erosi dan longsor di kawasan rawan bencana, terutama kawasan lereng curam”. Untuk mencapai *Goals* atau tujuan (manfaat) yang dikehendaki, maka diperlukan *output/* keluaran dengan aktivitas yang dijelaskan dengan Tabel 5.2 berikut.

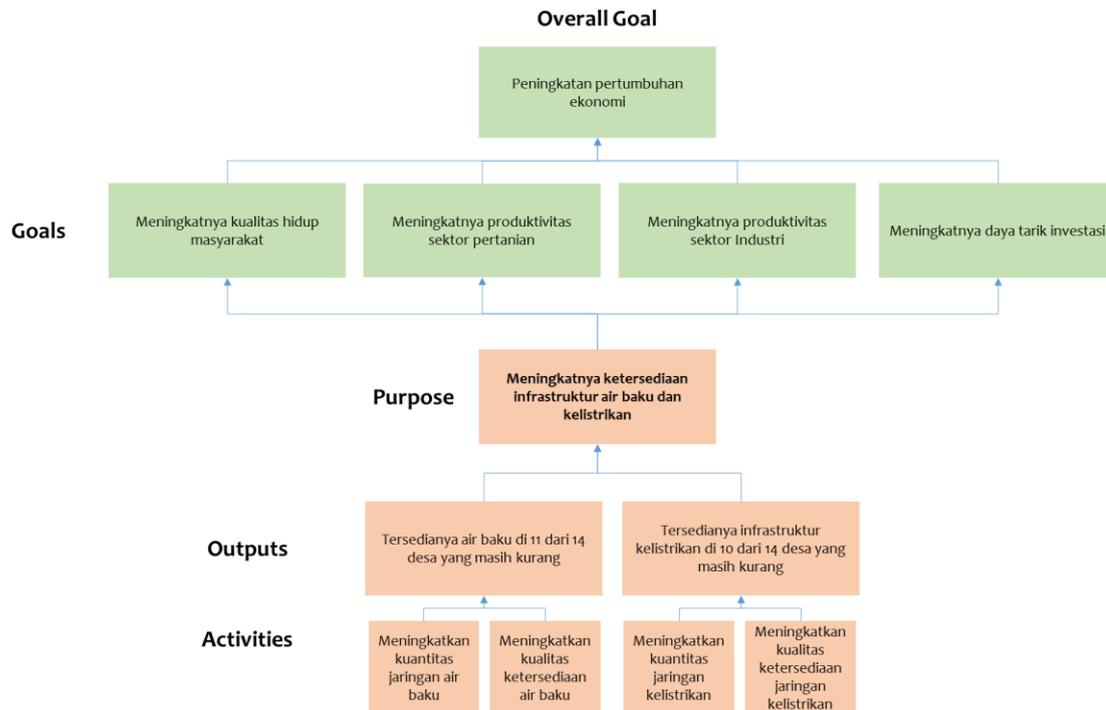
Tabel 5.2 Analisis Pengembangan Investasi Potensi Fisik di Kecamatan Buahdua

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas lahan untuk pembangunan (termasuk pertanian, perkebunan dan peternakan) karena dimanfaatkan sesuai peruntukannya	Menurunnya tingkat risiko erosi dan longsor di kawasan rawan bencana, terutama kawasan lereng curam	Persentase kemiringan lereng sangat curam 9,49% dari total luas wilayah Kecamatan Buahdua tidak menjadi hambatan untuk investasi	Meningkatkan kepastian berinvestasi dengan dukungan kebijakan pembangunan dan tata ruang yang selalu terintegrasi
	Peningkatan daya tarik investasi, terutama sektor konstruksi dan komersial		5 Desa dari 14 Desa yang memiliki kerawanan bencana gempa bumi tinggi memiliki kemampuan mitigasi bencana yang baik	Meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana pada desa-desa yang memiliki kerawanan bencana tinggi
	Keamanan investasi terjamin karena ruang yang dimanfaatkan bukan berada di kawasan rawan bencana dan menurunkan biaya asuransi		6 Desa dari 14 Desa memiliki kerawanan bencana longsor tinggi memiliki kemampuan mitigasi bencana yang baik	Membangun dan meningkatkan kapasitas Desa Tangguh Bencana pada desa-desa yang memiliki kerawanan tinggi
	Kualitas hidup masyarakat meningkat dengan didukung oleh penguatan kapasitas terhadap mitigasi dan		Penggunaan Lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menurunkan kerentanan bencana	Mengembangkan proses perizinan pembangunan yang sudah sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
	penanggulangan bencana			terintegrasi secara digital

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 5.7. Objectives Tree Ketersediaan Infrastruktur Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Purpose atau sasaran terkait dengan pengembangan potensi infrastruktur di Kecamatan Buahdua berdasarkan hasil analisis pohon tujuan yaitu “meningkatnya ketersediaan infrastruktur air baku dan kelistrikan”. Untuk mencapai Goals atau tujuan (manfaat) yang dikehendaki, maka diperlukan output/ keluaran dengan aktivitas yang dijelaskan dengan Tabel 5.3 berikut.

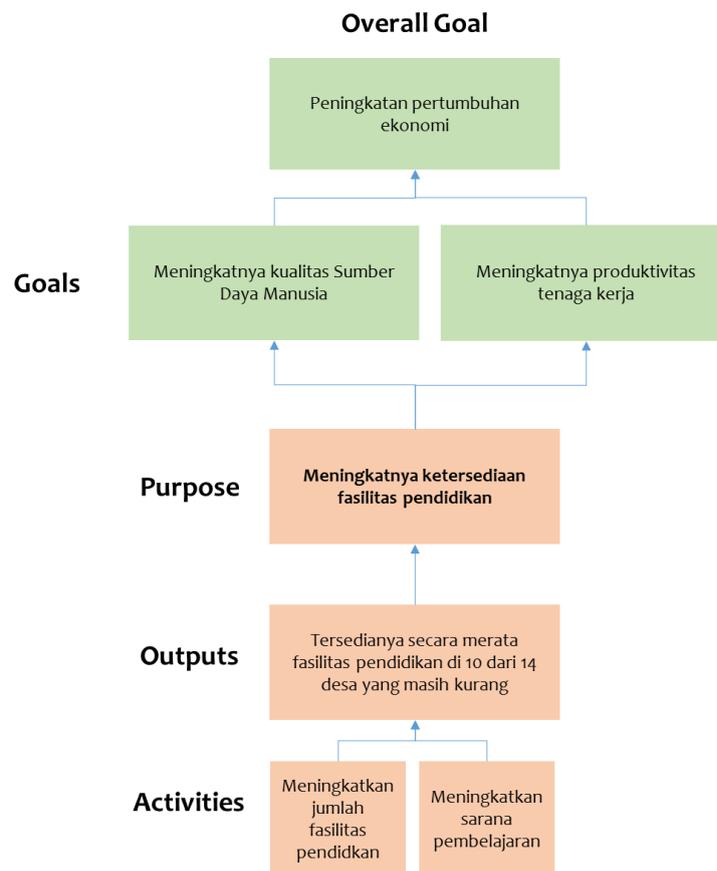
Tabel 5.3 Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan Infrastruktur di Kecamatan Buahdua

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat pertanian	Meningkatnya daya tarik investasi	Tersedianya air baku di 11 dari 14 desa yang masih kurang	Meningkatkan kuantitas jaringan air baku

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian		Tersedianya air baku di 11 dari 14 desa yang masih kurang	Meningkatkan kualitas ketersediaan air baku
	Meningkatnya produktivitas sektor Industri			Meningkatkan kuantitas jaringan kelistrikan
	Meningkatnya daya tarik investasi			Meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan kelistrikan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 5.8. Objectives Tree Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil analisis pemetaan masalah, ketersediaan fasilitas pendidikan masih menjadi masalah karena 10 dari 14 desa di Kecamatan Buahdua belum tersedia. *Purpose*

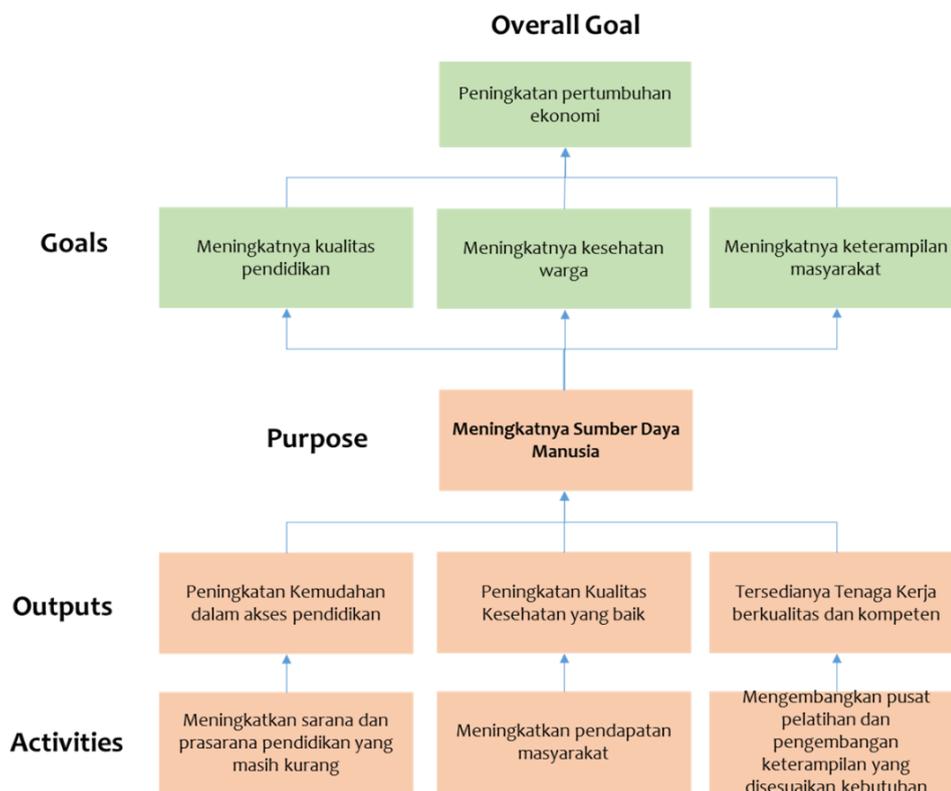
atau sasaran terkait dengan pengembangan potensi ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Buahdua berdasarkan hasil analisis pohon tujuan yaitu “meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan”. Untuk mencapai *Goals* atau tujuan (manfaat) yang dikehendaki, maka diperlukan *output/* keluaran dengan aktivitas yang dijelaskan dengan Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Buahdua

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	Tersedianya secara merata fasilitas di 10 dari 14 desa yang masih kurang	Meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja			Meningkatkan sarana pembelajaran

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 5.9. Objectives Tree Potensi SDM Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

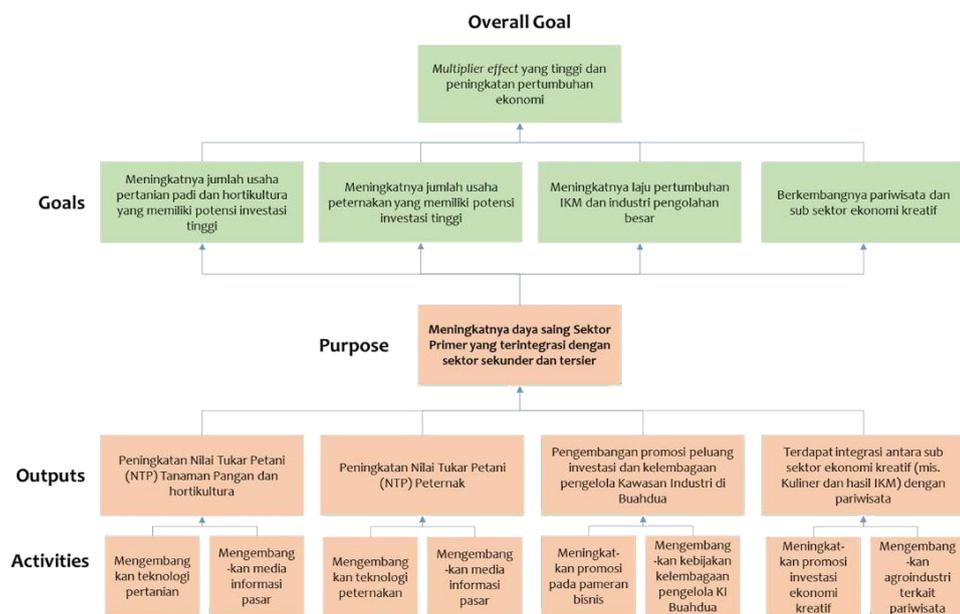
Purpose atau sasaran terkait dengan pengembangan potensi SDM di Kecamatan Buahdua berdasarkan hasil analisis pohon tujuan yaitu “meningkatnya Sumber Daya Manusia”. Untuk mencapai *Goals* atau tujuan (manfaat) yang dikehendaki, maka diperlukan *output/* keluaran dengan aktivitas yang dijelaskan dengan Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan SDM di Kecamatan Buahdua

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	Peningkatan kemudahan dalam akses pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
	Meningkatnya kesehatan warga		Peningkatan kualitas kesehatan yang baik	Meningkatkan pendapatan masyarakat
	Meningkatnya keterampilan masyarakat		Tersedianya Tenaga Kerja berkualitas dan kompeten	Mengembangkan pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan kebutuhan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 5.10. Objectives Tree Potensi Ekonomi Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Purpose atau sasaran terkait dengan pengembangan potensi ekonomi di Kecamatan Buahdua berdasarkan hasil analisis pohon tujuan yaitu “meningkatnya daya saing Sektor Primer yang terintegrasi dengan sektor sekunder dan tersier”. Untuk mencapai *Goals* atau tujuan (manfaat) yang dikehendaki, maka diperlukan *output/* keluaran dengan aktivitas yang dijelaskan dengan Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Analisis Pengembangan Investasi Ketersediaan SDM di Kecamatan Buahdua

Overall Goals	Goals	Purpose	Output	Activities
Multiplier Effect yang tinggi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya jumlah usaha pertanian padi dan hortikultura yang memiliki potensi investasi tinggi	Meningkatnya daya saing sektor primer yang terintegrasi dengan sektor sekunder dan tersier	Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan dan hortikultura	Mengembangkan teknologi pertanian
				Mengembangkan media informasi pasar
	Meningkatnya jumlah usaha peternakan yang memiliki potensi investasi tinggi		Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Peternak	Mengembangkan teknologi peternakan
				Mengembangkan media informasi pasar
Meningkatnya laju pertumbuhan IKM dan industri pengolahan besar	Terdapat integrasi antara sub-sektor ekonomi kreatif (mis. Kuliner dan hasil IKM) dengan pariwisata	Pengembangan promosi peluang investasi dan kelembagaan pengelola Kawasan Industri di Buahdua	Meningkatkan promosi pada pameran bisnis	
Berkembangnya pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif		Mengembangkan kebijakan kelembagaan pengelola KI Buahdua	Meningkatkan promosi investasi ekonomi kreatif	
				Mengembangkan agro-industri terkait pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2024

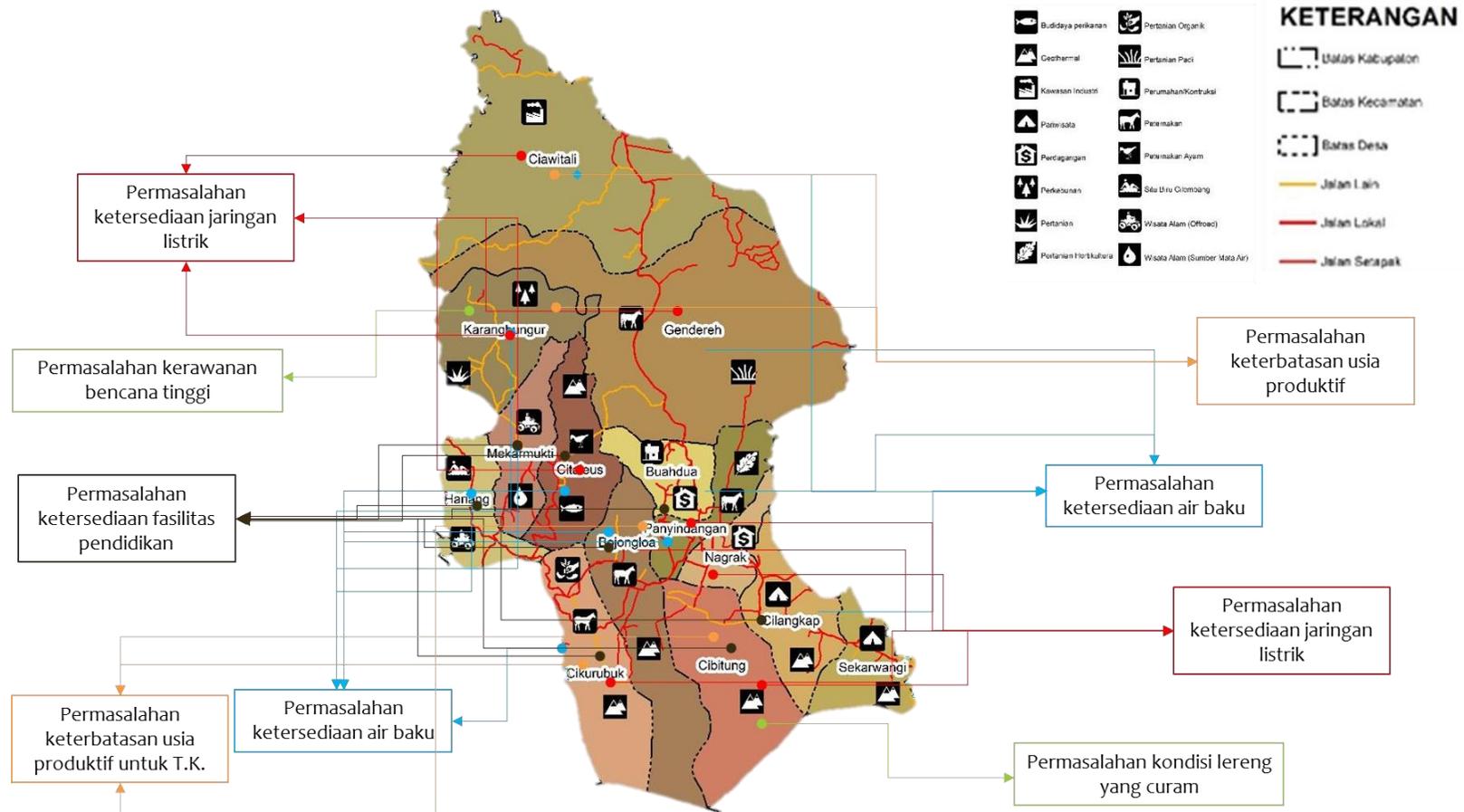
Pengembangan investasi berdasarkan kewilayahan untuk di Kecamatan Buahdua dapat menggunakan konsep pengembangan wilayah *Local Economi Development* (LED) yang terintegrasi dengan *cluster* atau pengelompokan. Komoditas pertanian padi, hortikultura, peternakan dan perikanan yang berada di wilayah unggul dapat dikembangkan dalam sebuah klaster Desa Pusat Produksi. Desa-desanya pusat produksi komoditas pertanian lokal

unggulan baik padi dan hortikultura tersebar di Desa Cikurubuk, Desa Cilangkap, Desa Ciawitali, Desa Citaleus dan Desa Panyindangan. Sedangkan desa-desa pusat produksi komoditas lokal unggulan baik peternakan dan perikanan diantaranya yaitu Desa Citaleus, Desa Cikurubuk dan Desa Bojongloa.

Desa pusat produksi ini terintegrasi dengan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang juga berada di dalam klaster. Desa yang menjadi SPPK ini berperan sebagai pengumpul hasil produksi pertanian unggulan. Misal, untuk pertanian hortikultura, Desa Ciawitali dapat menjadi pengumpul hasil produksi dari wilayah sekitarnya. Sedangkan untuk pertanian padi, Desa Sekarwangi dapat menjadi pengumpul hasil produksi dari wilayah sekitarnya. Desa pusat produksi yang menghasilkan komoditas lokal tersebut dapat mendistribusikan hasil produksinya ke Pusat Klaster atau yang disebut dengan Pusat Pengolahan Pasca Panen. Pusat Pengolahan pasca panen ini merupakan pusat industri kecil – menengah yang mengolah hasil produksi komoditas lokal dari desa pusat produksi. Pusat klaster ini terdapat di Desa Hariang dan Desa Gendereh.

Hasil produk olahan dari komoditas unggulan pertanian padi, hortikultura, peternakan dan perikanan didistribusikan ke Wilayah Perkotaan, seperti Desa Buahdua sebagai Pusat Pelayanan Kota dan Desa Sekarwangi yang banyak memiliki kegiatan perdagangan dan jasa. Desa Ciawitali dan Desa Gendereh merupakan wilayah penerima aliran produk hasil pengolahan untuk dipasarkan pada Pasar Regional Cirebon Raya. Desa Buahdua dan Desa Gendereh merupakan wilayah penerima aliran produk hasil pengolahan untuk dipasarkan pada Pasar Regional Bandung Raya. Gambar 5.11 dan Gambar 5.12 berikut merupakan Ilustrasi Peta Permasalahan dan Konsep Pengembangan Investasi berbasis Kewilayan di Kecamatan Buahdua.

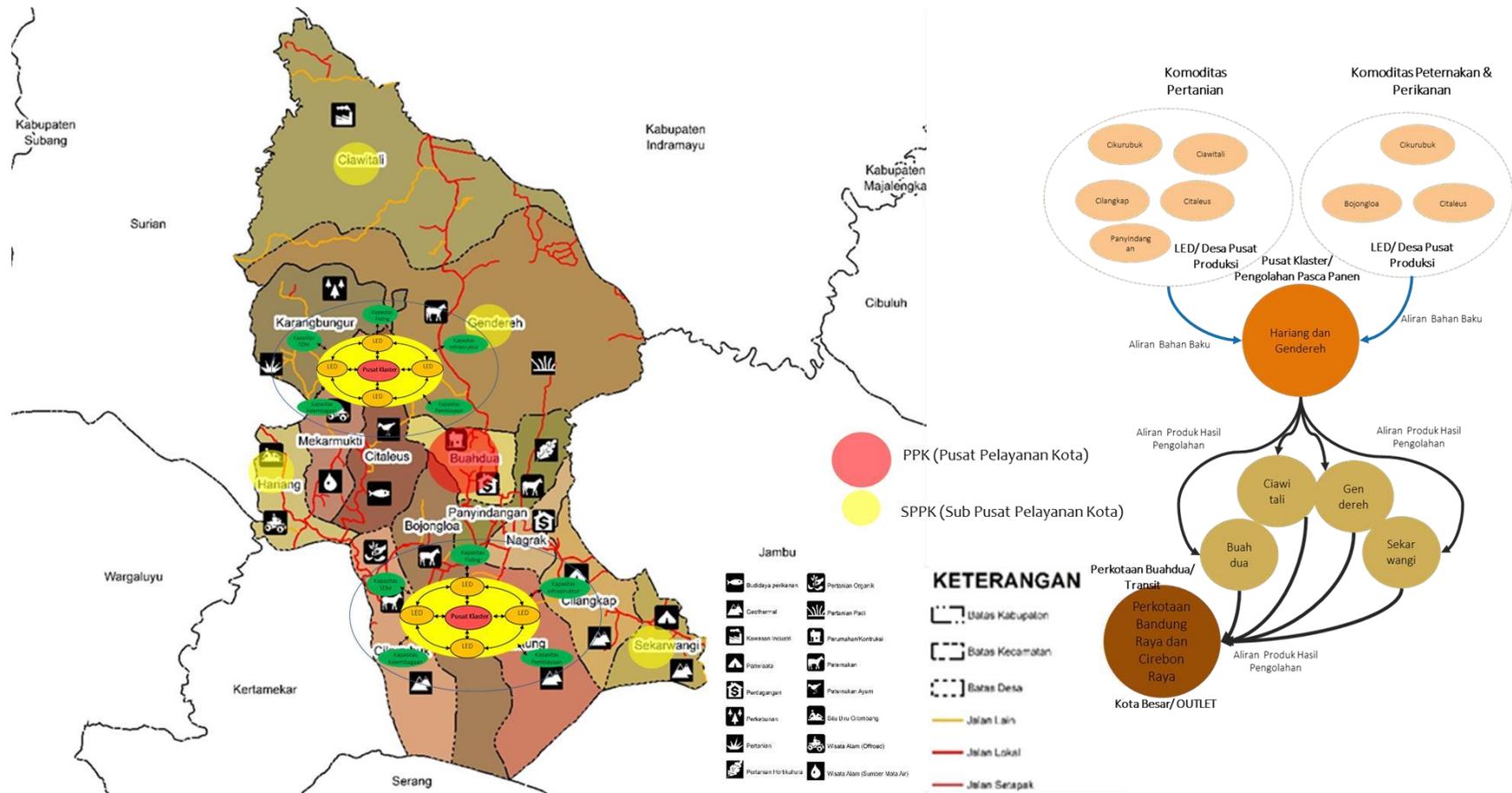
Gambar 5.11. Pemetaan Permasalahan Pengembangan Investasi di Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 5.12. Konsep Pengembangan Potensi Investasi Berbasis Kewilayahan di Kecamatan Buahdua



Sumber: Hasil Analisis, 2024





Bab 6



Kesimpulan dan Rekomendasi



6.1 KESIMPULAN

- Dari segi potensi fisik yang mendukung investasi, ditinjau dari beberapa indikator seperti kemiringan lereng, penggunaan lahan, hidrologi dan kerawanan bencana, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Hampir seluruh desa memiliki potensi fisik kemiringan lereng yang tinggi, yaitu dengan nilai kemiringan lereng 0-15% atau kemiringan lereng landau. Hanya satu desa, yaitu Desa Cibitung yang memiliki kemiringan lereng sangat curam dan kurang mendukung dari aspek fisik.
 2. Desa Buahdua dan Desa Sekarwangi sudah berkembang menjadi permukiman perkotaan. Oleh karena itu, potensi investasi berdasarkan indikator penggunaan lahan *mixed-use* di kedua desa relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya.
 3. Hampir setiap desa memiliki sungai sebagai sumber air baku, sehingga setiap desa memiliki potensi fisik hidrologi untuk mendukung investasi. Desa Ciawitali merupakan desa yang memiliki sumber air baku sungai yang relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan desa lainnya. Akan tetapi, ketersediaan jaringan air baku ini tidak diikuti dengan ketersediaan jaringan air baku yang memadai, sehingga masih menjadi permasalahan.
 4. Kecamatan Buahdua memiliki kerawanan bencana gempa bumi dan longsor dengan frekuensi kejadian bencana pernah terjadi 1 kali dalam setahun pada setiap desa. Oleh karena itu, kondisi ini menyebabkan masalah dalam pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua. Desa Karangbungur merupakan salah satu desa yang memiliki nilai skor tinggi terhadap indikator kerawanan bencana.
- Dari segi ketersediaan infrastruktur untuk mendukung investasi, ditinjau beberapa jenis infrastruktur yaitu jaringan jalan, jaringan air baku, jaringan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Terkait potensi, infrastruktur jaringan jalan dan telekomunikasi dinilai memiliki tingkat ketersediaan yang baik dan dapat mendukung investasi pada sektor-sektor unggulan yang ada pada masing-masing desa di Kecamatan Buahdua.
 2. Infrastruktur jaringan air baku dan kelistrikan masih menjadi kendala yang mungkin akan menurunkan ketertarikan investor untuk berinvestasi di

Kecamatan Buahdua. Hal ini disebabkan hasil analisis menunjukkan bahwa kedua jenis infrastruktur ini masih memiliki tingkat ketersediaan yang rendah. Namun demikian, permasalahan ini dapat juga dilihat sebagai peluang untuk menarik investasi pada sektor jaringan air baku dan ketenagalistrikan.

- Terkait dengan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Fasilitas kesehatan dan perdagangan dinilai telah memiliki tingkat ketersediaan yang cukup baik dan dapat mendukung atau menjadi daya tarik bagi investasi di berbagai sektor unggulan pada desa-desa di Kecamatan Buahdua.
 2. Fasilitas pendidikan masih menjadi permasalahan utama dan perlu untuk ditingkatkan ketersediaannya. Hal ini cukup penting mengingat dampak yang dapat diberikan oleh fasilitas pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung pada perekonomian dan investasi di Kecamatan Buahdua.
- Potensi yang paling mendukung investasi di Kecamatan Buahdua berdasarkan jumlah skor penilaian tertinggi secara relatif diantaranya:
 - 1) Potensi Keamanan dan Kenyamanan Berdasarkan Dukungan Kebijakan;
 - 2) Potensi Ketersediaan SDM Tenaga Kerja; indikator Ketersediaan Tenaga Kerja dari Tingkat Pendidikan; dan
 - 3) Potensi Fisik, indikator kemiringan lereng yang landai
- Setiap desa di Kecamatan Buahdua memiliki potensi dan permasalahan dalam pengembangan investasi. Desa-desa yang memiliki potensi tertinggi secara relative berdasarkan jumlah skor penilaian diantaranya:
 - 1) Desa Sekarwangi;
 - 2) Desa Buahdua;
 - 3) Desa Cilangkap; dan
 - 4) Desa Citaleus
- Permasalahan utama dalam pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua diantaranya:
 - 1) Kondisi lereng yang curam meningkatkan risiko erosi dan longsor di kawasan rawan bencana;
 - 2) Ketersediaan infrastruktur air baku dan kelistrikan yang masih kurang merata;
 - 3) Keterbatasan fasilitas pendidikan;

- 4) Sumber Daya Manusia yang rendah; dan
 - 5) Sektor Primer belum memiliki daya saing serta terintegrasi dengan sektor sekunder dan tersier.
- Pengembangan investasi berdasarkan kewilayahan untuk di Kecamatan Buahdua dapat menggunakan konsep pengembangan wilayah Local Ekonomi Development (LED) yang terintegrasi dengan cluster atau pengelompokan.
 - Pengembangan LED adalah dengan mengembangkan Desa-desu Pusat produksi komoditas pertanian lokal unggulan baik padi dan hortikultura tersebar di Desa Cikurubuk, Desa Cilangkap, Desa Ciawitali, Desa Citaleus dan Desa Panyindangan. Sedangkan desa-desu pusat produksi komoditas lokal unggulan baik peternakan dan perikanan diantaranya yaitu Desa Citaleus, Desa Cikurubuk dan Desa Bojongloa.
 - Desa pusat produksi ini terintegrasi dengan Pusat Klaster atau yang disebut dengan Pusat Pengolahan Pasca Panen. Pusat Pengolahan pasca panen ini merupakan pusat industri kecil – menengah yang mengolah hasil produksi komoditas lokal dari desa pusat produksi. Pusat klaster ini terdapat di Desa Hariang dan Desa Gendereh.
 - Hasil produk olahan dari komoditas unggulan pertanian padi, hortikultura, peternakan dan perikanan didistribusikan ke Wilayah Perkotaan, seperti Desa Buahdua sebagai Pusat Pelayanan Kota dan Desa Sekarwangi yang banyak memiliki kegiatan perdagangan dan jasa.
 - Desa Ciawitali dan Desa Gendereh merupakan wilayah penerima aliran produk hasil pengolahan untuk dipasarkan pada Pasar Regional Cirebon Raya. Desa Buahdua dan Desa Gendereh merupakan wilayah penerima aliran produk hasil pengolahan untuk dipasarkan pada Pasar Regional Bandung Raya.

6.2 REKOMENDASI

Rekomendasi yang merupakan tindak lanjut dalam pengembangan potensi investasi di Kecamatan Buahdua yaitu:

- Pengembangan potensi investasi aspek fisik:
 - 1) Meningkatkan kepastian berinvestasi dengan dukungan kebijakan pembangunan dan tata ruang yang selalu terintegrasi;
 - 2) Meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana pada desa-desu yang memiliki kerawanan bencana tinggi;

- 3) Membangun dan meningkatkan kapasitas Desa Tangguh Bencana pada desa-desa yang memiliki kerawanan tinggi; dan
 - 4) Mengembangkan proses perizinan pembangunan yang sudah sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang terintegrasi secara digital.
- Pengembangan potensi investasi aspek ketersediaan infrastruktur:
 - 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan air baku; dan
 - 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan ketenagalistrikan.
 - Pengembangan potensi investasi aspek ketersediaan fasilitas:
 - 1) Peningkatan jumlah fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan menarik investasi; dan
 - 2) Meningkatkan sarana pembelajaran.
 - Pengembangan potensi investasi aspek SDM:
 - 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang, terutama Desa Gendreh agar dapat menjadi pusat kluster pengolah hasil pertanian. Desa Gendreh masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah (SMP), tetapi memiliki usia produktif yang cukup besar.
 - 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan program pengentasan kemiskinan;
 - 3) Kerjasama pemerintah dan swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas; dan
 - 4) Mengembangkan pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan kebutuhan pasar kerja;
 - Pengembangan potensi investasi aspek ekonomi:
 - 1) Mengembangkan teknologi pertanian dan peternakan;
 - 2) Mengembangkan media informasi pasar pertanian dan peternakan;
 - 3) Meningkatkan promosi pada pameran bisnis;
 - 4) Mengembangkan kebijakan kelembagaan pengelola KI Buahdua;
 - 5) Meningkatkan promosi investasi ekonomi kreatif; dan
 - 6) Mengembangkan agroindustri terkait pariwisata.